

Fokuskan studi dalam buku ini meliputi: pengertian sosiologi pendidikan, pendidikan dan Masyarakat, sosiologi sebagai suatu pendekatan, sosiologi kurikulum, pendidikan dan budi pekerti, sekolah sebagai sistem sosial, pendidikan dan stratifikasi sosial, pendidikan dan perubahan sosial, pendidikan sebagai mekanisme terbentuknya keteraturan sosial, pendidikan dalam perspektif teori-teori sosiologis, pendidikan dan politik, pendidikan dan multicultural, pendidikan dan kebudayaan.

Secara khusus, buku sosiologi pendidikan Islam ini disajikan sebagai bahan bacaan ilmiah yang diperuntukkan bagi mahasiswa, para pengajar, dan para mahasiswa pascasarjana (S2 dan S3), serta mereka yang sedang mendalami pendidikan dalam hubungannya dengan proses sosial, struktur, perubahan sosial, serta berbagai persoalan sosial lainnya yang memiliki hubungan dengan pendidikan khususnya.

---

Baharudin, adalah dosen Fakultas Tarbiah IAIN Mataram. Doktor sosiologi dari Universitas Hasanudin Makassar ini pernah menjadi Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) IAIN Mataram dari tahun 2008-2010, wakil direktur program pascasarjana IAIN Mataram tahun 2010-2013. Buku yang pernah diterbitkan antara lain berjudul: Negara dan Sistem Perekonomian dalam Pemikiran Ibn Taimiyah dan Adam Smith (Genta Press Yogyakarta, 2008), Nahdlatul Wathan dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: Genta Press, 2008), Sosiologi Klasik, Modern dan Posmodernisme (Yogyakarta: Genta Press 2008), Sosiologi dan Pendidikan (Yogyakarta: Genta Press, 2008), Elit Agama dan Politik (Yogyakarta: Genta Press, 2008), Sosiologi Suatu Pengantar (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2010), Pendidikan Islam dan Isu-isu Sosial (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2011), Kepemimpin Spiritual TGH. Shafwan Hakim dalam Mengembangkan Pondok Pesantren (Jakarta, HG, 2015).



Jl. Berlian No. 7 RT. 8 RW. 11  
Cawang Atas Bidara Cina Jatinegara Jakarta  
Email: sanabil-creative@yahoo.co.id

**SOSIOLOGI PENDIDIKAN**

**DR. BAHARUDIN, M.Ag.**



# **SOSIOLOGI PENDIDIKAN**

**DR. BAHARUDIN, M.Ag.**

DR. BAHARUDIN, M.Ag.

# SOSIOLOGI PENDIDIKAN

  
Sanabil

Sosiologi Pendidikan  
© Dr. Baharudin, M.Ag., 2015

Judul:  
Sosiologi Pendidikan

Penulis:  
Dr. Baharudin, M.Ag.

Editor:  
Nur Latifah

Layout:  
Sanabil Art and Design

Desain Cover:  
Sanabil Art and Design

All rights reserved  
Hak Cipta dilindungi Undang Undang  
Dilarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku  
baik dengan media cetak ataupun digital tanpa izin dari penulis

Cetakan 1:  
Desember 2015

ISBN:  
978-602-74024-7-8

Diterbitkan oleh:  
Sanabil  
Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram  
Telp. 0370- 7505946, Mobile: 081-805311362  
Email: sanabilpublishing@gmail.com  
www.sanabilpublishing.com

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين  
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه  
اجمعين. وبعد!

*Alhamdulillah*, penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Karya ini dapat dirampungkan sebagaimana mestinya, hanya karena hidayah dan ma'unah (pertolongan) Allah SWT. Masa-masa sulit telah penulis lewati sepanjang penulisan tesis ini. Oleh karena itu, ungkapan pertama yang penulis panjatkan adalah Alhamdulillah, segala puji hanya tertuju dan milik Allah SWT. Selanjutnya, shalawat dan salam tak henti-hentinya kita persembahkan kepada baginda Nabi SAW, keluarga dan sahabat-sahabat yang setia menyertai dan mendukung perjuangan beliau dalam menegakkan kalimah Allah.

Studi mengenai sosiologi pendidikan bukanlah studi yang “baru”. Emile Durkheim salah seorang tokoh perintis sosiologi pendidikan yang berjudul *L'Evolution Pedagogique en France* (Evolusi Pendidikan di Prancis) yang ditulis Emile Durkheim pada tahun 1920 dan dipublikasikan pada tahun 1927. Tujuan penulisan buku itu adalah untuk menunjukkan bahwa setiap periode sejarah dan proyek tertentu untuk sosialisasi generasi

muda yaitu berbagai institusi sekolah, isi pengajaran, termasuk di dalamnya metode pengajaran.

Lahirnya buku sosiologi pendidikan ini, membutuhkan pemikiran mendalam dan waktu yang panjang. Hal ini terjadi tak lain karena kesibukan yang kadang terlalu menyita ihwal teknis administratif. Buku ini beurpaya menjelaskan pergulatan dan perdebatan teoritik tentang sosiologi pendidikan dan juga pertautannya dengan kekuasaan. Ini hanya studi awal—dan bukan studi akhir—untuk terus melakukan refleksi teoritik dalam lokal studi yang ada dalam buku ini.

Fokuskan studi dalam buku ini meliputi: pengertian dan ruang lingkup sosiologi pendidikan, pendidikan dan Masyarakat, sosiologi sebagai suatu pendekatan, sosiologi kurikulum, pendidikan dan budi pekerti, sekolah sebagai sistem sosial, pendidikan dan stratifikasi sosial, pendidikan dan perubahan sosial, pendidikan sebagai mekanisme terbentuknya keteraturan sosial, pendidikan dalam perspektif teori-teori sosiologis, pendidikan dan politik, pendidikan dan multicultural, pendidikan dan kebudayaan. Secara khusus, buku sosiologi pendidikan ini disajikan sebagai bahan bacaan ilmiah yang diperuntukkan bagi mahasiswa, para pengajar, serta mereka yang sedang mendalami pendidikan dalam perspektif sosiologis

Penulis sadar bahwa buku sosiologi pendidikan ini tidak luput dari berbagai kekurangan lantaran keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulisnya, oleh sebab ini, kritik-konstruktif demi kesempurnaan buku ini, penulis sangat harapkan dari semua pihak.

Terbitnya buku ini tidak terlepas dari sumbangsih berbagai pihak, terutama Prof Dr. Tahir Kasnawi (Guru Besar Sosiologi Universitas Hasanudin Makasar) Dr. Dedy Tikson, MA (Dosen Senior Universitas Hasanudin Makassar) , Prod. Dr. Musyafir

Pabbari, M, Si (Rektor UIN Alauddin Makassar) Dr. H. Mutawalli, M. Ag (Rektor IAIN Mataram), Dr. Masnun, M. Ag, Dr. Amir Aziz, M. Ag, Dr. H. Subhan Abdulloh Acim, MA, Dr. Hj. Nurul Yakin, M. Pd, Dr. Muhamad, Sa'i, MA, Dr. Asrin, M. Pd, M. Akhyar Fadly, M. Si, Suhaimi Syamsuri, M, Si dan teman-teman diskusi penulis yang tidak mungkin namanya disebutkan satu persatu.

Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan juga kepada istri penulis Nur Latifah, M. PdI, serta anak-anakku tersayang, Emde Ichsanul Amal (Ichal), Emde Asad Adfany (Affan) Emde Satria Effendy (Endy), Shafira Amelia Putri, (Fira) serta si bungsi yang lucu dan menggemaskan Shafina Adelia Putri (Fina), yang selalu menjadi motivator dan inspirator bagi penulis untuk dalam menyelesaikan buku ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara Nur Latifah, M. PdI dan Mu'aini, M. Pd, yang telah mengedit edit buku ini secara teliti, sehingga dapat berbentuk buku yang ada di tangan pembaca. Akhirnya penulis menyerahkan kepada sidang pembaca dan semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca, amien.

Gelogor, Pebruari 2016

Penulis.



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar ~ 3

Bab I

SOSIOLOGI PENDIDIKAN ~ 1

- A. Pengertian Sosiologi Pendidikan ~ 2
- B. Ruang Lingkup Sosiologi Pendidikan ~ 6
- C. Konten Sosiologi Pendidikan ~ 7
- D. Tujuan Sosiologi Pendidikan ~ 10

Bab II

PERKEMBANGAN

SOSIOLOGI PENDIDIKAN ~ 17

- A. Perkembangan Sosiologi Pendidikan ~ 17
- B. Para Perintis Sosiologi Pendidikan ~ 24

Bab III

PENDIDIKAN

DAN MASYARAKAT ~ 49

- A. Pengertian Pendidikan ~ 49
- B. Konsep Masyarakat ~ 50
- C. Hubungan Pendidikan dan Masyarakat ~ 57

Bab IV

SOSIOLOGI

KURIKULUM PENDIDIKAN ~ 65

- A. Pendahuluan ~ 65
- B. Sosiologi Kurikulum Pendidikan ~ 67
- C. Posisi Kurikulum dalam pendidikan ~ 79

Bab V

SEKOLAH SEBAGAI  
SISTEM SOSIAL ~ 83

- A. Sistem Sosial ~ 83
- B. Sekolah sebagai Sistem Sosial ~ 92

Bab VI

PENDIDIKAN DAN  
STRATIFIKASI SOSIAL ~ 99

- A. Stratifikasi Sosial ~ 99
- B. Pendidikan dan Stratifikasi Sosial ~ 115

Bab VII

PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN ~ 119

- A. Pendahuluan ~ 119
- B. Hakikat Pendidikan ~ 120
- C. Hakikat Kebudayaan ~ 121
- D. Pendidikan Sebagai Wahana  
Pengembangan kebudayaan ~ 126
- E. Kepribadian dalam Proses Kebudayaan ~ 128

Bab VIII

PENDIDIKAN  
DAN PERUBAHAN SOSIAL ~ 131

- A. Pendidikan Sebagai Lembaga Sosial ~ 131
- B. Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat ~ 136
- C. Pendidikan dan Pembentukan  
Kepribadian Masyarakat ~ 139
- D. Pendidikan sebagai sumber dan  
Kekuatan Pembangunan ~ 144
- E. Pendidikan dan Perubahan Sosial ~ 146

Bab IX

PENDIDIKAN SEBAGAI MEKANISME  
TERBENTUKNYA KETERATURAN SOSIAL ~ 149

- A. Mengetahui Pendekatan Fungsional ~ 149
- B. Pendidikan Menurut Pendekatan Fungsional ~ 149

Bab X

PENDIDIKAN MORAL

DAN PEMBAURAN SOSIAL ~ 153

- A. Pendidikan Moral ~ 153
- B. Pendidikan Moral ~ 155
- C. Nurani Kolektif (Collective Conscience) ~ 167
- D. Pendidikan moral dan Pembaruan Sosial ~ 169

Bab XI

PENDIDIKAN DAN POLITIK ~ 171

- A. Pendahuluan ~ 171
- B. Konsep Pendidikan dan Politik ~ 172
- C. Politik Pendidikan di Indonesia ~ 175
- C. Pendidikan di Era Orde Reformasi ~ 181
- D. Pendidikan dan Politik: Antara Harapan dan Kenyataan ~ 184

Bab XII

PENDIDIKAN

MULTIKULTURAL ~ 193

- A. Pendahuluan ~ 193
- B. Sejarah Pendidikan Multikultural ~ 195
- C. Konsep Pendidikan Multikultural ~ 197
- D. Pendekatan Pendidikan Multikultural ~ 199
- E. Kurikulum Pendidikan Multikultural ~ 201
- F. Pendidikan Multikultural dalam Desain pembelajaran ~ 206

Bab XIII

PENDIDIKAN

DAN IDEOLOGI ~ 209

- A. Pendahuluan ~ 209
- B. Ideologi-Ideologi Pendidikan ~ 211
- C. Kekuasaan dan Pendidikan ~ 214

Bab XIV

PENDIDIKAN DALAM

PERSPEKTIF TEORI SOSIOLOGI ~ 223

- A. Teori Sosiologi ~ 223
- B. Pendidikan dalam Perspektif  
Teori-Teori Sosiologi ~ 226

Bab XV

PERAN GURU AGAMA

DI ERA GLOBALISASI ~ 251

- A. Pendahuluan ~ 251
- B. Sosok Ideal Guru di Era Globalisasi ~ 252
- C. Penutup ~ 261

Daftar Pustaka ~ 263

Biografi Penulis ~ 271

Biografi Editor ~ 272

# BAB I

## SOSIOLOGI

### PENDIDIKAN

SOSIOLOGI PENDIDIKAN adalah studi yang mempelajari tentang bagaimana lembaga pendidikan dalam hubungannya dengan struktur sosial, proses sosial, serta perubahan sosial. Lebih jauh lagi ditegaskan bahwa sosiologi pendidikan membahas pula tentang segala interaksi sosial, proses sosial, proses sosial, dan hubungan individu-individu dalam sekolah dan pendidikan, yang berkaitan dengan problematika yang muncul dan bagaimana menjelaskan serta memberikan solusi atas masalah-masalah tersebut.

Sosiologi pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam menganalisis pendidikan, hubungan antara individu dalam masyarakat, dan juga struktur sosial masyarakat pada lingkungan pendidikan seperti madrasah dan pendidikan lainnya. Sosiologi pendidikan tidak hanya menjadikan pendidikan sebagai obyek, melainkan juga mempelajari masalah-masalah sosial yang memiliki kaitan dengan pendidikan. Kajian sosiologi pendidikan meliputi: pendidikan dan masyarakat, tenaga pendidik, pengembangan kurikulum pendidikan, tujuan pendidikan, dan lingkungan

sosial, yang memiliki kaitan dengan proses sosial, struktur sosial dan perubahan sosial.

### A. Pengertian Sosiologi Pendidikan

Dikalangan para sosiolog, belum ada pengertian yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan sosiologi pendidikan. Untuk menjelaskan pengertian sosiologi pendidikan, mau tidak mau mesti memperhatikan dan beranjak dari pengertian dan konsep-konsep umum sosiologi pendidikan.

Sosiologi pendidikan berasal dari dua kata, sosiologi dan pendidikan. Secara etimologi kedua kata ini, tentu mempunyai arti dan makna yang berbeda, serta memiliki maksud yang berbeda. Para sosiolog, memberikan definisi yang berbeda mengenai sosiologi. Auguste Comte mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat. Sedangkan menurut Emile Durkheim sosiologi adalah *“the science of institution”*. Sementara Goerge Simmel menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari *“human relationships”*. Sedangkan Weber berpendapat bahwa sosiologi merupakan *“a science concerning itself with the interpretative understanding of social action and theory by a causal axplanation of its course and concequences”* (Weber, 1978: 89).

Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi mengatakan, bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu: kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal-balik antara berbagai segi kehidupan bersama, umpamanya pengaruh timbal-balik antara segi kehidupan ekonomi dengan kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dengan segi

kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dengan segi kehidupan ekonomi dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut McGee (1977), sosiologi adalah: (1) studi tentang kelompok-kelompok manusia dan pengaruh mereka terhadap perilaku individu, (2) studi tentang tatanan manusia dan perubahan sosial, (3) sebagai pencarian sebab-sebab sosial dari hal-hal, cara-cara di mana fenomena sosial mempengaruhi perilaku manusia. Hassan Sahdly (1987), dalam bukunya "*Sosiologi Masyarakat Indoensia*", menyebutkan, bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar-manusia yang menguasai kehidupan itu.

J.A.A van Door dan C.J Lammers (1988), mengemukakan, bahwa sosiologi adalah pengetahuan tentang struktur-struktur sosial dan proses-proses sosial kemasyarakatan yang bersifat labil. Soekanto (1999) mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu sosial yang kategoris, murni, abstrak, berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional dan empiris, serta bersifat umum.

Dari definisi yang diberikan oleh para ahli di atas, dapat dinyatakan, bahwa sosiologi adalah ilmu yang mengkaji intraksi manusia dengan manusia lain dalam kelompok (seperti keluarga, kelas sosial, atau masyarakat) dan produk-produk yang timbul dari intraksi sosial tersebut, seperti nilai, norma, serta kebiasaan-kebiasaan yang dianut oleh kelompok atau masyarakat tersebut.

Sedangkan istilah pendidikan, dikalangan pemikir pendidikan didefinisikan secara berbeda. Menurut Muhamad Naquib al-Attas (1984), pendidikan adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan dalam diri manusia tentang segala sesuatu di dalam tatanan wujud sehingga dapat membimbing ke arah pengenalan dan

pengakuan tempat-tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud tersebut. Dalam definisi Al-Attas ini menempatkan Tuhan sebagai bagian paling penting dalam pendidikan. Oleh sebab itu menurut Al-Attas, tujuan pendidikan yang paling penting adalah mengetahui tempat Tuhan dalam tatanan wujud ini (Achmadi, 2008: 24).

Sedangkan menurut Ahmad Tafsir (1987: 34), pendidikan didefinisikan sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain agar ia berkembang secara maksimal dengan materi ajaran Islam atau bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi muslim semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan menurut Ahmad Tafsir adalah untuk membentuk manusia yang berkepribadian.

Sementara itu, sosiologi pendidikan dikalangan para ahli didefinisikan secara berbeda. E. George Payne (dalam Achmadi, 1991: 2), mengemukakan secara konseptual apa yang dimaksudkan dengan sosiologi pendidikan. Menurutnya, sosiologi pendidikan adalah:

by educational sociology we mean the science which describes and explains the institution, social group, and social processes, that itu the social relationships in which or through which the individual gains an organizes experiences.

Payne menegaskan bahwa di dalam lembaga-lembaga, kelompok-kelompok sosial, proses sosial, terdapat apa yang dinamakan *social relationship*, di mana di dalam dan dengan interaksi sosial itu individu memperoleh dan mengorganisir pengalaman-pengalamannya. Inilah yang merupakan aspek-aspek atau prinsip-prinsip sosiologi pendidikan. Payne secara spesifik memandang sosiologi pendidikan sebagai studi yang komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segi ilmu yang diterapkan. Bagi Payne sosiologi pendidikan tidak hanya

meliputi segala sesuatu dalam bidang sosiologi yang dapat bertalian dengan proses belajar dan sosialisasi, akan tetapi juga segala sesuatu yang dalam pendidikan yang dapat dikenakan analisis sosiologis. Tujuan utama ialah memberikan guru-guru, para peneliti dan orang lain yang menaruh perhatian akan pendidikan latihan yang serasi dan efektif dalam sosiologi yang dapat memberikan sumbangannya kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang pendidikan (Nasution, 1999:4)

Sementara Charles A. Ellwood mengemukakan bahwa *education sociology is the science which aim to reveal the connections at all point between the educative and the social process*. Sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari/menjuju untuk melahirkan maksud hubungan-hubungan antara semua pokok masalah antara proses pendidikan dan proses sosial. Menurut E. B Reuter dalam Butubara (2004: 2-3), sosiologi pendidikan mempunyai kewajiban untuk menganalisis evolusi dari lembaga-lembaga pendidikan dalam hubungannya dengan perkembangan manusia, dan dibatasi oleh pengaruh-pengaruh dari lembaga pendidikan yang menentukan kepribadian sosial dari tiap-tiap individu. Jadi, prinsipnya antara individu dengan lembaga-lembaga sosial itu selalu saling pengaruh-mempengaruhi (*process of social instruction*).

F.G Robbins dan Brown (1998: 88) mengemukakan, bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan serta mengorganisasi pengalamannya. Sosiologi pendidikan mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya.

Mengacu kepada pengertian sosiologi pendidikan yang diberikan oleh para pakar di atas, dapat dinyatakan bahwa sosiologi pendidikan, menunjukkan bahwa sosiologi pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses sosial dan

proses struktur sosial dan perubahan sosial dalam kaitannya dengan nilai-nilai Islam.

### **B. Ruang Lingkup Sosiologi Pendidikan.**

Ruang lingkup kajian sosiologi pendidikan pada dasarnya tidaklah berbeda dengan sosiologi pendidikan pada umumnya. Bedanya hanya terletak pada nilai-nilai Islam yang dijadikan sebagai dasar pendidikan dalam sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi di antara individu-individuan kelompok, kelompok dengan kelompok, atau dengan perkataan lain secara sosiologis pendidikan itu membicarakan dan menjelaskan institusi-institusi, kelompok-kelompok sosial dan proses sosial, hubungan antara relasi sosial di mana di dalam dan dengannya manusia memperoleh dan mengorganisir pengalaman-pengalamannya.

Seperti halnya sosiologi pendidikan, kajian sosiologi pendidikan sangat luas, meskipun demikian, namun kajiannya tidak terlepas dari berbagai persoalan masyarakat dan yang memungkinkan institusi pendidikan merekam berbagai persoalan dalam masyarakat tersebut. Pendidikan yang dilembaga seperti madrasah dan madrasah, dituntut untuk merekam segala fenomena yang terjadi dalam masyarakat, selanjut lembaga pendidikan madrasah dan madrasah memberikan penjelasan kepada peserta didik terhadap ontologis suatu peristiwa. Hal ini penting dilakukan, mengingat peran lembaga pendidikan seperti madrasah dan lembaga pendidikan lainnya, sebagai transformasi budaya, transformasi nilai, dan transformasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat, di mana di dalam melakukan fungsinya tersebut lembaga pendidikan seperti madrasah dapat menyesuaikan dengan realita yang terjadi pada masyarakat.

### C. Konten Sosiologi Pendidikan

Di dalam menelaah berbagai ragam hubungan antara pendidikan dengan masyarakat, sosiologi pendidikan mau tidak mau mesti memperhatikan dan beranjak dari sejumlah konsep-konsep umum sosiologi, misalnya konsep tentang masyarakat, kebudayaan, interaksi sosial, lingkungan, sosialisasi, kebudayaan, status dan peran, akomodasi, akulturasi, asimiliasi, ketimpangan dan sebagainya.

Selain itu, sosiologi pendidikan juga harus menelaah hubungan antara pendidikan dan ekonomi, kekuatan-kekuatan sosial, modal sosial, dan faktor-faktor penentu lainnya yang mempengaruhi arah perubahan sosial, dan perubahan pendidikan umumnya, dan kebudayaan, institusi-institusi sosial yang memainkan peran penting dalam proses pendidikan. Berbagai masalah dari struktur peranan dan analisis peranan dalam hubungannya dengan sistem sosial menyeluruh, dan juga masyarakat mikro di lembaga pendidikan itu sendiri, madrasah sebagai suatu organisasi formal, termasuk di dalamnya masalah otoritas, seleksi, pengorganisasian proses belajar, beserta arus perkembangannya, pertanyaan-pertanyaan bagi pengembangan kurikulum dan pengembangan sub-kultur, hubungan antara kelas sosial, budaya dan bahasa, serta antara pendidikan dengan lapangan kerja, dan masalah keborjouisian, demokratisasi, dan elitisme (Faisal, tt, 44).

Konten pendidikan yang meliputi aspek-aspek yang harus dibahas dalam sosiologi pendidikan di atas, menunjukkan bahwa lembaga pendidikan seperti madrasah harus mampu memberikan penjelasan terhadap berbagai permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. Apa yang dikemukakan di atas merupakan suatu kajian yang memungkinkan masalah-masalah sosial di masyarakat, menjadi kajian yang bersifat

aktual dan faktual karena secara empiris dirasakan dan dialami oleh masyarakat tersebut.

Reformasi total yang sedang bergulir sekarang, mengharuskan lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan seperti madrasah, pesantren, pendidikan tinggi Islam untuk menjadikan ajaran-ajaran agama sebagai penangkal dalam mengatasi berbagai masalah yang sedang melanda masyarakat. Krisis multidimensi saat ini adalah bahan yang faktual sebagai bahan kajian atau konten sosiologi pendidikan, untuk saat ini dapat dikembangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terekam setelah bergulirnya reformasi. Reformasi ternyata telah berimpikasi terhadap sistem hidup dan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, terutama berbagai faktor yang mempengaruhi lingkungan dan faktor strategis yang beraneka sifatnya.

Sosiologi pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam menganalisis pendidikan, hubungan antara individu dalam masyarakat, dan juga struktur sosial masyarakat di lingkungan madrasah dan pendidikan lainnya. Sosiologi pendidikan tidak hanya sosiologi yang mengambil pendidikan sebagai obyek. Sosiologi pendidikan mempelajari masalah-masalah sosial yang dikaitkan dengan pendidikan. Kajian sosiologi pendidikan meliputi: dasar-dasar pendidikan, tujuan pendidikan, bahan kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, dan lingkungan sosial masyarakatnya yang meliputi proses sosial, struktur sosial dan perubahan sosial. Dengan demikian sosiologi pendidikan melihat:

- 1) bagaimana hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat; seperti:
  - a. fungsi pendidikan dalam kebudayaan,
  - b. hubungan antara sistem pendidikan dengan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan,

- c. fungsi sistem pendidikan dalam proses perubahan sosial dan cultural atau usaha mempertahankan *status quo*,
  - d. hubungan pendidikan dengan sistem tingkat atau status sosial,
  - e. fungsi pendidikan formal bertalian dengan kelompok rasial, cultural dan sebagainya;
- 2) hubungan antar-manusia di dalam madrasah; yang dianalisis adalah struktur sosial di dalam madrasah. Pola kebudayaan di dalam madrasah menunjukkan perbedaan dengan apa yang terdapat di dalam masyarakat di luar madrasah,
  - 3) pengaruh pendidikan seperti madrasah terhadap kelakuan kepribadian semua pihak di madrasah. Dimensi pengaruh madrasah terhadap kelakuan dan kepribadian semua pihak di madrasah, menekankan analisisnya terhadap aspek proses pendidikan itu sendiri. Yang dianalisis berkaitan dengan kepribadian dan kelakuan guru, murid, dan lain-lain atas pengaruh partisipasi dalam keseluruhan sistem pendidikan.
  - 4) lembaga pendidikan dalam masyarakat. Kajian mengenai hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Hal ini mengingatkan masyarakat saat ini harus dilibatkan secara pro-aktif karena masyarakat memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu komponen stakeholder pendidikan. Yang dianalisis berkaitan dengan pola-pola interaksi antara lembaga pendidikan seperti madrasah dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dalam masyarakat di sekitar madrasah, antara lain:
    - (a) Pengaruh masyarakat atas organisasi lembaga pendidikan,
    - (b) Analisis proses pendidikan yang terdapat dalam sistem-sistem sosial dalam masyarakat luar lembaga pendidikan,

- (c) Hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan,
- (d) Faktor-faktor demokrasi dan ekologi dalam masyarakat ber- kaitan dengan organisasi lembaga pendidikan, yang perlu untuk memahami sistem pendidikan dalam masyarakat serta integrasinya di dalam keseluruhan kehidupan masyarakat (Batubara, 2003:41).

#### D. Tujuan Sosiologi Pendidikan

Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat mengalami perubahan sosial yang sangat cepat, maju dan memperlihatkan gejala disintegrasi. Perubahan sosial yang cepat itu meliputi berbagai bidang kehidupan, dan merupakan masalah bagi semua institusi sosial seperti: industri, agama, perekonomian, politik, dan keluarga. Masalah sosial dan masyarakat itu juga dirasakan oleh dunia pendidikan. Masalah pendidikan dalam keluarga, pendidikan di madrasah dan pendidikan dalam masyarakat.

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tentu saja mempengaruhi pendidikan, baik sebagai ilmu maupun sebagai aktivitas. John Dewey (1999) menganggap bahwa begitu esensialnya hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Menurut Dewey bahwa pendidikan tumbuh di masyarakat dan masyarakat tumbuh karena pendidikan. Antara keduanya terdapat hubungan yang bersifat *mutual benefit*, artinya saling menguntungkan bahkan merupakan suatu ikatan yang secara aksiomatik sulit dan mustahil untuk dipisahkan. Senada dengan Dewey, Emile Durkheim (1858-1917) memandang, bahwa pendidikan sebagai suatu *social thing*” atau sebagai ikhtiar. Durkheim mengemukakan bahwa: masyarakat secara keseluruhan masing-masing lingkungan sosial di dalamnya, merupakan sumber penentu cita-cita yang dilaksanakan

lembaga pendidikan. Suatu masyarakat bisa bertahan hidup, hanya kalau terdapat suatu tingkat homogenitas yang memadai dikalangan para warganya.

Pandangan Durkheim di atas mempertegas bahwa pendidikan—termasuk pendidikan merupakan alat atau wahana dalam mengembangkan kesadaran diri sendiri dan kesadaran sosial menjadi suatu panduan yang stabil, disiplin, dan utuh secara bermakna. Pandangan ini bersifat universal, karena sampai sekarang antara pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat tidak dapat dipisahkan, pendidikan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena itu, pendidikan bersifat fungsional dalam sistem hidup dan kehidupan manusia.

Dalam sistem hidup dan kehidupan masyarakat, pendidikan—termasuk pendidikan menjadi faktor penentu terhadap keberhasilan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Kesadaran ini muncul karena memang perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, mau tidak mau lembaga pendidikan harus menjadikan pendidikan sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan ilmu sosial. Melalui nilai-nilai yang dikandungnya pula pendidikan dapat mendorong dan meningkatkan kesadaran dan pengembangan modal sosial yang ada dalam masyarakat.

Berkaitan dengan tujuan sosiologi pendidikan, Nasution (1999: 1) mengemukakan, bahwa ada beberapa konsep tentang tujuan sosiologi pendidikan, antara lain adalah: (1) analisis proses sosioalisasi, (2) analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat, (3) analisis interaksi sosial antara lembaga pendidikan seperti madrasah dengan masyarakat, (4) alat kemajuan dan perkembangan sosial, (5) dasar dan tujuan pendidikan, (6) sosiologi terapan, dan (7) latihan bagi petugas pendidikan.

Konsep tentang tujuan sosiologi pendidikan di atas menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam pendidikan merupakan sebuah proses, sehingga pendidikan dapat dijadikan instrumen oleh individu untuk dapat berinteraksi secara tepat di komunitas dan masyarakatnya. Pada sisi lain, sosiologi pendidikan akan memberikan penjelasan yang relevan dengan kondisi kekinian dan kedisinian masyarakat, sehingga setiap individu sebagai anggota masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan berbagai fenomena yang muncul dalam masyarakat.

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat merupakan bentuk lain dari pola budaya yang dibentuk oleh masyarakat. Pendidikantugasnyatentusajamemberikanpenjelasanmengapa suatu fenomena terjadi, apakah fenomena tersebut merupakan sesuatu yang harus terjadi, dan bagaimana mengatasi segala implikasi yang bersifat buruk dan berkembangnya fenomena tersebut, sekaligus memelihara implikasi positif dari berbagai fenomena yang ada.

Mengaju kepada beberapa pendapat George S. Harrington (dalam Ahmadi, 1991: 9-10), maka sudah barang tentu bahwa tujuan sosiologi pendidikan secara umum adalah:

1. To understand the role of the teacher in the community and the school as an instrument of social progress and social faktor affecting school.
2. To understand the democratic ideologies, our culture and economic and social trends in relation to both formal and informal educationan agencies.
3. To understand social forces and their effects upon individuals.
4. To socialize the curriculum, and

5. To use techniques of research and critical thinking to achieve these aims.

Selain itu sosiologi pendidikan secara umum juga memiliki tujuan yang sangat penting, antara lain yaitu:

1. Untuk menganalisis proses sosialisasi anak, baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dalam hal ini, harus diperhatikan pengaruh lingkungan dan kebudayaan masyarakat terhadap perkembangan pribadi anak. Misalnya, anak yang dididik dalam keluarga yang religius, maka setelah dewasa/tua akan cenderung menjadi keluarga yang religius pula. Anak yang dididik dalam keluarga intelektual akan cenderung memilih atau mengutamakan jalur intelektual pula dan begitu seterusnya.
2. Menganalisis perkembangan dan kemajuan social. Banyak pengamat yang beranggapan bahwa pendidikan memberikan kemungkinan yang besar bagi kemajuan masyarakat karena dengan ijazah yang semakin tinggi akan lebih memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang tinggi pula, dan akan lebih mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi pula, yang konsekuensi logisnya memiliki penghasilan yang banyak pula.
3. Menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. Berdirinya suatu lembaga pendidikan dalam masyarakat sering disesuaikan dengan tingkatan daerah tempat lembaga pendidikan itu berada. Berdirinya lembaga pendidikan dalam masyarakat disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri.
4. Menganalisis partisipasi orang-orang terdidik dalam kegiatan social. Peran para terdidik sering

menjadi ukuran maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat.

5. Sosiologi pendidikan bertujuan membantu *menentukan tujuan pendidikan*. Sejumlah pakar pendidikan berpendapat bahwa tujuan pendidikan harus bertolak dan dapat dipulangkan kepada filsafat hidup dan nilai-nilai ajaran Islam.

Melihat tujuan sosiologi pendidikan di atas, masyarakat sangat menggantungkan harapan yang besar terhadap proses dan interaksi yang terjadi dalam dunia pendidikan. Lebih dari itu, pendidikan juga dapat dijadikan sebagai instrumen peningkatan kemajuan masyarakat, perkembangan ideologi, budaya dan ekonomi. Itulah sebabnya, pendidikan merupakan sebuah modal social sekaligus kekuatan sosial yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian dari kritik terhadap upaya-upaya pencapaian sesuatu di masyarakat.

Tujuan sosiologi pendidikan pada dasarnya adalah untuk mempercepat dan meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan Islam secara menyeluruh. Karena itu, sosiologi pendidikan tidak akan keluar dari upaya-upaya agar pencapaian tujuan dan fungsi pendidikan itu sendiri.

Dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, dinyatakan bahwa: “pendidikan adalah upaya mengembangkan kemampuan manusia Indonesia, meningkatkan mutu kehidupan manusia Indonesia, meningkatkan martabat manusia Indonesia, dan mewujudkan tujuan nasional”.

Menurut fungsi tersebut, jelas sekali bahwa sesungguhnya pendidikan diselenggarakan adalah untuk: (1) mengembangkan kemampuan manusia muslim Indonesia, (2) meningkatkan mutu kehidupan manusia muslim Indonesia, (3) meningkatkan martabat manusia muslim Indonesia, (4) mewujudkan tujuan

nasional melalui manusia-manusia Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan diselenggarakan untuk manusia Islam Indonesia, sehingga manusia Islam Indonesia tersebut memiliki kemampuan mengembangkan diri, meningkatkan mutu kehidupan, meningkatkan martabat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. □



## **BAB II**

# **PERKEMBANGAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN**

### **A. Perkembangan Sosiologi Pendidikan.**

Kelahiran sosiologi pendidikan tidak dapat dipisahkan dari sosok pemikir Emile Durkheim. Selain karena Emile Durkheim dikenal di seluruh dunia karena perannya sebagai bapak pendiri sosiologi, juga karena sejang panjang kariernya, ia intensif mendedikasikan dirinya untuk refleksi pendidikan. Sebuah pertanyaan yang mungkin diajukan adalah mengapa, sebagai sosiolog, ia mendedikasikan begitu banyak waktu dan usaha untuk tema pendidikan. Setidaknya ada tiga kemungkinan jawabannya, pertama, karena ia harus melakukannya, karena fakta ia bekerja di universitas sebagai dosen di kajian pedagogi, sehingga wajib berbicara tentang pendidikan. Namun demikian, ia berurusan dengan tema pendidikan sebelum posisinya sebagai kepala Departemen “pedagogi dan ilmu sosial” dan terus menghadapinya bahkan ketika posisinya pindah di Sorbonne.

Jawaban kedua menyangkut sebuah interpretasi “internalis” dari teorinya sendiri: pendidikan merupakan elemen yang aktual, langsung atau tidak langsung disepanjang tulisannya, sejauh dipahami oleh Durkheim sebagai proses sosial di mana moral diproduksi dan direproduksi, sedang transmisikan dari satu

generasi ke generasi lain. Ini adalah proses di mana masyarakat menciptakan kembali sendiri, membuat individu siap untuk hidup dalam masyarakat. Adalah bagaimana meninggalkan kondisi kehewanian kita belaka, dengan nafsu dan naluri kita, untuk menjadi manusia benar manusia, memperoleh barang peradaban. Singkatnya tanpa pendidikan, masyarakat tidak akan mungkin berubah, setidaknya tidak sebagai kontinum waktu: akan perlu untuk mengubah dirinya terus-menerus, mulai dari nol. Pendidikan adalah inti dari kehidupan sosial sehingga tidak lebih logis daripada menyimpannya sebagai obyek utama penelitian sosiologi. Adalah sesuatu yang sangat penting yang mengarah kepada Durkheim untuk membuat ranah khusus dari sosiologi yaitu “sosiologi pendidikan”.

Durkheim merupakan salah seorang tokoh yang membidani kelahiran sosiologi pendidikan di Prancis, Gouthherin (1993: 178) menyebut Durkheim sebagai *pere fondateur (the founding father)*. Pemikiran Emile Durkheim selalu relevan dan kontekstual dalam dinamika sosial masyarakat kontemporer. Pemikiran Durkheim tidak hanya mendominasi diskursus sosiologi pendidikan, tetapi juga menyebar dalam berbagai kajian sosiologi lainnya, seperti sosiologi agama, sosiologi kriminalitas, sosiologi keluarga maupun psikologi sosial. Dalam diskursus sosiologi pendidikan, Durkheim adalah perintisnya (Derouet, 2000: 9).

Dalam bukunya yang berjudul *Education et sociologie*, Emile Durkheim sangat menyadari perbedaan antara “sosiologi pendidikan” dan “pedagogi”. Sosiologi pendidikan menyangkut “dimensi eksplikatif”, yaitu dimensi yang berdasarkan keyakinannya bahwa sosiologi pendidikan harus mengamati dan mencoba untuk menjelaskan sistem pendidikan seperti keberadaan mereka. Pada dasarnya itu terdiri dari praktik prinsip-prinsip sosiologi pendidikan, dalam rangka memahami

apa yang sudah ada, menunjukkan hubungannya dengan cita-cita sosial. Dalam hal ini, hal tersebut akan membantu kita untuk menjadi lebih sadar diri tentang apa yang sangat mendasar dalam pendidikan kita sehingga kita memahami prinsip-prinsip dan kapasitas apa yang kita ajarkan kepada nak-anak kita.

Menurut Durkheim, sosiologi pendidikan tidak bisa mengatakan apa pendidikan terbaik atau apa yang harus terdiri sistem pendidikan. Di sisi lain, pengetahuan yang dihasilkan oleh sosiologi pendidikan, bersama-sama dengan disiplin ilmu lain seperti psikologi dan sejarah harus merupakan inti dari pedagogi yang dimilikinya sebagai refleksi cukup beralasan tentang bagaimana pendidikan seharusnya dilakukan. Pedagogi pada dasarnya adalah penting bagi seorang murid dan tugas utama pedagogi adalah untuk memberikan panduan untuk tindakan pendidikan. Dengan kata lain, pedagogi harus bergantung pada pengetahuan yang dihasilkan oleh disiplin ilmu untuk membangun sistem pendidikan terbaik dalam hal struktur, metode, dan konten untuk setiap masyarakat, saling membantu masyarakat untuk mencapai ide-ide yang paling benar dan mulia.

Selain Durkheim, perkembangan sosiologi pendidikan di Prancis, juga tidak dapat dileaskan dari peran Le Play. Dalam bukunya yang berjudul *Les Ouvriers Europeens* (1855), Le Play menjelaskan tentang konsep pendidikan. Buku ini juga menjelaskan hasil observasi dan partisipasi, terlebih Le Play dalam keluarga para buruh tersebut. Kontribusi utama Le Play adalah mengintrodusir pendidikan liberal (*l'education liberallie*). Le Play memiliki pengalaman sebagai dosen di Institut Pertambangan. Awal kariernya, Le Play adalah seorang insinyur pertambangan (Cuin and Gresle, 1992: 36)

Perkembangan sosiologi pendidikan di Prancis mengalami puncaknya pada tahun 1960-1970. Perkembangan ini diawali pada dekade 1950 ketika terjadi gerakan transformasi sosial di Prancis. Ketika itu muncul harapan dan dorongan kuat dari kalangan reformis di Prancis dalam mendorong transformasi masyarakat yang di mulai dari sekolah. Harapan pada konteks itu dianggap sebagai ilusi (Haecth, 2006: 25). Ketika itu, institusi egaliter setelah Perang Dunia II. Inilah yang menjadi pusat transformasi sosial yang berkembang signifikan dalam sosiologi. Pada periode tersebut Pierre Bourdieu (1920-2002) dan Raymond Boudon memiliki pengaruh penting dalam sosiologi Prancis. Selain itu nama Michel Foucault (1926-1984) juga memiliki pengaruh penting dalam sosiologi Prancis. Foucault memang tidak spesifik membahas pendidikan, tetapi memiliki perhatian mendalam mengenai genealogi kekuasaan dan pengetahuan dalam masyarakat. Kedua konsep ini sangat terkait dengan praktik pendidikan. Pasca Bourdieu yang meninggal 2002, Boudon menjadi sosiolog Prancis yang pemikirannya masih sangat berpengaruh dalam tradisi sosiologi Prancis hingga sekarang. Boudon lahir di Paris pada 27 Januari 1934. Boudon mennjadi profesor di *Universite Paris Pantheon Sorbonne*. Di laur nama Boudon, Jean Claude PeDi laur nama Boudon, Jean Claude Pesseron adalah sosiolog Prancis yang sangat konsisten dengan sosiologi pendidikan. Boudon sendiri tidak terlalu mendalami sosiologi pendidikan dibandingkan Bourdieu dan Passeron. Nama Bourdieu dan Passeron lebih dikenal sebagai sosiolog pendidikan Prancis sangat berpengaruh pasca Durkheim (Dantier, 2003: 25) Passeron lahir pada 1930 di Nice. Passeron dan Bourdieu berkolaborasi menulis beberapa buku yang kemudian menegaskan pengaruh kuat sosiologi pendidikan Prancis.

Perhatian Bourdieu pada pendidikan dapat dilihat pada bukunya yang berjudul *Homo Academicus* (1984). Buku ini

menjelaskan konflik akademik di fakultas/universitas Prancis, khususnya dosen dengan mahasiswa (Braz, 2001: 57). Terdapat tiga buku mereka yang sangat memperkuat corak sosiologi pendidikan Prancis yaitu: *La Reproduction, Elements Pour Une Theorie du Systemed'Enseignement* (1979), *Les Heritiers les E'tudiants et la Culure* (1964) dan *Les E'tudiants et Leur E'tudes* (1964). Pemikiran Passeron menjadi kekuatan sosiologi pendidikan Prancis. Kredir Bourdieu dan Passeron dalam tradisi sosiologi pendidikan Prancis adalah mengembangkan teori reproduksi pendidikan. Passeron juga dikenal mengembangkan studi universitas di Prancis yang kini tumbuh subur menjadi kajian mendalam sosiologi penerusnya di Prancis.

Secara lebi spesifik, Dandurand and Ollivier (1987) menjelaskan fase perkembangan sosiologi pendidikan dalam tiga fase. *Fase pertama*, berlangsung periode 1945-1965 yang disebut fase institusionalisasi sosiologi pendidikan. Fase ini didominasi oleh wacana pembangunan dan keadilan sosial. Dalam negara-negara kapitalisme maju pasca perang, karakteristik yang muncul adalah adanya akselerasi gerakan modernisasi dan renovasi sosial diberbagai negara. Negara-negara industrialisasi mengembangkan teknologi dalam upaya meningkatkan pembanguna ekonomi. Proyek sosio-politik dominan dalam periode ini. Pendidikan menjadi aspek penting dalam proyek politik sejalan dengan proyek ekonomi dan demokrasi pendidikan. Sekolah juga dikembangkan di negara-negara kapitalis maju. Reformasi pendidikan menjadi penting dalam pendidikan menengah dan univeristas. Paradigma dominan dalam periode ini adalah visi fungsionalis dan reformasi sekolah. Pemikiran Durkheim dan Talcott Parsons mendominasi fase ini. (Hidayat, 2008: 59-62)

*Fase kedua*, berlangsung pada periode 1965-1975 yang disebut fase radikal. Fase ini berlangsung secara dominan pasca perang

di akhir 1965. Ketika itu berlangsung krosi ekonomi. Dalam perjalanannya, krisis bisa berkurang. Perkembangan signifikan ditandai dengan perkembangan besar perusahaan-perusahaan multinasional hingga berlangsung supraproduksi. Di AmDi Amerika Serikat berlangsung krisis hegemoni dalam perang Vietnam. Fase ini juga ditandai beberapa gerakan mahasiswa di mancanegara. Gerakan mahasiswa mahasiswa di mancanegara. Gerakan mahasiswa yang sangat fenomenal adalah di Berkeley (AS) tahun 1965 dan Prancis pada 1968. Gerakan mahasiswa di Jerman dan Quebec juga berlangsung meski pengaruhnya tidak sebesar di AS dan Prancis> Fase ini juga ditandai dengan daya serap kelas menengah untuk mengakses universitas. Selain itu, di universitas juga dibuka beberapa fakultas/jurusan baru seperti disiplin ilmu sosial. Tradisi sosiologi kritik dominan dalam fase ini diantaranya pemikiran Herbert Marcuse yang merepresentasikan sosiologi Jerman dan Bourdieu dan Alain Touraine dari sosiologi Prancis. *Mainstream* pemikiran fase ini adalah tradisi Marxisme dan sosiologi pendidikan baru (*the new of sociology of education*, NSE) yang dikembangkan di Inggris tahun 1970-an (Young, 1971, Trottier, 1987, Strota, 1987, Poisson, 1991).

Pierre Bourdieu dan Jean Claude Passeron menjadi figur penting sosiologi pendidikan dalam fase ini. Bowles dan Gintis juga menjadi figur penting dalam sosiologi pendidikan di Amerika Serikat selama ini. *Fase ketiga* berlangsung pada periode 1975-1986 yang disebut fase restrukturisasi. Fase ini terdapat beberapa momen penting di antaranya secara dominan terjadi restrukturisasi sistem ekonomi, politik, dan teknologi. Ekspansi ekonomi juga terus berlangsung pasca perang yang paralel dengan sistem pengajaran di sekolah dan univeritas. Konsekuensi dari krisis ekonomi yang terjadi sejak 1973 berpengaruh dalam ranah sekolah dan pendidikan melalui pengurangan anggaran sekolah. Dampak krisis ekonomi itu

berpengaruh dominan secara global. Analisis yang dominan dalam fase ini adalah analisis tentang faktor internal sekolah. Selain itu kuat juga analisis tentang kritik dan delegitimasi teori struktural fungsional. Fase ini terlihat dalam kuatnya reintegrasi Marxisme dalam sosiologi pendidikan versi strukturalisme. Redikalisasi pemikiran juga tampak dalam pengembangan sosiologi konflik dan sosiologi kritik. Pemikiran yang masih mendominasi fase ini antara lain Bourdieu, Passeron, Bowles dan Gintis, Halsey dan Karabel.

Sosiologi pendidikan Prancis yang memiliki pengaruh penting juga Jean-Michel Berthelot (1945-2006). Selain mendalami sosiologi pendidikan, Berthelot juga mengkaji sejarah sosiologi, sosiologi pengetahuan, sosiologi sains dan sosiologi tubuh. Berthelot menulis buku *Le Pigeon Scolaire* (1983). Buku ini mengkritik teori reproduksi yang diintrodusir Bourdieu dan Passeron. Berthelot juga berupaya memperkaya sekaligus memperkaya teori dan model menjelaskan sosiologi pendidikan dalam kritik teori reproduksi. Secara lebih spesifik, Berthelot memberikan fondasi dalam pendekatan institusi sekolah (Laurens, 2011: 11). Perhatiannya terhadap pendidikan, dia tulis dalam disertasi doktoralnya yang berjudul *Ecole, Orientation, Societe* (1993). Berbagai tulisannya dalam tema pendidikan tersebar diberbagai jurnal sosiologi Prancis. Beberapa tulisan utamanya antara lain *Chahut Scolaire et Crise de l'institution* (1977), *Mode de Scolarisation* (1978), *Reflexions sur les Theories de la Scolarisation* (1982) (Hidayat, 2014).

Sosiolog Prancis lain yang memiliki saham dalam sosiologi pendidikan adalah Christian Baudelot. Baudelot dilahirkan pada 1938. Baudelot adalah profesor sosiologi di ENS Paris. Baudelot sering berkolaborasi dengan Roger Establet lahir pada 1938 di Nice. Pada 1959, Establet menjadi murid Louis Althusser di *Ecole Normale Supérieure* (ENS) Paris. Setelah

mendapatkan gelar doktor filsafat, Establet bergabung dalam proyek penelitian Marxis bersama Louis Althusser. Pada 1965, Establet berkontribusi dalam penulisan buku *Lire le Capital*. Buku ini merupakan kumpulan studi dari sebuah workshop yang diselenggarakan Louis Althusser pada 1948 di ESN Paris. Berikutnya, seminar juga dilakukan dengan mereka yang dikenal sebagai pemikir Marxis muda, pemikiran strukturalisme dan Lacan serta psikoanalisis (1961-1962). Setelah rangkaian diskusi tersebut berakhir, lahirlah buku *Lire leCapital*. Buku ini sebenarnya berupaya menginterpretasikan buku Marx berjudul *Capital* dalam kekuatan filosofisnya. Establet mendalami statistik dan pernah menjadi asisten Geoges Gurvitch (1894-19650. Geoges Gurvitch adalah sosiolog Prancis kelahiran Russia (Hidayat, 2014: 63).

## **B. Para Perintis Sosiologi Pendidikan.**

Menyajikan suatu sejarah teori sosiologis adalah tugas yang penting (S. Turner, 1998). Sejarah lahirnya suatu ilmu pengetahuan ditentukan oleh *setting sosialnya*. Hal ini juga berlaku untuk sosiologi pendidikan, yang tak hanya berasal dari kondisi sosialnya, tetapi juga menjadikan lingkungan sosial sebagai kajian pokoknya. Sejarah muncul dan berkembangnya sosiologi pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu sangat berkaitan dengan peristiwa kekacauan umat manusia.

Sosiologi pendidikan merupakan ilmu baru yang menjadi cabang dari sosiologi yang mempelajari hubungan timbal-balik antara pendidikan dan masyarakat. Sosiologi pendidikan manaruh perhatian pada kondisi sosial atau eksistensi pendidikan. Para sarjana dalam bidang pendidikan tidak terbatas melakukan analisis sosiologis pada wilayah pendidikan seperti tampak dari istilahnya, tapi secara praktis juga mengamati produk-produk intelektual, seperti filsafat, ideologi, doktrin-doktrin politik,

dan pemikiran teologis. Terhadap semua bidang ini, sosiologi pendidikan berupaya untuk menghubungkan ide-ide dengan realitas masyarakat dan mengkaji *setting histories* di mana ide-ide itu diproduksi dan diterima.

Kelahiran Sosiologi pendidikan tidak dapat pisahkan dari tokoh yang membidaninya. Lebih dari itu, sebagai kajian intelektual sosiologi pendidikan dibentuk secara mendalam oleh latar sosialnya, yang tidak hanya beral dari latar itu, tetapi mengambil latar sosial sebagai pokok masalah dasarnya. Berikut ini akan dipaparkan para perintis yang membidani lahirnya sosiologi pendidikan.

### 1. **Ibnu Khaldun (1332 M-1406 M)**

Ibnu Khaldun lahir di Tunisia, Afrika Utara, pada 27 Mei 1332 (Faghirzadeh, 1982). Ia lahir dari keluarga terdidik. Ibnu Khaldun dididik di bidang al-Qur'an, matematika, dan sejarah. Semasa hidupnya, ia melayani bermacam-macam sultan di Tunisia, Maroko, Spanyol, dan Algeria sebagai duta, bendaha raja, dan anggota dewan sarjana. Ia juga menghabiskan waktu dua tahun di penjara Maroko karena keyakinannya bahwa para penguasa negara bukanlah para pemimpin ilahiah. Setelah menjalankan kegiatan politik hampir dua dasawarsa, Ibnu Khaldun kembali ke Afrika Utara, di sana ia menjalankan periode lima tahun studi dan menulis. Karya-karya yang dihasilkan selama periode tersebut menambah kemashurannya dan menghasilkan jabatan dosen di pusat studi Islam, Universitas Al-Azhar di Kairo.

Ibnu Khaldun adalah orang yang pertama kali menggagas sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu baru yang mandiri. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara, pada 27 Mei 1332 atau 1 Ramadhan 732 H, di tengah situasi konflik yang begitu keras antara Muslim tradisional, rasional dan kaum sufi. Situasi tidak harmonis dalam masyarakat di sekitarnya itulah

yang mendorongnya untuk mempelajari masyarakat secara serius. Dalam kajiannya, ia telah menghasilkan sejumlah karya sosiologi, seperti *Kitab al-Ibar* yang berisi sejarah umum dan universal masyarakat, dan *Muqaddimah (prolegomena)* yang berisi pembaharuan tentang sosiologi. *Muqaddimah* merupakan karya terpenting dari keseluruhan karya Ibnu Khaldun. Kitab ini berisi 6 bab. Bab pertama, membahas sebuah sosiologi umum dan sebuah garis besar pengaruh lingkungan terhadap kondisi manusia, Bab kedua, berisikan sosiologi masyarakat primitif dan pedesaan, seperti masyarakat liar, nomad, kelompok-kelompok keluarga, dan suku-suku. Bab ketiga, berisi sosiologi politik termasuk bentuk-bentuk pemerintahan yang beragam, negara dan institusi, kekuatan spiritual dan temporal, dan kedudukan-kedudukan politik. Bab keempat, berisikan sosiologi masyarakat perkotaan termasuk bentuk-bentuk peradaban yang maju dan canggih, perbedaan tempat-tempat menetap, kota, dan propinsi. Bab kelima, berisi sosiologi ekonomi, industri termasuk mata pencaharian, aktivitas ekonomi, keahlian, dan seni yang berbeda-beda. Bab keenam, berisi sosiologi pengetahuan, ilmu pengetahuan, sosiologi pendidikan, dan persoalan-persoalan budaya secara umum. Pada bab ini juga dibicarakan persoalan hukum, sastra, puisi, bahasa, ilmu kebahasaan, dan bentuk-bentuk yang beragam dari kiasan, arti, dan pemahaman dalam budaya-budaya yang beragam. Dalam karyanya itu, ia mengkaji masyarakat secara empiris dan meneliti sebab-sebab fenomena sosial.

Ide-ide sosiologi pendidikan telah dilahirkan oleh Ibnu Khaldun pada abad ke 14. Ia memandang bahwa pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan kondisi sosial. Pandangan ini selaras dengan proposisi Karl Marx yang menyatakan bahwa, kesadaran manusia ditentukan oleh keberadaan sosialnya. Bagi Ibnu Khaldun perkembangan antara perkembangan

pendidikan dan perkembangan peradaban dalam masyarakat yang menetap.

Sebagaimana Karl Mennheim, yang oleh para pengamat dipandang sebagai pendiri sosiologi pengetahuan, Ibnu Khaldun berpandangan bahwa pemikiran ideologis tidak hanya terbatas pada kelas yang berkuasa, tapi juga dimiliki oleh semua kelas sosial. Setiap kelas memiliki eksistensinya sendiri, atau perspektif sosialnya, dan sejumlah kepentingan. Jadi, ide-ide yang dihasilkan oleh semua kelas pada dasarnya adalah ideologis. Sama halnya dengan Max Scheler, salah seorang tokoh sosiologi pendidikan yang lain, Ibnu Khaldun berpandangan bahwa faktor-faktor material sangat dapat mempengaruhi isi ide-ide, ideologi, dan pendidikan masyarakat.

Berdasarkan atas fakta di atas, maka pendiri sosiologi pendidikan sesungguhnya bukanlah Karl Mannheim sebagaimana diungkapkan oleh sebagian pengamat, tapi Ibnu Khaldun. Ini sangat logis, karena prinsip-prinsip interdependensi antara pendidikan dan kondisi sosial kemasyarakatan yang merupakan substansi sosiologi pendidikan telah dimiliki oleh Ibnu Khaldun sendiri sosiologi pendidikan sesungguhnya bukanlah Karl Mannheim sebagaimana diungkapkan oleh sebagian pengamat, tapi Ibnu Khaldun. Ini sangat logis, karena prinsip-prinsip interdependensi antara pendidikan dan kondisi sosial kemasyarakatan yang merupakan substansi sosiologi pendidikan telah dimiliki oleh Ibnu Khaldun, enam abad sebelum Karl Mannheim mencetuskannya. Inilah yang ditunjukkan oleh Saleh Faghirzadeh yang telah meneliti dengan seksama pikiran-pikiran Ibnu Khaldun dan memandingkannya dengan para pemikir sosiologi Barat, seperti Comte, Marx, Spencer, Durkheim, Weber dan Pareto.

## 2. Karl Marx (1818-1883)

Marx lahir dari keluarga Yahudi di Trier, Jerman pada tahun 1818. Marx lahir di tengah keluarga yang terdidik. Ibunya berasal dari keluarga Rubbi Yahudi, si sedangkan ayahnya berpendidikan sekuler dan pengacara sukses. Marx sendiri menyelesaikan studi doktor filsafatnya pada Berlin University. Dalam masalah pemikiran, Marx banyak dipengaruhi oleh Hegel dan pengikutnya yang kritis. Marx sangat berpengaruh terhadap cara berpikir tentang pendidikan dan masyarakat.

Marx memulai karyanya yang paling masyhur, *The Manifesto of the Comunist Party*. Bagi banyak orang, Marx lebih berupa ikon daripada pemikir yang pantas mendapat studi yang lebih serius. Symbolisme namanya cenderung mengacaukan pengertian atas ide-idenya. Marx adalah satu-satunya teori yang berkaitan dengan pergerakan-pergerakan politis dan sistem-sistem sosial yang dinamai menurut namanya. Dia mungkin satu-satunya teoritisi yang ditanggapi keras oleh teman-temannya dan keluarganya. Dia sering dikritik, dan juga dipuji oleh orang-orang yang tidak pernah betul-betul membaca bukunya. Bahkan dikalangan pengikutnya, ide-ide Marx disusutkan menjadi slogan-slogan seperti “candu bagi rakyat” dan “kediktatoran propetariat”, tetapi peran slogan-slogan itu sering diabaikan di dalam teori Marx yang mencakupnya.

Vlandimir Lenin (1972:180) mengatakan bahwa tidak seorang yang dapat mengerti sepenuhnya karya Marx, tanpa terlebih dahulu memahami filsuf Jerman G.W.F Hegel. Karena hegel adalah salah seorang dari para filsuf yang pernah menulis dengan tulisan yang paling sulit dipahami. Namun demikian, kita harus memahami beberapa hal mengenai Hegel agar dapat diapresiasi konsep sentral Marx mengenai dialektika.

Ide mengenai suatu filsafat dialektika sudah ada selama berabad-abad (Gadamer, 1989). Ide dasarnya ialah sentralitas

kontradiksi. Sementara sebagian besar filsafat, dan juga akal sehat, memperlakukan kontradiksi-kontradiksi sebagai kekeliruan, filsafat dialektika percaya bahwa kontradiksi ada di dalam realitas dan perkembangan hal-hal yang kontradiksi. Hegel menggunakan ide kontradiksi untuk memahami perubahan historis. Menurut Hegel, perubahan histori didorong oleh pengertian-pengertian yang kontradiktif yang merupakan esensi kenyataan, atau melalui usaha-usaha untuk memecahkan kontradiksi-kontradiksi, dan oleh kontradiksi-kontradiksi baru yang berkembang.

Marx juga menerima sentarlitas kontradiksi bagi perubahan historis. Hal ini dapat dilihat dalam perumusan-perumusan yang terkenal seperti “kontradiksi-kontradiksi kapitalisme” dan “kontradiksi-kontradiksi kelas”. Akan tetapi, tidak seperti Hegel, Marx tidak percaya bahwa kontradiksi-kontradiksi tersebut dapat bekerja di dalam pengertian seseorang, yakni di dalam pikirannya. Sebagai gantinya, bagi Marx hal-hal itu adalah kontradiksi-kontradiksi nyata yang sedang ada. (Wilde, 1991: 277). Bagi Marx, kontradiksi-kontradiksi seperti tidak dipecahkan oleh filsuf yang sedang duduk di kursi malas, tetapi dengan perjuangan mati-matian mengubah dunia sosial. Itu adalah suatu transformasi yang sangat penting karena mengizinkan Marx untuk memindahkan dialektika keluar dari ranah filsafat dan memasuki ranah studi mengenai relasi-relasi sosial yang berlandaskan dunia material.

Fokus Marx pada kontradiksi-kontradiksi nyata yang sedang ada menghasilkan suatu metode khusus untuk mempelajari fenomena sosial yang kemudian juga disebut “dialektika” (T. Ball, 1991)

Di dalam analisis dialektika, nilai sosial tidak dapat dipisahkan dari fakta-fakta sosial. Banyak sosiolog percaya bahwa nilai-nilai mereka dapat dan harus dipisahkan dari studi

mereka atas fakta-fakta tentang dunia sosial. Pemikir dialektis percaya bahwa bukan hanya mustahil untuk terus menjauhkan nilai-nilai dari dunia sosial, tetapi juga tidak pantas, karena dengan berbuat demikian akan menghasilkan suatu sosiologi tidak memihak yang tidak manusiawi yang hanya mampu menawarkan sedikit saja kepada orang yang sedang mencari jawaban bagi masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Fakta-fakta dan nilai-nilai saling merangkai dengan cara yang tidak terelakkan, akibatnya studi fenomena sosial sarat dengan nilai.

Metode analisis sosial dialektis tidak melihat hubungan sebab-akibat satu arah yang sederhana antara aneka bagian dunia sosial. Bagi pemikir dialektis, pengaruh-pengaruh sosial tidak pernah hanya mengalir satu arah seperti yang sering dilakukan para pemikir sebab dan akibat. Bagi yang dialektisi, satu faktor mungkin mempunyai suatu efek pada faktor lain, tetapi mungkin saja bahwa yang belakang mempunyai efek yang serempak kepada yang terdahulu. Sebagai contoh, eksploitasi pekerja yang terus meningkat oleh kaum kapitalis dapat menyebabkan para pekerja menjadi semakin puas dan lebih militan, tetapi militansi kaum proletiat yang semakin meningkat dapat menyebabkan para kapitalis beraksi bahkan semakin lebih eksploratif untuk menghancurkan perlawanan para pekerja. Jenis pemikiran itu tidak berarti bahwa sang dialektisi tidak pernah mempertimbangkan hubungan kausal di dalam hubungan sosial. Pemikiran seperti itu sungguh berarti bahwa ketika para pemikir dialektis berbicara tentang kausalitas, mereka selalu menyesuikannya dengan hubungan-hubungan resiprokal di antara faktor-faktor sosial dan juga totalitas dialektis kehidupan sosial tempatnya (Ritzer, 2012: 77).

Selain teori dialektika, Marx juga mempergunakan teori materialisme historis di dalam memahami realitas sosial. Materialisme historis merupakan pendekatan yang dipergunakan Marx dalam menjelaskan realitas sosial, termasuk tentang realitas pendidikan masyarakat. Setidaknya ada empat konsep sentral penting dalam memahami pendekatan materialisme historis Marx, yaitu: *pertama, means of production* (cara produksi) yaitu sesuatu yang digunakan untuk memproduksi kebutuhan material dan untuk mempertahankan keberadaan. Kedua, *Relations of production* (hubungan produksi), yaitu hubungan antara cara masyarakat memproduksi dan peranan sosial yang terbagi kepada individu-individu dalam produksi. Misalnya, pemilik dan bukan pemilik alat-alat produksi. Ketiga, *Mode of production* (mode produksi), yaitu elemen dasar dari suatu tahapan sejarah dengan memperlihatkan bagaimana basis ekonomi membentuk hubungan sosial, yaitu cara mengorganisasi produksi. Keempat, *force of production* (kekuatan produksi), yaitu kapasitas dalam benda-benda dan orang yang digunakan bagi tujuan produksi. Misalnya, pada masa feodal, kekuatan produksi bersumber pada tanah, alat-alat pertanian, dan teknik penggarapan. Atau masa kapitalis, kekuatan produksi berasal dari teknik-teknik industri, ilmu, modal, dan teknologi mesin.

Perubahan sosial dan budaya, termasuk perubahan dalam aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh perubahan cara produksi. Perubahan cara produksi meliputi perkembangan teknologi baru, penemuan sumber-sumber baru, atau perkembangan baru lain apapun dalam bidang kegiatan produksi (Johnson, 1986: 132). Cara produksi berubah, maka muncul kontradiksi antara cara produksi dan hubungan produksi. Ketika kontradiksi telah merusak parah keseimbangan, maka akan berdampak pada perubahan terhadap hubungan produksi, seperti perubahan pada pembagian kerja, dasar dan

bentuk struktur kelas, pada gilirannya dapat mengubah mode produksi.

Selain pendekatan materialis historis, Marx juga mempergunakan teori alienasi. Teori alienasi berangkat dari pemikiran bahwa apa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya? Kata Marx, kerja! Hanya manusialah, makhluk yang mampu melakukan kerja. Melalui kerja, oleh sebab itu, manusia sebagai produsen. Kalau manusia ini produsen, bagaimana mungkin manusia kehilangan kekausaan atas produksinya sendiri? Atau lebih tegas, bagaimana mungkin produksi ini mendapat kekausaan atau produsennya? Inilah masalah alienasi (keterasingan) (Layendecker, 1983: 248).

Kapitalisme telah menyebabkan manusia mengalami alienasi karena hasil kreativitas produsen menjadi terasing/ diasingkan dari produsen itu sendiri. Alienasi ini bisa mengambil bentuk: 1) produksi di luar kontrol dari produsen seperti jenis, kualitas, kuantitas, harga dan pemasaran produksi. 2) produsen harus menyesuaikan diri dengannya seperti mengikuti kapasitas produksi mesin. Oleh karena itu, menurut McLellan (1973: 111), manusia mengalami alienasi dalam tiga arti, *pertama*, manusia teralienasi dari produksi kerjanya sendiri, dalam arti bahwa ia hanya sekedar embel-embel dari proses produksi, sebagai pelayan mesin atau orang yang memindahkan kertas di kantor. *Kedua*, manusia juga teralienasi dari dirinya sendiri dalam arti bahwa ia kerja karena terpaksa, dan sebagai akibatnya manusia diubah menjaid hewan, “karena ia hanya merasa sennag apabila melakukan fungsi jadi hewani, yakni makan, minum dan memiliki anak-anak”. *Terakhir*, manusia teralienasi dari sesamanya. Hubungan yang ada di tempat kerja mempengaruhi hubungan dalam kehidupan di luar kerja.

#### 4. Emile Durkheim (1858-1917)

Durkheim dilahirkan di Epinal Prancis pada tahun 1858 dari keluarga Yahudi, ayahnya Rabbi. Studi di Ecole Supérieure di Paris. Dari tahun 1887 sampai 1902 menjadi guru besar dalam ilmu-ilmu sosial di Bordeaux. Durkheim berhasil menulis beberapa buku, di antaranya ada *The Methode*, dan *Suicide, The Elementary Form of the Religious Life*. Berbeda dengan Marx, sumbangan Durkheim terhadap sosiologi pendidikan lebih terasa, terutama dari berbagai ceramah yang diberikannya tentang sosiologi pendidikan, yang dibukukannya dengan judul *Education and Society* (1956), *Moral Education* (1961), dan *Evolution of Education Thought* (1977).

Salah satu buku yang ditulis Emile Durkheim berjudul, *L'Évaluation Pédagogique en France* (Evolusi pendidikan di Prancis) pada tahun 1920 dan dipublikasikan pada tahun 1927. Dalam buku itu penulis menunjukkan bahwa setiap periode sejarah adalah proyek tertentu untuk sosialisasi generasi muda dan proyek ini mengilhami semua kebijakan pendidikan yaitu berbagai institusi sekolah, isi pengajaran, termasuk di dalamnya metode pengajaran. Buku ini sangat kuat dengan logika fungsionalisme yang ditunjukkan dengan artikulasi semua elemen yang sangat sempurna. Asumsi sangat kuat sebagai basis fungsional.

##### a. Pendekatan Fungsional Sosiologi.

Untuk memisahkan sosiologi dari filsafat sosial dan mengaskan sosiologi sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang mandiri, maka Durkheim menulis *the Rules of Sociological Methods* untuk menegaskan bahwa obyek sosiologi ialah fakta sosial. Fakta sosial merupakan semua cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada di luar individu, bersifat memaksa, dan umum. Fakta sosial, oleh karena itu memiliki tiga karakteristik, satu eksternal yaitu di luar individu. Fakta sosial ada sebelum

individu ada dan akan tetap ada setelah individu tiada. Dua, determinan, yaitu fakta sosial memaksa individu agar selalu sesuai dengannya (fakta sosial). Tiga, general yaitu tersebar luar dalam komunitas/masyarakat, milik bersama, bukan milik individu.

b. Tesis Solidaritas Sosial

Dalam bukunya *the dividon of labor in society*, Durkheim menjelaskan tentang tipe solidaritas sosial dalam masyarakat, yaitu msyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik dan organik. Bagi kelompok masyarakat yang menganut solidaritas mekanik, yang diutamakan ialah persamaan perilaku dan sikap. Menurut Durkheim seluruh warga masyarakat diikat oleh apa yang dinamakannya kesadaran kolektif (*collective conscience*) suatu kesadaran bersama yang mencakup keseluruhan kepercayaan dan persamaan kelompok, dan bersifat ekstrem serta memaksa. Sedangkan solidaritas organic merupakan bentuk soolidaritas yang mengikat masyarakat kompleks kesalingtergantungan antara bagian. Tiap anggota menjalankan peran berbeda, dan di antara berbagai peran yang ada terdapat kesalingtergantungan laksana kesalingtergantungan antara bagian suatu organic biologis (Sunarto, 2000:132). Berbeda dengan ikatan organisatorik fungsional yang merupakan hasil dari kesadaran manusia/keinginan yang rasional.

**Tabel 1:** Perbedaan Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik

<b>Solidaritas Mekanik</b>	<b>Solidaritas Organik</b>
1. Pembagian kerja rendah	1. Pembagian kerja tinggi
2. Kesadaran kolektif kuat	2. Kesadaran kolektif tinggi
3. Hukum refresif dominant	3. Hukum restitutif dominant
4. Individualitas rendah	4. Individualitas tinggi.
5. Konsensus terhadap pola-pola normatif itu penting.	5. Konsensus pada nilai - nilai abstrak dan umum itu penting.

6. Keterlibatan komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang	6. Badan-badan kontrol sosial yang menghukum orang yang menyimpang.
7. Secara relatif saling ketergantungan itu rendah.	7. Saling ketergantungan yang tinggi.
8. Bersifat primitif (pedesaan).	8. Bersifat industri perkotaan.

Pada masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik, misalnya, karena terbatasnya ketersediaan lembaga pendidikan, maka orientasi pendidikan juga terbatas, bisa jadi pada level pendidikan dasar. Orientasi pendidikan seperti itu cenderung menekankan individualitas dan memiliki saling ketergantungan yang rendah. Selanjutnya, konsesus terpenting pilihan merujuk pada pola normatif yang ada. Adapun pada masyarakat yang berlandaskan solidaritas organik, orientasi pendidikannya lebih luas karena ketersediaan beragam lembaga pendidikan, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Keberagaman orientasi pendidikan ini menyuburkan individualitas dan saling ketergantungan antarsesama. Sementara konsensus terpenting dalam masyarakat tipe ini merujuk pada nilai abstrak dan umum yang tercantum dalam aturan perundangan dan hukum yang ada.

c. Teori Moralitas.

Teori moralitas merupakan pengembangan lanjut dari penerapan metodologi Durkheim tentang fakta sosial. Moralitas dapat dipandang sebagai fakta sosial, karena memiliki karakteristik eksternal, umum, dan memaksa. Moralitas merupakan realitas yang berada di luar individu. Moralitas hadir dalam kesadaran individu, karena dipelajari melalui proses sosialisasi. Oleh sebab itu, ia ada sebelum individu ada dan akan tetap ada jika individu ini telah tiada. Keran ia selalu ditransmisikandari satu generasi ke generasi berikutnya melalui sosialisasi masyarakat. Prases transmisi ini, atau dikenal sebagai sosialisasi, menyebabkan moralitas hadir dalam kesadaran

anggota masyarakat, tidak bersifat individual. Selanjutnya, moralitas memiliki sifat memaksa, di mana semua anggota masyarakat mengindahkan keberadaan fakta sosial ini. Jika tidak, akan ada sesuatu yang memaksa agar seseorang untuk berperilaku, bertindak, dan merasa seperti yang dikehendaki oleh fakta moral.

Menurut Emile Durkheim, moralitas memiliki tiga unsur, yaitu semangat disiplin, ikatan pada kelompok, dan otonomi. Pada dasarnya, moralitas adalah suatu disiplin. Semua disiplin bertujuan ganda: mengembangkan keteraturan tertentu dalam perilaku masyarakat, dan memberikan sasaran tertentu yang sekaligus juga membatasi cakrawalanya. Disiplin mengatur dan memaksa. Disiplin menjawab segala sesuatu yang selalu terulang dan bertahan lama dalam hubungan antarmanusia. Dengan demikian moralitas memiliki fungsi bagi bertahannya suatu masyarakat. Moralitas sebenarnya perwujudan dari tujuan impersonal dan umum, yang tidak tergantung dari pribadi dan kepentingan pribadi. Inilah bentuk otonom dari moralitas.

### **5. John Dewey (1859-1952)**

John Dewey lahir pada 20 Oktober 1859 di Burlington Amerika Serikat. Dewey adalah seorang filsuf dan ahli pendidikan dari Amerika Serikat. Ia termasuk mazhab pragmatisme. Setelah menyelesaikan studinya di Baltimore, ia menjadi guru besar dalam bidang filsafat dan kemudian dalam bidang pendidikan pada beberapa universitas. Sepanjang kariernya, Dewey menghasilkan 40 buku dan lebih dari 700-an artikel.

Selain dikenal sebagai filsuf, Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan. Menurut Dewey, filsafat bertujuan untuk memperbaiki

kehidupan manusia serta lingkungannya atau mengatur kehidupan manusia serta aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. Sebagai pengikut pragmatisme, John Dewey menyatakan bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahannya bagi perbuatan nyata. Filsafat tidak boleh larut dalam pemikiran-pemikiran metafisis yang kurang praktis, tidak ada faedahnya. Dewey lebih suka menyebut sistemnya dengan istilah instrumentalisme. Pengalaman adalah salah satu kunci dalam filsafat materialisme.

Kontribusi pemikiran Dewey dalam bidang pendidikan sangat nampak pada pemikirannya mengenai kurikulum. Menurutnya, kurikulum dan anak didik merupakan dua hal yang berbeda, tetapi keduanya adalah proses tunggal dalam bidang pendidikan. Kurikulum merupakan suatu rekonstruksi berkelanjutan yang memaparkan pengalaman belajar anak didik melalui suatu susunan pengetahuan yang terorganisasi dengan baik yang biasanya disebut kurikulum.

Bukunya Dewey yang berjudul *The Child and Curriculum* yang ditulis pada tahun 1902, merupakan bukti nyata bahwa Dewey memiliki pemikiran dalam bidang pendidikan. Dalam buku ini menegaskan perhatian Dewey pada studi kurikulum dengan fokus kajian pada perkembangan anak. Menurut Dewey, kurikulum dapat diartikan keseluruhan pengalaman, yang tak terarah dan terarah, tertumpu kepada perkembangan individu atau latihan pengalaman langsung secara sadar digunakan oleh sekolah untuk melengkapi dan menyempurnakan kelebihanannya. Dewey menekankan kepada pemupukan perkembangan individu melalui segala pengalaman termasuk pengalaman yang dirancang oleh sekolah. Dewey mengaitkan relasi antara subyek pelajaran melalui kurikulum dengan kehidupan dan perkembangan anak. Fokus Dewey tentang kurikulum kepada pengalaman

anak dalam kehidupan sehari-hari di kelas maupun di sekolah (McNeil, 2009: 354). Gagasannya ini mendapatkan pengakuan internasional karena relevansinya dengan perkembangan beberapa sekolah progresif yang saat ini bermunculan. Ada tiga ranah pemikiran Dewey jika dapat ditelusuri dari berbagai pemikirannya yaitu: pragmatisme, pendidikan dan demokrasi. Tiga ranah pemikiran ini merupakan refleksi dari seluruh karya akademik Dewey semasa hidupnya.

Dalam bukunya *The Child and Curriculum*, Dewey menjelaskan bahwa pendidikan harus merespon perkembangan sosial dan kultural dunia anak. Pendidikan dan perkembangan anak adalah satu kesatuan yang terintegrasi. Perkembangan anak termasuk di dalamnya mengenai interaksi anak dengan sesama temannya. Pendidikan juga harus mengembangkan kesadaran anak melalui stimulasi dari orang-orang dewasa (Hidayat, 2013: 23)

#### 5. Max Weber (1864-1920)

Weber dilahirkan di Erfurk 1864 sebagai anak tertua dari delapan bersaudara. Ayahnya seorang otoriter, sedangkan ibunya adalah seorang soleh yang teraniaya. Oleh karena itu, terjadi cekcok hebat antara Weber dengan ayahnya, sehingga ia mengusir ayahnya. Sumbangan pemikiran Weber dalam sosiologi pendidikan dipandang tidak kalah pentingnya dengan Emile Durkheim, dan tentunya melebihi kontribusi Karl Marx.

Meskipun Weber adalah seorang sarjana huku, dan meniti karir akaedemiknya yang pertaam dibidang hukum, karir awalnya didominasi oleh minat pada sejarah. Ketika Weber lebih banyak bergerak di arah bidang sosiologi yang masih agak baru, dia berusaha memperjelas hubungan sosiologi dengan bidang sejarah yang sudah mapan, Meskipun Webwr marasa

bahwa masing-masing bidang itu saling membutuhkan, dia berpandangan bahwa sosiologi bertugas untuk memberikan “layanan” yang dibutuhkan oleh sejarah (G. Roth, 1976: 307).

a. Analisis ideal dan metode verstehen

Berkaitan dengan tindakan sosial, Weber berpendapat bahwa semua tindakan manusia diarahkan oleh makna-makna. Jadi untuk memahami dan menjelaskan tindakan, makna-makna dan mitif-motif yang ada dibalik tindakan tersebut harus digali dan diapresiasi. Max Weber (1978) menegaskan bahwa:

“Actions is rasonality evident chiefly when we attain a comi-  
etelity clear intellectual grasp of the action-elements in their  
intended context of meaning. The highest degree of rasonal  
understanding is attained in cases involving the meaning of  
logically or mathematially related propositins”.

Selanjutnya Weber menyatakan bahwa suatu tindakan rasional terjadi ketika seseorang sedang mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan melakukan seleksi pada cara-cara (means) yang dinilai tepat untuk mewujudkannya sesuai dengan situasi yang ada. Tindakan rasional merupakan metode mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan cara yang diperhitungkan lebih tepat.

Weber (1978) menandakan bahwa tindakan sosial, sebagaimana tindakan-tindakan manusia yang lain dibedakan oleh makna-makna atau motif-motif yang menjadi dasar atau orientasi tindakan tersebut. Ada empat tindakan sosial menurut kadar rasionalitas yang dikandungnya, yakni:

*Pertama*, tindakan rasionalitas instrumen (Zweckrasionalitat) adalah suatu tindakan yang meliputi pertimbangan dan pilihan yang sadar berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipergunakan untuk mencapai. Individu dilihat sebagai

memiliki macam-macam tujuan yang mungkin diinginkannya, dan atas dasar suatu kriterium menentukan suatu pilihan di antara tujuan-tujuan yang saling bersaing ini. Individu lalu menilai alat yang mungkin dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang dipilih tadi.

Dalam bukunya, *The Theory of Social and Economic Organization*, Weber (1947:11&) menyatakan:

“Tindakan diarahkan secara rasional ke suatu sistem dari tujuan-tujuan individu yang memiliki sifat-sifatnya (zweckrasional) apabila tujuan itu, alat dan akibat-akibat sekundernya diperhitungkan dan pertimbangan semuanya secara rasional. Hal ini mencakup pertimbangan rasional atas alat alternatif untuk mencapai tujuan itu dengan hasil-hasil yang mungkin dari penggunaan alat tertentu apa saja, dan akhirnya pertimbangan mengenai pentingnya tujuan-tujuan yang mungkin berbeda secara relatif”.

Tindakan sosial tipe ini, kata Weber dalam karyanya *Economic and Society* (1978):

“is determined by expectation as to the behavior of objects in the environment and other human being these expectations are used as “condition” or “means” for attainment of the actor’s own rationally and calculated ends”.

*Kedua*, tindakan rasional nilai (werktrational action) adalah suatu tindakan sosial yang berorientasi kepada suatu sistem nilai tertentu. Tindakan sosial semacam ini dilaksanakan tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu asas manfaat dan tujuannya. Yang diperhitungkan adalah cara atau proses sosial untuk mencapai tujuan itu. Contohnya upacara-upacara religio magis, termasuk upacara-upacara keagamaan.

Untuk tindakan sosial rasionalitas nilai, Weber (1978) menerangkan:

“is determined by a conscious belief in the value for its own sake of some ethical, aesthetic, religious, or other form of behavior independently of the prospect of success”.

*Ketiga*, tindakan tradisional. Tindakan ini merupakan tipe tindakan sosial yang bersifat nonrasional. Kalau seorang individu memperlihatkan perilaku karena kebiasaan, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan, perilaku seperti itu digolongkan sebagai tindakan tradisional. Individu itu akan membenarkan atau menjelaskan tindakan itu kalau diminta, dengan hanya mengatakan bahwa dia selalu bertindak dengan cara seperti itu atau perilaku seperti itu merupakan kebiasaan baginya, dilakukan karena kebiasaan yang melekat atau karena warga masyarakat selalu melakukan dengan cara-cara tertentu.

*Keempat*, tindakan afektif. Tipe tindakan ini ditandai dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan atau kegembiraan, dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu, tanpa refleksi, berarti sedang memperlihatkan tindakan afektif. Tindakan itu benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideologis atau kriteria rasionalitas lainnya.

## 6. Antonio Gramsci (1891-1937)

Antonio Gramsci mengkaji kaitan antara sosiologi pendidikan dan kondisi sosial dengan cara mengkaitkannya dengan konsep hegemoni. Gramsci dengan konsep hegemoninya yang mencerminkan Hegelianismenya itu telah mencoba menghubungkan antara pemikiran dan tindakan.

Gramsci yakin bahwa ada hubungan antara pemikiran dan tindakan. Pemikiran dan tindakan merupakan esensi filsafat yang paling modern. Ia mendefinisikan hegemoni sebagai kepemimpinan kultural yang dilaksanakan kelas penguasa (Muhyar Fanani, 2010: 40).

Apakah hubungan antara konsep hegemoni dengan sosiologi pendidikan. Pendidikan dilihat memiliki peran yang strategis dalam mengabsahkan hegemoni yang dominan. Ia mensosialisasikan kaum muda bukan hanya fakta-fakta dunia tetapi juga tentang sikap terhadap fakta ini. Kaum intelektual dapat memainkan peranan penting untuk mempertahankan *status quo* yang ada, termasuk hegemoni kebudayaan dominan. Namun sebaliknya juga kaum intelektual dapat pula membangun suatu budaya kebudayaan kontra hegemoni yang melaluinya kebudayaan dominan dapat dilawan (Damsar, 2011: 45).

#### 7. Talcott Parsons (1902-1979)

Parsons merupakan salah seorang tokoh utama yang mampu mempopulerkan pendekatan sistem dalam sosiologi kontemporer. Suatu sistem menurut Parsons, hanya bisa fungsional apabila semua persyaratan terpenuhi. Ada saja persyaratan fungsional yang dibutuhkan oleh suatu sistem, yaitu: *Adaptation* (adaptasi) (A), *Goal attainment* (pencapaian tujuan) (G), *Integration* (integrasi) (I), dan *Latent pattern maintenance* (pola pemeliharaan) (L).

Persyaratan fungsional adaptasi (A) merupakan suatu kebutuhan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapinya. Lingkungan dapat berupa sosial maupun nonsosial/fisik. Melalui adaptasi, sistem mampu menjamin apa yang dibutuhkan dari lingkungannya serta mendistribusikan sumber-sumber ini ke dalam seluruh sistem.

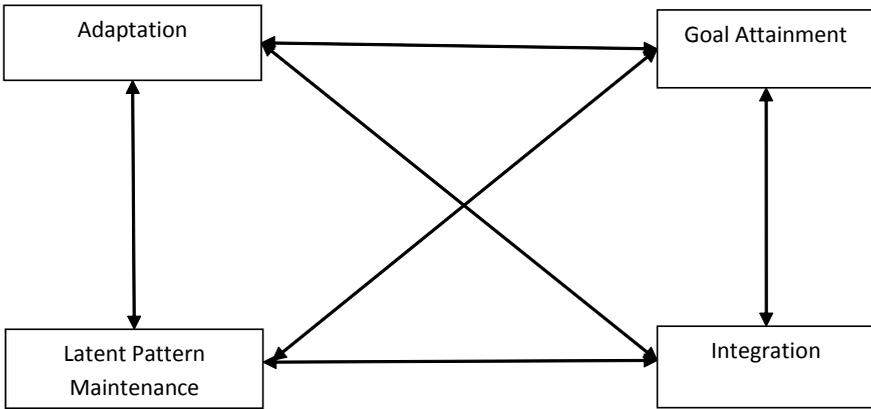
*Goal attainment* (pencapaian tujuan) (G) merupakan persyaratan fungsional yang menentukan tujuan dan skala prioritas dari tujuan yang ada. Setiap orang bertindak selalu diarahkan oleh suatu pencapaian tujuan. Namun perhatian utama bukan terfokus pada tujuan pribadi individu, melainkan diarahkan pada tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial.

Persyaratan fungsional Integrasi (I), adalah suatu kebutuhan sistem yang dapat mengkoordinasikan dan menciptakan kesesuaian antara bagian atau anggota dalam suatu sistem berperan sesuai dengan fungsinya dalam keseluruhan. Agar sistem sosial berfungsi efektif sebagai satu kesatuan, harus terdapat paling kurang suatu tingkat solidaritas di antara bagian atau individu yang termasuk di dalamnya. Masalah integrasi menunjuk pada kebutuhan untuk menjamin bahwa ikatan emosional yang cukup yang menghasilkan solidaritas dan kerelaan untuk bekerja sama dikembangkan dan dipertahankan. Ikatan emosional ini tidak boleh tergantung pada keuntungan yang diterima atau sumbangan yang diberikan untuk tercapainya tujuan individu atau kolektif. Jika tidak, solidaritas sosial dan kesediaan untuk kerja sama akan jauh lebih goyah sifatnya, karena hanya didasarkan pada kepentingan diri pribadi semata (Johnson, 1986: 130).

*Laten pattern maintenance* (pola pemeliharaan laten) (L) adalah persyaratan fungsional yang dibutuhkan sistem untuk menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma. Konsep laten menunjuk pada sesuatu yang tersembunyi atau tidak kelihatan. Kenapa perlu persyaratan fungsional itu? Apabila sistem sosial menghadapi kemungkinan terjadinya disintegrasi atau perpecahan, maka ada pola pemeliharaan yang tersembunyi yang dapat memelihara agar sistem tetap terintegrasi atau terpelihara.

Bagaimana hubungan antara-prasayarat fungsional tersebut? Hubungan antar-persyaratan fungsional bersifat saling pengaruhi-mempengaruhi secara timbal balik. Untuk lebih sederhananya lihat figur berikut ini.

**Figur:** Hubungan antar-prasyarat Fungsional



Sistem sosial, seperti halnya sistem yang lain, memiliki persyaratan fungsional AGIL. Dalam sistem sosial, kebutuhan fungsional AGIL, diemban beberapa subsistem seperti sistem ekonomi, *policy* (sistem politik), komunitas *societal*, dan *Fiduciari* (sistem sosialisasi). Ekonomi merupakan subsistem yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan pesyaratan fungsional adaptif adaptif (A) dalam suatu sistem sosial. Kegiatan produksi dalam subsistem ekonomi merupakan suatu usaha adaptif manusia agar dapat bertahan hidup (*survive*) dengan mengubah alam menjadi fasilitas yang dapat digunakan atau sesuatu yang sangat bermanfaat untuk bermacam tujuan individu dan kolektif, termasuk mencukupi kebutuhan dasar fisik biologis manusia sebagai organisme.

Sementara itu, dalam sistem sosial, *policy* (sistem politik) merupakan subsistem yang memikul tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan fungsional pencapaian tujuan (G).

Sistem politik, yang dilakoni oleh suatu pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), menentukan tujuan dan skala prioritas dari tujuan yang ada. Setiap unsur atau bagian dari sistem politik bertindak selalu diarahkan oleh suatu pencapaian tujuan. Tujuan individu, secara teoritis, berbeda dengan tujuan komunitas *societal*. Tujuan individual berkaitan dengan tujuan komunitas *societal*, manakala peran dimainkan seseorang berhubungan dengan perannya sebagai warga negara. Dalam sistem politik, partai politik dan kelompok kepentingan memiliki pengaruh terhadap penentuan tujuan masyarakat.

Adapun kebutuhan persyaratan fungsional integrasi dalam sistem sosial diemban oleh komunitas *societal*. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa integrasi menunjuk pada persyaratan untuk mengoordinasikan dan menciptakan kesesuaian antarbagian atau anggota-anggota dalam suatu sistem. Yang diperlihatkan oleh suatu tingkat solidaritas minimal sehingga bagian atau anggotanya akan bersedia untuk bekerja sama dan menghindari terjadinya konflik yang akan merusak. Dalam komunitas *societal*, Parsons menemukan bahwa sistem hukum, kontrol sosial, kebiasaan, dan norma antarpribadi serta agama sebagai suatu mekanisme utama yang berkaitan dengan masalah integrasi dalam sistem sosial.

Terakhir, prasyarat kebutuhan fungsional pemeliharaan pola laten dalam sistem sosial dipikulkan tanggungjawabnya kepada sistem *fiduciary* (sistem sosialisasi). Konsep *fiduciary* menunjuk pada peranan sebagai wali yang dilakukan oleh para pengemban tradisi kultural maupun mereka yang memindahkan tradisi ini pada anggota masyarakat. Dalam masyarakat minangkabau, misalnya peran *fiduciary* diemban oleh lembaga “tiga tungku sajaragan” yaitu ninik mamak (penghulu/datuk) alim ulama, dan cerdik pandai.

## 8. Piere-Bourdieu (1930-2002)

Pierre Bourdieu dilahirkan di kota kecil Selatan Prancis pada 1930. Sumbangan terbesar dari Bourdieu terhadap sosiologi pendidikan adalah idenya tentang kapital yang dihubungkan dengan pendidikan. Bourdieu melihat ada bahwa terdapat hubungan antara pendidikan dan kapital budaya dan simbolik. Kedua kapital ini direproduksi dan dilanjutkan melalui sekolah.

Bourdieu mendefinisikan kapital sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembaga serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal-balik, dengan kata lain, keanggotaan dalam kelompok sosial yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif (Damsar, 2011: 182).

Dalam karyanya Bourdieu, isu agensi-struktural diterjemahkan menjadi perhatian kepada hubungan antara habitus dan *field* (medan) (Eisenberg, 2007). *Habitus* adalah suatu struktur mental yang diinternalisasikan, atau suatu kognitif, melaluinya orang berhubungan dengan dunia sosial. *Habitus* memproduksi, dan diproduksi oleh masyarakat. *Medan* adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antara posisi-posisi obyektif. Struktur medan membantu membatasi agen, entah mereka individu atau kolektivitas. Secara keseluruhan, Bourdieu memperhatikan hubungan antara habitus dan medan. Medan mengondisikan habitus, habitus menyusun medan. Oleh karena itu ada hubungan dialektis antara habitus dan medan.

## 9. George S. Counts (1875-1952)

George S. Counts lahir di Baldwin City, Kansas Amerika Serikat pada tahun 9 Desember 1889. Ia dikenal sebagai

sosiolog, aktivitas politik dan aktivis pendidikan kritis. Counts menjadi akademisi kritis sejak berafiliasi dengan *the School of Social Reconstructionism in Education*. Dalam berbagai tulisannya, George S. Counts banyak memberikan inspirasi kepada guru untuk menempatkan sekolah sebagai alat kritik dan transformasi keteraturan sosial. Dalam bukunya *Dare the School Build a New Social Order?*, ia menjelaskan tentang relevansi sekolah dan masyarakat serta relevansinya dengan dilemma kontemporer pendidikan. Dalam bukunya yang lain *American Road to Culture*, ia menjelaskan lebih jauh sebuah perspektif global tentang pendidikan, ia menjelaskan bahwa ide-ide besar dalam pendidikan di Amerika Serikat seperti kisah individu sukses, solidaritas nasional dan filosofi ketidakpastian (*philosophic uncertainty*)

Counts melihat bahwa dalam sosiologi terdapat ruang dan kesempatan untuk meredesain bentuk sekolah dengan mempertimbangkan dampak kekuatan sosial dan variasi kepentingan sosial politik dalam praktik pendidikan. Berkaitan dengan kurikulum, Counts menjelaskan dalam bukunya *Basic Principles of Curriculum and Instruction 1949*), bahwa dalam mengevaluasi instruksi pengajaran, setidaknya ada empat bagian penting, yaitu: *pertama*, apa tujuan pendidikan yang harus dicapai sekolah? (menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai), *kedua*, bagaimana pengalaman belajar dipilih yang mungkin berguna dalam mencapai tujuan tersebut? (memperkenalkan pengalaman belajar yang bermanfaat). *Ketiga*, bagaimana pengalaman belajar diorganisasi untuk mencapai instruksi yang efektif (mengorganisasi pengalaman untuk mengurangi efek mereka). *Keempat*, bagaimana efektivitas pengalaman belajar dievaluasi? (evaluasi proses dan revisi bagian-bagian yang tidak efektif).



# BAB III

## PENDIDIKAN

### DAN MASYARAKAT

#### A. Pengertian Pendidikan.

Di kalangan para ahli, pendidikan didefinisikan secara berbeda. Hal ini terjadi karena istilah pendidikan adalah konsep yang sangat terbuka sehingga tidak mungkin mengedepankan pengertian tunggal. Adanya banyak ahli yang memberikan definisi tentang pengertian pendidikan. Menurut John Dewey, pendidikan didefinisikan sebagai suatu proses pembaharuan makna pengalaman, hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan anak muda, mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan social. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok di mana dia hidup (Yunus, 1999:7). Sedangkan menurut Horne pendidikan diartikan sebagai proses yang terus menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia.

Sedangkan menurut M, J Lngeveld pendidikan adalah setiap pergaulan yang terjadi antara orang dewasa dengan anak-

anak merupakan lapngan atau suatu keadaan di mana pekerjaan mendidik itu berlangsung (Yunus, 1999:9). Herman h. Honner (dalam Jalaludin, 2010: 63), menyatakan bahwa pendidikan adalah proses penyesuaian, yang secara fisik dan mental berkembang, bebas dan sadar terhadap Tuhan seperti yang diwujudkan dalam pikiran dan perasaan, dan diwujudkan dalam lingkungan manusia baik intelektual maupun emosional.

Pendidikan adalah sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju *taklif* (kedewasaan), baik secara akal, mental maupun moral, untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai seorang hamba, dihadapan Khaliqnya dan sebagai “pemelihara” (khalifah) pada semesta (Tafsir, 1994:56). Dari definisi ini, jelas bahwa fungsi pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik dengan kemampuan dan keahlian (*skill*) yang diperlukan agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk terjun ke tengah masyarakat.

Berdasarkan pengertian pendidikan di atas, John Milton menyatakan, bahwa pendidikan yang sempurna dan lengkap ialah pendidikan yang membekali manusia untuk melaksanakan dengan tepat, terampil dan murah hati, baik untuk pribadi maupun untuk umum, baik di masa sekarang maupun masa depan.

## **B. Konsep Masyarakat**

### **1. Pengertian Masyarakat.**

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu “*syaraka*” yang berarti ikut serta (berserikat), berpartisipasi. Sedangkan kata “*musyaraka*” berarti saling bergaul. Di dalam bahasa Inggris dipakai istilah “*society*” yang sebelumnya berasal dari kata latin “*socius*”, berarti “kawan” (Koentjoroningrat, 1980). Dalam buku yang ditulis oleh Abdul Syani (1997) yang berjudul,

*Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*, dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata *musyawarah* (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia).

Dalam bahasa Inggris, kata masyarakat diterjemahkan menjadi dua pengertian, yaitu *society* dan *community*. Berkaitan dengan istilah *Community* Arthur Hilin menjelaskan bahwa: “A definition of community must be inclusive enough to take account, of the variety of both physical and social forms which community take”

Ciri dari *community* ditekankan pada kehidupan bersama dengan bersandar pada lokalitas dan derajat hubungan sosial atau atau sentimen. *Community* ini oleh Hassan Shadily (1983) disebut sebagai peguyung yang memperlihatkan rasa sentiment yang sama seperti terdapat dalam *Gemennshaft*. Anggota-anggotanya mencari kepuasan berdasarkan adat kebiasaan dan sentimen (faktor primer), kemudian diikuti atau diperkuat oleh lokalitas (factor sekunder).

Lebih jauh berkaitan dengan masyarakat, Abdul Syani (1987), menjelaskan bahwa masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, memandang *community* sebagai unsur statis, yang *community* terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dan kesatuan-kesatuan masyarakatsehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubun sosial. Di samping itu, dilengkapi pula oleh adanya perasaan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbul atas akibat dan

adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia. *Kedua, community* dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses-(nya) yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antarmanusia, maka di dalamnya ada yang sifatnya fungsional. Dalam hal ini dapat diambil contoh tentang masyarakat pegawai negeri sipil, masyarakat ekonomi, masyarakat, mahasiswa, dan sebagainya.

Dari kedua ciri khusus yang dikemukakan di atas, berarti dapat diduga bahwa apabila suatu masyarakat tidak memenuhi ciri-ciri tersebut, maka ia dapat disebut masyarakat dalam arti *society*. Masyarakat dalam pengertian *society* terdapat interaksi sosial, perhitungan-perhitungan rasional dan *like interest*, hubungan-hubungan menjadi bersifat pamrih dan ekonomis (Syani, 2002).

Dalam rangka mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang masyarakat, berikut ini dijelaskan berbagai pendapat para ahli tentang masyarakat.

Menurut Ralph Linton (1936) mengemukakan, bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama dan bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Pengertian ini menunjukkan adanya syarat-syarat sehingga disebut masyarakat, yakni adanya pengalaman hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama dan adanya kerja sama di antara anggota kelompok, memiliki pikiran atau perasaan menjadi bagian dan satu kesatuan kelompoknya. Pengalaman hidup bersama menimbulkan kerja sama, adaptasi terhadap organisasi dan pola tingkah laku anggota-anggota. Faktor waktu memegang peranan penting, sebab setelah hidup bersama dalam waktu cukup lama, maka terjadi proses adaptasi terhadap organisasi tingkah laku serta kesadaran berkelompok.

Sedangkan menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin lebih sering disingkat Gillin dan Gillin (1954) mengatakan, bahwa masyarakat itu adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil. Pengertian yang dikemukakan oleh Gillin dan Gillin menunjukkan bahwa masyarakat itu meliputi kelompok manusia yang kecil sampai dengan kelompok manusia dalam suatu masyarakat yang sangat besar, seperti suatu negara. Seperti diketahui, suatu negara juga memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama dan keteraturan.

Sementara itu, menurut Steinmetz, seorang ahli sosiologi Belanda memberibatasan tentang masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar yang meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. Pengertian ini juga menunjukkan bahwa suatu masyarakat mencakup kelompok manusia yang kecil sampai dengan yang sangat besar, termasuk Negara. Sedangkan menurut Melville J. Herskovits atau akrab dipanggil Herkovits (1955) mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Pengertian ini menekankan adanya ikatan anggota kelompok untuk mengikuti cara-cara hidup tertentu yang ada di dalam kelompok masyarakat.

Auguste Comte (1896) bapak sosiologi mengemukakan pengertian tentang masyarakat, bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan relitas-realitas baru yang berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan besar

atau kecil dan beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.

Koentjaraningrat (1980: 160) seorang antropolog Indoensia merumuskan definisi masyarakat sebagai berikut: masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Hampir senada dengan definisi yang diberikan Koentjaraningrat, Selo Soemardjan seorang sosiolog mengatakan, bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

## 2. Ciri-Ciri Masyarakat

Menurut Durkheim, masyarakat bukanlah hanya sekedar suatu penjumlahan individu semata, melainkan suatu sistem yang dibentuk dan hubungan antar mereka (anggota masyarakat), sehingga menampilkan suatu realita tertentu yang mempunyai ciri-cirinya sendiri. Soerjono Soekanto (1986) menyatakan, bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu sebagai berikut.

- a. *Manusia yang hidup bersama.* Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoretis, angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama.
- b. *Bercampur untuk waktu yang cukup lama.* Kumpulan dan manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati, seperti kursi, meja, dan sebagainya, karena berkumpulnya manusia akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti;

mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia dalam kelompok tersebut.

- c. *Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.*
- d. *Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.* Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Ciri-ciri masyarakat di atas selaras dengan definisi masyarakat yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil yang mempunyai hubungan yang erat satu sama lain.

Menurut Abdul Syani (2003) menyebutkan, masyarakat ditandai oleh ciri-ciri: a). adanya interaksi; b). ikatan pola tingkah laku yang khas di dalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu; c). adanya rasa identitas terhadap kelompok, di mana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompoknya.

Sedangkan Marion Lievy mengemukakan empat ciri untuk dapat disebut masyarakat, yaitu: a). kemampuan bertahan melebihi masa hidup seorang individu; b). rekrutmen seluruh atau sebagian anggota melalui reproduksi; c). kesetiaan pada suatu sistem tindakan utama bersama; d). adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada.

Menurut Talcott Parsons (1968) merumuskan kriteria bagi adanya masyarakat sebagai berikut:

- 1). suatu sistem sosial yang swasembada (*selfsubsistent*); melebihi masa hidup individu normal;
- 2). merekrut anggota secara reproduksi biologis;
- 3). melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya.

Berdasarkan ciri-ciri masyarakat yang diberikan oleh para ahli di atas, maka dapat dinyatakan bahwa masyarakat bukannya hanya sekadar sekumpulan manusia belaka, tetapi di antara mereka yang berkumpul itu harus ditandai dengan adanya hubungan atau pertalian satu sama lainnya. Paling tidak, setiap individu sebagai anggotanya (masyarakat) mempunyai kesadaran akan keberadaan individu yang lainnya. Hal ini berarti, setiap orang mempunyai perhatian terhadap orang lain dalam setiap kegiatannya. Jika kebiasaan itu kemudian menjadi adat, tradisi atau telah melembaga, maka sistem pergaulan hidup di dalamnya dapat dikatakan sebagai pertalian primer yang saling pengaruh-mempengaruhi.

Menurut Syani (2002), ada beberapa unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama; di dalamnya manusia dapat saling mengerti dan merasa serta mempunyai harapan-harapan sebagai akibat dan hidup bersama itu. Terdapat sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia dalam masyarakat tersebut.
2. Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu kesatuan.
3. Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu sistem hidup bersama, yaitu hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan, oleh karenanya setiap anggota masyarakat merasa dirinya masing-masing terikat dengan kelompoknya.

Menurut Mac Iver (dalam Harsodjo, 1972), bahwa di dalam masyarakat terdapat suatu sistem cara kerja dan prosedur dan otoritas dan saling bantu membantu, yang meliputi:

(a). Kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain, serta

Ciri universal dari manusia adalah hidup dalam kelompok. Manusia lahir dalam kelompok, dan melalui kehidupan bersama ini manusia belajar dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan sebagainya. Dalam kelompok pula manusia mempelajari peralatan dan berbagai proses kehidupan, serta menerima agama dan pandangan hidup.

(b). Sistem dan pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan.

Masyarakat adalah suatu sistem atau totalitas, yang didalamnya terdapat berbagai subsistem yang berjenjang secara struktural, mulai dari subsistem kepercayaan, subsistem nilai atau norma-norma, subsistem kebutuhan, dan subsistem permintaan. Sub-sistem kepercayaan menjadi dasar munculnya subsistem nilai, yang kemudian mendasari subsistem kebutuhan, dan selanjutnya mendasari subsistem permintaan. Pemenuhan atas suatu subsistem akan memengaruhi atau mengubah subsistem berikutnya, demikian seterusnya.

### C. Hubungan Pendidikan dan Masyarakat.

Dalam mengembangkan kehidupannya, setiap masyarakat membutuhkan pendidikan. Melalui pendidikan suatu masyarakat dapat mengembangkan segala potensi para generasi muda. Menurut Nurkolis, setidaknya ada lima fungsi pendidikan dalam untuk memenuhi kebutuhan peradaban manusia, yaitu; *pertama*, pendidikan sebagai alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi; *kedua*, pendidikan berfungsi sebagai investasi memberikan nilai balik

(*rate of return*) yang lebih tinggi daripada investasi fisik di bidang lainnya. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiaya pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memiliki dunia kerja; *ketiga*, fungsi politis merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkat sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individu, pendidikan membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warganegara yang benar dan bertanggung jawab. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mengerti hak dan kewajibannya sehingga wawasan dan perilakunya semakin demokratis; *keempat*, fungsi budaya yang merujuk pada sumbangan pendidikan pada peralihan dan perkembangan budaya pada tingkatan social yang berbeda. Pada tingkat individual, pendidikan membantu peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya, kesadaran estetis serta untuk bersosialisasi dengan norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan social yang baik. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mampu menghargai atau menghormati perbedaan dan pluralitas budaya sehingga memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap keanekaragaman budaya; dan *kelima*, fungsi kependidikan merujuk kepada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan dan pemeliharaan pendidikan membantu peserta didik belajar cara belajar dan membantu pendidik cara mengajar (Legowo, Implementasi Dsentralisasi Pendidikan dan Tantagannya, University Mataram Press, 2006: 123).

Searah dengan fungsi pendidikan di atas, secara khusus pendidikan dalam suatu masyarakat memiliki fungsi penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat. Setidaknya ada tiga fungsi pendidikan, yaitu: (1) pendidikan sebagai sarana penanaman nilai kepada peserta didik, (2) pendidikan berfungsi

sebagai sarana transmisi budaya Islami dari satu generasi ke generasi berikutnya, (3) pendidikan memainkan peranan utama di dalam membimbing seseorang memiliki berbagai posisi dalam masyarakat, (4) pendidikan berfungsi untuk mendorong terjadinya perubahan sosial suatu masyarakat (Baharudin, 2008: 134).

Selain itu, pendidikan bagi masyarakat mempunyai tugas utama mendidik dan meneruskan ilmu pengetahuan yang telah dihimpunnya, serta memberi gelar berdasarkan penilaian lembaga terhadap kemampuan anak didiknya berdasarkan kriteria tertentu.

Melalui pendidikan pula seseorang dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan juga dapat menaikkan status sosialnya. Melalui label gelar yang diperoleh seorang alumnus sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam misalnya, akan mampu menaikkan status sosialnya sesuai dengan penilaian masyarakat luas terhadap hasil almamaternya serta harapan-harapan yang dimilikinya terhadap alumninya. Karena itulah negara-negara berkembang menghadapi suatu gerakan arus menuju ke lembaga pendidikan tinggi, sungguhpun pendidikan tinggi merupakan sesuatu yang mahal dan meminta banyak pengorbanan, yaitu pengorbanan uang, waktu dan energi. Dalam memberi maupun menerima pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu sering terlupakan, bahwa tujuan utama dari lembaga pendidikan adalah membentuk kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah manusia dan mendorong manusia membentuk suatu dunia yang lebih baik baginya berdasarkan pada nilai-nilai Islam.

Sebagian sosiolog mengungkapkan bahwa terdapat relasi resiprokal (timbal-balik) antara dunia pendidikan dengan kondisi sosial masyarakat. Relasi ini bermakna bahwa apa yang berlangsung dalam dunia pendidikan merupakan gambaran

dari kondisi yang sesungguhnya di dalam kehidupan masyarakat yang kompleks. Demikian juga sebaliknya, kondisi masyarakat, baik dalam aspek dalam aspek ekonomi, politik dan berbagai kemajuan lainnya, tercermin dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, majunya dunia pendidikan dapat dijadikan cermin majunya suatu masyarakat, dan dunia pendidikan yang amburadul merupakan cerminan dari kondisi masyarakat yang juga amburadul.

Relasi resiprokal antara pendidikan dengan masyarakat tidak selalu berbanding lurus. Bahkan seringkali relasi timbal-balik tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Representasi dunia pendidikan tidak bisa digeneralisasi secara total untuk mewakili kondisi masyarakat. Demikian sebaliknya, implikasinya, muncul kesenjangan relasi di antara keduanya. Kesenjangan ini merupakan realitas yang menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Sebab, masyarakat telah berkembang dalam eskalasi dan progresivitas yang tinggi, sementara dunia pendidikan sendiri masih tetap sibuk dengan beragam persoalan yang tidak mudah untuk diurai.

Sekarang ini, dunia pendidikan sedang berhadapan dengan berbagai persoalan yang kompleks. Rendahnya penyerapan lulusan pendidikan dalam dunia kerja, minimnya kreativitas manusia produk pendidikan, kenakalan remaja, serta menurunnya kualitas pendidikan, merupakan segelintir dari persoalan yang dihapai oleh dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Munculnya berbagai konflik sosial yang diikuti dengan tindak kekerasan yang terjadi diberbagai daerah, merupakan persoalan tersendiri bagi dunia pendidikan. Semua ini merupakan bukti yang menunjukkan adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dengan masyarakat.

Di sisi lain, melalui pendidikan pula masyarakat dapat melakukan berbagai transformasi sosial, seperti transformasi

ilmu pengetahuan, budaya, nilai dan norma, serta melalui pendidikan pula dapat mengembangkan berbagai potensi para generasi mudanya. Proses transformasi sosial ini, berlangsung secara dinamis, sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Dalam konteks seperti ini pendidikan dapat diartikan sebagai proses sosialisasi, yaitu sosialisasi nilai, pengetahuan, sikap, dan keterampilan antara generasi.

Pengembangan pendidikan pada suatu masyarakat atau negara sangat dipengaruhi oleh ideology yang dianutnya. Di Amerika misalnya, sebagai negara kapitalis, maka pengembangan pendidikan pada masyarakat Amerika diorientasikan untuk mempersiapkan generasi dalam rangka untuk mengembangkan kapitalis. Menurut Bowless perkembangan pendidikan pada masyarakat Amerika merupakan akibat dari kapitalisme tingkat lanjutan yang membutuhkan pembgaaian kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat kapitalis

Lebih jauh Bowless mengungkapkan bahwa kapitalisme dipandang mengorganisasi pendidikan secara missal sesuai dengan kepentingan kelas kapitalis, antara lain yaitu. Pertama, pendidikan masyarakat dapat menyediakan tenaga kerja (*labour*) yang murah dengan kemampuan kognetif dan skill yang diperlukan untuk berjalannya industry kapitalis. Kedua, pendidikan dapat menyediakan tenaga kerja yang telah menerima nilai-nilai dan perilaku yang kondusif untuk membangun tenaga produktif. Anak-anak dapat diberi pelajaran tepat waktu, disiplin, perbedaan wewenang, dan menerima tanggung jawab dalam pelajaran. Hubungan social antara lembaga pendidikan, pendidik, dan masyarakat misalnya, dapat dikembangkan ke dalam hubungan, lapangan kerja yang dapat mendorong transmisi dari keluarga ke dalam lingkungan dunia kerja.

Ketiga, lembaga pendidikan juga dapat mengajarkan kesetiaan kepada negara dan kebutuhan kepada hukum. Kesetiaan itu dapat ditanamkan kepada peserta didik dengan menyakinkan bahwa system yang ada merupakan system yang menguntungkan dan adil. Lembaga pendidikan kemudian dapat menyediakan tenaga kerja siap, memiliki kemauan dan kemampuan kepada ekonomi kapitalis

Berbeda dengan kaum kapitalis di Amerika, Ivan Illich, salah sorang tokoh radikal humanis yang berusaha melihat posisi dan peran pendidikan dalam masyarakat. Dalam bukunya "*Deschooling Society*", Ivan Illich (1982), menyatakan bahwa sekolah formal yang memasung kebebasan dan perkembangan manusia. sekolah dianggapnya sama sekali tidak memadai bagi perkembangan anak-anak dan kaum muda. Ivin Illich sangat yakin bahwa tujuan pendidikan sekolah dalam masyarakat akan menjadikan siswa dapat memperoleh kebebasan dalam belajar tanpa harus memperjuangkan untuk memperolehnya dari masyarakat. Setiap orang harus dijamin kepribadiannya dalam belajar, dengan harapan dia akan menerima kewajiban membantu orang lain untuk tumbuh sesuai dengan kepribadiannya.

Berkaitan dengan tujuan pendidikan dalam masyarakat, Ivan Illich berpendapat bahwa suatu system pendidikan yang baik harus mempunyai tiga tujuan, yaitu: 1) memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bebas dan mudah memperoleh sumber belajar pada setiap saat, 2) memungkinkan semua orang yang begitu memberikan pengetahuan mereka kepada orang lain dapat dengan mudah melakukannya, demikian pula bagi yang ingin mendapatkannya, dan 3) menjamin tersedianya masukan umum yang berkenaan dengan pendidikan (Soyomukti, 2010: 477).

Dalam pandangan Ivan Illich, pendidikan dalam masyarakat seharusnya tidak diformalkan, sehingga setiap orang memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk mengakses pendidikan dimana dan kapanpun.

Seara sosiologis dapat dinyatakan bahwa pendidikan dalam suatu masyarakat sangat ditentukan oleh perkembangan masyarakat itu sendiri, yang tentu saja ditentukan oleh kondisi material ekonomi yang berkembang. Dalam teori Marxis dinyatakan bahwa pentingnya melihat posisi pendidikan sebagai cerminan proses dan struktur masyarakat. Marx menempatkan pendidikan pada wilayah struktur atas (superstruktur) yang disangga (ditentukan) oleh ekonomi (hubungan produksi dan alat-alat produksi) sebagai struktur bawah yang merupakan suatu fondasi perkembangan masyarakat. Karena itu, pendidikan juga merupakan proses tempat filsafat, ideology, agama, dan seni diajarkan. Pendidikan adalah media sosialisasi pandangan hidup dan kecakapan yang harus diterima pada masyarakat.

Sementara itu, dalam pandangan para tokoh pendidikan bahwa pendidikan dimaksud sebagai sarana dan wahana masyarakat di dalam mendekatkan manusia dengan Khaliq. Dalam konteks seperti ini pendidikan merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju *taklif* (kedewasaan), baik secara akal, mental maupun moral, untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai seorang hamba, dihadapan Khaliqnya dan sebagai “pemelihara” (khalifah) pada semesta (Tafsir, 1994:56). Dengan demikian, jelas bahwa fungsi pendidikan adalah memepersiapkan peserta didik dengan kemampuan dan keahlian (*skill*) yang diperlukan agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk terjun ke tengah masyarakat.[]



# BAB IV

## SOSIOLOGI

### KURIKULUM PENDIDIKAN

#### A. Pendahuluan.

Istilah kurikulum sudah dikenal sejak 1820 (Karhami, 2000: 281). Sejarah keberadaan kurikulum dapat dilacak saat Plato menyusun aritmatika sebagai ringkasan belajar yang di dalamnya mencakup geometri, astronomi. Solid geometri. Semua itu berkaitan dengan pelajaran matematika (Alkin, 1992: 277). Meski Plato mengintrodusir, namun sejarah kurikulum mulai masuk ke sekolah dapat ditelusuri pada abad ke-16. Hamilton dalam tulisnya, menjelaskan bahwa tatanan alam/ bumi saat itu termasuk ilmu-ilmu alam sangat berpengaruh terhadap terciptanya kurikulum saat itu. Plato menyebutnya dengan unsur *nature knowledge*. Dua faktor yang cukup penting dalam periode tersebut adalah *renaissans* dan revolusi sains. Selain itu, Hamilton juga megatakan bahwa peran Descartes sangat besar dalam mengkonstruksi kurikulum. Alkin (1992) mengatakan: “*the spesializtation and modern views that the natural order of the curriculum is not to be found in knowledg but in the biological and psycological make up the learner.*”

Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu *currere* yang berarti *to run* (penyelenggaraan). Atau *to run the course* (penyelenggaraan suatu pengejaran). Bestor A ( 1958) dan

Phenik, PH (1962) mendefinisikan kurikulum sebagai: *the curriculum must consist essentially of disciplined study in five great areas: local language, mathematics, science, history, foreign language* (Levey, 1993).

Dalam undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar (Pasal 1) yang disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memerhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenia, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan (Pasal 37). (lihat Rahmat Hidayat, 2003:2)

Dalam perjalanan pendidikan di Indonesia, kurikulum menjadi salah satu permasalahan pendidikan. Hal ini mengingat bahwa kurikulum menempati posisi sentral di dalam keseluruhan proses pendidikan. Kurikulum merupakan suatu yang sangat strategis untuk mengendalikan jalannya proses pendidikan. Posisi sentral kurikulum dalam proses pendidikan dapat dilihat dari posisi kurikulum dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Dalam posisi ini kurikulum dapat disebut sebagai: “kontrak kerja” untuk transaksi pendidikan yang berlangsung di ruang kelas. Oleh sebab itu, kurikulum harus dirancang untuk mencapai tujuan. Dalam merancang kurikulum pendidikan setidaknya ada tiga hal yang harus ditempuh, yaitu: *pertama*, mempelajari aneka implikasi dari berbagai keinginan masyarakat untuk merevisi kurikulum sekaligus pembaharuan pendidikan, *kedua*, mempelajari aneka kelemahan yang terkandung dalam kurikulum sekarang yang dipandang ikut melahirkan berbagai kekurangan dan kelemahan bangsa.

*Ketiga*, mempelajari berbagai keharusan yang dapat dihindari dalam menyusun kurikulum. (Widistono, 2006: xxiii).

## B. Sosiologi Kurikulum Pendidikan.

### 1. Pengertian Sosiologi Kurikulum Pendidikan

Kata “Kurikulum” berasal dari bahasa Yunani yang semula digunakan dalam bidang olah raga, yaitu *currere* yang berarti jarak tempuh lari, yakni jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari dari *start* sampai *finish*. Pengertian ini kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan.

Pengertian kurikulum oleh para ahli diberikan pengertian secara bervariasi, ada yang menekankan pada isi pelajaran., ada pula yang menekankan pada proses atau pengalaman belajar. Menurut Saylor dan Alexander (1966) menyatakan bahwa kurikulum adalah segala usaha sekolah yang bisa menghasilkan atau menimbulkan hasil-hasil belajar yang dikehendaki, apakah di dalam situasi-situasi sekolah maupun di luar sekolah. Sedangkan Oliva (1988) mendefinisikan kurikulum sebagai rencana atau program yang menyangkut semua pengalaman yang dihayati peserta didik di bawah pengarahan sekolah.

Menurut Harold B Alberty dan Elise J Alberty (1965: 155) bahwa kurikulum adalah *all of the activities tha are provided for students by the school...* (semua aktivitas yang disediakan untuk siswa oleh sekolah...) Tyler sebagaimana dikutip oleh Daniel Tanner dan Laurel N Tannar (1980: 16), menjelaskan bahwa kurikulum adalah *“all of the learning of students which is planned by and directed by the school to attain its education goals”*. (semua kegiatan pembelajaran siswa yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan (Hasibuan, 2010: 7).

Sementara yang dimaksudkan dengan pendidikan, dikalangan pemikir pendidikan didefinisikan secara berbeda. Menurut Muhamad Naquib al-Attas (1984), pendidikan adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan dalam diri manusia tentang segala sesuatu di dalam tatanan wujud sehingga dapat membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat-tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud tersebut. Dalam definisi Al-Attas ini menempatkan Tuhan sebagai bagian paling penting dalam pendidikan. Oleh sebab itu menurut Al-Attas, tujuan pendidikan yang paling penting adalah mengetahui tempat Tuhan dalam tatanan wujud ini (Achmadi, 2008: 24). Sedangkan menurut Ahmad Tafsir (1987), pendidikan didefinisikan sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain agar ia berkembang secara maksimal dengan materi ajaran Islam atau bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi muslim semaksimal mungkin.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat dinyatakan bahwa sosiologi kurikulum pendidikan adalah studi yang membahas relasi politik kurikulum pendidikan di masyarakat secara luas, yang di dalamnya membahas tentang bagaimana terjadinya dominasi oleh kelompok dan ideologi dominan terhadap kelompok yang secara sosial lebih lemah, dengan mengaitkan dengan pendidikan.

Sosiologi kurikulum pada dasarnya tidak menempatkan kurikulum sebagai sebuah ruang yang hampa, melainkan kurikulum dipahami sebagai gejala sosial yang dinamis, kontradiktif dan *contested*. Asumsi dasar ini sama dengan berbagai gejala sosial lainnya seperti agama, industri, demokrasi, kesehatan, pembangunan, gender, olah raga, hak asasi manusia dan sebagainya. Karena menggunakan perspektif sosiologis, tentu saja pendekatannya berbeda dengan studi kurikulum

pada umumnya. Studi kurikulum sendiri pada awalnya menjadi rujukan utama perintis sosiologi kurikulum. Sosiologi kurikulum tidak lagi mengkaji kurikulum secara paraktis yang membahas bagaimana implementasi kurikulum di kelas. Meski demikian, sosiologi kurikulum tetap menempatkan kelas dan sekolah sebagai setting penting beroperasinya praktik kurikulum tersebut. Rakhmat Hidayat, Sosiologi kurikulum, 2013: 66).

## 2. Pokok Bahasan Sosiologi Kurikulum

Di awal lahirnya studi kurikulum, pada tahun 1920 memang sudah disadari bahwa studi kurikulum akan melahirkan pendekatan holistik, transdisipliner yang memerhatikan keterkaitan berbagai disiplin ilmu. Ada perbedaan mendasar sosiologi kurikulum dengan pendekatan studi kurikulum, yaitu studi kurikulum berkecenderungan membahas berbagai tejenis dan praktis kurikulum di sekolah atau madrasah, dan khususnya kelas yaitu membahas tentang desain, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Dalam pembahasan studi kurikulum juga terdapat beberapa isu penting lain yang tertuang dalam beberapa pertanyaan seperti apa manfaat mempelajari kurikulum? kenapa kurikulum harus dipelajari? Bagaimana kurikulum dapat dipraktikkan di sekolah? Apa yang bisa dijelaskan kurikulum tentang relasi teori dan praktik pendidikan serta relasi program sekolah dan struktur masyarakat di mana sekolah itu berada. Itulah beberapa isu penting yang dipelajari studi kurikulum di beberapa perguruan tinggi yang membahas tentang kurikulum.

Sementara itu, sosiologi kurikulum berbeda dengan studi kurikulum, baik dalam analisisnya maupun relasi dan kontestasi aktor-aktor yang terlibat dalam kurikulum. Sosiologi kurikulum dalam analisisnya bergerak lebih jauh untuk menjelaskan seluruh dinamika maupun kontradiksi dalam

produksi pengetahuan hingga praktiknya di sekolah. Selain itu, sosiologi kurikulum juga menjelaskan mengenai relasi dan kontestasi aktor-aktor yang terlibat dalam kurikulum tersebut. Aktor tersebut antara lain guru (pendidik), peserta didik, sekolah, maupun masyarakat. Semua aktor ini berkepentingan untuk terlibat dalam mekanisme kurikulum tersebut. Hal lain yang perlu dijelaskan juga, studi kurikulum dalam analisisnya cenderung lebih menggunakan pendekatan makro. Hal tersebut dapat dilihat dari peran dan kekuasaan negara maupun ideologi kelompok dominan. Secara umum dapat dijelaskan beberapa pokok bahasan sosiologi kurikulum, yaitu:

a. Kekuasaan

Permasalahan kekuasaan merupakan tema sentral dalam sosiologi kurikulum. Jika ditelusuri secara kritis di semua referensi yang membahas tentang sosiologi kurikulum pasti selalu membicarakan kekuasaan. Pokok bahasan ini seolah menjadi satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan dalam praktik kurikulum di sekolah. Negara atau kelompok dominan sangat berkepentingan dengan mekanisme kurikulum tersebut untuk mempertahankan sekaligus mereproduksi alat kekuasaan maupun kepentingan ideologinya. Kurikulum dalam pandangan kelompok dominan dipandang sebagai *soft mechanism* yang paling ampuh dan strategis. Mekanisme berlangsung secara masif, kontinue dan menjadi sesuatu yang *given*. Hal ini terus dipertahankan sepanjang sekolah tersebut ada. Beberapa pemikiran yang konsen dengan pokok bahasan ini antara lain John Franklin Bobbitt, John Dewey, W.W Charters, George S. Counts, Ralph W. Tyler, Hilda Taba, dan William F. Pinar.

John Franklin Bobbitt adalah profesor pendidikan di University of Chicago sejak tahun 1941. Dalam bukunya yang berjudul *The Curriculum* (1918), John Franklin Bobbitt mendefinisikan kurikulum sebagai sebuah ide. Definisi ini

berakar pada kata Latin *race-course*. Secara lengkap John Franklin Bobbitt mendefinisikan kurikulum sebagai program dan pengalaman di mana anak-anak harus menjadi dewasa dan sebagai persiapan kesuksesan hidupnya di kehidupan masyarakat kelak.

Menurut John Franklin Bobbitt kurikulum terdiri dari pengalaman guru yang disampaikan kepada para muridnya di dalam kelas agar memungkinkan murid-muridnya untuk mendapatkan pengalaman terbaik gurunya tersebut. Secara umum tujuan kurikulum menurut John Franklin Bobbitt berdasarkan pengalaman gurudnamuridadalah mempersiapkan murid memiliki tanggung jawab untuk memiliki peran sebagai orang dewasa yang akan berguna di kehidupan berikutnya. Melalui kurikulum, Bobbitt percaya bahwa pendidikan akan memberikan para murid kesadaran yang diperlukan untuk hidup dalam kelompok besar berdasarkan nilai dan norma kolektif. Dalam analisisnya, Bobbitt sangat yakin bahwa kurikulum dapat mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi berbagai bentuk kekuasaan, termasuk menghadapi bentuk kekuasaan pada masyarakat industri.

Michael Apple, menjelaskan bahwa kurikulum tidak pernah menjadi susunan pengetahuan yang netral. Karakter semacam ini pasti tampak dalam teks dan di kelas. Kurikulum selain menjadi bagian dari tradisi tertentu, pilihan khusus, atau visi kelompok tentang pengetahuan yang sah. Keputusan untuk menentukan pengetahuan suatu kelompok sebagai pengetahuan yang paling sah atau pengetahuan resmi, sedangkan pengetahuan kelompok lain diabaikan, sehingga memperlihatkan siapa yang berkuasa dalam masyarakat.

Saat itu, pendidikan publik mendapat serangan serentak dari kekuatan sayap kanan yang ingin menerapkan etika keuntungan kepentingan umum, "Sayap kanan" lebih memilih sistem

“berorientasi konsumen dan pasar’ yang secara tersirat menjadi “kebutuhan bisnis dan industri sebagai tujuan pendidikan”. Dalam kondisi tertekan seperti itu, sekolah kehilangan sebagian besar perannya sebagai agen demokrasi dan kesetaraan. “Ide demokrasi telah diubah”, dan konsep politik menjadi konsep ekonomi yang semata-matadipusatkan pada upaya penanaman kebiasaan konsumtif. Sebagai akibatnya adalah “marketisasi” atau “komodifikasi” sekolah dan kurikulumnya, dan pada saat yang sama kebaikan bersamadimarginalisasi, demi kepentingan perusahaan yang berorientasi—laba. (Joy A. Palmer, ed, 2001: 472)

Sedangkan menurut Henry Giroux, bahwa pendidik dan peserta didik perlu menyelidiki kurikulum siapa yang digunakan dan tidak digunakan di sekolah, atas kepentingan siapa kurikulum itu diterapkan, apa dampak penerapan kepentingan tersebut dalam masyarakat, serta sejauhmana keabsahan kurikulum dan pedagogi yang diterapkan di sekolah (Keith Morisson, dalam Joy A. Palmer, ed, 2001: 496)

#### b. Ideologi

Konstruksi ideologi dapat diteransformasikan melalui kurikulum oleh aktor yang dominan. Mereka yang memiliki kekuasaan akan mudah mewariskan dan mempertahankan wajah ideologi mereka antrgenerasi. Pokok bahasan ini juga menjadi isu sentral selain kekuasaan. Penetrasi ideologi dapat berjalan tanpa kesadaran kritis dari kelompok dominan yang berkuasa. Ideologi praktik kurikulum tersebut. Studi sosiologi kurikulum berupaya untuk menjelaskan bagaimana ideologi itu bisa dipraktekkan dan dipertahankan secara masif. Michael Apple adalah sosiolog pertama yang merintis kajian ideologi dalam kurikulum. Menurut Michael Apple bahwa pasar merupakan elemen yang sangat dominan dalammenggerakkan pendidikan, khususnya melalui kurikulum. Fokus Apple dalam

menelaah tema ini, *pertama*, relasi antara kebijakan pendidikan dengan tingkat praksis serta relasi antara kelompok dominan dan subordinat dalam masyarakat yang lebih luas. Kedua, lebih jauh Apple, ingin melihat relasi antara dunia ekonomi yang direpresentasikan melalui pasar dan dominan kultural dalam konteks ekonomi-politik di dunia pendidikan. Dalam penjelasannya, Apple banyak menjelaskan keberadaan kurikulum sebagai representasi dominan dan pertarungan tersebut. Lebih jauh Apple dan King (dalam Giroux dan Purpel, 1983:83) mengatakan bahwa: *in advanced industrial societies, school become particularly important as distributor this cultural capital...*”.

Dominan kultural dalam pandangan Apple dipahami sebagai implikasi sosial-kultural kelompok berkuasa terhadap kelompok lainnya yang dianggap lebih lemah. Dengan demikian, ada reproduksi ketimpangan sosio kultural akibat berbagai distorsi praktik pendidikan yang terjadi di sekolah. Apple memang menjelaskan lebih mendalam tentang reproduksi ekonomi, kultural dan ekonomi dalam praktik kurikulum dan pendidikan pada umumnya. Proses reproduksi itulah yang menjadi masalah utama di sekolah. Sekolah dalam pandangan Apple, terjebak dalam institusi yang menggerakkan reproduksi ketimpangan. Pada bagian ini dengan jelas, Apple sepakat dengan pemikiran Basil Bernstein, Pierre Bourdieu, dan Antonio Gramsci bahwa sekolah melalui kurikulum menjadi institusi ekonomi yang melahirkan reproduksi pembagian kerja dan berkontribusi dalam mendukung hegemoni ideologi. Dengan penjelasan ini, menurut Apple, bentuk dan isi kurikulum menjadi sangat signifikan dalam praktik dominasi kultural dan bagaimana kesatuan dibentuk.

Ironisnya kelompok dominan menepatkan sekolah melalui peannya sebagai “mesin besar demokrasi” yang mana mereka

mengklaim telah melahirkan berbagai unsur kebenaran dalam praktik kurikulum di sekolah. Kelompok dominan dapat melakukan fungsi ekonomi dan budaya dan mewujudkan aturan ideologi yang baik mempertahankan dan meningkatkan satu set ada hubungan struktural. Hubungan ini beroperasi pada tingkat dasar untuk membantu beberapa kelompok dan berfungsi sebagai penghalang bagi orang lain. Menurut Apple (dalam Weis, et.al, 2006: 14), *the study of interconnections between ideology and curriculum and between ideology and educational argumentation has important implications for the educational theory and policy in general.*”

Berdasarkan pernyataan itu, Apple sangat percaya bahwa relasi sosial antar pasar, ideologi, dan kultural akan memberikan implikasi yang besar kepada kebijakan pendidikan ditingkat makro. Pada aras itu, Apple seperti mengamini beberapa sosiolog pendidikan lainnya ingin menyakinkan bahwa sekolah dan universitas harus dipahami sebagai *process knowledge institution* yang memiliki fungsi ideologi. Sekolah juga oleh Apple dianggap sebagai agen penting terciptanya reproduksi kultural, ekonomi maupun ideologis dalam masyarakat. Apple and King dalam Weis, et.al, 2006: x mengatakan:

...it is important to realize that while our educational institutions do functions to distribute ideological values and knowledge.... As a system of institutions, they also ultimately help produce the type of knowledge (as a kind commodity) that is needed to maintain the dominant economic, political and cultural arrangements that now exist....”.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka tampak jelas bahwa ada korelasi pemikiran antara Apple dan Bourdieu tentang sekolah sebagai mekanisme terciptanya reproduksi sosial. Apple sangat fokus menjelaskan terjadinya berbagai reproduksi baik ekonomi, politik maupun kultural yang terjadi di sekolah.

Bagi Apple, sekolah hanya melahirkan berbagai ketimpangan ekonomi, politik dan kultural. Pernyataan Apple itu, searah dengan pandangan Bourdieu bahwa sekolah dan universitas sebagai “market” di mana terdistribusinya berbagai modal terutama *cultural capital* dan *economical capital*. Berhubungan dengan distribusi kapital, Apple (dalam Darder, 2003: 443) mengintroduksi *technical/administrative knowledge* sebagai salah satu bentuk *cultural capital* jenis ini dalam pandangan Apple menjadi faktor penting dalam ekonomi korporasi tingkat tinggi.

Pada konteks ini, Apple menjelaskan relasi antara kurikulum, sekolah, kapital dan reproduksi sosial. Dengan kata lain, kurikulum dan sekolah terlibat dalam kontestasi dalam arena ekonomi di mana berlangsung secara dramatis proses akulturasi kapital dan melalui kurikulum kelompok dominan berkepentingan untuk memperluas pasar dan keuntungan yang berada dalam masyarakat yang lebih luas. Hal ini menurut Apple merupakan sesuatu yang kontradiktif bagaimana kurikulum dan sekolah semakin termarginalkan dari institusi dominan lainnya. Singkatnya, dalam pandangan Apple, sekolah dan kurikulum tidak dapat terhindar dari hegemoni kapital (Hidayat, 2013: 156-57).

### c. Ketimpangan Sosial Ekonomi

Ketimpangan sosial muncul diantaranya, diakibatkan oleh praktik kurikulum yang diberlakukan oleh lembaga pendidikan. Kelompok dominan yang berkuasa sangat memungkinkan mereka yang secara sosial ekonomi merupakan kelompok yang memiliki akses kapital lebih dibandingkan dengan kelompok sosial lainnya. Menurut pendekatan neo-Marxist menjelaskan bahwa kurikulum memiliki kontribusi dalam menciptakan reproduksi ketimpangan sosial dalam masyarakat. Perspektif ini menjelaskan bahwa proses reproduksi dari struktur kelas.

Kurikulum juga seluruh yang terkait dengan pendidikan merupakan sebuah mekanisme untuk menciptakan reproduksi kelas sosial yang timpang. Hal penting lainnya yang dijelaskan perspektif ini adalah sangat mungkin akan lahirnya kontestan proses produksi dan ini bisa memunculkan perubahan politik yang radikal dalam ranah pendidikan (Hidayat 2013:107).

Berkaitan dengan hal ini, Bourdieu, dalam teorinya menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern sistem pendidikan digunakan hanya untuk “mereproduksi” budaya kelas dominan untuk terus memegang dan melepaskan kekuasaan. (Rakhamt Hidayat, 2013: 107). Sementara itu, Louis Althusser seorang filsuf dan sosiolog beraliran Marxis yang paling berpengaruh pada tahun 1970-an menjelaskan bahwa posisi sekolah *vis a vis* kurikulum yang tertuang dalam bukunya *ideology an dideological State apparatus* (1971) ada dua karakteristik apparatu, yaitu *pertama*, repressive state apparatus (RSA seperti polisi, pemerintah, birokrasi, pengadilan atau militer, *kedua*, *ideoloical state apparatus* (ISA) seperti gereja, politik, hukum, kebudayaan, komunikasi, media massa, keluarga, sekolah, keurikulum. Praktik berlangsungnya ISA dilakukan melalui ideologisasi berbeda dengan RSA yang lebih menggunakan fisik dan kontrol. Dalam penjelasannya lebih lanjut, Atthusser mengatakan praktis ISA berlangsung secara halus dan tanpa disadari. Fenomena ini seperti sesuatu yang natural. Bahkan, ia menyebut praktik ISA bisa melalui musik. Adapun praktik di sekolah ia melihat itu berlangsung sejak usia bayi hingga usia sekolah anak.-anak tersebut diwajibkan hadir di sekolah selama 8 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu.

Selain Athusser, Samuel Bowless dalam bukunya yang sangat berpengaruh dalam sodiologi pendidikan: *Schooling in Capitalist America: Educational Reform and the Contradiction of Economic Life* (1976) mengungkapkan bahwa pendidikan di

Amerika Serikat bukannya berdampak terhadap pemerataan pendapatan dan bisa melakukan perubahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, melainkan justru sekolah dan pendidikan di Amerika mereproduksi ketidakadilan sosial dan kelas (*reproduces social and class-based inequalities*).

Bowles dan Gintis menjelaskan bahwa pendidikan melalui praktik kurikulum digunakan oleh kaum borjuis untuk mengontrol tenaga kerja. Dari sudut pandang mereka sekolah memproduksi ketidaksetaraan yang ada dan mereka menolak gagasan bahwa ada kesempatan yang sama bagi semua. Dengan cara ini mereka berpendapat pendidikan yang membenarkan dan menjelaskan ketimpangan sosial. Selain mengkritisi peran sekolah melalui kurikulum dalam memperoleh ketidakadilan kelas, Bowles dan Gintis juga mengkaji tentang reformasi sekolah yang berlangsung di Amerika Serikat. Bowles dan Gintis melihat reformasi sekolah di akhir tahun 1970-an sebagai proyek berkelanjutan yang berakar dari sistem kapitalis. Hasilnya menunjukkan adanya kegagalan sistematis. Bowles dan Gintis percaya bahwa reformasi sekolah yang dilakukan hanya menguatkan tatanan kapitalis dengan kedok perubahan pro-aktif (Hidayat, 201: 115)

#### d. Ketimpangan Gender.

Tak dapat dipungkiri bahwa praktik kurikulum di sekolah mewariskan ketimpangan gender melalui seperangkat teks pelajaran yang diajarkan kepada peserta didiknya. Ketimpangan gender itu berada di teks, buku pelajaran maupun berbagai instruksi pengajaran yang bias gender. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai konstruksi yang seksis dan cenderung stereotipe terhadap perempuan. Laki-laki dianggap superior dan perempuan sebaliknya. Peserta didik tanpa disadari menerima teks dan penjelasan yang bias gender sebagai sebuah kebenaran. Hal yang terus di reproduksi dalam rasionalitas

masyarakat tersebut. Fenomena yang terjadi kemudian adalah ketimpangan gender akan semakin terlembagakan dalam masyarakat yang ada.

Isu ketidakadilan gender termasuk di dalamnya ketimpangan sosial ekonomi antara laki-laki dan perempuan terjad di seluruh aspe kehidupan masyarakat mulai dari politik, ekonomi, industri, pemerintah, dan pendidikan. Aspe pendidikan dan khususnya kurikulum tidak bisa dilepaskan dari praktik pelaksanaan pendidikan di sekolah. Bebrgai teori feminis menganalisis bagaimana pembentukan relasi gender yang timpang dalam praktis kurikulum di sekolah. Bebragai aliran teori feminis yang berkembang sebagaimana dijelaskan Davies (1997: 62) memberikan pengaruh kepada kalangan guru, berpengaruh juga untuk pembentukan kerikulum, pola-pola organisasi di sekolah serta relasi gender seluruh warga sekolah. Studi tentang ketimpangan relasi gender dalam kurikulum dibahas secara mendalam oleh Paechter (2000). Paechter melihat bahwa sekolah sering kali terjadi perbedaan perilaku antara peserta didik laki-laki dengan peserta didik perempuan. Oleh karena itu, ia menganalisis secara lebih mendalam perbedaan perlakuan tersebut (Hidayat, 2013: 124)

Ketidakadilan gender dalam pendidikan dapat dilihat pada produksi kurikulum hingga praktiknya di dalam kelas. Teori feminis melihat bahwa ketidakadilan gender sangat tampak terlihat dalam buku pelajaran yang diberikan kepada peserta didik untuk proses belajar sehari-hari. Banyak realitas menunjukkan bahwa dalam kurikulum tersebut masih banyak terdapat hal yang menonjolkan peran laki-laki di sektor publik sementara peran perempuan hanya berada pada sektor domestik. Dengan kata lain, kurikulum yang memuat bahan ajar, instruksi pengajaran dan isi pengajaran tidak bernuansa

gender yang dituangkan dalam gambar, teks maupun ilustrasi kalimat yang dipakai dalam penjelasan materi.

Kurikulum memiliki peran penting dalam menjelaskan relasi gender dikalangan peserta didik. Aliran feminis liberal misalnya menganalisis kurikulum sebagai satu ruang di mana seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya serta mendapatkan prestasi yang baik di sekolah. Analisis feminis liberal didasarkan pada bahwa kurikulum sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan oleh seluruh kelompok sosial khususnya anak-anak dari berbagai kelas sosial untuk berkompetisi mendapatkan prestasi (Hidayat, 2013: 127)

### **C. Posisi Kurikulum dalam pendidikan**

Kurikulum adalah jantung pendidikan. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan kurikulum dalam ranah pendidikan. Betapa penting kurikulum tentu saja sangat mewarnai konstruksi dan wajah pendidikan suatu masyarakat. Kurikulum bukan sekedar menyangkut substansi dan instruksional pembelajaran yang bermain dilevel mikro, tetapi kurikulum berkaitan dengan relasi-relasi sosial berbagai agen yang terlibat dan berkepentingan dibelakangnya. Kurikulum berkaitan dengan kepentingan politik penguasa, kurikulum juga berkepentingan dengan relasi antara negara dengan sekolah (melalui representasi guru dan murid), maupun relasi sosial antara sekolah dengan masyarakat. Bahkan relasi dengan pasar atau modal sangat berpengaruh. Aspek kedua yang mengkonfirmasi bahwa kurikulum menjadi sangat strategis dalam level makro.

Dengan kata lain, kurikulum tidak dapat dilepaskan dari dunia sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Setiap individu yang mengenyam pendidikan pada dasarnya pernah

berada dalam pengaruh dan kotrol kurikulum, meski itu terjadi melalui alam bawah sadar dirinya. Tanpa disadari, kurikulum sebenarnya menjadi bagian dari tindakan manusia—dalam ranah bawah pendidikan, melalui interkainya dengan manusia lain. Pada sisi lain, interaksi antarindividu tersebut berlangsung dalam sebuah ruang sosial yang bernama “masyarakat”. Masyarakat adalah sebuah ruang sosial tempat pertarungan berbagai arena kepentingan. Singkat, kurikulum menjadi bagian penting dalam pertarungan masyarakat.

Begitu pentingnya kedudukan kurikulum, sehingga menjadi materi diskusi menarik dikalangan para penguasa. Di Indonesia, problem kurikulum sudah menjadi hal serius dalam bidang pendidikan dan pengajaran saat ini. Meskipun demikian, Kolonial Belanda juga memberikan pelajaran bagi masyarakat Indonesia saat itu, semua kurikulum sekolah mengacu kepada pola kurikulum di negeri Belanda. Pada saat itu, dioorientasikan pada kebutuhan tenaga untuk pembangunan sarana produksi atau pelayanan pemeirntah bagi kepentingan pemerintah Kolonial (Tilaar, 1995: 252).

Pomeo yang mengatakan “ganti menteri ganti kurikulum” rasanya tepat untuk menggambarkan perubahan kurikulum di negeri ini. Pomeo tersebut sebenarnya hendak memberikan penjelasan bahwa kurikulum bukanlah sesuatu yang *given* atau *taken for granted*, tetapi kurikulum adalah hasil dari konstruksi sosial-politik dan ekonomi yang sedang berkuasa. Hal ini menunjukkan adanya garis linear antara kurikulum dengan kekuasaan. Ironisnya, bagi Indonesia, karena kurikulum menjadi komoditas politik yang dikendalikan rezim, maka ini pula yang kian menjadikan pendidikan di Indonesia semakin carut-marut.

Dengan demikian, penjelasan di atas menggambarkan bahwa dibalik kurikulum selalu terjadi kontestasi kekuasaan

(Tilaar, 2003: 55). Dalam kajian sosiologi, kajian mengenai kurikulum tidak dipahami sekedar teknis operasional yang implementatif, tetapi lebih dari itu, kurikulum dipahami sebagai *social constructed* yang dibentuk oleh berbagai faktor. Dengan demikian, kurikulum dapat dipahami sebagai ruang di mana di dalamnya terjadi kontestasi kekuasaan antara berbagai faktor yang saling bernegosiasi yaitu antara pasar, universitas maupun murid, dalam proses produksi pengetahuan. Implikasinya, kajian tentang kontestasi kekuasaan pada dasarnya merupakan kajian sosiologi.

Pendidikan tentu saja tak dapat dipahami sebagai *transfer of knowledge* dan *transfer of value an sich*. Kontestasi dipahami sebagai upaya penggambaran adanya persaingan dan perjuangan dalam hubungan-hubungan atau interaksi di mana nantinya akan muncul “pemenang” yang tetap bertahan (Foucault, 2000: 221). Dalam kontestasi terdapat beberapa pihak dengan kepentingan masing-masing saling berneosiasi maupun berkompetisi. Kontestasi yang dapat dilacak melalui pertarungan agen penting yang terlibat yaitu *state*, *market*, *university*, maupun *student*. Dalam kontestasi tersebut terdapat suatu proses sosial yang bersifat konstruktif, akomodatif dan resistensi. Kurikulum merupakan produk pengetahuan yang diproduksi oleh pemenang kontestasi tersebut. Kontestasi ini berlangsung dalam sebuah relasi sosial di dalamnya saling mendukung, berjuang, bersaing dan menghancurkan (Pradipto, 2007: 220). Dengan demikian jelas bahwa pendidikan bukan sebuah tempat yang steril dari pengaruh kekuasaan. Di mana kekuasaan dilihat sebagai mekanisme yang terus bergerak dan menyebar dalam setiap ranah sosial (Hidayat, 2013:88).

Dalam pendidikan, kurikulum memiliki kedudukan dan peran penting dan strategis, diantaranya: 1). Kurikulum sebagai mekanisme terbentuknya ketaraturan sosial, 2) Kurikulum

sebagai arena pemupukan modal simbolik, 3) Kurikulum sebagai dominasi Ideologi dan Politik, 4) kurikulum sebagai parktik diskursif, 5) Kurikulum sebagai mekanisme pasar kerja, 6) kurikulum sebagai praktik kolonialisasi, dan 7) kurikulum sebagai wahana mempertahankan kekuasaan.

- 1) Kurikulum sebagai mekanisme terbentuknya ketaraturan sosial.
- 2) Kurikulum sebagai arena pemupukan modal simbolik.
- 3) Kurikulum sebagai dominasi Ideologi dan Politik,
- 4) Kurikulum sebagai parktik diskursif,
- 5) Kurikulum sebagai mekanisme pasar kerja,
- 6) Kurikulum sebagai praktik kolonialisasi,
- 7) Kurikulum sebagai wahana mempertahankan kekuasaan.□

# BAB V

## SEKOLAH SEBAGAI SISTEM SOSIAL

### A. Sistem Sosial

#### 1. Pengertian Sistem Sosial

Kata sistem mengandung pengertian sebagai kumpulan dari berbagai unsur (komponen) yang saling bergantung antara satu dengan lainnya dalam satu kesatuan yang utuh. Sistem juga dapat diartikan sebagai jaringan yang terdiri dari banyak simpul, antara simpul yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan dan sulit untuk dipisahkan.

Sistem sosial dapat diartikan sebagai serangkaian bagian-bagian yang saling berhubungan, bekerja dengan bebas dan bersama-sama dalam mencapai tujuan keseluruhan dalam lingkungan yang kompleks. Menurut Shrode dan Voich (1974: 122) sistem sosial adalah: *“a set of interrelated parts, working independently and jointly, in pursuit of common objective of the whole, with in a complex environment”*. Dalam pengertian seperti ini, sistem memiliki konotasi penting, antara lain: *pertama*, menunjuk pada suatu benda (entitas) atau benda yang memiliki tata aturan atau susunan struktural dari bagian-bagiannya. Seperti, sekolah, lembaga pemerintah, lembaga politik, lembaga ekonomi, dan lembaga keagamaan. *Kedua*,

menunjukkan pada suatu rencana, metode, alat, atau tata cara dalam mencapai suatu (Amirin, 1986).

Sistem sosial adalah sejumlah kegiatan atau sejumlah orang yang mempunyai hubungan timbal-balik relatif konstan. Menurut Bertrand (1980), bahwa dalam sistem sosial, paling tidak harus memiliki tiga pokok, yaitu: 1) dalam setiap sistem sosial ada sejumlah orang dan kegiatan, 2) orang atau kegiatan itu berhubungan secara timbal-balik, 3) hubungan yang bersifat timbal-balik bersifat konstan.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa sistem sosial merupakan kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian (*elemen atau komponen*) yang terdiri dari: a) orang atau kelompok orang beserta kegiatannya, dan b). hubungan sosial, termasuk didalamnya norma-norma, dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara orang atau kelompok orang tersebut.

Sistem sosial merupakan hasil kreasi manusia, dalam pengertian bahwa sistem sosial terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Sistem sosial dipertahankan keberadaannya oleh manusia. Dalam perjalanan sejarah sistem sosial dapat berubah baik disengaja maupun tidak oleh manusia.

Sistem sosial mempengaruhi perilaku seseorang, karena dalam sistem sosial termuat nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan mengatur perilaku seseorang dalam masyarakat. Ada beberapa hal yang membuat manusia menciptakan sistem sosial, antara lain karena:

1. manusia mempunyai kebutuhan dasar biologi tertentu seperti pangan, sandang, misalnya, pendidikan, agama, dan seks.
2. untuk memenuhi kebutuhan ini, manusia tergantung pada organisasi-organisasi kemasyarakatan, seperti organisasi

ekonomi, organisasi politik, organisasi agama, organisasi hukum, dan organisasi pendidikan.

3. kenyataan di atas menciptakan kebutuhan-kebutuhan lain yaitu kebutuhan akan, norma dan nilai pada diri individu.
4. yang pada akhirnya manusia berusaha memenuhi kebutuhan dirinya secara maksimal.

Sistem sosial di buat oleh manusia berdasarkan beberapa faktor, seperti atas dasar kekerabatan, tempat tinggal, tempat kerja, keagamaan, aktivitas ekonomi, kecenderungan politik, dan lainnya. Sistem sosial atas dasar kekerabatan, misalnya dapat dilihat bentuknya dalam keluarga-keluarga besar yang menghimpun keturunan orang-orang tertentu, misalnya keluarga besar presiden, keluarga besar pengusaha sukses dan lain-lainnya.

Sistem sosial yang didasarkan pada tempat tinggal antara lain RT, RW, pedukuhan, dusun dan desa. Sedangkan sistem sosial berdasarkan tempat kerja seperti, kelompok dosen, kelompok pegawai, kelompok pengajian, dan beberapa organisasi keagamaan merupakan pengejawantahan dari sistem sosial atas dasar keagamaan.

## **2. Sistem Sosial dalam Sosiologi**

Sosiologi pada hakikatnya mempelajari manusia di dalam kehidupan kelompoknya, atau dengan perkataan lain di dalam kehidupan sosialnya. Mempelajari kehidupan maupun interaksi sosial berarti mempelajari sistem sosial. Kehidupan sosial itu sendiri adalah suatu sistem.

Ciri penting dari sebuah sistem, antara lain dapat diketahui dari:

1. sistem terdiri dari subsistem
2. mempunyai tujuan dan sasaran

3. diantara subsistem mempunyai hubungan saling tergantung dan merupakan suatu kebulatan yang utuh.
4. mempunyai kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri sendiri; mempunyai batas (*boundaries*) dengan lingkungannya. Batas ini tidak berarti sistem tersebut tertutup dari pengaruh luar, melainkan untuk menunjukkan keberadaannya di antara lingkungan.

Dalam realita kehidupan masyarakat, sistem sosial dapat terbagi menjadi dua macam, yaitu sistem sosial masyarakat tradisional dan sistem sosial masyarakat modern.

Menurut Rogers dan Schoemaker (1987), ciri-ciri sistem sosial tradisional adalah:

- a. kurang berorientasi pada perubahan;
- b. kurang maju dalam teknologi atau masih sederhana;
- c. relatif rendah kemelekan-hurufnya (tingkat buta hurufnya tinggi)
- d. sedikit sekali komunikasi yang dilakukan oleh anggota sistem dengan pihak luar.
- e. kurang mampu menempatkan diri atau melihat dirinya dalam peranan orang lain, terutama peranan orang luar sistem.

Sebaliknya sistem sosial modern menurut Rogers dan Schoemaker mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. pada umumnya mempunyai sikap positif terhadap perubahan;
2. teknologinya sudah maju dengan sistem pembagian kerja yang kompleks;
3. pendidikan dan ilmu pengetahuan dinilai tinggi;
4. hubungan sosial lebih bersifat rasional dari pada emosional;

5. pandangan kosmopolitan, karena anggota sistem sering berhubungan dengan orang luar, mudah memasukkan ide baru ke dalam sistem sosial;
6. anggota sistem sosial mampu berempati, dapat menghayati peranan orang lain yang betul-betul berbeda dengan sendirinya.

Secara umum, sistem sosial modern dicirikan oleh kemampuan sistem sosial itu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Oleh karena itu kita sering menyebut tradisional atau kolot, sebenarnya yang dimaksud adalah kelambanannya untuk berubah. Orang-orang yang flekibel dengan perubahan-perubahan disekitarnya disebut modern.

### **3. Komponen-Komponen Sistem Sosial**

Memandang masyarakat sebagai sebuah sistem sosial berarti kita melihat masyarakat sebagai sebuah kesatuan yang memiliki karekteristik seperti sebuah sistem. Sistem sosial yang ada pada masyarakat bukanlah sebuah sistem yang bersifat empiris. Sifatnya yang tidak empiris itulah, maka komponen-komponen yang terdapat di dalam sistem sosial juga tidak dapat dilihat dan diamati. Perlu disadari bahwa sistem sosial tidak lain adalah suatu sistem yang bersifat konseptual, yang berarti keberadaannya hanya dapat dimengerti melalui sarana berpikir dan bukan melalui sarana panca indra. Dengan demikian, komponen-komponen sistem sosial tidaklah mempunyai perwujudan fisik, tetapi dapat dibayangkan sebagai suatu konstruksi berpikir. Jika demikian, apakah yang menjadi komponen-komponen sistem sosial itu?

Secara umum komponen-komponen dari sistem sosial adalah terdiri dari status, peran dan perbedaan sosial; akan tetapi sesungguhnya secara lebih luas, banyak sekali komponen yang terkandung dalam pengertian sistem sosial. Menurut

Alvin L. Bertrand (1980) ada sepuluh unsur sistem sosial itu, yang terkandung di dalam sistem sosial, yaitu: 1) keyakinan, 2) perasaan, 3) tujuan, 4) sasaran (*sentiment*), 5) norma, 6) status dan peranan, 7) tingkatan atau pangkat, 8) kekuasaan dan pengaruh, sanksi, 9) sarana atau fasilitas, dan 10) tekanan-ketegangan (*stress-strain*).

Masyarakat sebagai sebuah sistem sosial yang bersifat konseptual yang dianggap sebagai komponen sistem sosial adalah peran-peran sosial. Meskipun yang dianggap sebagai komponen dari sistem sosial adalah peran-peran sosial, namun di dalam kenyataannya yang memegang peran-peran sosial tersebut adalah manusia-manusia juga. Manusia-manusia adalah yang menjadi pemain peran-peran sosial tersebut. Yang dimaksud dengan peran di sini adalah tingkah yang diharapkan atau tingkah laku normatif yang melekat pada status sosial seseorang. Misalnya, Pak Munir, Pak Fatur, dan Pak Ali adalah manusia-manusia yang berperan sebagai dosen di perguruan tinggi, maka ketika Pak Munir, Pak Fatur dan Pak Ali, berada di rumahnya tidak lagi berperan sebagai dosen, melainkan berperan sebagai suami dari istrinya dan bapak bagi anak-anaknya. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa manusia-manusia itu hanyalah pengisi, pemain atau pelaksana fungsi dari sistem sosial yang dapat berganti dari waktu ke waktu. Sedangkan komponen sistem sosial, yaitu peran sosial, akan tetap keberadaannya, meskipun manusia berganti atau mati misalnya. Peran dosen akan tetap ada sebagai komponen sistem sosial, meskipun manusia-manusia yang memegang peran sebagai dosen di perguruan tinggi misalnya Pak Munir, Pak Fatur, dan Pak Ali—dari tahun ke tahun telah berganti, karena sebagian dosen di perguruan tinggi tersebut telah memasuki purnabakti atau pengsiunan.

Sebagai komponen dari sistem sosial, peran-peran sosial itu saling berhubungan secara timbal-balik dan saling tergantung membentuk satu kesatuan kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi sebagai sebuah sistem sosial dianggap yang dianggap komponennya, bukan Pak Munir, Pak Fatur, dan Pak Ali, tetapi peran-peran sebagai dosen, pegawai, kantor, mahasiswa, ini saling berhubungan dengan satu sama lain dan saling tergantung membentuk suatu kesatuan kehidupan di kampus untuk mencapai suatu tujuan, yaitu melakukan proses perkuliahan dan menghasilkan lulusan sarjana yang baik (Narwoko dan Suyanto, 2006: 128).

#### 4. Fungsi Sistem Sosial

Keberadaan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari system sosial. Begitu juga sebaliknya system social merupakan satu kesatuan yang penting dalam suatu masyarakat. Durkheim (1956: 94) seorang sosiolog terkemuka memandang pendidikan sebagai kreasi sosial. Kreasi sosial dimaksudkan merupakan sarana yang digunakan masyarakat guna kelangsungan hidupnya dengan mensosialisasikan anak menurut citra masyarakat itu sendiri. Komponen-komponen system sosial—yang dengannya merupakan fakta yang sangat pasti dan sama realitasnya dengan fakta sosial lainnya saling ada kaitannya.

Masyarakat sebagai sebuah sistem sosial, terdiri dari beberapa subsistem. Menurut Talcott Parsons, ada 4 (empat) subsistem yang menjalankan fungsi-fungsi utama di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu: fungsi untuk mempertahankan dan atau pemeliharaan pola dan struktur masyarakat (*latent pattern maintenance*), fungsi integrasi (*integration*), fungsi pencapaian (*goal attainment*), dan fungsi adaptasi (*adaptation*), atau serig disingkat LIGA.

- 1). Fungsi mempertahankan dan atau pemelihara pola dan struktur masyarakat. Fungsi ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem cultural. Fungsi ini mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi dari masyarakat sambil menyediakan dasar dalam berperilaku menuju realitas tertinggi. Menurut Parsons, disebut pula bahwa fungsi ini sebagai fungsi latency, yakni fungsi suatu sistem menampilkan kualitas kebutuhan, keahlian dan kualitas lainnya yang tepat guna, sehingga memungkinkan konflik dan ketegangan internal tidak sampai berkembang ke tingkat yang merusak keutuhan sistem.
- 2) Fungsi integrasi (*integration*). Fungsi ini mencakup koordinasi yang diperlukan antara unit-unit yang menjadi bagian dari suatu sistem sosial, khususnya berkaitan dengan kontribusi unit-unit terhadap keseluruhan sistem.
- 3). Fungsi pencapaian tujuan (*Goal attainment*). Fungsi ini mengatur hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem kepribadian. Fungsi ini tercermin dalam bentuk penyusunan skala dari segala tujuan yang hendak dicapai dan penentuan bagaimana suatu sistem memobilisasi sumber daya serta tenaga yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut.
- 4). Fungsi adaptasi (*adaptation*). Menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem organisme tindakan dan dengan alam fosiko-organik. Secara umum fungsi ini menyangkut kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya. Dalam pelaksanaan fungsi ini, teknologi sangat penting perannya.

Menurut Parsons, fungsi untuk mempertahankan dan pemeliharaan pola dan struktur masyarakat akan dilaksanakan oleh subsistem budaya, fungsi integrasi akan dilaksanakan oleh subsistem hukum, fungsi pencapaian tujuan akan dilaksanakan oleh subsistem politik, dan fungsi adaptasi tersebut akan dilaksanakan oleh subsistem ekonomi.

Subsistem-subsistem tersebut akan menjalankan fungsinya masing-masing. Subsistem ekonomi tersebut akan melaksanakan fungsi-fungsi ekonomi, misalnya melaksanakan produksi dan distribusi barang dan atau jasa. Subsistem ini juga akan menghasilkan fasilitas-fasilitas atau alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan sistem.

Sedangkan subsistem politik, akan melaksanakan fungsi distribusi kekuasaan dan juga memonopoli penggunaan unsur paksaan yang sah (*legalized power*). Subsistem ini akan bekerja untuk memaksimalkan potensi masyarakat untuk mencapai tujuan kolektifnya. Sementara itu, subsistem hukum akan melaksanakan fungsi integrasi, misalnya dengan cara mempertahankan tata cara dan keterpaduan antara komponen-komponen sistem yang saling berbeda pendapat, pandangan dan kerangka moralitas untuk mendorong terbentuknya solidaritas sosial. Yang termasuk ke dalam subsistem ini adalah sistem hukum, kontrol sosial, kebiasaan dan norma-norma sosial.

Subsistem budaya akan menagani urusan pemeliharaan nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berlaku dalam proses kehidupan bermasyarakat, terutama untuk tujuan kelestarian struktur masyarakat. Subsistem pemeliharaan pola ini akan memaksimalkan komitmen sosial, motivasi dan mengendalikan ketegangan-ketegangan perasaan-perasaan individu, sehingga mereka dapat melaksanakan dan berpartisipasi dengan baik

dalam kehidupan sosial. Yang termasuk ke dalam subsistem budaya ini adalah keluarga, agama dan pendidikan.

Sementara itu lembaga pendidikan sebagai subsistem memiliki peran untuk mentransformasi nilai, norma, kepercayaan, kekuasaan, status dan peran, stratifikasi sosial di tengah-tengah masyarakat.

Pada pokoknya subsistem mempertahankan dan pemeliharaan pola masyarakat akan berhubungan dengan aspek moralitas dari komponen-komponen di dalam sistem sosial. Keempat subsistem tersebut, masing-masing akan bekerja secara mandiri, tetapi saling tergantung satu sama lain untuk mewujudkan keutuhan dan kelestarian sistem sosial secara keseluruhan.

Robert M. Lawang (1999: 23) menyatakan, bahwa sistem sosial dapat menjamin kebutuhan orang-orang yang terlibat di dalamnya, apabila sistem sosial itu terbatas pada kelompok kecil. Berarti sistem sosial yang dapat menjamin kebutuhan orang banyak secara makro, masih cukup sulit dilaksanakan.

## **B. Sekolah sebagai Sistem Sosial**

### **1. Struktur Sekolah**

Sekolah merupakan suatu bagian dari suatu masyarakat. Keberadaan sekolah tidak bisa dilepaskan dari keberadaan suatu masyarakat. Antara sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat, dimana masyarakat membutuhkan sekolah dan melalui sekolahlah masyarakat dapat, mengembangkan segala potensinya.

Setiap orang yang menjadi anggota suatu masyarakat mempunyai bayangan tentang kedudukan masing-masing dalam kelompok itu. Setiap anak mempunyai gambaran tentang kedudukan ayah, ibu dan anggota keluarga lainnya. Demikian pula di sekolah kita mempunyai bayangan tentang kedudukan

kepala sekolah, para guru, para staf administrasi, dan siswa-siswa sendiri serta hubungan antara berbagai kedudukan itu. Biasanya gambaran seseorang tentang berbagai kedudukan itu bercorak pribadi dan berkaitan dengan tokoh tertentu. Namun yang kita selidiki bukanlah yang bersifat pribadi, melainkan yang bersifat umum. Kita mengetahui kedudukan seorang ayah pada umumnya dalam keluarga serta hubungannya dengan kedudukan ibu, anak-anak, walaupun setiap ayah menjalankan perannya dengan cara khas menurut pribadinya dalam keluarganya. Demikian pula dapat diselidiki kedudukan kepala sekolah pada umumnya, walaupun tiap kepala sekolah mempunyai pribadi tersendiri yang unik dan menjalankan perannya menurut pribadi masing-masing.

Dalam mempelajari struktur sekolah akan kita selidiki berbagai jenis anggota menurut kedudukannya masing-masing dalam system persekolahan. Dengan kedudukan atau posisi dimaksud kategori atau tempat seseorang dalam system klasifikasi social. Misalnya, “anak wanita”, “anak dewasa”, “nenek” menunjukkan posisi atau kedudukan dalam sistem penggolongan menurut usia jenis kelamin. Tiap individu dapat mempunyai berbagai kedudukan menurut system klasifikasi, misalnya sebagai, “pria dewasa”, sebagai “bapak” dalam keluarga, sebagai “dosen” di kampusnya, sebagai “teman’ di dalam suatu pergaulan di tengah masyarakat.

Dalam setiap kedudukan individu diarpakan menunjukkan pola kelakuan tertentu. Perbuatannya, ucapannya, perasaannya, nilai-nilainya, dan sebagainya harus sesuai dengan apa yang diharapkan bertalian dengan kedudukannya. Menurut kedudukan atau posisinya ia harus menjalankan peran tertentu. Peranan menentukan kelakuan yang diharapkan dalam situasi social tertentu.

Dalam setiap kelompok orang mengenal kedudukan atau posisi masing-masing. Orang mempunyai gambaran tentang kelakuan yang diharapkan dari masing-masing menurut kedudukan yang ditempatinya. Jadi di masyarakat sekolah dari kepala sekolah, guru, siswa, pegawai sekolah diharapkan kelakuan tertentu.

Pada umumnya dapat kita bedakan dua tingkat dalam struktur social sekolah yakni yang berkenaan dengan orang dewasa serta hubungan di antara mereka, jadi mengenai kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, pengurus yayasan pada sekolah swasta, Kanwil. Tingkat kedua berkenaan dengan system kedudukan dan hubungan antara muris. Selanjutnya akan diselidiki hubungan di antara kedua tingkat itu.

## **2. Sistem Sosial di Sekolah**

Kepala sekolah menduduki posisi yang paling tinggi di sekolah berkat kedudukannya, tetapi juga sering karena pengalaman, masa kerja dan pendidikannya. Kepala sekolah memiliki hak dalam mengambil keputusan yang harus dipatuhi oleh seluruh komponen sekolah. Di samping hak kepala sekolah memikul tanggung jawab penuh atas kelancaran proses pendidikan disekolah.

Kepala sekolah merupakan perantara, antara atasan yakni Dikpora dengan guru-guru. Keputusan Kementerian Pendidikan Nasional disampaikan oleh Dikpora melalui kepala sekolah kepada para guru dan siswa. Sebaliknya, kepala sekolah menjadi perantara para guru dengan atasannya, seperti mengenai kenaikan pangkat golongan, kinerja para guru dan pegawai. Dalam lembaga pendidikan swasta kepala sekolah menjadi perantara antara pengurus yayasan dengan para guru, begitu juga sebaliknya.

Kepala sekolah juga berkedudukan sebagai konsultan yang memberikan petunjuk, nasehat, saran-saran kepada para guru dalam usaha untuk memperbaiki mutu pendidikan. Dalam hal ini, kepala sekolah didukung oleh kemampuan profesionalnya serta pengalamannya sebagai guru dan kematangan pribadinya. Kepala sekolah dapat memaparkan filsafat sekolah, tujuan pendidikan yang harus dicapai serta cara-cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan kurikulum sekolah. Kepala sekolah dianggap lebih bijaksana untuk mengatasi masalah-masalah antara guru dengan siswa, juga antara sesama guru. Guru yang meminta nasihat tentang tindakan terhadap anak sebenarnya memindahkan tagging jawab kepada kepala sekolah dan mengharapkan agar kepala sekolah memberi dukungannya. Jadi guru menggunakan kepala sekolah sebagai pelindung dan perisai terhadap reaksi dari pihak orang tua.

Kepala sekolah juga memegang kepemimpinan di sekolah dan ia diharapkan sanggup memberikan pimpinan dalam segala hal yang mengenai sekolah, dalam menghadapi masyarakat, siswa maupun para guru. Pada satu pihak para guru mengharapkan keputusan dan tindakan yang tegas, di lain pihak mereka menginginkan agar keputusan diambil dengan cara musyawarah.

Sementara itu, para guru yang secara struktura memiliki posisi lebih rendah dari pada kepala sekolah, ia harus menghormati kepala sekolah dan bersedia untuk mematuhi dalam hal-hal yang berkaitan dengan berbagai permasalahan sekolah. Dalam kaitan pangkat ia bergantung pada disposisi atau rekomendasi yang baik dari kepala sekolah dan arena itu sedikit banyak masa depannya ditentukan oleh hubungannya dengan kepala sekolah. Sebagai pegawai atau bawahan, para guru berada di bawah kekuasaan kepala sekolahnya. Para guru mempunyai kedudukan sebagai pegawai, berkaitan dengan

posisiya ini, para guru harus mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh atasan Pemerintah ataupun yayasan.

Semuan unsur system yag ada di sekolah, seperti kepala sekolah, para guru, siswa, pegawai, orang tua, harus membangun hubungan yang erat dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Semua unsur yang ada dalam sekolah tersebut, memiliki peran dan fungsi masing-masing dan unsure-unsur tersebut dituntut untuk menjalankan perang dan fungsi masing-masing. Manakala salah satu unsur dalam system sekolah tersebut tidak menjalankan fungsi dan perannya secara baik, maka akan dapat mengganggu unsur yang lainnya. Misalnya, kepala sekolah yang tidak menjalankan fungsi sebagai kepala sekolah dengan baik, maka akan dapat mengganggu unsur-unsur lainnya yang di sekolah tersebut, seperti akan berpengaruh teradap kinerja guru, pegawai serta proses belajar mengajar siswa. Begitu juga halnya, manakala para pegawai tidak menjalankan perannya dengan baik, akan dapat mengganggu segala aktivitas yang berkaitan dengan proses pengadministrasian sekolah.

Begitu juga para guru, manaka para guru tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagai tenaga pendidikan dengan baik, maka akan sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di sekolah tersebut, dan akan berpengaruh juga terhadap pencapaian tujuan pendidikan, serta upaya pningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Hubungan antara guru dan siswa mempunyai sifat yang relatif stabil, dimana guru diakui mempunyai status yang lebih tinggi dank karena itu dapat menuntut siswa untuk menunjukkan kelakuan yang sesuai dengan sifat hubungan itu. Begitu kelakuan siswa akan sedikit banyak dipengaruhi oleh perilaku guru. Bagamanapun dalam pandangan para siswa guru merupakan tauladan yang harus digugu dan ditiru. Kelauan

guru akan menjadi contoh bagi para siswanya. Para guru yang menunjukkan kelakuan yang baik, secara tidak langsung dapat menjadi inspirasi bagi para siswanya. Sebaliknya kelakuan guru yang kurang terpuji dapat menjadi contoh bagi para siswanya untuk memiliki kelakuan yang kurang terpuji pula.

Guru akan sedikit banyak mempengaruhi kelakuan siswa bila dalam memberikan pelajaran dalam kelas hubungan itu tidak sepihak seperti terdapat dalam metode ceramah, akan tetapi hubungan interaktif dengan partisipasi yang sebanyak-banyak dari pihak siswa. Hubungan itu akan lebih efektif dalam kelas yang kecil daripada di kelas yang besar (Nasution, 2009: 78).□



# BAB VI

## PENDIDIKAN DAN STRATIFIKASI SOSIAL

### A. Stratifikasi Sosial

#### 1. Pengertian Stratifikasi Sosial

Dalam kehidupan setiap masyarakat terdapat berbagai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dapat didefinisikan sebagai perbedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Pitirim A. Sorokin mengatakan bahwa stratifikasi sosial adalah pengelompokan atau perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang bertingkat, kelas tinggi, menengah, dan rendah. Pemilikan terhadap sesuatu yang berharga merupakan bibit yang menimbulkan adanya sistem pelapisan dalam masyarakat.

Status yang dimiliki seseorang dibedakan lagi antara status yang diperoleh (*ascribed status*) dan status yang diraih (*achieved status*). Status yang diperoleh misalnya perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, hubungan kekerabatan dan keanggotaan dalam kelompok seperti kasta dan kelas sosial.

Berbeda dengan itu, status sosial yang diraih adalah status sosial yang diperoleh seseorang karena prestasi kerja yang diperolehnya. Seorang anak petani karena prestasi dalam ilmu pengetahuan berhasil menempatkan diri pada status sosial

yang tinggi karena prestasi akademiknya yang tinggi, profesor, misalnya.

## 2. Bentuk-Bentuk Stratifikasi Sosial.

Menurut Ralph Lipton, terdapat beberapa bentuk stratifikasi sosial, yaitu:

*Pertama*, stratifikasi sosial berdasarkan usia. Stratifikasi sosial sangat menentukan hak dan wewenang dari mereka yang menjadi anak sulung dan yang bukan. Dalam sistem kerajaan Inggris misalnya, anak sulung memiliki hak untuk menjadi putra mahkota menggantikan kedudukan raja di kemudian hari.

*Kedua*, stratifikasi sosial berdasarkan jenis kelamin. Stratifikasi ini menentukan hak dan wewenang antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat yang menganut sistem patriarkat, anak laki-laki mempunyai wewenang yang lebih besar untuk mewariskan kekayaan orang tua sebaliknya, dalam masyarakat sistem matrilenial, wanita memiliki hak yang lebih luas dibandingkan anak laki-laki.

*Ketiga*, stratifikasi sosial berdasarkan hubungan kekerabatan. Stratifikasi ini menentukan hak dan wewenang dari seorang ayah, ibu, paman, dan anak serta keponakan dalam kehidupan keluarga.

*Keempat*, stratifikasi berdasarkan keanggotaan dalam masyarakat. Stratifikasi yang berhubungan dengan etnis, agama, dan golongan dalam masyarakat. Stratifikasi ini bersifat horizontal.

*Kelima*, stratifikasi berdasarkan pendidikan. Stratifikasi berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimilikinya, semakin tinggi kedudukan sosial seseorang.

*Keenam*, stratifikasi berdasarkan pekerjaan. Stratifikasi ini tergantung jabatan seseorang dalam pekerjaan. Ada yang berkedudukan sebagai manajer dan ada yang berkedudukan sebagai pekerja biasa saja.

*Ketujuh*, stratifikasi berdasarkan tingkat perekonomian yang dimiliki seseorang. Ada yang berkedudukan sebagai kelas atas, menengah dan ada yang kelas bawah.

Stratifikasi sosial terdiri dari tiga dimensi, yaitu:

- 1). dimensi ekonomi, kaya, kelas menengah, dan miskin,
- 2). dimensi kehormatan, kelas bagsawan dan rakyat jelata, dan
- 3). dimensi kekuasaan, *ruler* dan *the ruled*; sebab terjadinya stratifikasi sosial.
  - a) imbalan bagi status yang dimilikinya; imbalan bagi seorang manajer beda dengan imbalan yang diterima seorang buruh harian;
  - b) pembagian kerja; memungkinkan perbedaan kekayaan, kekuasaan dan prestise seseorang.
  - c) ketidak-samarataan dalam bidang ekonomi, kekuasaan dan prestise.

### **3. Terjadi Stratifikasi Sosial dalam Masyarakat.**

Stratifikasi merupakan hasil kebiasaan hubungan antar-manusia secara teratur dan tersusun, sehingga setiap orang, setiap saat mempunyai situasi yang menentukan hubungannya dengan orang lain secara vertical maupun mendatar dalam masyarakatnya.

Dengan demikian, peranan yang diambil oleh orang dalam masyarakatnya ditentukan oleh situasi kelompok.

Berkaitan dengan situasi individu dalam kelompok maupun dalam masyarakat luas F. Znaniecki berpendapat bahwa situasi

dapat ditinjau dari dua segi, yaitu: dari segi subyektif dan segi obyektif. Adapun segi subyektif meliputi penilaian probadi, sesuai interpretasi dan konsep. Sedangkan segi obyektif adalah penilaian oleh masyarakat yang ditentukan faktor kebudayaannya.

Terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: sistem stratifikasi/pelapisan yang terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa disegaja, dan sistem stratifikasi/pelapisan yang terjadi dengan segaja disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya atau tidak segaja misalnya, lapisan yang didasarkan pada umur, jenis kelamin, kepandaian, sifat keaslian keanggotaan kerabat kepala masyarakat, mungkin dalam batas-batas tertentu berdasarkan harta.

Sedangkan stratifikasi sosial yang terjadi dalam masyarakat disegaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata dan sebagainya (Narwoko dan Suyanto, 2005: 161).

Alasan terjadinya stratifikasi sosial dengan sendirinya antara lain adalah tingkat umum (senior), kepandaian, sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang kepala masyarakat, juga mungkin kekayaan. Misalnya, pada masyarakat yang hidup berburu, alasan utama yang dipakai dalam pelapisan masyarakat adalah kepandaian berburu. Sedangkan stratifikasi sosial yang disegaja disusun untuk mengejar tujuan bersama biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal, seperti pemerintah atau perusahaan.

Menurut Williams (1960: 89), bahwa proses terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat pada dasarnya dapat diteliti dengan berpedoman pada hal berikut ini:

1. Sistem stratifikasi sosial mungkin berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat.
2. Sistem stratifikasi sosial dapat dianalisis berdasarkan unsur-unsur:
  - b. distribusi hak-hak istimewa yang obyektif, misalnya penghasilan, kekayaan dan wewenang.
  - c. Sistem pertanggung jawaban yang diciptakan warga (Basrawi, 61)

Stratifikasi sosial yang terjadi pada masyarakat, dapat terjadi dalam dua proses:

1. sistem stratifikasi yang terjadi dengan sendirinya. Sistem stratifikasi yang terjadi dengan sendirinya antara lain adalah tingkat umum (senior), kepandaian, sifat keaslian keanggotaan kekerabatan seorang kepada masyarakat, dan juga mungkin kekayaan. Alasan yang dipakai tiap-tiap masyarakat dalam proses stratifikasi sosial dalam masyarakat mungkin saja berbeda. Pada masyarakat yang hidup berburu, misalnya alasan utama yang dipakai dalam pelapisan sosial adalah kepandaian berburu.
2. sistem stratifikasi sosial yang dibuat dengan sengaja.

Stratifikasi sosial yang disengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal, seperti pemerintah dan perusahaan.

Stratifikasi sosial bisa dibedakan antara stratifikasi yang dibentuk secara sengaja, seperti kasta dan stratifikasi sosial yang terjadi secara alamiah. Dalam masyarakat yang mengenal sistem kasta, manusia dibedakan berdasarkan kelahirannya.

Di sini orang tidak lagi berbicara tentang kemampuan dan keahlian yang dimiliki seseorang. Status sosial seseorang dipatok berdasarkan kelahirannya. Seorang ditempatkan pada masyarakat kasta atas (Brahmana, misalnya) terutama karena secara kebetulan ia lahir dari kelas itu. Sekalipun ia ditempatkan pada masyarakat kasta atas, tidak berarti kemampuan dan keahlian lebih tinggi dari individu yang berasal dari kelas bawah. Dengan demikian, stratifikasi sosial seseorang secara segaja dibentuk oleh mereka yang memiliki kekuasaan sebelumnya. Agar kekuasaannya tidak diambil alih oleh kelompok lain, maka mereka menciptakan kelompok-kelompok dalam masyarakat sedemikian sehingga hanya mereka yang dekat atau berhubungan erat dengan sang penguasa saja yang menempati kasta atas. Akan tetapi, stratifikasi sosial yang terjadi secara alamiah terjadi karena individu-individu memiliki kemampuan dan keahlian yang dapat membedakan dirinya dengan individu yang lain (Philupus dan Nurul Aini, 2006: 40).

#### 4. Sifat Sistem Stratifikasi Sosial

Dilihat dari sifatnya, ada dua sifat dari sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat, yaitu: bersifat tertutup (*closed sosial stratification*), dan bersifat terbuka (*open sosial stratification*).

Stratifikasi sosial tertutup bercirikan sulitnya seseorang untuk berpindah dari satu lapisan ke lapisan lain. Contohnya sistem stratifikasi sosial tertutup adalah kasta pada masyarakat India.

Sedangkan stratifikasi sosial terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berpindah ke lapisan yang lain (lebih tinggi). Hal ini dapat dilakukan dengan usaha berdasarkan kecakapannya sendiri.

Dasar atau kriteria yang umumnya dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam stratifikasi dalam masyarakat, antara lain adalah:

1. Kekayaan. Kekayaan merupakan dasar yang paling banyak digunakan dalam pelapisan sosial masyarakat. Seorang yang mempunyai kekayaan banyak akan dimasukkan ke strata atas dan yang mempunyai kekayaan sedikit akan dimasukkan ke strata bawah.
2. Kekuasaan. Seorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang yang besar akan masuk pada lapisan atas dan yang tidak mempunyai kekuasaan akan masuk lapisan bawah.
3. Kehormatan. Orang yang paling disegani dan dihormati akan dimasukkan ke lapisan atas. Dasar semacam ini biasanya dijumpai pada masyarakat tradisional.
4. Ilmu pengetahuan. Dasar ini dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan, walaupun kadang-kadang masyarakat salah persepsi kerana hanya meninjau dari gelar seseorang.

#### **5. Unsur-Unsur Stratifikasi Sosial**

Stratifikasi sosial terwujud dari unsur-unsur: (a) status (kedudukan); dan (b) *role* (peranan). Kedudukan dan peranan sebenarnya melekat dalam satu obyek individu. Keduanya merupakan sisi-sisi yang saling berkait erat. Pengertian kedua konsep ini dijelaskan sebagai berikut:

1. *Status sosial* atau kedudukan sosial adalah tempat di mana seseorang dalam suatu sistem sosial dihubungkan dengan orang-orang lainnya dalam sistem sosial (dalam pengertian obyektif) atau hasil dari penilaian orang lain terhadap diri seseorang dengan siapa ia berhubungan. Seseorang dikatakan berada pada status sosial yang tinggi karena orang-

orang lain menempatkan dia pada tempat yang lebih tinggi dari dirinya atau lebih berharga dari dirinya. Di kalangan masyarakat pedesaan ada pendapat bahwa individu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan menjadi pegawai negeri berada pada status sosial yang lebih tinggi dari pada pegawai atau pekerja lainnya.

Bagaimana seseorang memperoleh status? Status yang diperoleh seseorang dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu: *ascribed status* dan *achieved status*.

- a. *Ascribed status* yaitu status ini kedudukan yang diperoleh seseorang dalam masyarakat atas dasar keturunan atau kelahiran. Orang tidak dapat memilih dia akan lahir dari keluarga Jawa, Cina, Jepang, Sasak atau yang lainnya. Pada masyarakat tertentu, seperti di kalangan suku Sasak, bila seorang anak dilahirkan dari keluarga bangsawan, dengan gelar Lalu, maka anak tersebut secara otomatis akan menjadi bagian dari nigrat yang memperoleh gelar Lalu. Begitu juga sebaliknya, bila dia dilahirkan dari keluarga kelas Jajar karang.
- b. *Achieved status* adalah kedudukan yang dicapai seseorang dalam masyarakat dengan usaha-usaha yang disegaja, bukan diperoleh karena kelahiran. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan dari masing-masing orang dalam mengejar dan mencapai tujuan-tujuannya. Masyarakat kita telah menempatkan individu yang berpendidikan pada status yang lebih tinggi, bahkan ada sebagian anggota masyarakat yang mengejar gelar tertentu dalam pendidikan hanya untuk menaikkan status sosial keluarganya. Jadi, ada sebagian anggota masyarakat yang segaja mengejar pendidikan tertentu untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi. Ini bisa dimengerti, karena umumnya orang yang berpendidikan

lebih tinggi akan lebih inovatif, mempunyai hubungan sosial yang lebih luas, dan tak dapat dipungkiri berpenghasilan relatif lebih baik.

2. *Sosial role* atau peranan sosial adalah perilaku normatif seseorang, karena kedudukannya. Bisa juga diartikan sebagai pola perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan status yang disandangnya dalam sistem sosial tertentu.

Peranan yang melekat pada seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat merupakan unsur status yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu:

- a. peran meliputi norma-norma yang dapat dilakukan oleh individu atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Dan
- c. peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan merupakan sisi lain dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka berarti dia menjalankan suatu peranan. Sebenarnya yang membedakan antara peranan dan kedudukan hanya untuk tujuan analisis. Keduanya tidak dapat dipisahkan, tidak ada peranan tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa peranan. Pengertian *tempat* dalam hubungannya dengan status tinggi rendahnya status seseorang dalam suatu sistem sosial tertentu? Dalam hal ini ada beberapa kriteria tertentu. Kriteria-kriteria itu tidak lain merupakan

dimensi-dimensi pelapisan sosial yaitu: (1). Kekuasaan; (2). Prevelese; dan (3). Prestise (kehormatan).

## 6. Dasar-Dasar Stratifikasi Sosial.

Stratifikasi sosial didasarkan pada kreteria yang umum dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan dalam masyarakat antara lain, seperti:

### a). Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dalam pelapisan sosial merupakan faktor utama yang paling banyak menentukan dalam proses pelapisan sosial di masyarakat. Pelapisan sosial berdasarkan ekonomi berarti kita membedakan orang menurut kesempatan yang dimilikinya dalam bidang ekonomi. Kesempatan-kesempatan itu antara lain dapat dilihat dalam pendapatan yang diperoleh setahun, kekayaan yang dimilkinya sekarang yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu untuk meningkatkan kehidupan ekonominya.

### b). Faktor Seks (jenis kelamin)

Jenis kelamin merupakan kategori sosial yang diperoleh manusia sejak lahir, artinya tidak diperoleh atas dasar usaha yang disegaja. Dari tinjauan sosiologis, pembicaraan faktor jenis kelamin dalam pelapisan sosial tidak bermaksud untuk menguraikan faktor-faktor biologis yang membedakan pria dan wanita, tetapi pembicaraan lebih ditunjukkan pada hubungan antara faktor jenis kelamin dengan ketiga dimensi sosial.

Ada kecenderungan bahwa pria memiliki kesempatan yang lebih banyak dibandingkan. Dengan kata lain, kedudukan wanita dipandang lebih rendah oleh beberapa masyarakat dari pada pria. Pemikiran-pemikiran yang membedakan kedudukan dan peran berdasarkan jenis kelamin disebut gender. Masyarakat pedesaan membatasi kiprah anak putrinya dalam hubungan sosial. Budaya pingit masyarakat Jawa sangat menunjukkan

pola stratifikasi sosial berdasarkan jenis kelamin yang begitu jelas. Karena itu timbul usaha-usaha emensipasi seperti yang dimotori oleh Kartini dan Dewi Sartika.

c). Faktor Usia

Meskipun faktor usia tidak selalu mempunyai hubungan dengan ketiga dimensi pelapisan sosial, namun ada baiknya di sini dikemukakan juga. Pertimbangan ini didasarkan atas kenyataan bahwa beberapa masyarakat pedesaan di Indonesia mempunyai kecenderungan menganggap makin tua seseorang makin tinggi statusnya. Sebetulnya hubungan positif antara usia dengan ketiga dimensi status yang kita bicarakan adalah adanya pandangan bahwa makin tua seseorang makin bijaksana dia.

Proses menghargai orang tua dalam budaya Indonesia melahirkan budaya *paternalistic*. Sifat *paternalistic* ditunjukkan dengan dihormatinya orang tua tidak hanya dalam kehidupan keluarga tetapi juga dalam bidang pemerintahan, hukum, dan politik.

d). Faktor Pendidikan (Ilmu Pengetahuan)

Keberadaan kaum terdidik atau kaum cendikia dikalangan masyarakat memperoleh tempat tersendiri dalam lapisan sosial masyarakat desa. Beberapa waktu lalu, orang yang mempunyai gelar pendidikan tertentu dianggap mengetahui segala hal yang tidak diketahui penduduk desa, kepada orang-orang terdidik itu umumnya mereka bertanya.

Orang-orang terdidik umumnya mempunyai hubungan sosial yang lebih luas, informasi yang lebih banyak, sehingga mudah menerima inovasi baru. Karena itu, para terdidik ini mudah menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial yang dialaminya. Aspek-aspek ini diberi nilai yang lebih oleh

orang lain dan mendudukan para terdidik itu ke kedudukan yang lebih tinggi.

e). Kekuasaan.

Orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang yang besar akan masuk pada lapisan atas dan yang tidak mempunyai kekuasaan akan masuk lapisan bawah.

f). Kehormatan.

Orang yang paling disegani dan dihormati akan dimasukkan ke lapisan atas. Dasar semacam ini biasanya dijumpai pada masyarakat tradisional.

## 7. Perspektif Tentang Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial atau pembedaan anggota masyarakat ke dalam berbagai kelas sosial ini sebenarnya diperlukan atau tidak? Jawaban terhadap pertanyaan ini bersifat relatif, tergantung dari mana sudut pandang kita melihatnya dan pendekatan macam apa yang akan kita pergunakan.

a). Pendekatan Asumsi Dasar

Para penganut pendekatan fungsional biasanya akan menjawab bahwa pelapisan sosial adalah sesuatu yang inhern dan diperlukan demi kelangsungan sistem. Sedangkan penganut pendekatan konflik akan menjawab sebaliknya dan menyatakan bahwa timbulnya pelapisan sosial sesungguhnya hanyalah ulah kelompok-kelompok elit masyarakat yang berkuasa untuk mempertahankan dominasinya. Jawaban kedua pendekatan ini wajar bertolak belakang karena keduanya memiliki asumsi dan pandangan yang memang berbeda.

Pendekatan fungsional dan konflik bertumpu pada dua tradisi yang didasari perbedaan asumsi tentang hakikat manusia dan masyarakat. Fungsionalis bertumpu kepada tradisi konservatif yang melihat stratifikasi sosial penting untuk

memenuhi “kebutuhan sosial” masyarakat secara keseluruhan. Pandangan fungsional ini yakin bahwa tanpa adanya pelapisan sosial, masyarakat justru akan kacau karena akan ada peran-peran sosial tertentu yang mengalami kekosongan pelaksana dan pemeran.

Sementara dipihak lain, pendekatan konflik mempertanyakan eksistensi dan makna dari pengertian “kebutuhan sosial”. Penganut pendekatan ini umumnya curiga bahwa di balik alasan pelapisan sosial itu dibutuhkan bagi kalangan sistem sosial sebenarnya barang dan jasa yang bernilai dan langka.

#### b). Pendekatan Fungsional

Menurut Kingsley Davis dan Wilbert Moore, stratifikasi sosial dibutuhkan demi kelangsungan hidup masyarakat yang membutuhkan berbagai macam jenis pekerjaan. Tanpa adanya stratifikasi sosial, masyarakat tidak akan terangsang untuk menekuni pekerjaan-pekerjaan sulit atau pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan proses belajar yang lama dan mahal. Stratifikasi sosial dibutuhkan juga karena kebutuhan masyarakat untuk menempatkan orang-orang ke dalam posisi-posisi yang membutuhkan struktur sosial, dan kemudian mendorong mereka agar menjalankan tugas-tugas yang berhubungan dengan posisi tersebut.

### 8. Cara Mempelajari Stratifikasi Sosial

Menurut Zanden (1979), di dalam sosiologi dikenal tiga pendekatan dalam mempelajari stratifikasi sosial, yaitu:

#### 1. Pendekatan Objektif.

Dalam mengkaji stratifikasi sosial, pendekatan obyektif berusaha untuk memilah-milah masyarakat ke dalam beberapa lapisan dilakukan menurut ukuran-ukuran yang obyektif berupa variable yang mudah diukur secara kuantitatif. Beberapa pakar

demokrasi, misalnya sering membagi masyarakat menurut kategori umum, atau perbedaan besar penghasilan. Pihak yang dikategorikan menurut pendekatan obyektif mungkin saja mereka tidak menyadari atau menolak termasuk ke dalam kategori yang dibuat secara obyektif oleh pakar tersebut. Contohnya ketika pemerintah mengumumkan jumlah orang miskin di Indonesia tahun 1990 hanya tinggal sekitar 27 juta jiwa, banyak anggota masyarakat menolak atau tidak sadar bahwa mereka termasuk orang miskin.

## 2. Pendekatan Subyektif

Pendekatan subyektif dalam melihat stratifikasi sosial dalam masyarakat tidak diukur dengan kriteri-kriteria yang obyektif, melainkan dipilih menurut kesadaran subyektif warga masyarakat itu sendiri. Berbeda dengan pendekatan obyektif di mana peneliti bisa menyusun kategori statistik, untuk pendekatan subyektif yang tersusun adalah kategori sosial yang ditandai oleh kesadaran jenis. Seseorang menurut kriteria obyektif termasuk miskin, menurut pendekatan subyektif ini bisa saja dianggap tidak miskin kalau ia sendiri memang merasa bukan termasuk kelompok masyarakat miskin.

## 3. Pendekatan Reputasional

Pendekatan reputasional berpandangan, bahwa pelapisan sosial disusun dengan cara subyek penelitian diminta menilai status orang lain dengan jalan menempatkan orang lain tersebut ke dalam suatu skala tertentu. Untuk mencai siapakah di desa tertentu yang termasuk kelas atas, peneliti yang menggunakan pendekatan reputasional bisa melakukannya dengan cara menanyakan kepada warga desa tersebut siapakah warga desa setempat yang paling kaya atau menanyakan siapakah warga desa setempat yang paling mungkin diminta pertolongan meminjamkan uang dan sebagainya.

## 9. Fungsi Stratifikasi Sosial

Pada umumnya orang beranggapan bahwa stratifikasi sosial menghambat kemajuan masyarakat/individu. Sebenarnya stratifikasi sosial mempunyai beberapa fungsi atau kegunaan. Menurut Kingsley (1967) dan Wilbert Moore menjelaskan, bahwa fungsi-fungsi stratifikais sosial adalah:

- a). stratifikasisosialmenjelaskankepadaseseorang“tempat”nya dalam masyarakat sesuai dengan pekerjaan, menjelaskan kepadanya bagaimana ia harus menjalankannya dan sehubungan dengan tugasnya menjelaskan apa dan bagaimana efek serta sumbangannya kepada masyarakat.
- b). karena peranan dari setiap tugas dalam setiap masyarakat berbeda-beda dengan seringkali adanya tugas yang kurang dianggap penting oleh masyarakat (karena beberapa pekerjaan meminta pendidikan dan keahlian terlebih dahulu) maka berdasarkan perbedaan persyaratan dan tuntutan atas prestasi kerja, misalnya memberi imbalan kepada yang melaksanakan tugas dengan baik dan sebaliknya “menghukum” yang tidak atau kurang baik. Dengan sendirinya terjadilah distribusi penghargaan, hal mana menghasilkan dengan sendirinya pembentukan stratifikasi sosial.
- c). penghargaan yang diberikan biasanya bersifat ekonomik, berupa pemberian status sosial atau fasilitas-fasilitas yang karena distribusinya berbeda (sesuai dengan pemenuhan persyaratan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas) membentuk struktur sosial (Astrid, 1999: 67).

Masyarakat dengan sendirinya, akan terbentuk lapisan-lapisan yang didasarkan pemenuhan persyaratan tugas tadi. Akhirnya berdasarkan penilaian atas pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan tugas dalam masyarakat, akan terbentuk suatu pelembagaan yang dalam tingkat teratasnya menguasai

masyarakat dan menentukan distribusi dari penghargaan ini lebih lanjut. Lapisan-lapisan sosiologik dalam masyarakat ini akhirnya akan merupakan unsur penertiban dan pengaturan pelaksanaan tugas masing-masing anggota dalam masyarakat. Dengan demikian melalui stratifikasi sosial terbentuklah stratifikasi politik.

Meskipun demikian, dalam masyarakat yang mengalami perubahan sosial yang dahsyat, tidak selalu stratifikasi sosial berimpitan dengan stratifikasi politik, hal mana justru memberi sifat dinamika terhadap masyarakatnya dan merupakan masyarakat demokratis. Di samping unsur pembagian pekerjaan sebagai faktor penentu dalam pembentukan stratifikasi sosial, dikenal juga unsur biologik dan ras sebagai faktor pembentuknya. Suatu bangsa yang menjajah biasanya menempatkan diri pada lapisan masyarakat teratas, membatasi pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk orang-orang dari ras tersebut.

Di samping unsur-unsur obyektif, terdapat pula unsur subyektif, yaitu kesadaran manusia akan lapisan golongan masyarakatnya. Kesadaran ini dapat—tetapi dapat juga tidak—menyebabkan suatu perasaan senang dan puas diri. Menurut Richard Centers unsur kesadaran akan lapisan sosial timbul karena: *“comes from the individual’s feelings of identification with others who have imiliar backgrounds”*.

Beberapa indikator tentang penilaian subyektif seseorang menempati lapisan masyarakat ialah:

1. bentuk rumah; kondisi perawatan rumah, tata kebun.
2. wilayah tempat tinggal atau lingkungan karena dianggap bahwa wilayah tempat tinggal menentukan status.

3. pekerjaan atau profesi yang dipilih seseorang menunjukkan keinginan (identifikasi diri) dengan lapisan masyarakat tertentu,
4. sumber pendapatan menentukan status sosial seseorang (W. Lloyd Warner). Sehubungan dengan ini perlu dijelaskan bahwa bukan jumlah uang yang diterima yang menentukan melainkan status yang dinikmati melalui sumber itu.

### **B. Pendidikan dan Stratifikasi Sosial.**

Dalam kehidupannya, manusia memiliki berbagai macam posisi, status dan peran. Posisi, status dan peran manusia dalam suatu masyarakat disebabkan oleh beberapa factor, antara lain yaitu: factor jenis kelamin, factor usia, factor ekonomi, faktor keturunan, dan bahkan factor ilmu pengetahuan atau pendidikan.

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang dapat menyebabkan seseorang mampu melakukan mobilitas sosial. Melalui pendidikan yang ditempuh oleh seseorang, ia dapat meraih berbagai kelebihan atau keuntungan, termasuk keebihan dalam aspek ekonomi. Menurut Nurkolis, setidaknya ada lima fungsi pendidikan dalam untuk memenuhi kebutuhan peradaban manusia, yaitu; *pertama*, pendidikan sebagai alat untukperkembanganekonomidanbukansekedarpertumbuhan ekonomi. Sebagian anggota masyarakat yang segaja mengejar pendidikan tertentu untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi. Karena umumnya, orang yang berpendidikan lebih tinggi akan lebih inovatif, mempunyai hubungan sosial yang lebih luas, dan tak dapat dipungkiri berpenghasilan relatif lebih baik. Pendidikan mempunyai peranan yang sanga penting dalam pertumbuhan ekonomi. Melalui ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan seseorang dapat meningkatkan pendapatannya; *kedua*, pendidikan berfungsi sebagai investasi

memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi daripada investasi fisik di bidang lainnya. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiaya pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memiliki dunia kerja; *ketiga*, fungsi politis merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkat sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individu, pendidikan membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warganegara yang benar dan bertanggung jawab. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mengerti hak dan kewajibannya sehingga wawasan dan perilakunya semakin demokratis; *keempat*, fungsi budaya yang merujuk pada sumbangan pendidikan pada peralihan dan perkembangan budaya pada tingkatan sosial yang berbeda. Pada tingkat individual, pendidikan membantu peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya, kesadaran estetis serta untuk bersosialisasi dengan norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan sosial yang baik. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mampu menghargai atau menghormati perbedaan dan pluralitas budaya sehingga memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap keanekaragaman budaya; dan *kelima*, fungsi kependidikan merujuk kepada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan dan pemeliharaan pendidikan membantu peserta didik belajar cara belajar dan membantu pendidik cara mengajar (Legowo, 2006: 123).

Hubungan antara latar belakang pendidikan dimiliki masyarakat dan ketidaksamaan struktur sosial (*social structured inequality*) tidak dapat menghilangkan ketidaksamaan struktur sosial-ekonomi pada suatu kelompok masyarakat. Meskipun suatu kelompok masyarakat di mana banyak kalangan anak mudanya memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi, katakanlah alumni perguruan tinggi, tetapi tidak serta merta

dapat memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang memadai, sehingga diharapkan dapat mengubah struktur sosial ekonomi ke arah lebih tinggi.

Bagi kelompok masyarakat dari kelas bawah, akan sangat berarti bila setelah memperoleh pendidikan tinggi memiliki akses memperoleh pekerjaan, sehingga dapat mengubah struktur sosial yang sering kali diukur dengan tingkat pendapatannya. Akses untuk berbagai bentuk status pekerjaan juga akan menyulitkan bila tidak memiliki latar belakang pendidikan atau tidak menamatkan pendidikan tertentu, katakanlah di perguruan tinggi, dimana aksesnya akan terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa ijazah, tamatan pendidikan di perguruan tinggi, walaupun tidak selalu mudah memperoleh akses langsung dalam status pekerjaan pada perusahaan atau instansi akan tetapi jauh lebih baik dan lebih berprospek dalam memperoleh pekerjaan dibandingkan dengan mereka (generasi muda) yang tidak menempuh atau gagal dalam pendidikan. Kelompok masyarakat (generasi muda) yang *uneducated* ini umumnya cenderung akan lebih sulit merangkak dan akhirnya dapat mengubah struktur sosial-ekonomi ke arah yang lebih tinggi pada masyarakat manapun di dunia ini.

Selain itu, sebagai lembaga sosial pendidikan mempunyai tugas utama mendidik dan meneruskan ilmu pengetahuan yang telah dihimpunnya, serta memberi gelar berdasarkan penilaian lembaga terhadap kemampuan anak didiknya berdasarkan kriteria tertentu.

Pendidikan, selain dapat meningkatkan pengetahuan juga dapat menaikkan status sosial seseorang. Melalui label gelar yang diperoleh seorang alumnus sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam misalnya, akan mampu menaikkan status sosialnya sesuai dengan penilaian masyarakat luas terhadap hasil almamaternya serta harapan-harapan yang dimilikinya

terhadap alumninya. Karena itulah negara-negara berkembang menghadapi suatu gerakan arus menuju ke lembaga pendidikan tinggi, sungguhpun pendidikan tinggi merupakan sesuatu yang mahal dan meminta banyak pengorbanan, yaitu pengorbanan uang, waktu dan energi. Dalam memberi maupun menerima pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu sering terlupakan, bahwa tujuan utama dari lembaga pendidikan adalah membentuk kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah manusia dan mendorong manusia membentuk suatu dunia yang lebih baik baginya berdasarkan pada nilai-nilai Islam (Baharudin, 2008: 178).[]

## BAB VII

# PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### A. Pendahuluan

Manusia bukan hanya berada di dunia tetapi dia mengada. Mengada atau bereksistensi ialah prose menjadi manusia (*human being*). Manusia itu bukannya semata-mata hidup sebagai adanya manusia (*human being*) yang mempunyai sifat-sifat khusus kemanusiaan, tetapi manusia itu berkewajiban mewujudkan kemanusiaannya itu *human being*)

Menjadi manusia tidak terjadi dalam ruangan yang kosong, tetapi dalam lingkungan sesama manusia atau ruang kemanusiaan. Ruang kemanusiaan itu tidak lain adalah kebudayaan manusia yang terbetang dalam ruang dan waktu. Tidak ada masyarakat tanpa budaya. Oleh sebab itu, pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan eksistensial. Kebudayaan dalam pengertian tertentu merupakan proses pendidikan. Dan tidak ada kebudayaan yang statis, kebudayaan terus menerus dalam proses perubahan. Oleh sebab itu, proses pendidikan juga merupakan suatu proses yang dinamis. Proses pendidikan tidak dapat direduksi hanya sebagai proses yang terjadi dalam lembaga sekolah, tetapi sekolah sebagai lembaga sosial merupakan bagian dari proses pendidikan sebagai proses pembudayaan. Lembaga sekolah yang melaksanakan proses

pendidikan, merupakan bagian dari proses pendidikan yang lebih luas sebagai proses pembudayaan. Dengan demikian, proses pendidikan hanya dapat diketahui apabila ditempatkan dalam lingkungan kebudayaan suatu masyarakat (Tilaar, 2003: xxiii). Dengan demikian kita perlu menjelaskan bagaimana proses pendidikan sebagai bagian dari proses kebudayaan dalam suatu masyarakat.

## B. Hakikat Pendidikan

Dikalangan para ahli pendidikan diartikan secara berbeda-beda. Menurut John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman, hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan keseimbangan sosial. Proses ini melibatkan pengawasan dan kelompok di mana ia hidup. Sedangkan menurut H. Horne, pendidikan adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar, intelektual, emosional dan memanusiasikan manusia (Yunus, 1997:7).

Sedangkan pendidikan menurut Ahmadi dalam bukunya, *Ideologi Pendidikan* (2009: 29) adalah usaha yang lebih khusus ditekankan untuk mengembangkan fitrah keberagamaan (*religiousitas*) subyek didik agar lebih mampu memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Dalam konteks seperti ini pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi muslim yang selain memiliki iman dan taqwa, juga memiliki kemampuan yang teraktualisasi dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam sekitarnya secara baik, positif dan konstruktif. Dengan demikian, maka fungsi pendidikan mampu melahirkan generasi

yang tidak hanya mampu mewariskan perilaku, kebiasaan, kebudayaan, melainkan juga mampu melahirkan kebudayaan-kebudayaan baru yang berdasarkan nilai-nilai Islam di masa depan.

Seperti halnya pendidikan pada umumnya, pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan. Melalui pendidikanlah masyarakat muslim dapat mempromulasikan kebudayaan serta dapat mentransformasikan kebudayaannya sekaligus dikembangkan dari generasi ke generasi.

Dengan demikian, pendidikan bagi masyarakat muslim dalam kehidupan bermasyarakatnya mempunyai peranan yang sangat penting. Melalui pendidikan kepribadian Islami, setiap warga masyarakat muslim dapat dibentuk. Melalui pendidikan pula perubahan dan pengembangan kebudayaan masyarakat muslim dapat dilakukan. Dalam posisi seperti ini, pendidikan dapat menjadi sutau kekuatan dalam mencetak sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dalam mengembangkan segala potensi dirinya berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Noor Syam mengemukakan bahwa: ...”dengan adanya pendidikan manusia berkebudayaan dengan proses pendidikan pula manusia menuju suatu tingkat perkembangan kepribadian agar manusia kreatif dan produktif dalam menciptakan kebudayaan. Secara teknis tujuan pendidikan adalah membudayakan manusia atau membina supaya berkebudayaan” (Syam, 1998: 80)

### C. Hakikat Kebudayaan

Kata “kebudayaan” berasal dari bahasa sansekerta *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal”. Ada sarjana lain yang mengupas kata *budaya* sebagai suatu perkembangan dari majemuk *budi-daya*, yang berarti “*daya dari budi*”

(Koedjaraningrat, 1981). Mereka membedakan “budaya” dari “kebudayaan”. demikianlah “budaya” adalah “daya dari budi” yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan “kebudayaan” adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu. Istilah antropolog-budaya perbedaan itu ditiadakan. Kata “budaya” di sini hanya dipakai sebagai suatu singkatan saja dari “kebudayaan” dengan arti yang sama.

Sementara itu, dikalangan antropolog, kebudayaan seringkali diartikan secara berbeda. Sampai sejauh ini, berdasarkan literature yang, definisi kebudayaan yang dihasilkan antropolog sudah mencapai lebih dari 170 definisi. Definisi kebudayaan yang paling tua dikemukakan oleh Edward B. Taylor pada tahun 1871. Kebudayaan oleh Taylor didefinisikan sebagai: “keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat-istiadat dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat”. Alfred Weber (dalam BassamTibi, 1999:73) mendefinisikan kebudayaan sebagai “suatu bentuk eksresional spiritual dan intelektual terhadap substansi kehidupan, atau suatu sikap spiritual dan intelektual terhadap substansi kehidupan itu”.

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas. Di dalamnya termasuk misalnya saja agama, ideology, kebathinan, kesenian, dan semua unsur yang m

Merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat. Sedangkan Taylor mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hokum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Menurut C. Wissier, dan Kluckholn A. Davis secara mirip mengartikan kebudayaan sebagai perbuatan yang pada dasarnya merupakan instink, selanjutnya dimodifikasi dan dikembangkan melalui proses belajar. Kluckholn, misalnya telah melakukan pelacakan terhadap sekian banyak pengertian kebudayaan dan kemudian merangkumnya menjadi: (1) keseluruhan cara hidup suatu masyarakat, (2) warisan sosial yang diperoleh individu dari kelompoknya, (3) suatu cara berpikir, merasa dan percaya, (4) suatu abstarksi dari tingkah laku, (5) suatu teori pada pihak antropolog tentang cara suatu kelompok masyarakat nyatanya bertingkah laku, (6) suatu gudang untuk mengumpulkan hasil belajar, (7) seperangkat orientasi-orientasi standar pada masalah yang sedang berlangsung, (8) tingkah laku yang dipelajari, (9) suatu mekanisme untuk penataan tingkah laku yang bersifat normative, dan (10) seperangkat teknik untuk menyesuaikan, baik dengan lingkungan luar maupun dalam dengan orang-orang lain, (11) suatu endapan sejarah.

Lebih lanjut C. Kluckhon dalam bukunya *Universal Categories of Culture* menjelaskan unsure-unsur universal kebudayaan yang didapatkan pada semu bangsa di dunia, antara lain, yaitu: a) bahasa (lisan maupun tulis), b) sistem teknologi (peralatan dan perlengkapan hidup manusia), c) sistem mata pencaharian (mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi), d) organisasi sosial (sistem kemasyarakatan), e) sistem pengetahuan, f) kesenian, dan, g) sistem religi. Berkaitan dengan sistem religi berusaha mengungkap manusia percaya pada kekuatan supranatural, mengapa manusia melakukan aktivitas-aktivitas yang beraneka ragam untuk melakukan dan mencari hubungan dengan kekuatan supranatural? Mengapa masyarakat yang satu dengan lainnya memiliki sistem religi yang berbeda? Bagaimana pula sistem religi mengalami perubahan.

Dengan demikian, kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial, yang isinya ialah perangkat-perangkat, model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi, dan untuk mendorong serta menciptakan tindakan yang diperlukannya. Kebudayaan dalam konsep ini, mengandung dua unsur utama, yaitu: sebagai pola tindakan dan pola dari tindakan. Sebagai pola dari tindakan, kebudayaan ialah seperangkat pengetahuan manusia yang berisi model-model yang secara selektif digunakan untuk menginterpretasikan, mendorong dan menciptakan tindakan atau dalam pengertian lain sebagai pedoman tindakan, sedangkan sebagai pola dari tindakan, kebudayaan ialah apa yang dilakukan dan dapat dilihat oleh manusia sehari-hari sebagai sesuatu yang nyata adanya atau dalam pengertian lain ialah sebagai wujud tindakan.

Robert H. Lowie (1997) mendefinisikan kebudayaan adalah “penjumlahan total apa yang dicapai oleh individu dari masyarakatnya—keyakinan-keyakinan, adat-istiadat, norma-norma artistic, kebiasaan makan, dan ukir-ukiran yang dimilikinya,, sebagai warisan masa lampau yang disampaikan melalui pendidikan formal atau tidak formal”. Sementara itu, Herkovits dan Malinowski memberikan definisi kebudayaan sebagai suatu yang superorganik. Karena kebudayaan yang turun-menurun dari generasi ke generasi tetap hidup terus atau berkesinambungan, meskipun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan karena irama kematian dan kelahiran.

Hassan Shadly mengemukakan, kebudayaan berarti keseluruhan dari hasil manusia hidup bermasyarakat, berisi aksi-aksi terhadap dan oleh sesama manusia sebagai anggota

masyarakat yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral hukum, adat istiadat, dan lainnya.

Koentjaraningrat dalam bukunya *Pengantar Ilmu Antropologi* (1985), menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan manusia, yang meliputi: a) Kebudayaan materiil (bersifat jasmaniah) yang meliputi benda-benda ciptaan manusia, misalnya kendaraan, alat rumah tangga, dan lain-lainnya, b) Kebudayaan non materiil (bersifat rohaniah), yaitu semua hal yang tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya: agama, bahasa, ilmu pengetahuan dan sebagainya.

Talcott Parsons dan A.L Kroeber pernah menganjurkan untuk membedakan secara tajam wujud kebudayaan sebagai suatu sistem ide dari ide-ide dan konsep-konsep dari wujud kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola (Koedjaraningrat, 1986). J.J Honigmann dalam bukunya *The World of Man* (1959:11-12) membedakan ada tiga gejala kebudayaan, yaitu (a) ideas, (b) activities, dan (c) artifacts.

Menurut Koedjaraningrat kebudayaan itu ada tiga wujudnya, yaitu: 1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, 2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan 3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. (Koedjaraningrat, 1986)

Luasnya aspek kebudayaan menimbulkan adanya telaahan mengenai apasebenarnya isi dari kebudayaan itu. Kondjaraningrat (2000: 2), mengemukakan unsur universal dari kebudayaan ada tujuh, yaitu: a) Sistem Religi dan upacara keagamaan, b) Sistem dan organisasi kemasyarakatan, c). Sistem pengetahuan, d) Bahasa, e) Kesenian, f) Sistem mata pencaharian hidup, dan g) Sistem Tehnologi dan perlatan.

#### **D. Pendidikan Sebagai Wahana Pengembangan kebudayaan.**

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian terdahulu, bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses pembelajaran pemberian ilmu pegetahuan, keterampilan dan sikap melalui pikiran, karakter, serta kapasitas fisik dengan menggunakan pranata-pranata agar tujuan yang ingin dapat dipenuhi berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Pendidikan dapat diperoleh melalui lembaga formal dan informal. Penyampaian kebudayaan melalui lembaga informal tersebut dilakukan melalui inkulturasi semenjak kecil dalam lingkungan keluarga. Dalam masyarakat yang sangat kompleks, terspesialisasi dan berubah cepat pendidikan memiliki fungsi yang sangat besar dalam memahami kebudayaan sebagai satu keseluruhan.

Pendidikan itu inheren kebudayaan masyarakat Islam, sebagaimana juga kebudayaan inheren dalam dalam pendidikan pada umumnta. Dengan demikian, pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia tidak dapat dilepaskan diri dari kebudayaan. Kebudayaan juga tidak dapat melepaskan diri dari pendidikan. Tujuan yang hendak dicapai melalui pendidikan adalah manusia yang manusiawi sesuai dengan potensinya berdasarkan nilai-nilai jaran Islam. Tidak diharapkan pendidikan yang menjadikan manusia lebih dari manusia atau kurang dari manusia. Proses yang menyebabkan binatang

dapat berperilaku manusia juga bukan pendidikan, melainkan merupakan penjajahan. Tidak ada keselarasan antara kognisi (memang tidak punya) dan psikomotorik yang terjadi pada binatang yang berperilaku manusia.

Kebudayaan tidak diwariskan secara generatif atau biologis. Bisa saja hasil kerja cipta, karsa dan rasa orang tua tidak dimiliki oleh anak-anaknya. Anak-anak juga bisa menghasilkan kerja cipta, karsa dan rasa yang bisa jauh melebihi apa yang telah dihasilkan orang tuanyapenyebab utamanya adalah karena kebudayaan hanya dapat dimiliki atau dihasilkan melalui proses belajar.

Proses belajar dalam menghasilkan kebudayaan itulah yang merupakan inti pendidikan. Pendidikan akan menghasilkan kebudayaan masyarakat Islam. Pada giliran lain, kebudayaan masyarakat Islam menghasilkan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas menghasilkan kebudayaan yang berkualitas pula. Sebaliknya, kebudayaan luhurlah yang dapat menghasilkan pendidikan yang luhur pula. Pendidikan buruk, kebudayaan juga buruk. Kebudayaan buruk, pendidikan juga buruk. Lihatlah kebudayaan primitive menghasilkan pendidikan primitif atau sebaliknya pendidikan primitif menghasilkan kebudayaan primitif.

Kebudayaan masyarakat Islam itu mencakupi pendidikan. Pendidikan yang menyeluruh juga meliputi kebudayaan. Pendidikan itu timpang apabila tidak mencapai kebudayaan. Dengan demikian, mau tidak mau pendidikan itu harus mempehitungkan kebudayaan. Tidak ada penyelenggaraan pendidikan yang tidak menggunakan dasar kebudayaan, sekalipun suatu bangsa itu primitif.

Melalui pewarisan kebudayaan dan internalisasi pada setiap individu, pendidikan hadir dalam bentuk sosialisasi kebudayaan, berinteraksi dengan nilai-nilai masyarakat setempat dan

memelihara hubungan timbal-balik yang menentukan proses-proses perubahan tatanan sosio-kultur masyarakat dalam rangka mengembangkan kemajuan peradaban. Sebaliknya, dimensi-dimensi sosial yang senantiasa mengalami dinamika perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor dominan yang telah membentuk eksistensi pendidikan manusia. Penggunaan alat dan sarana kebutuhan hidup yang modern telah memungkinkan pola pikir dan sikap manusia untuk memproduksi nilai-nilai sesuai dengan intensitas pengaruh teknologi terhadap tatanan kehidupan sosial budaya.

#### **E. Kepribadian dalam Proses Kebudayaan**

Fungsi pendidikan dalam konteks kebudayaan dapat dilihat dalam perkembangan kepribadian manusia. Tanpa kepribadian manusia tidak ada kebudayaan, meskipun kebudayaan bukanlah sekedar jumlah kepribadian-kepribadian. Para pakar antropologi, menunjuk kepada peranan individu bukan hanya sebagai bidak-bidak di dalam papan catur kebudayaan. Individu adalah creator dan sekaligus manipulator kebudayaannya. Dalam hal ini studi kebudayaan mengemukakan pengertian “sebab akibat sirkuler” yang berarti bahwa antara kepribadian dan kebudayaan terdapat suatu interaksi yang saling menguntungkan. Di dalam perkembangan kepribadian diperlukan kebudayaan dan seterusnya kebudayaan akan dapat berkembang melalui kepribadian-kepribadian tersebut. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa pendidikan bukan semata-mata transmisi kebudayaan secara pasif tetapi perlu mengembangkan kepribadian yang kreatif. Pranata sosial yang disebut sekolah harus kondusif untuk dapat mengembangkan kepribadian yang kreatif tersebut. Namun apa yang terjadi dalam lembaga pendidikan yang bernama sekolah kita

ialah sekolah telah menjadi sejenis penjara yang memasung kreativitas peserta didik.

Kebudayaan sebenarnya berasal dari istilah sosiologi untuk tingkah laku yang bisa dipelajari. Dengan demikian tingkah laku manusia bukanlah diturunkan seperti tingkah laku binatang tetapi harus dipelajari kembali berulang-ulang dari orang dewasa dalam suatu generasi. Di sini kita lihat bahwa betapa pentingnya peranan pendidikan dalam pembentukan kepribadian manusia.



# BAB VIII

## PENDIDIKAN

### DAN PERUBAHAN SOSIAL

#### A. Pendidikan Sebagai Lembaga Sosial.

Dalam kehidupannya, manusia memiliki berbagai kebutuhan seperti kebutuhan sandang, pangan, papan dan bahkan kebutuhan akan seks. Semua kebutuhan tersebut, manusia berusaha untuk dipenuhinya secara maksimal. Untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, maka manusia membutuhkan kebutuhan yang lainnya, seperti nilai, norma, kepercayaan, kekuasaan, status dan peran.

Untuk memenuhi kebutuhan akan nilai, norma, kepercayaan, kekuasaan, status dan peran, manusia juga membutuhkan lembaga sosial, seperti lembaga keagamaan, lembaga politik, lembaga ekonomi, dan 1 pendidikan. Menurut Nurkolis, setidaknya ada lima fungsi pendidikan dalam untuk memenuhi kebutuhan peradaban manusia, yaitu; *pertama*, pendidikan sebagai alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi; *kedua*, pendidikan berfungsi sebagai investasi memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi daripada investasi fisik di bidang lainnya. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiaya pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memiliki dunia kerja;

*ketiga*, fungsi politis merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkat social yang berbeda. Misalnya pada tingkat individu, pendidikan membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warganegara yang benar dan bertanggung jawab. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mengerti hak dan kewajibannya sehingga wawasan dan perilakunya semakin demokratis; *keempat*, fungsi budaya yang merujuk pada sumbangan pendidikan pada peralihan dan perkembangan budaya pada tingkatan social yang berbeda. Pada tingkat individual, pendidikan membantu peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya, kesadaran estetis serta untuk bersosialisasi dengan norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan social yang baik. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mampu menghargai atau menghormati perbedaan dan pluralitas budaya sehingga memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap keanekaragaman budaya; dan *kelima*, fungsi kependidikan merujuk kepada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan dan pemeliharaan pendidikan membantu peserta didik belajar cara belajar dan membantu pendidik cara mengajar (Legowo, Implementasi Dsentralisasi Pendidikan dan Tantagannya, University Mataram Press, 2006: 123).

Searah dengan fungsi pendidikan di atas, secara khusus pendidikan sebagai lembaga sosial memiliki fungsi penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat. Setidaknya ada tiga fungsi pendidikan, yaitu: (1) pendidikan sebagai sarana penanaman nilai kepada peserta didik, (2) pendidikan berfungsi sebagai sarana transmisi budaya Islami dari satu generasi ke generasi berikutnya, (2) pendidikan memainkan peranan utama di dalam membimbing seseorang memiliki berbagai posisi dalam masyarakat, (3) pendidikan berfungsi untuk mendorong

terjadinya perubahan sosial suatu masyarakat (Baharudin, 2008: 134).

Selain itu, sebagai lembaga sosial pendidikan mempunyai tugas utama mendidik dan meneruskan ilmu pengetahuan yang telah dihimpunnya, serta memberi gelar berdasarkan penilaian lembaga terhadap kemampuan anak didiknya berdasarkan kriteria tertentu.

Pendidikan, selain dapat meningkatkan pengetahuan juga dapat menaikkan status sosial seseorang. Melalui label gelar yang diperoleh seorang alumnus sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam misalnya, akan mampu menaikkan status sosialnya sesuai dengan penilaian masyarakat luas terhadap hasil almamaternya serta harapan-harapan yang dimilikinya terhadap alumninya. Karena itulah negara-negara berkembang menghadapi suatu gerakan arus menuju ke lembaga pendidikan tinggi, sungguhpun pendidikan tinggi merupakan sesuatu yang mahal dan meminta banyak pengorbanan, yaitu pengorbanan uang, waktu dan energi. Dalam memberi maupun menerima pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu sering terlupakan, bahwa tujuan utama dari lembaga pendidikan adalah membentuk kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah manusia dan mendorong manusia membentuk suatu dunia yang lebih baik baginya berdasarkan pada nilai-nilai Islam.

Esensi pendidikan tinggi Islam sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi pada umumnya kurang dipahami. Kenyataan bahwa sebagai hasil pendidikan tinggi Islam seorang anak didik akan menerima gelar, dianggap merupakan suatu kenyataan mutlak bahwa seakan-akan apa yang diberi oleh almamater telah diterima secara mutlak dan penuh pula. Prinsip ini bertentangan dengan kenyataan bahwa volume pengetahuan terlalu banyak terhimpun di suatu lembaga

pendidikan tinggi (sesuai dengan spesialisasi) untuk diberikan seluruhnya kepada para mahasiswa. Adanya suatu pengertian dari fungsi pendidikan tinggi Islam dalam banyak hal, juga merupakan kelalaian dari pihak pendidik sendiri, karena dalam kesibukan mengajar mereka lupa menyampaikan nilai-nilai ilmiah dan moral tadi, serta menjelaskan fungsi dan peran yang dapat diharapkan dari lembaga pendidikan tinggi dalam hubungannya dengan masyarakat umumnya dan anak didik khususnya. Dalam kesibukan inilah penelitian dan pendidikan banyak dilakukan (tanpa unsur kesegajaan), tanpa melihat relevansi dan hubungannya dengan lingkungan maupun mahasiswanya, sehingga pendidikan dan penelitian diadakan demi pendidikan dan penelitian itu sendiri, dengan melupakan hubungan dan interaksi sosial suatu lembaga pendidikan tinggi dengan unsur lingkungan. Inilah sebabnya mengapa pendidikan di tingkat tinggi banyak mengalami kerugian dalam arti penilaian terhadapnya, yaitu karena kesibukan menyebabkan terlupakannya beberapa unsur penentu, seperti:

1. bahwa mutu ilmu yang diterima anak didik ditentukan oleh mutu tenaga pengajar,
2. bahwa mutu anak didik ditentukan oleh mutu yang diperoleh sebelum memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. bahwa perlu ada partisipasi aktif dari tenaga pengajar dalam penelitian yang juga relevan dengan kebutuhan langsung masyarakat,
4. bahwa mutu tenaga pengajar dan pendidikan ditentukan oleh peralatan penelitian dan fasilitas-fasilitas pelaksanaannya (Peter dkk, 1970: 111)

Pendidikan tinggi merupakan medium untuk mendidik kaum intelektual muda guna mempersiapkan mereka dalam menghadapi berbagai permasalahan global yang sedang dan

yang akan mereka hadapi. Di samping itu, tugas pendidikan adalah meneruskan dan memindahkan nilai-nilai ilmiah yang baru dan lama, serta menyebarkan pemikiran-pemikiran, nilai-nilai yang dianggapnya penting untuk meningkatkan martabat manusia maupun masyarakat lingkungannya. Dengan demikian, secara otomatis telah diterima pemikiran bahwa setiap lembaga pendidikan tinggi Islam haruslah bersifat *future oriented* (berorientasi masa depan), artinya mencerminkan kegiatannya dalam efektivitas dan dampaknya terhadap masa depan bangsa dan umat manusia pada umumnya.

Sejalan dengan pernyataan di atas, maka jelaslah bahwa pendidikan dan para pendidik haruslah memiliki tujuan utamanya, selain untuk menanamkan nilai ajaran Islam, pendidikan juga memiliki fungsi untuk membantu anak didiknya dalam belajar dan menganalisa situasi sosial dan lingkungan sesuai dengan kebutuhan.

Setiap lembaga pendidikan tinggi Islam haruslah terlibat dalam kejadian-kejadian aktual masyarakatnya dan ikut menentukan pembentukan pribadi-pribadi anak didiknya dalam mengatasi maupun menjadi unsur dalam kejadian-kejadian aktual tadi. Tugas pendidikan tinggi Islam adalah membantu anak didiknya agar supaya proses sosialisasi dan pendidikan sosialnya akan dapat menjadi pegangan dalam situasi penyesuaian diri. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam pada negara-negara yang sedang berkembang memiliki tugas mempersiapkan anak didiknya dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, melalui proses sosialisasi yang serasi, sehingga anak didik mampu menjadi anggota masyarakat yang baik dan berperan dalam lingkungannya.

Di negara-negara berkembang, lembaga pendidikan tinggi menjadi katalisator modernisasi. Dalam realitasnya keberadaan lembaga pendidikan tinggi masih terlalu mencerminkan keadaan

betapa asingnya ide-ide lembaga tinggi untuk masyarakatnya (maupun orang-orang yang berkecimpung dan berperan dalam menentukan fungsi pendidikan tingginya sendiri), yaitu karena pendidikan tinggi di negara-negara berkembang masih terlalu banyak mewariskan pendidikan dari negara bekas penjajahnya ataupun negara-negara lain yang dikaguminya. Hal ini terjadi, justru pada saat peranan pendidikan tinggi makin dirasakan merupakan peranan yang integral dengan kemajuan negara dan bangsa, sehingga pendidikan tinggi merupakan bagian dan milik nasional dengan adanya unsur-unsur asing di dalamnya.

### **B. Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat.**

Dalam membahas mengenai perubahan sosial dan pembangunan budaya, terlebih dahulu harus membahas apa maksud serta peranan lembaga pendidikan. Setiap lembaga merupakan hasil dari beberapa faktor yang masing-masing mempengaruhi sosial, ekonomi, maupun politik, sebagaimana juga budaya lingkungan di mana suatu lembaga pendidikan berada. Setiap lembaga pendidikan harus peka terhadap perkembangan-perkembangan lingkungannya. Sesuai dengan situasi sosial, serta nilai-nilai yang dihayati serta harapan yang dimiliki oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi, demikian pulalah peranan suatu lembaga pendidikan dalam masyarakat. Selain itu, apabila orang meneliti peranan suatu lembaga atau seseorang, maka peranan selalu akan ditelitinya dari segi sosiologi maupun psikologi.

Dalam perspektif sosiologis, peranan lembaga sosial selalu akan ditinjau dalam hubungannya dengan kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Sebagaimana manusia satu sama lain mengadakan interaksi dan mengadakan pengaruh timbal-balik, demikian pula kelompok dan lembaga-lembaga sosial mengadakan interaksi satu sama lain dan mempengaruhi

lingkungannya. Sebaliknya, setiap lembaga sosial peka sekali terhadap perubahan lingkungannya, terhadap nilai-nilai kelompoknya serta penilai orang terhadap lembaga sosial tadi. Peranan selalu dihubungkan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu masyarakat. Dengan demikian, peranan nyata suatu lembaga pendidikan adalah juga sesuai dengan pemikiran seberapa jauh suatu masyarakat mengharapkan dapat mencapai tujuannya dengan pemanfaatan lembaga pendidikan sebagai wahana penyediaan sumber daya manusia.

Sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat serta lingkungan terhadap pendidikan sebagai suatu lembaga sosial, pendidikan juga akan memilih beberapa tugas dan peranan yang diharapkan dapat dipenuhinya sesuai dengan kemampuan dan kondisi materi maupun tenaga pendidik dan administrasi yang dimilikinya.

Selain itu, sebagaimana manusia juga hanya akan memberi reaksi terhadap suatu kejadian dengan apa yang pernah dipelajari dan dialaminya. Demikian pula suatu lembaga pendidikan akan memberi reaksinya sesuai dengan apa yang telah dipelajari dan dialaminya. Dengan demikian peranan suatu lembaga merupakan suatu rangkaian reaksi dan tindakan yang terorganisir. Disinilah letak perbedaan antara suatu lembaga sosial dengan individu, di mana individu dapat memberi reaksi secara spontan dan implisit, sedangkan suatu lembaga dalam memberikan reaksi harus dipikir matang-matang terlebih dahulu, yaitu sesuai dengan peraturan dan fungsi formal dan materi dalam masyarakat. Pada pihak lain, reaksi yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki orang-orang yang berkecimpung dalam lembaga itu sendiri, terutama pimpinannya.

Eksistensi dan pengalaman yang dimiliki suatu lembaga pendidikan akan menentukan pula, yaitu: sesuai dengan

pengalamanyangdiperoleh dankebudayaan yangditerapkannya selama “masa hidupnya”. Apakah kebudayaan serta unsur-unsur yang ikut membentuknya? Menurut Milville Herskovits (1970), kebudayaan adalah: *the complex of knowledge, morality, law, usage, custom, and other capabilities and habits that man has acquired.*

Sedangkan dalam klasifikasi besarnya kebudayaan dapat dibagi menjadi:

- a. kebudayaan materi: perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi,
- b. lembaga-lembaga sosial: komunikasi, organisasi sosial, pendidikan, struktur politik lingkungan.
- c. Seni budaya dan ilmu pengetahuan,
- d. Manusia dan alam, sistem nilai dan kepercayaan, serta hidup.

Dalam banyak segi, lembaga pendidikan terikat oleh faktor-faktor budaya yang disebut di atas. Secara langsung atau tidak langsung, setiap lembaga pendidikan, selain selalu mengadakan dan mendorong terjadinya berbagai perubahan, serta semaksimal mewarisi berbagai kebudayaan (*culture transference*).

Lembaga pendidikan agar selalu terlibat dalam berbagai kegiatan untuk:

1. mengadakan refleksi tentang dan terhadap lingkungan (meneliti hubungan batin antar-diri dan lingkungan, hal mana menyangkut masalah idea serta nilai-nilai berbagai kelompok sosial yang harus dilayaninya).
2. meneliti manfaat dari ide-ide tentang manusia dalam segala bentuk kegiatannya sehubungan dengan eksistensinya.
3. meneliti hubungan manusia dengan lingkungannya.

4. meneliti hubungan manusia dengan hidup kehidupannya.
5. meneliti manusia dengan interaksinya (Buehler, 1970: 222).

Usaha lembaga pendidikan tinggi ialah untuk memahami semua hubungan ini demi perbaikan dan meningkatkan martabat manusia dalam lingkungannya. Sehubungan dengan tugas formal ini, lembaga pendidikan selalu akan mencari jalan bagaimana manusia sebaiknya menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah-ubah ini dan hubungan dengan penyesuaian diri itu, dengan sendirinya mengadakan perubahan terhadap lingkungannya pula. Inilah tujuan utama dari pendidikan dalam arti luasnya dan merupakan dasar dari falsafah pendidikan.

### **C. Pendidikan dan Pembentukan Kepribadian Masyarakat.**

Pendidikan—termasuk pendidikan merupakan pusat pengembangan sumber-sumber ilmu pengetahuan dalam memperkaya pengetahuan dan meningkatkan kemampuan kemampuan guna memecahkan masalah-masalah masyarakat.

Dengan menggunakan sumber-sumber dari berbagai kalangan, lembaga pendidikan mendidik anak didiknya untuk mengadakan sosialisasi dalam dunia ilmu pengetahuan, karena sosialisasi berarti: *“A process by which the individual learns the ways of living and of thinking of the society or group to which he belong so that he may be able to function within that society or group”* (Hovde, 1970:23).

Sosialisasi dalam bidang ini tampaknya lebih berhasil dari pada sosialisasi individu dalam lingkungan nasionalnya sendiri. Hal ini dapat disimpulkan dari kenyataan bahwa para ilmuan dari berbagai negara lebih mengerti satu sama lain, sering kali jauh lebih baik dari pada sesama golongan bangsa. Hal ini

menjelaskan bahwa sosialisasi dalam dunia ilmu pengetahuan telah lebih berhasil daripada sosialisasi dalam lingkungan nasional, karena perubahan-perubahan nasional terlalu banyak dan terlalu cepat.

Selain itu, sebagai lembaga pendidikan (terutama lembaga perkembangan dan kebudayaan) pendidikan tinggi seringkali mengajarkan nilai-nilai yang asing yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai lokal yang masih berlaku di suatu masyarakat, seperti beberapa nilai tradisional yang dapat menghambat kemajuan. Nilai-nilai yang baru disebarluaskan ini akhirnya dapat mengganggu stabilitas sosial dan bahkan mengubah kehidupan dan nilai-nilai yang pernah diterima oleh seseorang dalam masa kanak-kanaknya. Menurut Margaret Mead menunjukkan bagaimana di Bali (sebuah contoh masyarakat tradisional) seorang anak berkembang secara alamiah dalam kebudayaannya, seperti juga mengalami perkembangan jiwa, mengerti hidup dalam keluarganya tanpa mengalami gangguan dan terputusnya perkembangan kebudayaan ini.

Ruth Benedict (dalam Buehler, 1979: 25), selanjutnya berpendapat bahwa kehidupan di dunia Barat dan pendidikan modern menunjukkan tendensi mengarah kepada pengadaaan jurang antara apa yang pernah dipelajari orang dalam bagian pertama hidupnya dengan apa yang diterimanya kemudian, sehingga individu melalui pendidikan yang terakhir harus melupakan nilai-nilai yang seringkali diperoleh sebelumnya.

Pendidikan tinggi di negara-negara berkembang, kebanyakan merupakan warisan dari bekas penjajah—merupakan tempat meminta anak didiknya untuk mengubah hidup dan nilai-nilai tradisional dan mengubah kebudayaannya. Hal ini tentunya bukan saja mengakibatkan problem-problem kebudayaan baru, akan tetapi juga masalah-masalah sosial. Karena itu sering dikatakan bahwa lembaga pendidikan tinggi

di negara berkembang membentuk *marginal man*, “manusia serba salah”, bahkan individu-individu dengan kepribadian dan unsur-unsur yang terpisah satu sama lain. *Marginal man* adalah orang-orang yang mencapai kedewasaan tanpa menemukan peranannya dalam masyarakat (Beucher: 1970: 177)

Hal ini mudah terjadi apabila lembaga pendidikan tinggi berkembang melihat diri sebagai lembaga atau pelaku perubahan (*agent of change*) dengan mendidik orang-orang untuk hidup dalam suatu masyarakat yang lebih modern. Pada pihak lain peserta didik memasuki lembaga pendidikan tinggi dengan gambaran lain dan terutama dengan harapan-harapan untuk masa depan (Grant, 1972)

Kebanyakan peserta didik memasuki pendidikan tinggi dengan gambaran mereka, bahwa pendidikan tinggi pada umumnya masih didasarkan pada nilai-nilai tradisional, bahwa guru haruslah mampu memecahkan semua masalah mereka, di samping memberi gelar akademik juga mempunyai tugas memberi suatu pekerjaan kepadanya; bahwa tanggung jawab guru terhadap anak didik tidak berakhir dengan selesainya studi di suatu pendidikan tinggi, bahwa guru haruslah selalu siap untuk membimbing, menolong para alumninya dalam segala bidang.

Dengan demikian, terbentuklah pertentangan nilai tentang peranan pendidikan tinggi dan pembinanya, hal mana merembet dari kampus ke luar. Banyak gerakan anak didik, karena dimulai dengan protes terhadap almamater dengan tuduhan terutama “membebankan anak didik saja”, “mengajar hal-hal yang tidak relevan dengan kebutuhan” dan seterusnya, karena perbedaan persepsi justru tentang nilai-nilai pendidikan tinggi sendiri. Terlupakan bahwa dewasa ini pendidikan tinggi hanya mampu memberi dan meneruskan kepada anak didiknya pegangan dan alat untuk menemukan

jalan dalam masa depannya sendiri. Dengan “peralatan” inilah para alumni suatu pendidikan tinggi harus dapat menemukan perannya dalam masyarakat dan mengalami *self-realization* atau perwujudan dirinya.

Homey menjelaskan, bahwa:

“by self-realization the individual realizes his best potentialities, and that development of these potentialities-given expression to the universal self of an individual through which he not only furthers himself, but others as well. In this way he participates in cultural creativeness” (Hovde, 1973).

Dengan demikian, pendidikan yang diberi di pendidikan tinggi tidak dimaksudkan untuk membatasi diri pada hanya meneruskan tradisi ilmu pengetahuan dan bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut sebagai suatu alat untuk menemukan jalan bagi anak didik, tetapi juga pendidikan tinggi perlu menyatakan pula bagaimana hubungan dan relevansi antara “alat” yang diberikan itu dengan kemungkinan menemukan hidup yang paling baik baginya, tidak saja dalam arti materi, melainkan yang paling utama dalam arti social. Hanya dengan jalan inilah pendidikan tinggi memberi sumbangannya dalam dinamika budaya, membantu dalam proses sosialisasi dan penemuan kepribadian diri anak didiknya. Karena kepribadian seseorang ditentukan oleh faktor ini pula, maka dalam proses sosialisasi bangsa suatu pendidikan tinggi, ternyata bukan saja meneruskan dan mewariskan pengetahuan ilmiah atau membantu anak didik dengan rata-rata 10 tahun (Hecter, 1969: 21). Sebab itu pulalah, pendidikan tinggi bertugas untuk menimbulkan motivasi yang tepat, yaitu mengarahkan pendidikan ke arah penemuan kepribadian diri anak didik, sehingga pendidikan tinggi akan memperoleh arti yang lebih mendalam bagi mereka, bukan saja demi jaminan materi dan

keuangan masa depan, melainkan pendidikan tinggi merupakan tempat yang ideal bagi sumber protes dan pemberontakan karena bagaimanapun juga suatu pendidikan tinggi selalu dan di mana-mana merupakan suatu lembaga yang rawan justru dalam mencari keserasian dalam fungsi memenuhi tuntutan akan kebebasan dan mencari keseimbangan kekuasaan melalui penghindaran pemakaian kekuasaan sebanyak mungkin untuk memungkinkan perkembangan mental swadaya. Situasi inilah yang menyebabkan bahwa pendidikan tinggi menjadi tempat di mana protes dan pemberontakan mudah berkembang dan kadang-kadang menjadi tindakan kekerasan fisik.

Dalam era modernisasi sekarang ini, dengan berbagai kemajuan dalam bidang teknologi dan komunikasi, pendidikan tinggi harus menjadi *think tank* (tangki berpikir), bahkan merupakan sumber pemikiran dan perencanaan dalam bidang sosial dan politik.

Lebih lanjut, perubahan dan kemajuan yang disebarluaskan dari pendidikan tinggi dengan sendiri mempunyai akibat terhadap masyarakat luas. Kenyataan ini telah menyebabkan bahwa banyak lembaga dan pelebagaan sosial yang sebelumnya merupakan tempat pemecahan masalah, tidak mampu lagi memenuhi fungsinya. Dewasa ini peningkatan dan kemajuan penemuan baru dan teknologi telah menyebabkan bahwa hanya lembaga-lembaga yang dapat menguasai masalah-masalah baru inilah yang dapat menjamin kelanjutan hidup dan peranannya. Dalam alam modern sekarang ini, pendidikan tinggi merupakan salah satu lembaga sosial yang telah dan harus mampu mengambil alih peranan dari lembaga-lembaga sosial tradisional. Hal ini, karena pendidikan tinggi merupakan tempat yang paling dapat mengerti perubahan dan kemajuan yang telah ditimbulkannya.

Hagen(1962:73)menyatakanbahwa,perubahanmasyarakat mulai pada saat suatu elit mengalami pengurangan status sosial semulanya. Apabila pendapat Hegen ini diproveksikan ke negara berkembang, maka sebenarnya perubahan masyarakat secara besar-besaran dimulai waktu zaman penjajahan, yaitu waktu elit negara-negara tersebut mengalami pengurangan status sosial dan pergeseran bangsanya oleh penjajah. Karena itulah perubahan besar-besaran dengan penemuan nilai baru (sebagaimana oleh penjajah dinilai baik bagi kepentingannya) sekaligus telah merupakan proses berkurang, bahkan menghilangnya kepribadian bangsa sebagaimana dikatakan oleh Hagen (1962: 73), sebagai berikut: *“One’s status is one’s identity, it include one’s purpose and values in life, Thus the satisfaction derived by an individual from his activity in life depends in part on the status associated with it”*.

#### **D. Pendidikan sebagai sumber dan Kekuatan Pembangunan**

Negara-negara berkembang, secara tahap demi setahap mulai berkerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dalam pembangunannya. Lembaga pendidikan tinggi, selain melaksanakan proses belajar mengajar, pengabdian kepada masyarakat, juga mempunyai tugas penelitian. Hasil penelitian pendidikan tinggi dapat dipergunakan pemerintah dalam menetapkan suatu keputusan atau kebijakan tentang pengadaan suatu rencana pembagunan di suatu tempat. Lembaga pendidikan tinggi, di nilai sebagai tempat dan alat sistem masukan (*feedback system*) atau sistem arus balik yang harus memberi informasi seobyektif-sistematis mungkin kepada pemerintah. Begitu penting hasil pendidikan bagi pemerintah Indonesia, tidaklah berlebihan jika dibentuk Menteri Riset yang bertugas mengkoordinasikan rencana-

rencana penelitian sebagai bahan penunjang pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa peranan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia diakui sebagai lebih dari pada hanya suatu lembaga ilmiah yang secara tidak langsung mempengaruhi masyarakat.

Pendidikan tinggi di Indonesia berpartisipasi secara aktif di dalam pembagunan dan proses pembangunan nasional. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia menjadi suatu potensi dalam masyarakat Indonesia, bukan saja dalam arti sebagai pusat ilmu pengetahuan atau tempat semua ilmu pengetahuan dihimpun (Hovde, 1973: 18), akan tetapi menjadi sumber ide pembangunan.

Dewasa ini pemerintah Indonesia menjadikan lembaga pendidikan tinggi sebagai patner di dalam kegiatan pembangunan nasionalnya. Inilah sebabnya mengapa juga kebebasan ilmiah makin lama makin disadari sebagai sesuatu yang urgen dalam kehidupan pendidikan tinggi, dan karena itu perlu dikembangkan. Fredreck Hovde (1973: 19) menyatakan, bahwa ada 5 (lima) sumber pokok untuk pembangunan dan menyebutnya sebagai sumber ketahanan nasional suatu negara, yaitu:

- a). sumber daya manusia,
- b). sumber daya ekonomi,
- c). keterampilan,
- d). sumber-sumber politik (dalam arti luas),
- e). sumber-sumber moral.

Lebih jauh, Hovde mengemukakan, bahwa “perkembangan dan pengajaran keterampilan, pendidikan profesi, pendidikan dalam pengelolaan sosial dan ekonomi serta kecakapan dalam pemanfaatan organisasi dan lembaga yang ada, merupakan tanggung jawab utama dari pendidikan tinggi”. Apabila

lembaga-lembaga pendidikan tinggi tidak mampu memenuhi tuntutan ini, seluruh negara dan bangsa akan menderita karenanya, yaitu sesuai dengan kekurangan yang terdapat pada pihak pendidikan tinggi (Hovde, 1973: 20).

Menurut Hovde, pendidikan tinggi merupakan pusat pendidikan yang mempersiapkan sumber daya manusia. Lembaga pendidikan tinggi perlu memberikan landasan moral, politik dan berpikir ilmiah kepada anak didiknya. Lebih lanjut Hovde, mengatakan, bahwa karena tugas ilmiah, lembaga pendidikan tinggi menjadi suatu pusat kebudayaan dalam pengertian luas).

Sebagai pusat kebebasan intelektual, sebagai lembaga pendidikan tinggi mendorong orang untuk belajar, menemukan hal-hal yang baru, mengajar dan berdiskusi serta memberikan kritik di mana perlu, pendidikan tinggi memberi sumbangannya yang besar kepada bangsanya dalam bidang persiapan tenaga manusia.

#### **E. Pendidikan dan Perubahan Sosial.**

Tinjauan tentang dialektika antara pendidikan, masyarakat dan perubahan sosial sudah menjadi dialog klasik dan terus menerus dilakukan. Pendidikan merupakan produk masyarakat yang dijadikannya sebagai sarana di dalam melakukan transformasi ilmu pengetahuan, nilai budaya, serta wahana di dalam mengkonstruksikan budaya-budaya baru. Dari sudut pandang masyarakat, pendidikan ialah proses sosialisasi, yakni memasyarakatkan nilai-nilai, ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan. Sosiolog Emile Durkheim dalam karyanya *Education and Sociology* (1956), mengatakan bahwa pendidikan merupakan produk masyarakat yang menetapkan kelanggengan kehidupan masyarakat itu sendiri. Antara masyarakat dan pendidikan tidak bisa dipisahkan

antara satu dengan yang lainnya. Melalui pendidikan pula, suatu masyarakat dapat menciptakan berbagai perubahan sosial yang akan terjadi di masa depan. Melalui pendidikan pula, masyarakat dapat mempersiapkan generasi baru dalam menghadapi berbagai kecenderungan perubahan.

Keberadaan pendidikan menjadi semakin penting manakala dikaitkan dengan berbagai kecenderungan gelombang globalisasi. Ali Alatas (dalam Tilaar, 2002) melihat empat perubahan mendasar yang dapat terjadi:

1. Adanya suatu gelombang perubahan di dalam konstalasi politik global. Apabila sebelumnya politik global bersifat bipolar seperti misalnya Barat versi Timur, negara-negara industri maju versus negara-negara berkembang, negara-negara demokratis versus negara-negara totaliter dan sebagainya. Di dalam gelombang globalisasi konstelasi politik menorah kepada kerangka multipoler. Perdagangan misalnya tidak lagi bersifat hubungan antara dua negara tetapi dengan berbagai negara.
2. Saling menguatkan hubungan antara negara yang berarti semakin kuatnya saling ketergantungan. Keterkaitan antara Negara dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan hak-hak asasi manusia. Keterkaitan tersebut mempunyai dampak positif maupun negatif.
3. Globalisasi menonjolkan permainan-permainan baru didalam kehidupan masyarakat, yaitu aktor-aktor non-pemerintah. Apabila sebelumnya para aktor terutama didominasi oleh pemerintah, maka dalam era globalisasi muncullah aktor-aktor seperti ornop-ornop (organisasin non pemerintah), atau yang disebut juga lembaga swadaya masyarakat.
4. Lahirnya berbagai isu baru di dalam agenda hubungan-hubungan internasional. Isi-isu baru tersebut antara lain

hak asasi manusia, intervensi kemanusiaan, perkembangan demokrasi atau demokratisasi, dan keinginan untuk mengatur suatu tata cara atau sistem pengelolaan global, misalnya di dalam lingkungan dunia yang berkenaan dengan paru-paru dunia. Demikian pula rasa suatu kebutuhan akan adanya *global governance* yang mengatur tata cara dan kesepakatan di dalam hidup yang mengglobal.

Dalam menghadapi berbagai kecenderungan gelombang globalisasi tersebut di atas, pendidikan merupakan sarana mempersiapkan masyarakat di dalam menghadapi perubahan, dapat dilihat sebagai sosiologi pendidikan. Di dalam sosiologi pendidikan atau pun tinjauan sosiologis tentang pendidikan, dikenal berbagai bentuk kebudayaan yang berkaitan dengan transformasi nilai-nilai budaya kepada generasi seterusnya. Pandangan mengenai hubungan antara masyarakat dan pendidikan dapat dikategorisasikan di dalam empat teori, yaitu teori fungsionalisme, teori Marx, teori kredensial, dan teori pembangunan bangsa (*nation building*).

Teori fungsional menyatakan, bahwa pendidikan modern disebabkan karena berubahnya kebutuhan fungsional yang menyertai proses industrialisasi, industrialisasi menuntut tingkat keterampilan kerja, dan pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang terampil untuk berfungsi secara efektif di dalam dunia industri. Dengan demikian, pendidikan merupakan fungsi untuk memenuhi kebutuhan perkembangan industri. Jelaslah bahwa, teori fungsional merupakan suatu bentuk teori *human capital*. Teori ini diterima sangat luas di dalam perkembangan ekonomi industri. Memang tenaga kerja yang terampil merupakan tuntutan dari industri modern.

Sementara Marx, menunjukkan kaitan antara sistem pendidikan dengan kapitalisme industri. Di dalam sosiologi

pendidikan, terkenal teori Bowles dan Gintis dalam bukunya yang sangat terkenal *Schooling in Capitalist America* (1976), kedua pakar ini mengatakan, bahwa sistem disiplin kerja bagi kelas pekerja yang sedang timbul, menunjukkan adanya ketidak harmonisan di dalam masyarakat capital. Dengan demikian, visi pendidikan (kurikulum) pada dasarnya hanya menunjang eksistensi sistem yang ada.

Menurut teori kredensial yang dipelopori oleh Collins dan Dore, menyatakan bahwa pendidikan telah dijadikan suatu komoditas yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. pendidikan diburu oleh individu-individu untuk mencapai sukses ekonomi dan mobilitas sosial. Dengan demikian, ijazah merupakan suatu kredensial yang dicari-cari.[]



# **BAB IX**

## **PENDIDIKAN SEBAGAI MEKANISME TERBENTUKNYA KETERATURAN SOSIAL**

### **A. Mengenal Pendekatan Fungsional**

Dalam pandangan pendekatan struktural fungsional, masyarakat dipandang sebuah struktur yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Fungsionalisme menempatkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dan unsur-unsur pembentuknya, yaitu norma-norma, kebiasaan, tradisi, dan institusi. Auguste Comte bapak struktural fungsional dalam pandangannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Pendekatan ini tujuan akhirnya mencapai keeraturan sosial.

### **B. Pendidikan Menurut Pendekatan Fungsional**

Emile Durkheim (1858-1917) dikenal sebagai perintis sosiologi pendidikan. Durkheim adalah sosiolog pertama yang secara sistematis menjelaskan keterkaitan pendidikan dengan masyarakat (Saha dan Zubrzycki, 1997: 11). Hal ini tertuang dalam dua buku klasiknya yang membahas pendidikan, yaitu

*Education and sociology* (1922) dan *Moral Education* (1925) Ia memiliki peran signifikan dalam sistem pendidikan di Prancis khususnya universitas Durkheim juga menjadi tokoh kunci dalam organisasi sistem universitas.

Durkheim sangat tertarik dengan pada bagaimana pendidikan dapat digunakan untuk memberikan basis moral dan sosial kepada masyarakat untuk mencegah anomie (keadaan tanpa hukum) dalam masyarakat modern. Menurut Durkheim guru memiliki peran sangat penting dalam sekolah karena menanamkan cita-cita dan pengetahuan masyarakat pada peserta didik mereka. Dengan demikian, perubahan baik dalam metode dan isi pengajaran harus mewujudkan perubahan-perubahan penting dan substansial yang dalam budaya yang lebih besar. Pada bagian ini sebenarnya Durkheim percaya bahwa dengan penyampaian metode dan isi pengajaran yang menanamkan nilai, norma, kepercayaan kepada peserta didik dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan tertib. Tujuan jangka panjangnya adalah menciptakan keteraturan sosial. Keteraturan sosial adalah masyarakat yang dicita-citakan.

Sebagai sosiolog fungsional, dalam bukunya *Moral Education*, Emile Durkheim mengatakan seluruh pendidikan adalah pendidikan moral (*all education is moral education*). Durkheim mendefinisikan moral sebagai satu set tugas dan kewajiban yang memengaruhi perilaku individu. Walaupun gagasan awal moralitas yang dikaitkan dengan keyakinan agama, Durkheim berpendapat bahwa masyarakat industri modern tetap membutuhkan moralitas sekuler. Masa depan kohesifitas suatu masyarakat bertumpu pada pemeliharaan basis moral dan kewajiban sosial yang bermanfaat bagi individu maupun masyarakat. Singkatnya, menurut Durkheim sistem pendidikan formal maupun non-formal merupakan pusat

perhatiannya untuk menciptakan sekaligus mempertahankan konsensus dan solidaritas dalam masyarakat yang semakin industri yang semakin trspesialisasikan, semakin hterogen dan semakin kompleks.

Talcott Parsons sosiolog utama pendekatan struktural fungsional, dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi dan prosesnya. Pendekatannya selain diwarnai oleh adanya keteraturan masyarakat yang ada di Amerika juga dipengaruhi oleh Auguste Comte, Emile Durkheim dan Max Weber.

Menurut Parsons, individu berinteraksi satu sama lain melalui media struktur sosial. Mereka menerima standar umum evaluasi, yang merupakan standar moral atau “norma”. Proses sosial ini mempertahankan struktur-struktur, dan menjamin stabilitas melalui kepatuhan terhadap norma-norma. Analisis fungsional masyarakat menurut Parsons teradap empat hal penting, yaitu: *pertama*, adaptation yaitu menyediakan kebutuhan fisik. Parsons menjelaskan ini sebagai sistem ekonomi. Masyarakat harus beradaptasi untuk mendapatkannya. *Kedua*, *goal attainment*, yaitu adanya pembentukan tujuan secara keseluruhan yang lebih merupakan sistem politik. Misalnya melaksanakan distribusi kekuasaan dan monopoli unsur paksaan yang sah. Menurut Parsons ini adalah sistem politik. *Ketiga*, *integration* yaitu sosialisasi individu untuk menerima norma dan kontrol mereka. Ini lebih kepada sekolah, gereja, media, polisi dan sistem peradilan. *Keempat*, *latent, pattern dan maintenance* yaitu pola pemeliharaan dan manajemen ketegangan berfungsi untuk memotivasi individu dan menyelesaikan konflik. Bagian lebih kepada siste, kekerabatan, keluarga dan perkawinana. Penjelasan Parsons ini sering disebut dengan AGIL.

Parsons melihat pendidikan berkontribusi dalam menciptakan integrasi. Melalui pendidikan individu

disosialisasikan untuk menyesuaikan diri. Pendidikan juga mendukung keberadaan ekonomi masyarakat dengan cara menanamkan keterampilan teknis tertentu dan persyaratan dan memisahkan pekerja potensi berbagai titik untuk ke pasar tenaga kerja. Parsons menganggap pentingnya sekolah untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan norma-norma kepada anak-anak jika keluarga tidak mampu melaksanakannya.

Parsons juga menjelaskan kasus di Amerika Serikat bahwa pendidikan sekolah dasar mengajarkan kaum muda Amerika Serikat tentang nilai persaingan. Dalam arti, Parsons menjelaskan bahwa ada penghargaan yang berbeda yang diterima peserta didik atas prestasi yang berbeda pula. Kuncinya terletak pada ada akses dan kesempatan yang adil. Kaum fungsionalis sebagaimana juga dijelaskan oleh Emile Durkheim selalu memegang tesis adanya hubungan antara pendidikan dan ekonomi. Sebuah sistem pendidikan akan mengalami gangguan fungsi jika setiap individu tidak diberi peran yang sesuai. Bertahannya sistem pendidikan itulah yang ditentukan bagaimana instruksi dan isi pengajaran yang diajarkan pendidik kepada para peserta didiknya di dalam kelas. Jika kurikulum dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, maka akan menghasilkan sistem pendidikan yang berintegrasi. Dengan kata lain, kurikulum menjadi sarana penting untuk menopang berlangsungnya sistem pendidikan yang harmonis dalam sebuah masyarakat (Hidayat, 2013: 100). []

# BAB X

## PENDIDIKAN MORAL DAN PEMBAURAN SOSIAL

### A. Pendidikan Moral.

Membahas tentang moralitas tentu tidak dapat dipisahkan dengan sosiolog Emile Durkheim. Durkheim adalah seorang sosiolog yang memberikan perhatian khusus terhadap moralitas. Durkheim memberikan perhatian terhadap moralitas terletak pada fondasi sosiologi sebagai suatu disiplin. Perhatian Durkheim akan pentingnya moralitas, karena ia menyadari bahwa terjadi suatu krisis moral yang luas di tengah-tengah masyarakat pada era modern, terutama setelah terjadi revolusi Prancis. Revolusi Prancis telah mengumumkan fokus padahak-hak individu yang sering mengungkapkan diri sebagai suatu serangan kepada otoritas tradisional dan kepercayaan-kepercayaan agamis. Trend itu berlanjut bahkan setelah jatuhnya emerintahan revolusioner. Pada pertengahan abad 19, banyak orang merasa bahwa tatanan sosial terancam karena orang hanya memikirkan diri mereka sendiri dan tidak memikirkan masyarakat (Ritzer, 2012: 144).

Perhatian mendasar Durkheim tentang moralitas terkait dengan definisinya yang aneh mengenai *kebebasan*. Dalam pandangan Durkheim manusia terancam melakukan

pelanggaran (patologis) ikatan-ikatan moral. Ikatan-ikatan moral itu penting bagi Durkheim, karena tanpa itu individu akan dipaksa oleh nafsu-nafsu mereka untuk mengusahakan pemuasan yang membabi buta, tetapi pemuasan yang baru hanya akan membawa kepada kebutuhan-kebutuhan yang semakin banyak. Menurut Durkheim, satu hal yang akan selalu diingatkan setiap orang yang ialah menjadi “lebih”. Dan tentu saja, itulah hal yang tidak pernah seseorang punyai. Jika masyarakat tidak membatasi seseorang, seseorang akan menjadi budak bagi pengejaran hal yang lebih baik. Karena itu, Durkheim menganut pandangan yang tanpak paradoksikal bahwa individu membutuhkan moralitas dan kendali eksternal agar dapat menjadi bebas. Pandangan atas hasrat tidak terpuaskan itu yang ada pada setiap inti manusia, sentral bagi sosiologinya.

Bagi Durkheim, moralitas memiliki dua aspek, *pertama*, bagi Durkheim moralitas adalah suatu fakta sosial. Dengan kata lain bahwa moralitas dapat dipelajari secara empiris, eksternal bagi individu, bersifat memaksa individu, dan dijelaskan oleh fakta-fakta sosial yang lain. Hal itu berarti bahwa moralitas bukanlah sesuatu yang dapat difilsafati orang, tetapi sesuatu yang harus dipelajari sebagai suatu fenomena empiris. Hal itu khususnya benar karena moralitas berhubungan erat dengan struktur sosial. Untuk memahami moralitas suatu lembaga tertentu, *Anda terlebih dahulu mempelajari* cara lembaga itu dibentuk, cara menerima bentuknya yang sekarang, bagaimana tempatnya di dalam struktur keseluruhan masyarakat, bagaimana berbagai kewajiban kelembagaan dihubungkan dengan kebaikan sosial, dan seterusnya.

*Kedua*, Durkheim adalah sosiolog moralitas, karena studinya didorong oleh eprhatiannya kepada “kesehatan” moral masyarakat modern. Banyak sosiologi Durkheim dapat dilihat

sebagai produk sampingan perhatian kepada isu-isu moral, Sungguh, seornagkolegan Durkheim menulis di dalam tinjauan mengenai karya seumur hidup Durkheim bahwa”orang gagal memahami karya-karyanya jika tidak memperhitungkan fakta bahwa moralitas adalah pusat dan obyeknya”.

Poin kedua tersebut membutuhkan penjelasan yang lebih banyak jika seseorang ingin mengerti perspektif Durkheim. Durkheim tidak menganggap bahwamasyarakat telah terjadi, atau sedang terancam menjadi, tidak bermoral. Hal itu benar-benar mustahil, karena moralitas bagi Durkheim adalah disamakan dengan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tidak mungkin tidak bermoral, tetapi tentu saja ia dapat kehilangan kekuatan moralnya jika kepentingan koektif masyarakat menjadi sekedar jumlah total kepentingan-kepentingan diri. Hanya pada tingkat bahwa moralitas adalah suatu fakta sosial maka ia dapat memaksakan kewajiban kepada para individu yang menggantikan kepentingan diri mereka. Akibatnya, Durkheim percaya bahwa masyarakat membutuhkan suatu moralitas umum yang kuat. Seperti apa seharusnya masyarakat kurang mendapat perhatiannya.

## **B. Pendidikan Moral**

Berkaitan dengan moral, Durkheim memulai pembahasan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan moral? Moralitas meliputi konsistensi, keteraturan tingkah laku. Apa yang menjaid moral hari ini akan menjadi moral esok hari. Moralitas juga meliputi pengertian wewenang. Seseorang dipaksa untuk bertindak dengan cara-cara tertentu, seseorang merasakan perlawanan terhadap implus-implus yang tidak masuk akal. Kedua ciri moralitas ini--tingkah laku dan wewenang--sebenarnya merupakan dua aspek dari satu hal, yaitu disiplin (penyatuan aspek-aspek yang berbeda atau bertentangan dari

realitas dalam sebuah konsepsi adalah suatu kiat yang digemari Durkheim.

Berkaitan dengan pendidikan moral, Emile Durkheim melihat masalah-masalah di dalam masyarakat modern sebagai penyimpangan-penyimpangan temporer dan bukan sebagai kesulitan-kesulitan yang alami. Durkheim sangat percaya pada pembaharuan sosial. Dalam mengambil pendirian tersebut, dia berlawanan dengan kaum konservatif dan radikal di zamannya. Kaum konservatif tidak melihat adanya harapan di dalam masyarakat modern dan sebagai gantinya mengusahakan pemulihan monarki atau kekuasaan politik Gereja Katolik Roman. Kaum radikal seperti para sosialis di masa Durkheim setuju bahwa dunia tidak dapat diperbaharui, tetapi mereka berharap bahwa revolusi akan mewujudkan sosialisme dan komuniasme.

Baik program-program Durkheim untuk pembaharuan maupun pendekatan reformisnya disebabkan oleh kepercayaannya bahwa masyarakat adalah sumber dari setiap moralitas. Program-program pembahruannya dititiktekannya oleh fakta bahwa masyarakat perlu menghasilkan pengaruh moral bagi individu. Karena itu, masyarakat sedang kehilangan kepastiannya, ia harus direformasi. Pendekatan-pendekatan reformasinya didiktekan oleh fakta bahwa sumber setiap reformasi seharusnya adalah masyarakat yang ada secara aktual. Tidak baik merumuskan program-program pembinaan dari sudut pandang suatu moralitas yang abstrak. Program itu harus dihasilkan oleh kekuatan-kekuatan sosial masyarakat itu dan bukan dari filsuf, atau bahkan sistem etis sosiologi. "Cita-cita tidak dapat disahkan ke dalam eksistensi, itu harus mengerti, dicintai, dan diperjuangkan oleh badan yang bertugas untuk mewujudkannya.

## 1. Moralitas.

Durkheim menawarkan kursus-kursus dan memberi kuliah-kuliah publik mengenai pendidikan moral dari sosiologi moral. Selain itu dia maksudkan, seandainya hidup cukup lama, untuk memuncakkan karya seninya dengan suatu presentasi komprehensif ilmunya mengenai moral. Hubungan yang dilihat Durkheim antara sosiologi dan moralitas, baru berakhir ini dihargai oleh sebagian besar sosiolog:

“Tampak bagi saya, bukan suatu kebetulan bahwa penekanan baru pada Durkheim pasti berada di wilayah moralitas, filsafat dan pergaulan intelektual, hal ini menandakan kebutuhan reflektif sosiologi yang sedang bertumbuh untuk masalah-masalah ontologis, kebutuhan yang menghubungkan keprihatinan-keprihatinan profesional dengan situasi sosio-historis profesi itu. Sementara baru satu dasawarsa atau lebih yang lalu banyak sosiolog mungkin merasa malu...”... (George Ritzer: 2012: 177)

Meskipun Durkheim secara sentral memerhatikan moralitas, namun tidak mudah mengklasifikasikan teori moralitasnya menurut kategori-kategori yang khas. Pada satu sisi, dia adalah seorang relativis moral yang percaya bahwa aturan-aturan etis benar-benar dan harus berubah dalam menjawab fakta-fakta sosial yang lain. Pada sisi lainnya, dia adalah seorang tardisonalis karena dia tidak percaya bahwa orang-orang benar-benar dapat menciptakan suatu moralitas yang baru. Setiap moralitas yang harus hanya dapat bertumbuh dari tradisi-tradisi moral kolektif seseorang. Dia menegaskan bahwa orang harus “melihat di dalam moralitas itu sendiri suatu fakta yang harus diselidiki hakikatnya dengan penuh perhatian, bahkan dengan penuh hormat, sebelum berani untuk memodifikasi” (Durkheim, 1973)

Teori moralitas sosiolog Durkheim melampaui pendirian-pendirian mengenai moralitas masa kini dan memberikan kemungkinan akan suatu perspektif yang segar mengenai perdebatan kontemporer atas isu-isu seperti keluarga-keluarga tradisional dan muatan moral kebudayaan populer. Bagi Durkheim, moralitas mempunyai tiga komponen, *pertama*, moralitas meliputi disiplin, yakni suatu perasaan akan otoritas yang melawan dorongan-dorongan hati yang idiosinkritik. *Kedua*, moralitas meliputi kelekatan kepada masyarakat karena masyarakat adalah sumber moralitas seseorang. *Ketiga*, moralitas meliputi otonomi, suatu perasaan akan tanggung jawab individual atas tindakan-tindakan seseorang.

## 2. Semangat Disiplin

Durkheim biasanya mendiskusikan disiplin dalam kerangka pengendalian atas dorongan-dorongan hati egoistik seseorang. Pengendalian demikian perlu karena kepentingan-kepentingan individu dan kepentingan-kepentingan kelompok tidak sama dan mungkin, setidaknya dalam jangka waktu yang singkat., bertentangan. Disiplin menghadapkan seseorang dengan tugas moralnya yang bagi Durkheim adalah tugas seseorang kepada masyarakat. Disiplin sosial juga membuat individu lebih bahagia karena membatasi keinginan-keinginannya yang tidak terbatas sehingga memberikan kesempatan satu-satunya untuk bahagia karena kalau tidak ia akan selalu menginginkan hal yang lebih.

Menurut Durkheim moralitas bukan hanya sekedar sistem perilaku yang sudah merupakan kebiasaan. Ia adalah suatu sistem perintah. Emile Durkheim telah menegaskan bahwa perilaku yang tidak tetap, secara moralitas dianggap tidak lengkap. Demikian pula halnya moralitas dengan pada kaum anarkis. (Istilah ini digunakan mengacu kepada orang yang sama sekali tidak merasakan adanya realitas imperatif moral,

orang yang menderita semacam penyakit buta warna, dengan demikian semua daya moral dan intelektual baginya sama saja). Di sini seseorang dihadapkan dengan unsur lain dari moralitas; selain unsur keteraturan, pada dasar kehidupan moralitas tersebut terjalin erat, dan jalinan kedua unsur tersebut berasal dari ide yang lebih kompleks yang merangkum keduanya, yakni konsep mengenai disiplin. Disiplin inilah yang pada kenyataannya mengatur perilaku. Disiplin merangkum perilaku yang selalu terulang dalam kondisi-kondisi tertentu. Namun disiplin tidak mungkin timbul tanpa ada otoritas, yakni otoritas yang mengaturnya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah unsur fundamental dari moralitas. (pendidikan Moral, Durkheim, 23).

Biasanya disiplin dianggap berguna karena berkaitan dengan perilaku yang membawa akibat yang berguna. Disiplin hanyalah sarana untuk merinci dan mempertegas perilaku yang diperintahkan. Jaid perilaku merupakan sumber bagi *raison d'etre-nya*. Adalah suatu nhal yang baik apabila orang mempeunyai smeangat disiplin, terlepas dari berbagai tindakan yang menurut perasaannya di[aksakan padanya. Mengapa? disinilah perlunya seseorang membahas masalah ini karena disiplin dan kaidah sering dirasakan sebagai paksaan, yang mungkin memang perlu, tapi bagaimanapun suatu keburukan yang patut disayangkan yang harus diketahui oleh setiap orang bagaimana harus menghadapinya sambil berusaha untuk membatasinya sampai sesedikit-mungkin.

Lalu bagaimana fungsi moralitas pengaruhnya pada pendidikan anak. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa, pada dasarnya moralitas adalah suatu disiplin. Semua disiplin mempunyai tujuan ganda: mengembangkan suatu keteraturan tertentu dalam tindak-tanduk manusia dan memberiknya suatu sasaran tertentu yang lebih mengutamakan

hal-hal yang merupakan kebiasaan dan juga membatasinya. disiplin mengatur dan memaksa. Disiplin menjawab segala sesuatu yang selalu terulang dan bertahan lama dalam hubungan antar-manusia. Karena kehidupan sosial mempunyai unsur-unsur yang bersifat umum dan karena hal-hal yang sama dari lingkungan seseorang selalu terulang secara periodik, maka wajarlah bila cara-cara bertindak tertentu--yakni yang ternyata paling sesuai dengan masalah yang dihadapi--juga selalu terulang secara teratur. Keteraturan relatif dari berbagai situasi di mana seseorang berada itulah yang menunjukkan keteraturan relatif dari tingkah laku seseorang.

Disiplin berguna bukan hanya demi kepentingan masyarakat sebagai suatu sasaran mutlak tanpa mana suatu kerja sama mustahil teratur, melainkan juga demi kesejahteraan individu sendiri. Melalui disiplin seseorang belajar mengendalikan keinginan, tanpa ini mustahil orang dapat mencapai kebahagiaan. Dengan demikian, disiplin sangat membantu perkembangan suatu hal yang amat penting bagi diri seseorang masing-masing, yakni kepribadian. Kemampuan untuk membatasi berbagai keinginan dan mengendalikan diri sendiri, suatu kecakapan yang seseorang peroleh dalam pendidikan disiplin moral, merupakan syarat mutlak bagi tumbuhnya kemampuan individu yang bertanggung jawab. Peraturan mengajar seseorang untuk membatasi dan menguasai diri, dan karena itu merupakan sarana emansipasi dan kebebasan. Yang lebih penting lagi, dalam masyarakat demokratis seperti masyarakat seseorang ini, mutlak perlu diajarkan pengendalian diri secara menyeluruh kepada anak-anak. Karena dalam hal-hal tertentu kendali-kendali konvensional sudah tidak efektif lagi--kendali-kendali yang dalam suatu masyarakat yang majemuk membatasi hasrat dan ambisi manusia--hanya tinggal disiplin moral saja yang masih mampu memberikan pengaruh untuk mengatur tingkah laku manusia. Sebab pada prinsipnya kini semua

jabatan terbuka bagi setiap orang, dorongan terus maju kini dirangsang dan dikobarkan melampaui semua ukuran hingga suatu titik yang nyaris tanpa batas.

Pendidikan harus membantu anak untuk memahami sejak dini bahwa di luar susunan batas-batas tertentu yang membentuk kerangka historis keadilan, masih ada batas-batas yang didasarkan atas sifat hakiki sesuatu, yakni sifat hakiki diri seseorang masing-masing. Hal itu sama sekali tidak berarti bahwa seseorang harus terus-menerus menanamkan sikap pasrah dalam diri anak, atau mengalihkann keinginan-keinginannya yang absah, ataupun mencegahnya untuk melihat situasi yang ada disekitarnya. Pandangan semacam itu sangat bertentangan dengan prinsip dasar sistem sosial seseorang. Tetapi dalam diri si anak harus ditanamkan pengertian bahwa cara mencapai kebahagiaan adalah dengan kondisi setiap pribadi. Kebahagiaan tidak terletak dalam pemaksaan diri untuk mencapai sasaran yang jauh tak terhingga, yang pada akhirnya juga tidak mungkin tercapai. Tetapi perlu berusaha menyembunyikan ketidakadilan yang ada di dunia, karena ketidakadilan akan selalu ada di dunia ini, seseorang harus menyadarkan anak didik bahwa ia tidak dapat menggantungkan kebahagiaannya pada kekuasaan, pengetahuan atau kekayaan yang tidak terbatas. Sebaliknya, anak didik harus disadarkan bahwa kebahagiaan itu dapat ditemukan dalam situasi-situasi yang sangat berbeda-beda. Anak juga perlu sadar bahwa setiap orang mempunyai suka-dukanya sendiri, dan yang penting adalah menemukan sasaran yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sasaran itu harus memungkinkan dia untuk mewujudkan hakikat pribadinya tanpa berusaha melampauinya dengan berbagai cara dan tanpa memaksakan diri melewati batas-batas kemampuannya. Terdapat cukup banyak sikap mental yang harus ditanamkan di sekolah dalam diri si anak, bukan karena sikap-sikap tersebut sejalan dengan suatu aturan

manapun, melainkan karena sikap-sikap tersebut memang sehat dan akan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan umum. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa kekuatan-kekuatan moral akan menjadi pengawal untuk menghadapi kekuatan yang brutal dan ketidaktahuan. Akhirnya, seseorang juga tidak boleh melihat dalam pandangan yang cenderung menyatakan perlu adanya kontrol itu itu sebagai tendensi ke arah setagnan. Bergerak menuju sasaran yang jelas, satu demi satu, berarti bergerak maju tanpa henti bukan mandeg. Masalahnya bukan mempertanyakan apakah seseorang harus maju atau tidak, melainkan dengan kecepatan berupa dan bagaimana caranya.

Dengan demikian sampailah seseorang kepada masalah pembenaran disiplin secara rasional. menurut kegunaanya, dan juga menurut aspek-aspek moralitas, yang lebih jelas. Namun harus dicatat bahwa konsepsi seseorang mengenai fungsi moralitas sama sekali berbeda dari konsepsi yang sudah dikenal dari kaum apologis tertentu. Pada kenyataannya, sering terjadi bahwa untuk memajukan kegunaan moralitas, kaum apologis berpijak pada prinsip yang saya kecam

Menarik untuk dicermati gagasan Emile Dirckheim mengenai moralitas, menurut jika seseorang percaya bahwa disiplin itu berguna, dan memang diperlukan oleh setiap orang, hal itu disebabkan karena rupanya memang merupakan tuntutan hakikatnya sendiri. Inilah cara bagaimana biasanya hakikat mewujudkan dirinya, dan bukan cara untuk mengurangi atau merusak hakikat. Sebagaimana makhluk-makhluk lainnya, manusia pun merupakan makhluk terbatas, ia merupakan bagian dari keseluruhan. Secara fisik ia merupakan bagian dari alam semesta, secara moral ia merupakan bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, ia tidak bisa, tanpa memperkosa hakikatnya, mencoba mengubah batas-batas yang merintanginya. Karena segala sesuatu yang ada padanya adalah bagian dari kualitas

unsur atau kekuasaan ini. Bila seseorang mengatakan bahwa seseorang adalah suatu pribadi, ini berarti bahwa orang itu, berbeda dari orang lainnya. Perbedaan menyiratkan adanya pembatasan. Jadi, bila seseorang berpendapat bahwa disiplin itu baik, itu tidak berarti bahwa seseorang memandang fungsi hakikat dengan mata pemberontak, atau seseorang melihat adanya rencana jahat yang harus digagalkan, tetapi hanya ingin menyatakan bahwa hakikat manusia hanya bisa membangun dirinya sendiri melalui disiplin. Bila seseorang beranggapan bahwa kecenderungan hakikat diberi batasan, itu tidak berarti bahwa seseorang menganggap hakikat itu jahat atau bahwa seseorang ingin membatasi hakikat untuk memperoleh kebahagiaan, justru sebaliknya, karena kalau tidak kecenderungan hakikat sama sekali tidak mempunyai harapan mendapatkan apa yang sepatutnya dapat mereka peroleh. Dengan demikian seseorang temukan konsekuensi praktisnya yang pertama, asketisme itu tidak baik dalam dirinya dan pada dirinya sendiri.

### 3. Kelekatan pada Kelompok Sosial

Persoalan moralitas memiliki keterikatan atau kelekatan dengan individu pada kelompok sosial di mana ia menjadi anggotanya. Dengan demikian moralitas hanya ada sejauh seseorang menjadi anggota suatu kelompok manusia, apapun juga bentuknya. Karena manusia baru lengkap jika termasuk dalam beberapa masyarakat, maka secara moral ia pun baru lengkap jika merasa dirinya menyatu dengan kelompok yang berbeda-beda di mana ia terlihat: keluarga, serikat buruh, suaha, partai politik, negara, dan umat manusia seluruhnya. Akan tetapi dari segi moral kelompok-kelompok tersebut tidak sama pentingnya dan peranannya dalam kehidupan sosial pun tidak sama. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat menyamaratakan semua kelompok tersebut begitu saja. Dari semua kelompok tersebut begitu saja. Dari semua kelompok tersebut ada satu yang utama dan mewakili tujuan *par excellence* dari perbuatan

moral. Kelompok itu adalah masyarakat politik, yaitu negara, yang diartikan sebagai bagian dari perwujudan cita-cita umat manusia (Durkheim, 1968: 58)

Durkheim tidak melihat moralitas hanya sebagai masalah pengendalian. Unsur kedua di dalam moralitas ialah *kelekatan* kepada kelompok-kelompok sosial--aspek positif komitmen kelompok yang sukarela dan hangat--tidak berasal dari kewajiban ekstrenal, tetapi dari kekuatan yang sukarela. Berkaitan dengan hal ini, Durkheim menyatakan:

Masyarakat yang seseorang anggap sebagai bagian paling penting dari diri seseorang. Dari sudut pandang tersebut, orang siap melihat bagaimana masyarakat menjadi hal yang melihat seseorang. Sebenarnya, seseorang tidak dapat melepaskan diri dari masyarakat tanpa memotong diri seseorang dari diri seseorang sendiri. Di antara masyarakat dan seseorang ada hubungan yang paling kuat dan paling intim., karena masyarakat adalah bagian dari keberadaan seseorang, karena di dalam arti tertentu masyarakat merupakan hal yang terbaik dalam diri seseorang. ... Akibatnya... ketika seseorang menjaga diri seseorang sendiri seseorang menjaga sesuatu selain diri seseorang. .. oleh karena itu sebagaimana moralitas membatasi dan mengandalkan seseorang, untuk memenuhi syarat-syarat hakikat seseorang, begitu jugalah dalam mengharuskan komitmen seseorang dan mensubordinasikannya kepada kelompok, masyarakat benar-benar memaksa seseorang mewujudkan diri seseorang sendiri (Durkheim, 1925/1961: 71-72).

Kedua unsur moralitas ini—disiplin dan kelekatan—saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain karena mereka hanyalah aspek-aspek masyarakat yang berbeda. Disiplin adalah masyarakat dilihat mengajukan tuntutan kepada seseorang, dan kelekatan adalah masyarakat dilihat sebagai bagian dari seseorang.

#### 4. Otonomi atas Nasib Sendiri

Elemen ketiga moralitas ialah *otonomi*. Durkheim mengikuti definisi filosofis Kant dan melihatnya sebagai suatu dorongan hati berbasis rasional dari keinginan dan kehendak, dengan simpul sosiologis bahwa pendasaran rasional pada akhirnya bersifat sosial. Menurut Emanuel Kant otonomi merupakan prinsip moralitas. Dalam kenyataannya, moralitas tercapai dengan mewujudkan tujuan-tujuan impersonal dan umum, yang tidak tergantung pada suatu pribadi dan kepentingan individu. Padahal nalar, berdasarkan hakikat bentukannya, diarahkan kepada hal-hal yang umum dan impersonal, sebab ia sama bagi semua orang, bahkan bagi semua makhluk yang mempunyai nalar. Hanya ada satu nalar. Karena itu bila seseorang bertindak berdasarkan nalar, seseorang sesungguhnya melakukan tindakan moral dengan kebebasan penuh karena seseorang memang sekedar mengikuti hukum dari hakikat penalaran seseorang.

Kalau demikian halnya, darimana asalnyaperasaan mengenai kewajiban itu? Ini karena dalam kenyataannya seseorang bukan hanya makhluk rasional semata-mata, melainkan juga makhluk yang memiliki perasaan. Watak merupakan ciri yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Kegembiraan saya adalah milik saya sendiri dan hanya mencerminkan watak saya pribadi. Oleh karena itu kepekaan seseorang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan-tujuan yang individual, egoistis, irrasional, dan immoral. Di antara hukum nalar dan watak seseorang terdapat suatu antagonisme yang sangat besar, dan karena itu hukum nalar hanya bisa diterapkan pada watak melalui paksaan nyata. Perasaan akan adanya paksaan itulah yang menimbulkan naluri tentang adanya kewajiban. Bagi Tuhan, semua adalah nalar, dan tidak ada tempat bagi perasaan-perasaan semacam itu. Bagi Dia moralitas terlaksana dengan spontanitas yang sepenuhnya bersifat otonom. Namun tidak

demikian halnya bagi seorang manusia, makhluk kompleks dan heterogen yang memiliki sekian banyak sifat dalam dirinya sendiri.

Dari sudut pandangan ini kewajiban atau disiplin hanya sekedar merupakan ciri tambahan dari hukum-hukum moral. Pada dirinya sendiri hukum-hukum moral tidak perlu bersifat imperatif, dan hanya akan menampilkan sifat tersebut bila dalam keadaan konflik dengan watak, bila harus menjalankan otoritas untuk mengatasi perlawanan yang bertubi-tubi. Namun hipotesa samaam ini secara keseluruhan bersifat arbitrer. Kewajiban merupakan unsur hakiki bagi setiap perintah moral, dna kami telah mengemukakan alasan-alasannya. seluruh kodrat seseorang mempunyai kebutuhan untuk dipaksa, diikat, dibatasi, baik kodrat intelektual maupun kodrat emosional seseorang. Dalam kenyataannya, nalar bukan suatu kekuatan transenden, melainkan merupakan bagian dari alam dan dengan sendirinya juga tunduk kepada hukum-hukum alam. Alam semesta ini terbatas, dan semua pembatasan mengisyaratkan adanya kekuatan-kekuatan yang membatasi. Lebih jauh lagi, untuk memahami kehendak yang benar-benar otonom. Kant harus mengakui bahwa kehendak, sejauh bersifat rasional murni, tidak tunduk kepada hukum alam. Ia harus menjadikannya suatu kekuatan yang terpisha dari dunia, di mana alam tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Hanya mengandalkan pada kekuatan dirinya sendiri, kehendak tersebut terhindar dari berbagai pengaruh kekuatan luar. (Pendidikan Moral Durkheim, 2010: 81)

Fokus Durkheim pada masyarakat sebagai sumber moralitas telah menyebabkan banyak orang beranggapan bahwa sektor idealnya adalah orang yang hampir seluruhnya dikendalikan dari luar--seorang konfromis total. Akan tetapi, Durkheim tidak menganut pandangan aktor yang ekstren,

seperti itu: “Korformitas tidak boleh didorong hingga ke titik yang menundukkan intelek secara lengkap. Karena itu, korformitos tidak berasal dari suatu kepercayaan akan perlunya disiplin yang harus membuta dan membudak. Lihat Gidden, (1972: 113) mitos-mitos dan simbol-simbol yang digunakan oleh sistem-sistem moral sebelumnya untuk menuntut disiplin dan dorongan kelekatan. Durkheim percaya bahwa kini mitos-mitos tersebut telah berlalu, hanya pengertian ilmiah saja yang dapat memberikan fondasi untuk otonomi moral. Khususnya, moralitas modern harus didasarkan pada hubungan antara individu dan masyarakat seperti yang disimpulkan oleh ilmu Durkheim yang baru yaitu sosiologi. Satu-satu cara agar pengertian sosiologi tersebut menjadi moralitas yang sejati adalah melalui pendidikan.

Otonomi mencapai daya penuhnya di dalam modernitas hanya seiring dengan kemunduran mitos-mitos dan simbol-simbol yang digunakan oleh sistem-sistem moral sebelumnya untuk menuntut disiplin dan mendorong kelekatan. Durkheim percaya bahwa kini mitos-mitos tersebut telah berlalu, hanya pengertian ilmiah saja yang dapat memberikan fondasi untuk otonomi moral. Khususnya, moralitas modern harus didasarkan pada hubungan antara individu dan masyarakat seperti yang diungkapkan Durkheim yang baru yaitu sosiologi. Satu-satu cara agar pengertian sosiologi tersebut menjadi moralitas yang sejati adalah melalui pendidikan.

### C. Nurani Kolektif (*Collective Conscience*).

Durkheim mencoba menguraikan minatnya kepada moralitas umum dengan berbagai cara dan dengan konsep-konsep yang berbeda. Dalam usaha awalnya menangani isu tersebut, Durkheim mengembangkan ide mengenai *nurani kolektif* (*collective conscience*). Dalam bahasa Prancis,

kata *collective conscience* berarti baik “*conscience*” (kesadaran) maupun “nurani moral”. Durkheim menciriikan nurani kolektif sebagai berikut:

Totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen yang lazim bagi rata-rata warga masyarakat yang sama yang membentuk suatu sistem tertentu yang mempunyai kehidupannya sendiri, orang dapat menyebutnya nurani kolektif atau nurani bersama... oeh karena itu, nurani kolektif adalah hal yang berbeda sama sekali dari nurani-nurani khusus, meskipun ia dapat disadarimelalui nurani-nurani khusus itu.

Ada beberapa titik tekan dalam definisi di atas, yaitu: pertama, Durkheim menganggap bahwa nurani kolektif sebagai hal yang terjadi di sleuruh masyarakat teretntu, *Kedua*, Durkheim membaynagkan dengan jelas nurani kolektif sebagai hal yang independen dan mampu menentukan fakta-fakta sosial yang lain. ia bukan suatu pentulan dari basis material seperti yang dianjurkan Marx. Akhirnya, meskipun dia menganut pandangan mengenai nurani kolektif yang demikian, Durkheim juga menulis mengenai “kesadaran atasnya” melalui kesadaran individu.

Nuranikolektif mengacukepadastrukturumumpengertian-pengertian norma-norma dan kepercayaan-kepercayaan yang diyakini bersama. Nurani kolektif merupakan suatu konsep yang serba mencakup dan tidak berbentuk. Durkheim mempergunakan konsep itu untuk menyatakan masyarakat “primiitif” mempunyai suatu nurani kolektif yang lebih kuat-yakni pengertian-pengertian norma-norma dan kepercayaan-kepercayaan yang lebih banyak diyakini bersama--dari pada masyarakat modern (Ritzer, 2012:136-137)

#### D. Pendidikan moral dan Pembaruan Sosial

Usaha-usaha Durkheim yang paling konsisten untuk memperbaharui masyarakat untuk memungkinkan terwujudnya moralitas modern, diarahkan pada pendidikan. Pendidikan didefinisikan oleh Durkheim sebagai proses yang ditempuh sang individu untuk memperoleh alat-alat fisik, intelektual, dan yang paling utama bagi Durkheim, alat-alat moral, yang dibutuhkan agar dapat berfungsi di dalam masyarakat. (Durkheim, 1922: 1956:71). Seperti dilaporkan Lukes (1972: 359). Durkheim selalu percaya “bahwa hubungan ilmu sosiologi dengan pendidikan ialah hubungan teoritik dengan praktek”. Pada 1902, dia diberi posisi yang kuat sebagai kepala departemen pendidikan Sarbonne. “Hampir tidak berlebihan mengatakan bahwa setiap pikiran orang muda di Paris, dalam dasawarsa sebelum perang Dunia I, secara langsung atau tidak langsung, berada di bawah pengerauhnya.

Sebelum Durkheim mulai pembaharuan pendidikan, sudah ada dua pendekatan, pendekatan yang satunya melihat pendidikan sebagai perluasan gereja, dan pendekatan lainnya melihat pendidikan sebagai pembentangan individu alamiah. bertentangan dengan itu, Durkheim berargumen bahwa pendidikan harus membantu anak-anak mengembangkan suatu sikap moral terhadap masyarakat. Dia percaya bahwa sekolah-sekolah hampir merupakan satu-satunya lembaga yang ada yang dapat memberi suatu fondasi sosial bagi moralitas modern.

Bagi Durkheim ruang kelas adalah masyarakat kecil dan dia menyimpulkan bahwa semangat-tinggi kolektifnya dapat dibuat cukup kuat untuk menanamkan sikap moral. Ruang kelas dapat memberikan cukup kuat untuk menanamkan sikap moral. Ruang kelas dapat memberikan lingkungan pergaulan kolektif yang diperlukan untuk menghasilkan kembali

representasi-representasi kolektif (Durkheim, 1925: 229). Hal ini akan memungkinkan pendidikan untuk menghadirkan dan memproduksi kembali ketiga elemen moralitas sekaligus.

*Pertama*, pendidikan akan memberikan para individu disiplin yang mereka butuhkan untuk mengendalikan nafsu-nafsu yang mengancam menelan mereka. *Kedua*, pendidikan dapat mengembangkan rasa kesetiaan siswa terhadap masyarakat dan terhadap sistem moralnya. Yang paling penting adalah peran pendidikan di dalam pengembangan otonomi, yang memuat disiplin “yang diinginkan secara bebas”, dan kelekatan terhadap masyarakat berdasarkan “persetujuan yang tercerahkan” (Durkheim, 1925/1961: 120)

Mengajarkan moralitas bukan dengan berkhotbah atau indoktrinasi, melainkan dengan menjelaskan. Jika seseorang menolak memberikan semua penjelasan jenis itu kepada anak-anak, jika seseorang tidak mencoba membantu mereka memahami alasan-alasan mengapa aturan-aturan itu perlu dipatuhi, seseorang akan menyalahkan mereka sebagai orang-orang yang mempunyai moralitas yang tidak lengkap dan inferior.[]

# BAB XI

## PENDIDIKAN DAN POLITIK

### A. Pendahuluan

Mendiskusikan hubungan antara pendidikan dan politik bukanlah suatu persoalan yang baru. Sejak zaman Plato dan Aristoteles, para filsuf dan pemikir politik telah memberikan perhatian cukup intens kepada masalah ini. Kenyataan ini misalnya ditegaskan dengan ungkapan *“As is the state, so school”* (sebagaimana negara, seperti itulah sekolah), atau *“What you want in the state you must put into the school”* (apa yang anda inginkan dalam negara, harus anda masukkan ke sekolah). Juga terdapat teori yang dominan dalam demokrasi yang mengasumsikan bahwa pendidikan adalah sebuah korelasi, jika tidak sebuah persyaratan, bagi suatu tatanan demokrasi (Coleman dalam Coleman, ed, 1965: 6).

Dalam sejarah, hubungan antara pendidikan dan politik juga dapat dilacak sejak masa-masa pertumbuhan paling subur dalam lembaga-lembaga pendidikan, semacam madrasah. Sepanjang sejarah, terdapat hubungan yang amat erat antara pendidikan dengan politik. Kenyataan ini misalnya dapat dilihat dari pendirian banyak madrasah di Timur Tengah yang disponsori oleh penguasa politik. Contoh paling terkenal dalam hal ini adalah Madrasah Nizamiyyah di Bagdad yang didirikan sekitar tahun 1064 oleh Wazir dinasti Saljuk, Nizam

al-Mulk, di madrasah ini terkenal bahwa pemikir dan ulama besar, al-Ghazali pernah menjadi guru besar.

### **B. Konsep Pendidikan dan Politik.**

Pendidikan menurut Romo Mangun Wijaya adalah proses awal usaha untuk menumbuhkan kesadaran sosial pada setiap manusia sebagai pelaku sejarah. Kesadaran sosial hanya akan bisa tercapai apabila seseorang telah berhasil membaca realitas perantara dunia di sekitar mereka. Sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran sosial, maka perlu adanya perangkat analisis yang bersumber dari kebebasan berpikir dari masing-masing individu, yang pada akhirnya memberikan daya nalar yang kritis terhadap perkembangan sosial yang ada (Beni Susentyo, 2005: 147 dalam Muh Yamin, 2009: 14).

Sementara itu, politik mempunyai pengertian, 1) pengetahuan tentang ketatanegaraan atau keegaraan, yaitu mengenai sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, 2) segala urusan dan tindakan, kebijakan, siasat tentang pemerintahan ataupun terhadap negara, 3) kebijakan, cara bertindak di dalam menghadapi suatu masalah tertentu (kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2002).

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 No 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran bagi peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UUSPN, No 20 Tahun 2003).

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga disebutkan bahwa pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar

Republik Indonesia 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia serta pendidikan harus tanggap terhadap perubahan zaman. Dalam konteks ini, politik pendidikan nasional dimaksudkan sebagai pendekatan atau metode yang didasarkan pada kebudayaan bangsa Indonesia guna memengaruhi pihak-pihak tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, sebelum lebih jauh memperbincangkan pendidikan, maka terlebih dahulu akan diperjelas pengertian politik pendidikan. Menurut Ki Supriyoko, sebagaimana dikutip Ali Mahmudi Amnur (2007: 5) menyatakan bahwa ada empat definisi mengenai politik pendidikan, *Pertama*, politik pendidikan adalah metode memengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan pendidikan; *kedua*, politik pendidikan adalah lebih berorientasi pada bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai; *ketiga*, politik pendidikan berbicara mengenai metode untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya anggaran pendidikan, kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat; *keempat*, politik pendidikan berbicara mengenai sejauhmana pencapaian pendidikan sebagai pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas, penyangga ekonomi nasional, pembentukan bangsa yang berkarakter, dan sebagainya.

Dengan demikian, politik pendidikan dimaknai sebagai sebuah endapan politik negara, penjabaran dari tradisi bangsa dan nilai-nilai, serta sistem konsep rakyat mengenai bentuk negara dalam sistem pendidikan. Sementara itu, Aristoteles seorang filsuf menyatakan bahwa tidak mungkin kita membicarakan masalah-masalah pendidikan terlepas dari konsep kehidupan yang baik. Masing-masing orang atau masyarakat mempunyai perspesinya sendiri mengenai apa yang dimaksud dengan kehidupan baik. Oleh sebab itu, maka orang akan mempunyai konsep yang berjenis-jenis mengenai

pendidikan. Dengan demikian masalah pendidikan kan terletak di dalam tatanan politik.

Pendidikan tidak terlepas dari politik, meskipun pendidikan tidak dapat menggantikan fungsi politik. Kenyataan ialah meskipun pendidikan tidak dapat menggantikan politik, tetapi tanpa pendidikan, tujuan-tujuan politik sulit untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, fungsi dan peranan pendidikan di dalam kehidupan suatu bangsa tidak terlepas dari kehidupan politik, serta juga ekonomi, dan kebudayaan pada umumnya.

Politik pendidikan menjadipanduan utamadalam perjalanan pendidikan kebangsaan. Politik pendidikan yang dibentuk dan dicapai pun akan berada dalam bangunan konsep yang tepat, kuat, dan kokoh. Kesemuanya ini melahirkan sebuah tatanan pendidikan yang mencerahkan. Pendidikan pun mampu melahirkan produk-produk pendidikan yang berkualitas dan dipertanggungjawabkan, baik secara intelektual maupun sosial. Melalui politik pendidikan sebagai pemegang kebijakan akan mampu mengarahkan (Yamin, 2007: 21).

Politik pendidikan adalah perangkat lunak yang bisa diuraikan dalam bentuk konsep-konsep pendidikan yang mendidik anak bangsa, termasuk pula dapat diselipkan dalam pola kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan dana pendidikan. Peran penting seperti ini, politik pendidikan dapat mendatangkan keberhasilan dalam pembentukan karakter bangsa yang layak melahirkan dan menjalankan politik pendidikan yang mencerdaskan bagi kehidupan bangsa agar bangsa ini memiliki karakter yang jelas.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa politik pendidikan berupaya membangun sebuah kesadaran yang lebih menitikberatkan pada kesadaran terbuka untuk memikirkan pendidikan. Oleh karenanya, bila dikaitkan dengan pembangunan karakter bangsa, maka keterkaitan ini ada

jalin kelindan yang bersangkutan paut antara keduanya. Politik pendidikan secara tidak langsung akan berpengaruh besar terhadap pembangunan karakter bangsa adalah pendidikan konsistensi dalam perjuangan untuk memikirkan persoalan-persoalan bangsa. Masyarakat akan memiliki ketegasan dalam mengupayakan terbangunnya bangunan kebangsaan yang solid dan kuat karena politik pendidikan akan membentuk sebuah kekuatan besar bagi pembangunan karakter bangsa. Dengan demikian politik pendidikan yang dimasukkan dalam visi dan misi pendidikan nasional akan memiliki efek secara langsung maupun tidak langsung terhadap sebuah pembangunan karakter bangsa.

Dalam pembangunan bangsa, Menurut Riswanda Imawan, bahwa pembangunan akan bisa dicapai apabila ada kemungkinan sekelompok orang yang terlibat dalam proses politik yang membangun dan saling mentransformasi gagasan serta pemikiran bagaimana sesuatu hal harus dikerjakan, diperbaiki, dan begitu seterusnya (Muh Yamin, 2007: 31). Apabila dikaitkan dengan politik pendidikan, maka sudah seyogianya bila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merangkul sebuah rumusan yang menyeluruh mengenai pendidikan dari masyarakat, memasukkannya dalam agenda aktivitas yang harus diputuskan, melaksanakan ide-ide tersebut secara praksis dari konkret berupa pembuatan anggaran pendidikan, dan lain sejenisnya yang diharapkan dapat membangun bangsa kedepannya (Riswanda Irawan, 2003: 179).

### **C. Politik Pendidikan di Indonesia.**

Pada dasarnya politik pendidikan di Indonesia sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak masa Orde Lama. Pada orde Lama di bawah kendali kekuasaan Saekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Konsep

pemerintahan Soekarno yang berasaskan sosialisme, menjadi rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan dalam pembangunan bangsa.

Konsep sosialisme menjadi prinsip dasar dalam pelaksanaan pendidikan. Pendidikan merupaka hak semua kelompok masyarakat tanpa memadamg kelas social apapun, baik atas, menengah, maupun kelas bawah. Sosialisme juga memberikan kedudukan yang sama bagi semua orang di depan hukum. Menurut Willy Aditya, pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia merupakan negara yang sarat dengan cita-cita sosialisme. Cita-cita sosialisme ini termasuk juga dalam dunia pendidikan.

Orde Lama berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Inilah amanah UUD 1945 yang menyebutkan saah satu cita-cita pembangunan nasional adalah kencerdaskan kehidupan bangsa.

Di dalam kampus, muncul kebebasan akademis yang luar biasa, ditandai dengan fragmentasi politik yang begitu hebat di kalangan mahasiswa. Mahasiswa bebas berorganisasi sesuai dengan pilihan atau keinginannya. Kebebasan berpendapat, walaupun sempat juga muncul embredelan pers oleh Soekarno, namun relatif lebih baik ketimbang Orde Baru yang pada suatu waktu (setelah peristiwa demonstrasi mahasiswa 1978) pernah membrandal 15 media massa sekaligus. Inilah salah satu era keemasan bagi gagasan dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Oleh sebab itu, pendidikan yang diterapkan di era Orde Lama cukup memberikan angin segar bagi arah perjalanan bangsa.

Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pada saat Orde Lama berkuasa, lahir banyak pemikir yang kemudian lahir sebab ruang kebebasan betul-betul dibuka dengan demikian

luas. Tidak ada siapapun maupun pihak manapun yang terlalu mendikte kepada setiap warganya, pendidikan saat itu merupakan sebuah surge yang mampu membuka paradigma kebebasan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, menjadi sebuah keniscayaan apabila saat itu pendidikan mampu membangun wawasan cukup luas dan ke depan bagaimana sebuah bangsa akan diformat dengan sedemikian rupa (Yamin, 2007: 89-90).

Pada masa Orde Baru, politik dijadikan sebagai panglima. Segala kegiatan diarahkan kepada berbagai usaha untuk mencapai tujuan politik, misalnya bangkitnya nasionalisme, rasa persatuan bangsa, penggalangan kekuatan bangsa di dalam kehidupan ekonomi yang terlalu nasionalisasi mengakibatkan kehidupan ekonomi bangsa terisolasi.

Kecenderungan-kecenderungan dalam kehidupan politik, ekonomi, kebudayaan pada waktu itu juga memasuki dunia pendidikan. Praktisi pendidikan diarahkan kepada proses indoktrinasi dan menolak segala unsur budaya yang datangnya dari luar. Dengan sendirinya pendidikan tidak difungsikan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Pendidikan tidak diorientasikan kepada kebutuhan pasar, tetapi pada kebutuhan politik. Motodeologi pendidikan dalam cara-cara indoktriner mulai memasuki dunia pendidikan dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan telah mulai diarahkan kepada pengembangan sikap materialisme yang militant sesuai dengan tuntutan kehidupan di dalam suasana perang dingin. Pendidikan untuk perdamaian diganti dengan pendidikan untuk berpikir kepada blok-blok dunia yang terpecah antara kapitalisme dan komunisme. Pendidikan di Indonesia mulai diarahkan bukan kepada peningkatan kualitas tetapi dijadikan sebagai alat kekuasaan dalam mencapai tujuan politik. Otoriterisme di dalam segala bentuknya mulai

memasuki kehidupan bermasyarakat termasuk di dalam bidang pendidikan. Segala sesuatu diarahkan kepada kemauan penguasa sehingga kebebasan berpikir, berpikir alternatif, berpikir kritis semakin lama semakin dikubur. Hasilnya ialah manusia-manusia yang tidak mempunyai alternatif selain alternatif yang telah disodorkan oleh penguasan.

Pada tahun 1959, ketika bangsa Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan situasi politik, sosial, dan pendidikan yang dahsyat. Perdebatan tentang penciptaan masyarakat Indonesia yang bervisi sosialis sangat memengaruhi sistem dan kebijakan di Indonesia. Sejak 1959, bangsa Indonesia di bawah gelora manipol (manifesto politik), sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin. Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia).

Pada masa Orde Baru pendidikan bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat bahwa pendidikan diarahkan untuk menjadi pekerja. Setelah selesai dari bangku sekolah, mereka masuk ke dalam dunia kerja. Berkaitan dengan tujuan pendidikan seperti ini, pendidikan bukan lagi bertujuan melahirkan para terdidik yang siap mengabdikan kepada bangsa dan negara guna melakukan perubahan, namun mereka berada di bawah kendali para penguasa, pengusaha, dan elemen lainnya yang memiliki modal besar. Posisi mereka ini digunakan sebagai penyokong keberlangsungan dan kemajuan usaha para majikan.

Dalam masa Orde Baru pendidikan tidak lagi bertujuan untuk memanusiakan manusia, namun sebaliknya pendidikan merusak hakikat kemanusiaan manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat. Orde Baru menjadikan manusia sebagai budak para pemilik modal, para pemegang kebijakan pabrik-pabrik, dan seterusnya. Orde Baru telah menjadikan pendidikan sebagai pemuas nafsu politik dan

ekonomi segelintir orang semata sebab inilah salah satu tujuan pentingnya menjadikan pendidikan yang demikian. Pendidikan pada masa Orde Baru menyiapkan para tenaga yang siap untuk tidak dihargai kecerdasan dan kepintarannya.

Bagi penguasa Orde Baru dengan segala kroni dan anteknya, produk-produk pendidikan adalah para pekerja fisik yang siap menyerupai mesin. Pendidikan tidak dijalankan sebagai mana tujuan yang sebenarnya yaitu demi penguatan harkat, martabat, dan kemanusiaan manusia sebagai makhluk yang terdidik dan berakal. Pendidikan hanyalah alat memuluskan kepentingan politik dan ekonomi golongan dominan yang memiliki kekuasaan, jaringan kekuasaan dengan penguasa, dan kelompok tertentu yang sedang memanfaatkan kekuasaan Orde Baru agar dapat ikut menikmati keuntungan politis dan ekonomis tersebut.

Dengan demikian, jelas bahwa pendidikan telah diarahkan pada pembangunan ekonomi. Pendidikan tidak lagi melahirkan lulusan yang memiliki kepekaan social yang tinggi, apalagi memikirkan persoalan bangsa dan ikut membangun bangsanya dengan lebih baik di masa mendatang, karena yang dikejar dalam dunia pendidikan adalah dunia kerja, mendapatkan uang, dan melangsungkan kehidupan masing-masing.

Untuk mencaapi target pendidikan seperti yang dihendaki oleh penguasa Orde baru tersebut, ada beberapa strategi penting yang digunakan guna melahirkan tenaga terdidik antirealitas adalah sebagai berikut:

1. Pelarangan adanya buku-buku aliran kiri, seperti sosialisme maupun maxisme. Buku-buku jenis ini dilarang beredar di pasaran agar anak-anak didik tidak membaca buku-buku yang mengarah ke ideology sosialis, sebab ini dapat mengancam rezim Orde Baru.

2. Segala bentuk kelompok diskusi yang berkaitan kajian social kritis pun, terlebih lagi sosialisme dan maxisme, dilarang dijalankan oleh kaum muda terdidik, sebab ini akan dapat melahirkan sebuah golongan pemuda yang cukup membahayakan rezim Orde Baru,
3. Buku-nuku yang menanamkan indoktrinasi Orde Baru terhadap anak-anak muda bangsa justru dibolehkan beredar sebagai konsumsi bacaan public sebba ini menjadi sebuah penguat dan penanaman nilai-nilai politis kepentingan Orde Baru sehingga anak-anak muda bangsa pun tercekoki dan dicekoki ideology penguasaan Orde Baru (Muh. Ymin 2010: 103).

Semua strategi di atas dimaksud oleh Orde Baru untuk menggiring para pemuda Indonesia berlutut di kaki kepentingan politik rezim Orde Baru yang berkuasa, sehingga akan mustahil pendidikan mampu melahirkan pemuda yang kritis dan peka terhadap persoalan-persoalan social yang sedang dihadapi bangsa. Kemiskinan yang sedang dihadapi oleh bangsa, tidak dapat didediksi oleh para kalangan muda terdidik, karena pemerintah Orde Baru membungkam mereka dengan pendidikan yang berorientasi pada persaingan pada dunia kerja.

Selain itu, rezim Orde Baru juga memasung kebebasan, termasuk kebebasan berpendapat. Dengan kata lain, demokrasi yang memberikan ruang sebebaskan-bebasnya dalam segala hal dikebiri. Demokrasi saat itu dianggang di atas api panas kekuasaan rezim Orde Baru. Mahasiswa yang menjai pioneer demokrasi pada masa Orde Baru dibukam. Kampus menjadi penjara bagi mahasiswa untuk melakukan aktualisasi terhadap segala bentuk potensi dan bakat yang dimilikinya, sehingga ini kemudian menjadikan mereka mandul, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya diwajibkan untuk datang ke ruang kelas,

duduk manis mendengarkan secaramah dosen, mengerjakan tugas yng diberikan dosen (Yamin 2010: 106).

Melihat berbagai permasalahan, rupanya sangat mustahil melahirkan produk pendidikan yang berkemampuan luar biasa. Belum lagi, jika berbicara mengenai berbagai kondisi pendidikan di negeri ini yang turut menyulitkan pembentukan karakter bangsa yang kuat sebagaimana harapan bersama. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2003, beberapa bangunan sekolah di Jakarta, seperti Sekolah Dasar Negeri (SDN), rawan rusak. Sementara menurut Kompas Tahun 2000, kondisi sekolah dasar (SD) di Indonesia 58 persen rusak. Sebanyak 23 persen dalam kondisi rusak parah, dan 36 persen tingkat kerusakannya tergolong ringan (Kompas 3 Maret 2000).

### **C. Pendidikn di Era Orde Reformasi**

Gelombang reformasi yang diusung mahasiswa pada, 21 Mei 2008, telah memberikan pengaruh terhadap segala sendi kehidupan berbangsa di Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikan. Kebijakan dalam sistem pendidikan pun mulai berubah. Romo Benny Susetyo menyatakan, bahwa era reformasi telah memberikan ruang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dn revolusioner. Misalnya kebijakan pendidikan yang bersifat sentralistik bergeser ke desentralistik pasca reformasi. Slain itu, kurikulum yang sebelumnya berupa hafalam diganti menjadi kurikulum berbasis kompetensi. Dilaksanakannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan sebuah kabar gembira bahwa segala kebijakan termasuk pendidikan tidak lagi berada di tangan pusat, melainkan beraa di tangan

daerah sebagai eksistensi kebijakan d tingkat local (Yamin, 2007: 108).

Diterapkannya Undang-Undang No 20 Tahun 1999 tentang mengatur pemerintah daerah, yang diperkuat dengan Undang-Undang No 25 Tahun 1999, yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang dilanjutkan dengan otonomi pendidikan, menunjukkan bahwa seolah dan segaja ingin dilepaskan dari pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab. Pendidikan dilepaskan dengan menggunakan alat DPR selaku lembaga yang membuat aturan tersebut.

Menurut ketentuan pasal 11 UU No. 22 Tahun 1999, pendidikan termasuk salah satu bidang pemerintahan yang didesentralisasikan. Dengan demikian, masalah pendidikan yang semula serta ditangani pemerintah pusat, maka tanggung jawab masalah ini bergeser ke pemerintahan daerah, dalam hal ini adalah daerah kabupaten maupun kota.

Dalam program pembangunan nasional 1999-2004, juga diakui bahwa manajemen pendidikan nasional selama ini secara holistic sangat sentralisasi, sehingga ini menutup dinamika demokrasi pendidikan nasional selama. Diakui atau tidak, manajemen pendidikan yang sentralistik akan menyebabkan dan melahirkan kebijakan *uniform* (seragam) yang tidak mampu dan tidak bisa mewadahi segala perbedaan, keberbedaan, atau heterogenitas kepentingan setiap daerah/sekolah/peserta didik. Ini kemudian mematikan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan serta mendorong terjadinya pemborosan dan kebocoran alokasi anggaran pendidikan.

Dalam era reformasi, penguasa berupaya memformulasikan arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam GBHN 1999-2004 sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi, dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti,
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan professional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan,
3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan local sesuai dengan kepentingan setempat serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional,
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pemberdayaan nilai, sikap dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai,
5. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah, untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
6. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh sleuruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara

optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya,

7. Meningkatkan penguasaan, perkembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, termasuk usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya local (Yamin, 2010: 109).

Ini kemudian diperkuat dalam UUD 1945 psal 31 ayat (4) yang berbunyi: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Mencermati arah kebijakan Propenas dan UUD 1945 tersebut, maka jelaslah bahwa sesungguhnya ini semualah yang ingin dicapai oleh pemerintah berkaitan dengan pendidikan di era reformasi ini.

#### **D. Pendidikan dan Politik: Antara Harapan dan Kenyataan.**

Pada dasarnya politik pendidikan merupakan suatu upaya membangun sebuah kesadaran yang lebih menitikberatkan pada kesadaran terbuka untuk memikirkan pendidikan. Bila dikaitkan dengan tujuan pendidikan, maka sesungguhnya politik pendidikan memiliki keterkaitan yang jalin kelindan yang bersangkutan paut di antara keduanya. Pengaruh besar politik pendidikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang sesungguhnya adalah politik pendidikan yang diharapkan. Pembangunan karakter bangsa merupakan sebagian dari tujuan pendidikan, termasuk pendidikan Islam.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pasal 1 No 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pemerintah pada dasarnya sudah memiliki dasar hukum yang jelas bagaimana mengurus dunia pendidikan. Dasar hukum tersebut sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, ayat (1), yang berbunyi, “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, ayat (2) berbunyi; “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”, dan pasal (3) berbunyi, “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang”, ayat (4) berbunyi. “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pada dasarnya politik pendidikan adalah perangkat lunak yang bisa diuraikan dalam bentuk konsep-konsep pendidikan yang mendidik bangsa ini, termasuk pula dapat diselipkan dalam pola kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan dana pendidikan. Politik pendidikan pada dasarnya memiliki peran penting bagi keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan dan pembangunan karakter bangsa.

Persoalan selanjutnya adalah siapakah yang layak melahirkan dan menjalankan politik pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut? Sebetulnya, hal tersebut merupakan tanggung jawab para pemegang kebijakan

di tingkat elit politik dan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan dunia pendidikan di negeri ini.

Dalam konteks hubungan tidak langsung, Dewan Perwakilan Rakyat RI yang membidangi pendidikan harus serius memikirkan dunia pendidikan. Memberikan konsep yang jelas arah pendidikan bangsa adalah sebuah tanggung jawab politik yang harus memikirkan dan mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Di Gedung Dewan Perwakilan Rakyatlah, persoalan pendidikan diperjuangkan melalui pembuatan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemajuan pendidikan. Tentunya dengan menghilangkan kepentingan sektarian tertentu untuk memanfaatkan pendidikan sebagai proyek keuntungan personal, golongan tertentu.

Membangun kesepakatan politik bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, harus diteriakkan secara bersama-sama oleh seluruh anggota dewan yang membidangi pendidikan. Menurut Riswanda Imawan dalam Said Tuhuleley 2003: 179), mengungkapkan bahwa pembangunan akan bisa dicapai apabila ada kemungkinan sekelompok orang terlibat dalam proses politik yang membangun dan saling bertransformasi gagasan serta pemikiran bagaimana sesuatu hal harus dikerjakan, diperbaiki.

Ungkapan Riswanda Imawan di atas, manakala dikaitkan dengan politik pendidikan, maka sudah seyogianya bila Dewan perwakilan Rakyat RI merangkum sebuah rumusan yang menyeluruh mengenai pendidikan dari masyarakat, memasukkannya dalam agenda aktivitas yang harus diputuskan, dilaksanakan dalam bentuk keputusan dalam bentuk penetapan anggaran pendidikan.

Sedangka dalam konteks langsung, politik pendidikan dijalankan oleh pemerintah selaku eksekutor pendidikan. Pemerintah harus menjalankan segala aturan yang telah dibuat oleh DPR RI berkaitan dengan perundang-undangan yang sudah disahkannya. Pola penganggaran dana pendidikan yang tidak diskriminatif terhadap setiap lembaga pendidikan dari segala jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, termasuk cara penyelurannya harus jujur, serta tidak sarat dengan korupsi.

Sejujurnya dapat dikatakan, bahwa konsep politik pendidikan yang ideal seperti uraian di atas, seandainya dapat dijalankan dengan maksimal dan optimal, maka pendidikan akan menjadi jembatan luar biasa bagi pembangunan bangsa Indonesia di masa depan. Realitas politik pendidikan selama ini belum mencerminkan konsep ideal tersebut.

Diberlakukannya Otonomi Daerah oleh pemerintah melalui Undang-Undang No 20 Tahun 1999, yang mengatur pemerintah daerah, kemudian diperkuat dengan adanya Undang-Undang No 25 Tahun 1999 yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesungguhnya dimaksud untuk melakukan desentralisasi kewenangan pusat ke daerah, termasuk dalam hal ini adalah kewenangan dalam bidang pendidikan. Melalui kebijakan ini, secara kelembagaan terdapat pengurangan dan juga perampingan lembaga pemerintah di pusat, redistribusi pegawai negeri ke daerah-daerah, dan pengembangan konsep pembangunan keuangan pusat dengan daerah. Di sini otonomi daerah dan desentralisasi juga menyentuh lembaga-lembaga yang selama ini menjadi pengelola pendidikan.

Menurut Benny Susetyo (2005: 18), ternyata pelaksanaan otonomi daerah tersebut tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Terbukti pemerintah pusat masih melakukan desentralisasi beberapa kebijakan dalam dunia pendidikan,

misalnya sejumlah standarisasi pengelolaan, baik kurikulum, kompetensi siswa, dan penilaian hasil belajar, proses pelaksanaannya masih setengah hati.

Sementara itu, Ki Supriyoko (dalam Suara Pembaruan 1 Mei 2005) berpendapat sekaligus mempertanyakan, apakah dengan desentralisasi ini pendidikan kita akan menjadi lebih baik?. Menurutnya, pelaksanaan desentralisasi pendidikan sampai sekarang masih menimbulkan anda Tanya besar, apakah kinerja pendidikan nasional kita di masa mendatang akan lebih meningkat (Yamin, 2010: 34).

Kelemahan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan disebabkan oleh beberapa factor yang melatarbelakanginya antara lain, yaitu: 1) sistem desentralisasi pendidikan merupakan barang baru bagi dunia pendidikan nasional, yang tentu saja belum memiliki bukti kehebatannya, 2) banyak daerah di Indonesia yang tidak memiliki sumber daya alam, keuangan dan juga sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan sistem desentralisasi, 3) banyaknya pimpinan daerah yang tidak memiliki kepedulian memadai terhadap pendidikan. Berdasarkan berbagai kelemahan pemerintah daerah tersebut, sangat mustahil melahirkan produk pendidikan yang berkuaitas.

Sementara itu, Winarno Surachmad dalam bukunya Ade Irawan dkk (2004: 14), menyatakan bahwa persoalan politik pendidikan yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan hasil yang maksimal, hal ini karena pada tidak adanya landasan dan tujuan yang jelas. Artinya, sebagai sebuah alat, pendidikan Indonesia tidak jelas tujuan pemakaian. Carut marut pendidikan di Indonesia dikarenakan oleh politik pendidikan yang membodohi rakyat, sehingga berdampak serius pada karakter bangsa yang muram. Di samping itu, hal ini terjadi, sebagian disebabkan karena kebijakan-kebijakan pendidikan

pemerintah yang selalu berubah. Misalnya kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pendidikan yang titik beratkan pada Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) yang digagas oleh Menteri Pendidikan Fuad Hasan, yang belum dilaksanakan secara maksimal sudah diganti oleh kebijakan Link and Match yang digagas oleh Wardiman Djojonegoro. Kedua kebijakan pendidikan tersebut terjadi di era kepemimpinan Soeharto pada waktu itu. Perubahan kebijakan pendidikan juga terjadi di era reformasi Menurut Winarno misalnya kebijakan yang berkaitan dengan penerapan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang selanjutnya diganti oleh kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Menurut Winarno Surachmad, kebijakan pendidikan yang selalu berubah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia belum memiliki filosofi pendidikan yang kuat dan benar, bagaimana seharusnya pendidikan itu dibentuk dan diarahkan.

Sementara itu HAR Tilaar dalam bukunya “Paradigma Baru Pendidikan Nasional”, (2000), menegaskan bahwa persoalan dalam dunia pendidikan di Indonesia ini, dikarenakan oleh kuatnya dominasi pemerintah. Lebih jauh Tilaar menjelaskan bahwa dalam perjalanannya, pendidikan Indonesia selalu di bawah kungkungan penguasa yang digunakan untuk melanggengkan kekuasaannya. Sejalan dengan Tilaar, Benny Susetyo (2005) mengatakan bahwa politik pendidikan penguasa sangat kental dalam perjalanan pendidikan di negeri ini, sehingga kemudian terbentuk karakter pendidikan yang sangat sempit serta menjadikan bangsa ini berkarakter rusak dan buruk.

Akibatnya, mengharapkan dunia pendidikan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa, serta melahirkan anak bangsa yang menjadi actor perubahan di masa depan, hanyalah sebuah harapan yang tinggal harapan.

Persoalan pendidikan menadi semakin amburadul ketika pemerintah menerapkan kebijak yang berkaitan dengan ujian nasional (UN) maupun ujian akhir sekolah bestandar nasional (UASBN). Siapapun akan mengatakan bahwa tujuan itu baik, tapi pertanyaannya, baik untuk siapa? Yang jelas, kebijakan tersebut tidak sebangun dengan kondisi kualitas pendidikan di negeri ini yang sangat buruk. Oleh karenanya, mencermati kebijakan demikian menunjukkan sebuah model politik pendidikan penguasa yang cenderung memaksakan kehendak secara sepihak (Yamin, Jawa Pos, 22 April 2008).

Persoalan amburadulnya politik pendidikan di Indonesia semakin bertambah, dengan akan dilaksanakannya Racangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) yang sedang digodok pemerintah bersama DPR RI, yaitu lembaga pendidikan diberikan keleluasan sepenuhnya untuk mencari dana pendidikan sendiri dan tanpa mendapatkan subsidi dari pemerintah. Gagasan cemerlang RUU BHP ini sesungguhnya tidak sebangun dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat miskin dan bahkan menjadi penggaguran.

Dampak politik pendidikan seperti di atas, lebih amburadul lagi yang dihadapi oleh pendidikan Islam. Meskipun masuk dan diakui keberadaannya dalam perundang.undangan pendidikan nasional baik UUSPN No 2 Tahun 1989, maupun UUSPN No 20 Tahun 2003, namun secara realitas pendidikan Islam tidak diperlakukan sama dengan sekolah-sekolah umum. Hal ini dapat dilihat pada kesenjangan antara pendidikan Islam masih jauh sekali jika dibandingkan dengan pendidikan umum. Secara realitas pendidikan Islam yang dalam konstalasi pendidikan di Indonesia hampir mancapai 35%, secara umum masih sangat tertingga, baik dalam segi mutu, fasilitas sarana dan prasarana, jumlah guru maupun pendanaan.

Berdasarkan data tahun 2000/2001, indeks biaya perkapita pendidikan persiswa di madrasah jaih lebih kecil dibandingkan di sekolah umum. Dari data tersebut terlihat biaya pendidikan persiswa MIN adalah Rp 19.000,- bandingkan dengan persiswa SD Rp 100.000,- . MTs persiswa rp 33.000,- sedangkan siswa SMPN adalah 126,000,- MAN persiswa Rp 40.000,- dan SMU?SMKN persiswa 140.000,-. Sementara ditingkat perguruan tinggi permahasiswa IAIN Rp 50.000,- berberbanding Rp 150.000,- permahasiswa universitas/ institut umum negeri.

Kepincangan pendanaan/subsidi tersebut akan lebih mencolok lagi jika mencakup madrasah atau sekolah Islam swasta yang selama ini memang cenderung diabaikan pemerintah. Jumlah madrasah swasta ini (termasuk pesantren) jauh lebih besar dibandingkan madrasah negeri. Dalam sector penggajian atau kesenjangan guru-guru, madrasah swasta ini sangat memprihatinkan dan jauh dari atau pemberian sukarela. Kalaupun digaji, hanya berkisar antara Rp 25.000,- sampai dengan Rp 150.000,- perbulan.

Akibat perlakuan yang berbeda dan cenderung diskriminatif dari pemerintah, maka penyelenggaraan pendidikan Islam khususnya yang berstatus swasta, di mana sebagian besar menghadapi kesulitan dan keterbatasan biaya, mengakibatkan mutu pendidikan Islam sangat rendah.

Ketertinggalan madrasah dibandingkan dengan sekolah umum menuntut pemerintah pusat, mengevaluasi politik pendidikan diskriminatif yang selama ini dilakukan terhadap pendidikan Islam. Pendidikan pusat seegera mungkin melakuka reorientasi politik pendidikannya, dengan cara mereformasi pandangannya yang menganggap pendidikan Islam seperti madrasah sebagai pendidikan “kelas dua”. Sementara itu, pemerintah daerah dapat mengembangkan pendidikan Islam

/madrasah menjadi pendidikan alternative dan mengelolanya secara kreatif, inovatif dalam persaingan pasar (Habullas, 2007:152).[]

## BAB XII

# PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

### A. Pendahuluan

Istilah multikultural tidak saja merujuk pada kenyataan sosial-antropologis adanya pluralitas kelompok, etnis, bahasa, dan agama yang berkembang di Indonesia, tetapi juga mengasumsikan sebuah sikap demokratis dan egaliter untuk bisa menerima keragaman budaya. Dengan kata lain, multikultural sulit tumbuh jika tidak ditopang kualitas pendidikan yang bagus. Mengingat itu merupakan fakta primordial, yang keberadaannya mendahului kelahiran seseorang yang secara sederhana disebut “taqdir”, maka kita dituntut untuk menerima keragaman itu secara positif. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan keyakinan agama yang menyatakan seseorang terlahir dalam sebuah komunitas tertentu itu merupakan kehendak Tuhan, maka menyangkal keragaman kulit, budaya, dan agama sama halnya dengan menyangkal kehendak Sang Pencipta.

Di Indonesia, juga pada tingkat global, pendidikan dan kesadaran paham multikultural amat urgen dilakukan bersamaan dengan derasnya arus globalisasi informasi dan mobilitas pendidikan sehingga perjumpaan dengan orang lain (*encounter with the other*) semakin intens. Di berbagai lembaga pendidikan, terutama pendidikan tinggi Islam, semakin terasa

perjumpaan lintas budaya dan agama dimaksud. Pendidikan tinggi Islam, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri, merupakan miniatur Pendidikan tinggi di Indonesia dari segi agama dan budaya.

Pendidikan dan agenda pembangunan budaya sesungguhnya tidak dapat dipisahkan karena sejatinya salah satu tujuan yang hendak diraih oleh proses pendidikan adalah mengantarkan anak didik untuk bisa hidup di tengah dan bersama masyarakat guna memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya tempat mereka lahir dan tumbuh. Disayangkan, kultur pendidikan yang berkembang justru sering kali memisahkan anak didik dari nilai-nilai dan kehidupan nyata yang tumbuh semakin dalam masyarakat sehingga sekolah dan para alumninya semakin teralienasi dari lingkungan sosial budaya yang mesti mereka cintai dan rawat (Komarudin Hidayat, dalam Tonni d. Widiastono, 2004: 89).

Dalam konteks yang lebih luas, John Naisbit dan Alvin Toffler dalam salah satu unguapannya menyatakan bahwa dunia merupakan suatu kampung besar (*global village*). Berkaitan dengan tersebut John Naisbit selanjutnya meramalkan bahwa di dunia yang terbuka akibat gelombang globalisasi terdapat kemungkinan lahirnya seribu Negara dalam abad 21. Apa yang diramalkan John Naisbit saat ini bangsa-bangsa ini terdapat kecenderungan ke arah itu (Syafiq mughni, dalam Mahfud, 2009: vii)).

Gelombang demokrasi menuntut pengakuan perbedaan dalam tubuh bangsa. Gelombang demokrasi tidak hanya membawa dampak positif dalam pengertian penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) dan eksistensi kelompok manusia, tetapi juga membawa bahaya pemecahan suatu negara. Samuel P. Huntington dalam *the Clash of Civilization*, meramalkan akan terjadinya benturan antar peradaban, yang

disebabkan akibat beberapa factor, seperti politik, sosial-budaya, ekonomi, ras, bahkan agama.

Sementara itu, di Indonesia yang majmuk yang berbeda tidak hanya secara etnis, sosial-budaya, ekonomi, tapi juga berbeda secara bahasa dan agama. Berbagai macam perbedaan itu menuntut pengakun dalam tubuh bangsa. Untuk menjawab berbagai macam perbedaan tersebut, maka pendidikan multikultural adalah jawaban atas beberapa problem kemajmukan. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural senantiasa menciptakan struktur dan proses di mana setiap kebudayaan bisa melakukan ekspresi.

### **B. Sejarah Pendidikan Multikultural.**

Di Indonesia sendiri pendidikan multikultural menemukan momentumnya ketika system pendidikan nasional yang otoriter-meliteristik tumbang seiring dengan jatuhnya rezim Soeharto. Saat itu, Negara dalam keadaan kacau. Konflik sosial berlatar belakang etnis, agama, ras, dan lainnya, muncul diberbagai belahan di daerah di Indonesia.

Pendidikan multikultural lahir sejak 40 tahun yang silam, tepatnya sesudah perang dunia ke II seiring dengan lahirnya banyak negara dan semakinya berkembangnya prinsip-prinsip demokratis. Dicapainya kemerdekaan pada negara-negara bekas jajahan dan di negara-negara maju telah mendorong melahirkan prinsip hidup demokratis. Di negara-negara bekas jajahan muncullah gerakan yang dapat disebut sebagai poskolonialisme yang melibatkan aib dari praktik-praktik colonial yang membedakan harkat manusia. Munculnya pembedaan antara kulit putih dan kulit hitam dan supremasi kebudayaan Barat, telah menimbulkan reaksi-reaksi terhadap pandangan biner telah mendorong munculnya gerakan orientalisme dan

gerakan-gerakan poskolonialisme lainnya (Lihat Muhidin M. Dahlan: 2001).

Sementara di negara-negara maju termasuk bekas-bekas penjajah maupun negara-negara demokratis seperti Amerika Serikat, terdapat tantangan terjadap praktik-praktik kehidupan deokratis. Di Amerika yang dikenal tentang rasisme yang melahirkan manusia seperti Martin Luther King dan gerakan-gerakan yang menghapuskan rasisme dalam praktik kehidupan. Pemikiran-pemikiran ini merembes ke dalam dunia pendidikan.

Di Indonesia, sebenarnya gerakan kemerdekaan yang melahirkan Kebangkitan Nasionalisme telah menunjukkan upaya membangun masyarakat dan bangsa Indonesia berdasarkan kesetaraan cultural. Beberapa bukti kesetaraan cultural di Indonesia nampak jelas pada gerakan Boedi oetomo yang didasarkan kepada kebudayaan Jawa, perkumpulan-perkumpulan pemuda Jong Java, Jong Sumatra, Jong Selebes dan sbagainya, menunjukkan kebhinekaan dari masyarakat Indonesia.

Pandangan multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia, ditunjukkan dengan lambang negara yaitu Bhineka Tunggal Ika, yaitu keragaman dalam kesatuan ternyata yang ditekankan ialah kesatuannya dan mengabaikan keragaman budaya dan masyarakat Indonesia.

Dalam konteks pendidikan, pendidikan multikultural di Indonesia memang baru dimulai. Belum ada pengalaman mengenai bagaimana pendidikan multikultural. Oleh sebab itu, diperlukan waktu dan persiapan yang cukup lama untuk memperoleh suatu bentuk yang pas dan pendekatan yang cocok untuk pendidikan multikultural di Indonesia. Bentuk-bentuk dan system yang cocok bagi Indonesia buka hanya memerlukan pemikiran akademik dan analisis budaya atas

masyarakat Indonesia yang pluralistic, tetapi juga meminta suatu kerja keras untuk melaksanakannya. Multikultural bukan hanya sesuatu yang abstrak, tapi mengembangkan suatu pola tingkah laku yang hanya diwujudkan melalui pendidikan.

Orde reformasi yang membawa angin demokratis telah menghidupkan kembali wacana pendidikan multikulturalisme sebagai kekuatan dari bangsa Indonesia. Dalam era reformasi

### **C. Konsep Pendidikan Multikultural.**

Konsep pendidikan multikultural sebenarnya relatif baru dibandingkan konsep pluralitas maupun keagamaan. Menurut Bhikhu Parekh, baru sekitar 1970-an pendidikan multikultural muncul pertama kali di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia pendidikan multikultural muncul seiring dengan terjadinya reformasi 1997. Menurut pandangan Azyumardi Azra munculnya berbagai macam krisis, mulai krisis moneter, ekonomi, politik 1997, pada gilirannya mengakibatkan terjadinya krisis sosio-kultural di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Jalanan tenun masyarakat tercabik-cabik akibat berbagai krisis yang melanda masyarakat (Muhfud, 2009: 82

Di kalangan para ahli, konsep mengenai apa yang dimaksud dengan pendidikan multikultural seringkali dipahami secara berbeda. Hal ini terjadi karena pendidikan multikultural adalah konsep yang sangat terbuka sehingga tidak mungkin mengedepankan pengertian tunggal. Adanya banyak ahli yang memberikan definisi pendidikan multikultural. Menurut Andersen dan Cusher (1994: 320) bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Sedangkan Menurut Muhaemin el Mahady menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi

perubahan demografi dan cultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan (global).

James Banks (1993: 3) mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk *people of color*. Artinya pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (*sunnatullah*). Lebih jauh Banks menyatakan bahwa pendidik multikultural memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu: *pertama, content integration*, yaitu mengintegrasikan berbagai dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu. *Kedua, the knowledge construction process*, yaitu membawa peserta didik untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. *Ketiga, an equity pedagogy*, yaitu menyelesaikan metode pengajaran dengan cara belajar peserta didik dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik peserta didik yang beragam baik dari segi ras, budaya atau sosial. *Keempat, prejudice reduction*, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras peserta didik dan menentukan metode pengajaran mereka. Kemudian, melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olah raga, berinteraksi dengan seluruh staff dan peserta didik yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusi (Mahfud, 2009: 178).

Searah dengan itu, gagasan tentang pendidikan multikultural terkait masalah-masalah keadilan sosial (*sosial justice*), demokrasi, dan hak asasi manusia. Tidaklah berlebihan mengharapkan apabila pendidikan multikultural berkaitan dengan isu-isu politik, kultur, moral, educational, dan agama (Nigel Balke, 146-161).

Para pakar pendidikan mengidentifikasikan tiga lapis diskursus yang berkaitan dalam pendidikan multikultural.

1. Masalah kebudayaan. Dalam hal ini terkait masalah-masalah mengenai identitas budaya suatu kelompok masyarakat atau suku. Bagaimana hubungan antara kebudayaan dengan kekuasaan dalam masyarakat sehubungan dengan konsep kesetaraan di masyarakat.
2. Kebiasaan-kebiasaan, tradisi, pola-pola kelakuan yang hidup di dalam suatu masyarakat,
3. Kegiatan atau kemajuan tertentu dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang merupakan identitas yang melekat pada kelompok tersebut.

#### D. Pendekatan Pendidikan Multikultural

Dalam pelaksanaannya, pendidikan multikultural membutuhkan berbagai macam pendekatan. Ada beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan dalam pendidikan multikultural, antara lain: *pertama*, tidak lagi menyamakan pandangan pendidikan dengan persekolahan, atau pendidikan multikultural dengan program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan membebaskan pendidikan dari asumsi keliru bahwa tanggung jawab primer mengembangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik semata-mata berada di tangan mereka, tetapi justru semakin banyak pihak yang bertanggung jawab, karena program-program sekolah seharusnya terkait dengan pembelajaran informal di luar sekolah.

*Kedua*, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. Secara tradisional, para pendidik lebih mengasosiasikan kebudayaan dengan kelompok-kelompok sosial yang *relative self sufficient*, ketimbang dengan sejumlah orang yang secara terus-menerus

dan berulang-ulang terlibat satu sama lain dalam satu atau lebih kegiatan. Dalam konteks pendidikan multikultural, pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program pendidikan multikultural untuk menyiapkan kecenderungan memandang anak didik secara *stereotype* menurut identitas etnik mereka, sebaliknya mereka akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan anak didik dari berbagai kelompok etnik.

*Ketiga*, karena pengembangan kompetensi dalam suatu “kebudayaan baru” biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, maka dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik merupakan antitesa terhadap tujuan pendidikan multikultural.

*Keempat*, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi, itu ditentukan oleh situasi dan kondisi secara proporsional. *Kelima*, kemungkinan bahwa pendidikan baik formal maupun nonformal meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan kita dari konsep dikotomi antara kebudayaan pribumi dengan kebudayaan luar. Dikotomi semacam ini akan membatasi individu untuk sepenuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan. Kesadaran ini mengandung makna bahwa pendidikan multikultural berpotensi untuk menghindari dikotomi dan mengembangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri anak didik.

### E. Kurikulum Pendidikan Multikultural

Pada dasarnya, pendidikan multikultural memang sebuah konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan kebersamaan peluang pendidikan bagi semua peserta didik yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya. Salah satu tujuan penting pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua peserta didik agar memperoleh pengetahuan, sikap, keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.

Berkaitan dengan tujuan pendidikan multikultural, James A Banks, mengungkapkan, bahwa tujuan pendidikan multikultural adalah:

The goal multikultural education is an education for freedom..., multikultural education should help students to develop the knowledge, attitudes, and skills to participate in democratic and free society... Multikultural education promotes the freedom, abilities and skills to cross ethnic and cultural boundaries to participation in other cultures and groups”.

Pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk kebebasan. Pendidikan multikultural dimaksudkan untuk membantu para siswa dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam berpartisipasi dalam masyarakat yang bebas dan demokrasi. Pendidikan multikultural mengembangkan kebebasan, kemampuan dan keterampilan dalam menerobos batas-batas budaya dan etnis dalam berpartisipasi dengan kebudayaan dan kelompok lain”.

Jika dijabarkan lebih rinci, pendidikan multikultural sekurang-kurangnya memiliki lima tujuan, yaitu: *pertama*, meningkatkan pemahaman diri dan konsep diri secara baik. *Kedua*, meningkatkan kepekaan dalam memahami orang lain, termasuk terhadap berbagai kelompok budaya di negaranya sendiri dan Negara lain, *ketiga*, meningkatkan kemampuan untuk merasakan dan memahami kemajemukan, interpretasi kebangsaan dan budaya yang kadang-kadang bertentangan menyangkut sebuah peristiwa, nilai dan perilaku. *Keempat*, membuka pikiran ketika merespon isu. *Kelima*, memahami latar belakang munculnya pandangan klise atau kuno, menjauhi stereotipe dan mau menghargai semua orang (Zubaidi, 2008: 71)

Singkatnya, paradigma pendidikan multikultural diharapkan dapat menghapus stereotipe, sikap dan pandangan egositik, individualistic dan eksklusif dikalangan anak didik. Sebaliknya, senantiasa dikondisikan bagi tumbuhnya pandangan komperhensif terhadap sesama, yaitu sebuah pandangan yang mengakui bahwa keberadaan dirinya tidak bisa dipisahkan atau terintegrasi dengan lingkungan sekeliling yang realitasnya terdiri atas pluralitas etnis, ras, agama, budaya dan kebutuhan. Oleh karena itu, cukup proporsional jika proses pendidikan multikultural diharapkan membantu para siswa dalam mengembangkan proses identifikasi (pengenalan) anak didik terhadap budaya, suku bangsa dan masyarakat global. Pengenalan kebudayaan artinya, anak dikenalkan dengan berbagai jenis tempat ibadah, lembaga kemasyarakatan dan sekolah. Pengenalan suku bangsa artinya, anak dilatih untuk bias hidup sesuai kemampuannya dan berperan positif sebagai salah seorang warga dari masyarakatnya. Sementara, lewat pengenalan secara global, diharapkan siswa memiliki sebuah pemahaman tentang bagaimana mereka bias mengambil peran

dalam percaturan kehidupan global yang dia hadapi (Zubaidi, 2008: 72).

Dalam implentasinya, paradigma pendidikan multikultural dituntut untuk berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Pendidikan multikultural harus menawarkan beragam kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang.
2. Pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah.
3. Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komperhensif dnegan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda.
4. Pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantaskan pandangan klise tentang ras, budaya dan agama (Zubaidi, 2008: 72)

Pendidikan multikultural mencerminkan keseimbangan antara pemahaman persamaan dan perbedaan budaya serta mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri (Zubaidi, 2008: 72)

Beberapa aspek yang menjadi kunci dalam melaksanakan pendidikan multikultural dalam struktur sekolah adalah tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi, termasuk tidak adanya penghinaan terhadap ras, etnis, dan jenis kelamin. Juga, harus menumbuhkan kepekaan terhadap perbedaan budaya, diantaranya mencakup pakaian, music, dan makanan kesukaan. Selain itu, juga memberikan kebebasan bagi anak dalam menyatakan hari-hari besar umat beragama serta memperkokoh sikap anak agar merasa butuh terlibat dalam mengambil keputusan secara demokratis.

Nilai dasar dari pendidikan multikultural adalah toleransi. Toleransi merupakan sikap kewargaan yang aktif, bukan sikap yang spontan. Toleransi harus dididikkan, tidak cukup berhenti pada wacana.

Sebagai konsekuensinya, agar pendidikan lebih multikultural, maka pendidikan dan pengajaran harus memperkokoh pluralism dan menentang adanya rasisme, diskriminasi gender dan bentuk-bentuk lain dari intoleransi dan dominasi sosial. Pada konteks ini tentu harus dilakukan transformasi kurikulum, model pembelajaran, suasana sekolah, kegiatan ekstra kurikuler, dan peran guru menjadi multikultural. Menurut Gay's, prinsip-prinsip penting dalam menerapkan pendidikan multikultural adalah kurikulum berdasarkan sejarah dan berpusat Pendidikan multikultural harus pada keragaman, berorientasi pada perbaikan, pengajaran mengarah pada keragaman kurikulum tergantung pada konteks, bersifat menyerap keragaman dan dapat diterapkan secara luas dan bersifat komprehensif dan mencakup semua level pendidikan.

Isi, pendekatan dan evaluasi kurikulum harus menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif. Isi dan bahan ajar di sekolah perlu dipilih yang sungguh menekankan pengenalan dan penghargaan terhadap budaya dan nilai lain, misalnya, ketika seorang guru mengajarkan sebuah materi keilmuan, ia perlu memasukkan nilai dan tokoh-tokoh dari budaya lain agar siswa mengerti bahwa dalam ilmu itu dikembangkan dalam tiap budaya. Kesamaan dan perbedaan perlu dijelaskan dan dimengerti. Siswa dibantu untuk kian mengerti nilai budaya lain, menerima dan menghargai. Misalnya, dalam mengajarkan makanan, pakaian, cara hidup, bukan hanya dijelaskan dari budayanya sendiri, tetapi juga budaya yang lain.

Sebagai pengenalan konsep keragaman budaya dan tujuan pendidikan multikultural dikalangan sekolah menengah, seorang pendidik bisa menggunakan sebuah alat peraga visual berupa payung. Sebut saja payung itu bernama "Payung Multikultural", yang pada tiap-tiap rus bgin luar payung ditulisi berbagai etnis, ras, agama, budaya, kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan/keadaan khusus seperti anak-anak terlantar, orang-orang cacat, penerita AIDS, dan lain-lain.

Seorang pendidik bisa menggunakan "Payung Multikultural" dalam membantu anak didik untuk memahami keterlibatan banyak kelompok dan keinginan di masyarakat. Caranya, anak didik di kelas diberi

Paradigma pendidikan multikultural perlu mewarnai model pembelajaran yang diterapkan dalam kelas. Model pembelajaran multikultural tersebut menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda-beda. Misalnya, seorang guru menyajikan bahan termasuk dalam member contoh, dia dituntut memilih yang beraneka nilai. Di samping itu, buku-buku yang ditulis dalam pelajaran pun perlu disusun untuk menghargai budaya lain dan penghargaan jender.

Sesuai prinsip pendidikan multikultural, maka aktivitas pembelajaran di sekolah disarankan untuk memberikan perhatian pada kompleksitas dinamis dari berbagai factor yang memengaruhi interaksi manusia, seperti fisik, mental, kemampuan, kelas, usia, politik, agama dan etnis. Untuk itu langkah-langkah yang ditemuh untuk mengembangkan model pembelajaran multikultural yaitu: 1) pendidik mereduksi atau mengikis sikap negatif yang mungkin mereka miliki terhadap pluralisme sosial, keagamaan dan etnis, 2) seorang pendidik dan anak didik melakukan analisis situasi agar akrab dengan masyarakat, 3) seorang pendidik dan anak didik melakukan memilih materi yang relevan dan sekaligus menarik, 4) seorang

pendidik dan anak didik bersama-sama menyelidiki persoalan yang berkaitan dengan materi yang dipilih. Dalam hal ini, seorang pendidik disarankan mengidentifikasi persoalan sosial yang berkaitan dengan agama, suku, kehidupan ekonomi, kemampuan, mental serta fisik.

Selain itu seorang pendidik juga dituntut untuk mau dan mampu menerapkan strategi dalam pergaulan sosial dengan peserta didik yang memiliki berbagai sifat yang beragam serta bisa menciptakan suasana belajar yang sangat menyenangkan (Zubaidi, 2008:77).

#### **F. Pendidikan Multikultural dalam Desain pembelajaran**

Pembelajaran merupakan suatu proses untuk meramu sarana dan prasarana pendidikan dengan tujuan untuk mencapai kualitas pendidikan sebagaimana telah ditetapkan. Tercapainya tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh beberapa komponen, seperti tujuan, kurikulum, pendidik, sarana dan prasana dan sebagainya. Komponen pendidik misalnya sangat menentukan kualitas hasil dari proses pembelajaran.

Begitu juga dengan komponen kurikulum, kurikulum menempati peran penting dan sangat strategis, karena bagaimanapun tercapai tidak tujuan pendidikan, sangat ditentukan oleh kurikulumnya. Menurut Ronald C. Doll, kurikulum merupakan pengalaman yang ditawarkan kepada peserta didik di bawah bimbingan dan arahan lembaga pendidikan.

Sebagai bagian dari perencanaan pembelajaran, kurikulum berisi tujuan yang ingin dicapai, bahkan yang akan disajikan, alat-alat pengajaran, dan jadwal waktu pembelajaran. Sebagai suatu system, kurikulum merupakan subsistem dari keseluruhan kerangka organisasi pendidik dan system sekolah yang mencakup penentuan kebijakan tentang kurikulum,

susunan persoania, dan prosedur pengembangan kurikulum, penerapan, evaluasi, dan penyempurnaannya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan, implementasi kurikulum diarahkan kepada pencapaian tujuan. Tujuan dan materi yang hendak dicapai dalam pendidikan disusun dalam kurikulum.[]



# BAB XIII

## PENDIDIKAN DAN IDEOLOGI

### A. Pendahuluan

Kekuasaan yang tidak terbatas bukan hanya dimiliki oleh pemerintah diktator tetapi juga telah memasuki dunia pendidikan. Proses pendidikan ternyata sering kali digunakan untuk memperkuat atau melanggengkan struktur kekuasaan yang ada. Pemerintah memanfaatkan pendidikan untuk menata dengan rapi struktur pemerintahan serta kehidupan kebudayaan dalam berbagai sistem dan prosedur. Sistem pemerintahan yang sentralistis biasanya ditopang oleh suatu sistem pendidikan yang sentralistis pula.

Pendidikan menurut John Dewey merupakan suatu sarana untuk menumbuhkan sikap demokratis, kesatuan bangsa atau nasionalisme, rasa persatuan yang merupakan capital sosial dari suatu masyarakat. Pembangunan suatu masyarakat hanya dapat terjadi apabila masyarakat tersebut mempunyai capital sosial yang besar dan bukan hanya dana yang cukup atau lembaga-lembaga yang teratur dengan manajemen yang terbuka. Sedangkan para ahli Marxisme pendidikan dimaknai sebagai proses yang memberikan kekuatan kepada individu untuk melawan kekuatan yang membatasi perkembangan

dirinya yang diatur oleh kekuatan ekonomi kelompok yang berkuasa atau kelompok kapitalis.

Sedangkan kekuasaan adalah suatu potensi yang membuat seseorang di dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri walaupun mendapat tantangan dari orang lain (Weber 1964). Kekuasaan merupakan suatu hal yang masih potensial. Lebih jauh menurut Weber, kekuasaan merupakan kemungkinan seseorang dalam relasi sosialnya berada dalam posisi bisa menjalankan apa yang diinginkan, meskipun menghadapi resistensi. Oleh karena itu, menurut Weber kekuasaan ada di seluruh bentuk relasi kehidupan sosial manusia. Mulai dari kehidupan di ranah keluarga, lembaga sosial bahkan organisasi kemasyarakatan hingga pada ranah pemerintahan (Maliki, 2010: 12).

Definisi kekuasaan yang dibuat Weber mengharuskan kita memahami dua hal, yaitu: *pertama*, kehendak atau apa yang diinginkan seseorang di satu pihak, dan *kedua*, pengaruh atau *power* yang memungkinkan seseorang bisa menjalankan keinginannya meski mendapatkan perlawanan. Berkaitan dengan kehendak seseorang, maka *power* sebagai sebuah kemungkinan menjalankan kehendak, mengharuskan kita untuk memahami kesadaran atau apa yang disebut dengan intensionalitas individu terhadap tindakannya. Memahami intensionalitas tindakan individu akan memandu untuk dapat memahami apa yang dimaksud dan diinginkan seseorang dari tindakan yang dilakukannya itu.

Jadi apakah ada hubungan antara pendidikan dengan kekuasaan? Sepintas lalu kelihatannya tidak ada hubungan apapun antara pendidikan dan kekuasaan. Tidak pernah kita dengar bahwa pendidikan dikerahkan untuk mengambil alih suatu kekuasaan politik, atau kekuasaan ekonomi ataupun bentuk-bentuk kekuasaan lainnya. Malah kita membayangkan

bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses yang berjalan dalam suasana kedamaian, dalam kehidupan bersama manusia yang tanpa kekerasan. Namun dalam studi cultural, posisi pendidikan mendapatkan tempat yang sangat istimewa karena transformasi sosial tidak dapat terlaksana tanpa pendidikan. Oleh sebab itu, masalah kekuasaan, pendidikan, dan studi cultural mempunyai bidang garapan yang bersamaan. Pendidikan adalah suatu ilmu praktis yang diarahkan kepada suatu refleksi untuk mengubah praksis pendidikan menuju kepada transformasi kehidupan bersama yang lebih maju.

Peran negara tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan. negara merupakan suatu unit berdasarkan kekuasaan. Dalam rangka melestarikan kekuasaannya, negara seringkali menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam bukunya *Education and Power*, Michale W Apple dalam Tilaar (2002: 144) mengungkapkan bahwa dalam kehidupan bernegara tersangkut dalam pelestarian kekuasaan negara melalui politik kebudayaan. Lebih jauh Apple mengungkapkan bahwa politik kebudayaan suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikannya. Oleh sebab itu, dalam pendidikan tersalur kemauan-kemauan politik atau sistem kekuasaan dalam sistem pendidikan dari suatu masyarakat. Biasanya, hal tersebut tidak disadari dalam sistem pendidikan, namun demikian kekuasaan politik secara tidak langsung berada dan merasuk dalam sistem pendidikan dengan bentuk *hidden curriculum*. Tanpa disadari suatu sistem pendidikan melaksanakan cita-cita suatu negara, mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar.

## B. Ideologi-Ideologi Pendidikan

Kaitan antara pendidikan dan kekuasaan membawa kita kepada masalah ideologi. Sikap masyarakat modern mempunyai

ideologi yang menjadi panutan atau *life style* yang membimbing arah perkembangan masyarakat. Dalam kehidupan modern terdapat berbagai jenis ideologi, baik yang sedang marak maupun yang telah mengalami penyesuaian-penyesuaian seperti ideologi liberal yang berubah kepada neliberalisme, ideologi sosialisme yang telah mengalami kegagalan pada abad ke 20, demokrasi sebagai perkembangan dari ideologi liberal yang kini sedang melanda dunia. Ideologi-ideologi ini ternyata memasuki relung-relung pendidikan bukan hanya dalam strukturnya, tetapi juga dalam isi (kurikulumnya). Dalam tiga dasawarsa terakhir ini ideologi-ideologi klasik seperti kapitalisme, sosialisme dan nasionalisme mulai kehilangan momentumnya, disusul dan diganti dengan ideologi kontemporer seperti: Feminisme, pluralisme, dan post modernisme. Khusus di bidang pendidikan juga diramainkan dengan ideologi-ideologi baru yang menawarkan doktrin-doktrin pendidikan terapi atas krisis yang melanda dunia pendidikan. Di satu sisi hadirnya ideologi-ideologi tersebut memperkaya khazanah pemikiran pendidikan, tetapi di sisi lain bisa membingungkan para perencana dan praktisi pendidikan.

Berdasarkan pemetaan William O'Neil ada dua aliran ideologi besar yang cukup berpengaruh, dengan varian masing-masing, yaitu: *pertama*, ideologi konservatif dengan variasi: fundamentalisme, intelektualisme, dan konservatisme; *kedua*, ideologi liberalis dengan variasi: liberalism, neoliberalisme, dan anarkisme (Achmadi, 2008: 4).

Setiap ideologi tersebut memiliki ciri-ciri utama masing-masing aliran dapat digambarkan sebagai berikut:

*Pertama*, Konservatisme, memandang bahwa konsep yang selama ini digunakan masih tetap actual dan relevan sehingga tidak perlu perubahan. Secara teologis aliran ini menuju pada teologi *Jabariyah* atau determinisme, bahwa masyarakat

pada dasarnya tidak dapat mempengaruhi perubahan sosila. Semuanya Tuhanlah yang menentukan.

*Kedua*, Liberalisme, akar pandangan liberalisme ini adalah pandangan yang menekankan pengembangan kemampuan, melindungi dan menjunjung tinggi hak dan kebebasan individu. Konsep pendidikannya bertolak dari paradigma Barat tentang rasionalisme dan individualism yang sejarah perkembangan kapitalisme di Barat.

*Ketiga*, anarkisme, kritisme dan rekonstruksionisme. Aliran ini memandang bahwa pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya rekonstruksi sosial. Mereka menghendaki perubahan struktur sosia, ekonomi, politik melalui pendidikan. Oleh karenanya pendidikan difungsikan sebagai wahana transformasi sosial, kalau perlu melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi sosial, menuju tatanan sosial yang lebih adil dna manusia (Achmadi, 2008: 6).

Dengan mengungkap beberapa aliran ideologi tersebut di atas, jelas bahwa betapa ideologi yang dianut oleh penguasaan sedikit tidak akan berpengaruh pada pendidikan yang dikembangkan pada suatu Negara.

Peranan ideologi dalam pendidikan di Indonesia misalnya kita lihat dalam Undang-Undang Pendidikan Sistem Pendidikan Nasional yang mendasarkan pendidikan kepada ideologi Pancasila. Pengalaman selama Orde Baru menunjukkan betapa ideologi telah dijadikan sebagai sumber indiktrinasi yang telah mematikan kreativitas peserta didik. Ideologi yang seharusnya menjadi pembimbing telah berubah menjadi alat penekan dari penguasa dalam mengendalikan sistem dan isi pendidikan Nasional.

Wacana mengenai pengembangan nasionalisme dalam suatu masyarakat yang pluralistic seperti di Indonesia tentunya

menarik perhatian. Sebagai suatu Negara baru, pengembangan nasionalisme mempunyai bentuk yang tersendiri dibandingkan dengan negara-negara maju yang telah mapan. Di negara-negara (Pendidikan dan kekuasaan, Tilaar 2003: 68)

### C. Kekuasaan dan Pendidikan

Masalah kekuasaan sangat menarik terutama dalam masyarakat modern. Boleh dikatakan seluruh aspek kehidupan manusia diliputi oleh pegasaruh kekuasaan. Dalam kehidupan sehari-hari kita diatur oleh berbagai jenis kekuasaan, seperti kekuasaan meliter, kekuasaan ekonomi, kekuasaan politik dan macam-macam kekuasaan lainnya. Di antara berbagai jenis kekuasaan itu biasanya kekuasaan politik dianggap sangat menonjol dalam kehidupan manusia modern. Tetapi kekuasaan politik hanyalah merupakan sebagian dari apa yang disebut kekuasaan sosial (*social power*). Seorang pakar sosiologi, Gianfranco Poggi membedakan kekuasaan sosial menjadi tiga jenis, yaitu: 1) kekuasaan politik, 2) kekuasaan ekonomi, dan 3) kekuasaan normatif atau ideologi.

Secara teoritik kekuasaan bisanya digolongkan ke dalam dua kategori besar, yaitu: kekuasaan organic dan kekuasaan mekanik, dalam pandangan pertama, teori orgnaik seperti dalam pemikiran Plato dan Aristoteles, sedangkan dalam teori yang mekanik seperti dalam teori kontrak sosial. Dalam teori organic, kekuasaan merupakan lembaga etis dengan tujuan moral. Teori organic beranggapan bahwa kesatuan politik seperti negara merupakan tuntutan dari dalam manusia untuk berasosiasi dengan ornag lain. Sebagai makhluk rasional, manusia menyadari bahwa kekuasaan yang membuat hidup menjadi mungkin dan bermanfaat bagi mereka. Kesatuan moral atau sosial berhasil dari kehendak kolektif untuk

berhubungan bersama-sama dan memfungsikan diri sebagai anggota masyarakat.

Pandangan mekanisme cenderung mengabaikan sifat sosial manusia dan memandang kekuasaan sebagai suatu lembaga artificial yang didasarkan atas tuntutan-tuntutan individu. (Tilaar 2003: 73)

Pendidikan dalam masyarakat modern dewasa ini, termasuk di Indonesia telah menjadi wacana public. Dalam masyarakat modern pendidikan bukan lagi urusan keluarga, pendidikan telah menjadi rebutan partai-partai politik, serta menjadi perdebatan para akademisi yang peduli terhadap kemajuan pendidikan suatu bangsa (Kbijakan pendidikan, Tilaar 2008: 3).

Proses pendidikan yang sebenarnya adalah proses pembebasan dengan kemampuan kemandirian atau memberikan kekuasaan kepadanya untuk menjadi individu. Pemberian kekuasaan ini atau *empowerment* merupakan ciri dari pendidikan transformatif. Proses individualisasi hanya terjadi melalui partisipasi dalam kehidupan masyarakat berbudaya.

Kekuasaan dalam pendidikan bersifat kekuasaan yang transformatif. Tujuan ialah dalam proses terjadinya hubungan kekuasaan tidak ada bentuk subordinasi antara subjek dengan subjek yang lain. Kekuasaan yang transformatif bahkan membangkitkan refleksi, dan refleksi tersebut menimbulkan aksi. Orientasi yang terjadi dalam aksi tersebut merupakan orientasi yang advokatif.

Di dalam proses kekuasaan sebagai transformatif terjadi proses transmisi yang diinginkan oleh subyek yang memegang kekuasaan terhadap subjek yang terkena kekuasaan itu sendiri. Orientasi kekuasaan di sini bersifat orientasi legiitimatif. Dengan demikian, yang terjadi dalam proses pelaksanaan

kekuasaan adalah suatu aksi dari subjek yang bersifat robotic karena sekedar menerima atau dituangkan sesuatu ke dalam bejana subjek yang bersangkutan. Inilah yang disebut oleh Paulo Freire dengan proses sistem banking (*banking sistem*). Perbedaan selanjutnya dari orientasi advokasi dan orientasi legislatif ialah soal poses perubahan dari refleksi kepada aksi yang meminta waktu. Apalagi apabila proses tersebut berkenaan dengan perubahan kelakuan manusia (Tilaar 2003: 88).

Bagaimana praksis pendidikan dilaksanakan berdasarkan kekuasaan seperti dirumuskan di atas. Menurut H.A.R Tilaar (2003:89), setidaknya ada empat masalah yang berkenaan erat dengan pelaksanaan pendidikan berdasarkan kekuasaan, yaitu:

1). Domestifikasi dan stupidifikasi.

Proses domestifikasi dalam pendidikan dapat kita lihat pada bagaimana sekolah, peserta didik, dan para guru harus dijalankan proses pendidikan sesuai petunjuk-petunjuk, baik yang digariskan oleh penguasa ataupun petunjuk-petunjuk yang dibuat oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Baik guru maupun peserta didik mengikuti berbagai peraturan yang telah dirumuskan, mempelajari bahan pelajaran buku teks yang tersedia, jenjang pendidikan yang telah ditentukan, dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Inilah yang kita anggap sebagai suasana belajar yang ideal dari lembaga pendidikan yang ideal. Tetapi apakah yang terjadi dalam suasana proses pendidikan tersebut di atas? Ternyata proses yang terjadi adalah proses domestifikasi atau penjinakan, yaitu membunuh kreativitas dan menjadikan manusia atau peserta didik sebagai robot-robot yang sekedar menerima transmisi nilai-nilai kebudayaan yang ada. Demikianlah praksis pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan menjadi tempat untuk menjinakkan pribadi-pribadi agar patuh kepada kemauan

taunnya. Proses pendidikan menjadi proses domestifikasi anak manusia. Hasilnya bukan pembebasan, tetapi pembodohan (*stupidifikasi*). Proses domestifikasi dalam pendidikan disebut juga imperaalisme pendidikan dan kekuasaan. Artinya, peserta didik menjadi subjek eksploitasi oleh suatu kekuasaan di luar pendidikan dan menjadikan peserta didik sebagai budak-budak dan alat dari penjajahan mental dari yang mempunyai kekuasaan.

Proses domestifikasi dalam pendidikan kita lihat juga dalam perlakuan yang salah mengenai ijazah atau pemujaan ijazah. Ijazah dijadikan alat untuk naik pada tangga sosial, terlepas apakah ijazah tersebut merupakan hasil dari jerih payah untuk mengasah kemampuan diri. Dengan segala cara orang ingin untuk menggapai ijazah, baik diperoleh secara legal maupun illegal dengan jalan membeli. Ijazah telah merupakan suatu penyakit.

Proses pembodohan di lembaga-lembaga pendidikan formal juga terlihat di dalam evaluasi pendidikan. Pengaruh tes objektif merupakan suatu proses domestifikasi karena tidak mengajak manusia berpikir, tetapi menjadikan manusia yang menghadapi kehidupan sebagai menghadapi teka-teki silang saja. Kemampuan analisis dan mencari alternatif yang terbaik dalam situasi yang dihadapi tentunya tidak dapat dikembangkan melalui tes objektif ini. Tes objektif tidak mengembangkan kemampuan rasio manusia dan bahkan melumpuhkan kemampuan berpikir manusia. Tes objektif seakan-akan mengarah kepada epistemologi mengenai kebenaran yang mutlak tanpa ada alternatif.

## 2) Indoktrinasi.

Proses pendidikan mengenal kekuasaan dalam pengertian yang berorientasi kepada advokasi dan kekuasaan yang berorientasi kepada legitimasi. Michael W. Apple dalam

bukunya, *Ideology and Curriculum*, menjelaskan bahwa kurikulum yang berlaku pada suatu sekolah sebenarnya merupakan sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan. Biasanya para pendidik, juga masyarakat luas, tidak menyadari apa sebenarnya peranan kurikulum di dalam proses pemberdayaan peserta didik. Apabila kita lihat penyusunan kurikulum persekolahan di Indonesia yang silih berganti, menunjukkan betapa kekuasaan yang berlaku menancapkan kukunya dalam menentukan isi kurikulum. Sesuai dengan sistem pemerintahan pada waktu itu, kurikulum pada semua tingkat pendidikan merupakan rekayasa yang dibuat oleh pemerintah. Tidak ada kebebasan dari lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak sampai pendidikan tinggi untuk menyesuaikan kurikulumnya sendiri. Semua aspek kurikulum sudah diatur begitu rupa sesuai dengan proses domestifikasi yang telah dijelaskan di atas. Maka yang terjadi dalam proses pendidikan sebenarnya adalah suatu proses mentransmisikan ilmu pengetahuan secara paksa.

Menurut Apple pengetahuan (*knowledge*) adalah suatu *capital*. Sebagaimana banyak orang berjuang untuk mengumpulkan *capital*, maka demikian pula orang berjuang untuk mengumpulkan ilmu pengetahuan sebagai *capital*. Dan *capital* itu merupakan sumber kekuasaan. Tidak mengherankan apabila pemerintah mempunyai kepentingan untuk menguasai pendidikan dan khususnya kurikulum. Melalui kurikulum inilah terjadi proses indoktrinasi, yaitu proses untuk mengekalkan struktur kekuasaan yang ada. Menguasai pendidikan berarti menguasai kurikulum. Pierre Bourdieu (1998: 34) mengatakan, bahwa dalam masyarakat terdapat struktur-struktur tertentu yang mengatur tingkah laku para anggotanya. Dalam hal ini kurikulum dari sistem pendidikan suatu masyarakat berfungsi sebagai *doxa* (struktur tertentu) yang mengatur dan mengarahkan tingkah laku para anggotanya.

Apabila kurikulum berisi indoktrinasi maka cara menyampaikan proses belajar-mengajar juga mengikuti pola domestifikasi dan indoktrinasi jelas merupakan suatu proses transmisi dari kebudayaan. Dengan jalan demikian, kebudayaan sebenarnya menghadapi stagnasi karena matinya daya kreatifitas dari para anggotanya. Proses pendidikan seperti yang telah dijelaskan merupakan proses transmisi kebudayaan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Manajemen pendidikan yang cocok dengan proses indoktrinasi tentunya haruslah terpusat dan mudah dikontrol. Yang diterapkan dalam sistem yang demikian ialah manajemen berdasarkan control (*management by Control*) dan bukan manajemen yang berdasarkan tujuan (*management by Obkective*).

### 3) Demokrasi dalam pendidikan

Adalah John Dewey, seorang tokoh pendidikan demokrasi mengungkapkan bahwa yang dihasilkan oleh demokrasi bukanlah produk dalam bentuk barang, tetapi produk dalam bentuk manusia yang lebih bebas. Inilah inti dari pendidikan demokrasi, yaitu seseorang yang menghadapi masalah-masalah hidup yang penuh problematik dengan alternatif-alternatif yang dikembangkan oleh kemampuan akal budinya untuk mencari solusi yang terbaik. Di sini kita lihat suatu tuntutan dari demokrasi yaitu adanya kemungkinan-kemungkinan yang terbuka yang dihadapi kepada seseorang. Inilah yang disebut situasi-situasi problematis dan bukan penuangan pengetahuan yang sudah dikunyah terlebih dahulu dari sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan tersebut dapat berupa petunjuk pemerintah melalui kurikulum yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh para pendidik sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah terinci. Berkaitan dengan hal ini, Naom Chomsky mengungkapkan mengenai manusia yang terdidik, yaitu

manusia yang bebas tetapi yang disertai dengan kesempatan-kesempatan untuk memilih. Kebebasan saja tanpa kesempatan yang terbuka merupakan suatu pembohongan bahkan suatu kriminal.

Isi kurikulum ternyata ditentukan oleh perspektif dari mana seseorang memandang proses pendidikan. Dengan kata lain, kurikulum disusun berdasarkan perspektif tertentu. Nietzsche mengenai perspektif-perspektif yang menentukan kehidupan bersama manusia. Perspektif ilmu pengetahuan manusia yang berbeda-beda akan menghasilkan ilmu yang berbeda-beda pula. Dewasa ini dalam rangka reformasi pendidikan nasional orang berduyun-duyun memperbaiki kurikulum, antara lain yang populer dewasa ini kurikulum berdasarkan kompetensi atau kurikulum berdasarkan dasar yang luas.

Penyusunan kurikulum kita di dewasa ini masih berpusat pada kekuasaan yang dipegang oleh negara, antara lain ialah menentukan standar-standar atau *benchmarking* dari proses pendidikan. Hal ini memang dapat dijustifikasi asal saja penentuan standar untuk mencapai kualitas bukan merupakan proses *imposing* dari atas. Idealnya manajemen pendidikan nasional berdasarkan kurikulum yang berisi pesan-pesan negara harus disepakati dengan melaksanakan manajemen yang bukan berdasarkan control (*Management by Control*) dan juga tidak mencukupi melaksanakan manajemen berdasarkan tujuan (*Management by Objective*) karena tujuan itu sendiri didesentralisasikan kepada daerah-daerah yang cocok dengan kebutuhan daerah. Yang dibutuhkan dalam manajemen pendidikan dewasa ini adaah *management by vision*, yaitu yang menyatukan visi dari semua anggota masyarakat Indoensia sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelasah bahwa betapa pendidikan—termasuk pendidikan, tidak terlepas dari politik, bukan dalam arti politik praktis. Pengalaman kita selama ini ialah pendidikan telah menjadi alat politik praktis dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan proses pendidikan demokratis.

#### 4) Integrasi sosial.

Integritas sosial ternyata tidak dapat diciptakan dengan pemaksaan melalui kekuasaan dari atas. Desentralisasi dan otonomi pemerintahan, baik pusat maupun daerah memiliki peran penting dalam pendidikan dan kebudayaan. Suatu sistem pendidikan yang *uniform* dan otoriter akan mematikan kemampuan untuk mengembangkan budaya local yang merupakan batu bata penyusunan budaya nasional. Pendekatan multikulturalisme merupakan suatu keharusan bagi bangsa Indonesia dengan masyarakat yang pluralistik dalam mengembangkan pendidikan dan kebudayaan. Disinilah letak perkerjaan rumah dari sistem pendidikan nasional di Indonesia, yaitu untuk mengembangkan budaya local dengan menempatkan sumber kekuasaan di tingkat local dan kemudian dikembangkan untuk membangun solidaritas sosial pada tingkat bangsa.

Dalam perannya bahwa pendidikan sebagai motor dari perubahan sosial yang radikal, menyebabkan pendidikan jadi rebutan kekuasaan dalam masyarakat. Partai-partai politik menjadikan pendidikan sebagai program yang utama atau sebagai iming-iming utama untuk membujuk rakyat di dalam pemilihan umum atau sebagai sarana untuk melestarikan kekuasaan atau jabatan. Semua itu menunjukkan betapa pendidikan telah beralih dari domain personal ke domain publik. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas betapa pendidikan telah dijadikan kebijakan utama untuk kemajuan suatu bangsa (Tilaar, 2008: 7)

Hampir semua negara maju, ketika masih pada tahap seperti negara-negara berkembang dewasa ini, mempunyai misi yang jauh ke depan, mereka melihat peran pendidikan di dalam memantapkan kehidupan politiknya sejalan dengan perbaikan kehidupan ekonominya. Tidak mengheran sebagian negara-negara maju tersebut menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama di dalam pembangunannya atau di dalam menjaga kepemimpinan (kekuasannya) di dunia yang terbuka dewasa ini.

Setiap negara mempunyai ideologinya masing-masing sebagai platform untuk menyejahterakan rakyatnya. Dari platform ini dijabarkan berbagai dalam berbagai jenis kebijakan yang akan di tempuh oleh pemerintah beserta aparatnya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama itu (Tilaar 2008: 8).□

# BAB XIV

## PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF TEORI SOSIOLOGI

### A. Teori Sosiologi

#### 1. Pengertian Teori Sosiologi

Di kalangan para ahli, teori seringkali dipahami secara berbeda. Hal ini terjadi karena teori adalah konsep yang sangat terbuka sehingga tidak mungkin mengedepankan pengertian tunggal. Adanya banyak ahli yang memberikan definisi teori. Kerlinger sebagaimana dikutip Zamroni (1992: 1), menyatakan bahwa teori sosial adalah sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang saling kait mengkait yang menghadirkan suatu tinjauan secara sistematis atas fenomena sosial yang ada dengan menunjukkan secara spesifik hubungan-hubungan di antara variable-variabel yang terkait dalam fenomena, dengan tujuan memberikan eksplanasi dan prediksi atas fenomena tersebut.

Sementara Gibbs (1972) mendefinisikan teori sebagai suatu kumpulan statemen yang mempunyai kaitan logis, merupakan cermin dari kenyataan yang ada tentang sifat-sifat atau ciri-ciri suatu kelas, peristiwa atau suatu benda. Ahli lain, Hage (1972) menyatakan bahwa teori harus mengandung tidak hanya konsep dan statemen tetapi juga definisi, baik definisi teoritis maupun definisi operasional dan hubungan logis yang bersifat teoritis dan operasional antara konsep atau statemen tersebut.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu teori harus: a) mengandung konsep, definisi, dan proposisi, b) ada hubungan logis di antara konsep-konsep, definisi-definisi dan proposisi-proposisi, c) hubungan-hubungan tersebut menunjukkan atau merupakan cermin fenomena sosial, d) dengan demikian teori dapat digunakan untuk eksplanasi dan prediksi.

Proposisi merupakan pernyataan yang mengandung dua konsep atau lebih. Sedangkan sesuatu bisa digunakan untuk eksplanasi dan prediksi atas sesuatu yang lain, jikalau antara keduanya ada hubungan yang bersifat kausal.

Suatu teori dapat diterima dengan dua kriteria, yaitu: a) kriteria ideal dan b) kriteria pragmatis. Adapun kriteria ideal adalah suatu teori akan dapat diakui apabila memenuhi persyaratan berikut:

- 1). Sekumpulan ide yang dikemukakan mempunyai hubungan logis dan konsisten
- 2). Sekumpulan ide-ide yang dikemukakan harus mencakup seluruh variabel yang diperlukan untuk menerangkan fenomena yang dihadapi,
- 3). Kumpulan ide-ide tersebut mengandung proposisi-proposisi di mana ide yang satu dengan yang lainnya tidak tumpang tindih,
- 4). Kumpulan ide-ide tersebut dapat diuji secara empiris.

Sedangkan kriteria pragmatis mengemukakan bahwa ide-ide dikatakan sebagai teori kalau ide-ide tersebut memiliki:

- 1). Asumsi dan paradigma,
- 2). Frame reference, yakni kerangka pikir yang mengidentifikasi aspek-aspek kehidupan sosial yang akan diuji secara empiris,

- 3). Konsep-konsep, yakni abstraksi atau symbol sebagai ujud sesuatu ide,
- 4). Variabel, yakni penjabaran konsep yang mengandung dimensi,
- 5). Proposisi yakni hubungan antara konsep,
- 6). Hubungan yang sistematis dan bersifat kausal di antara konsep-konsep dan proposisi-proposisi tersebut.

Sementara itu, teori sosiologi dapat didefinisikan sebagai kumpulan pendapat tentang kepedulian masyarakat dan fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, teori sosiologi adalah rangkaian cara pandang (pendapat abstrak) yang mempelajari masyarakat dan fenomena sosial dalam kaitannya dengan realitas sosial yang ada yang biasa digunakan untuk mengumpulkan struktur sosial masyarakat dan proses sosial masyarakat.

## 2. Fungsi dan Manfaat Teori Sosiologi

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa teori dapat dijadikan sebagai pisau analisis di dalam menjelaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan fakta dan fenomena sosial masyarakat. Berkaitan dengan fungsi teori, setidaknya ada 3 fungsi dari suatu teori, yaitu:

- a). Untuk sistematisasi pengetahuan. Kegunaan pertama dari teori adalah sistematisasi pengetahuan atau disebut dengan *typologies*. Setiap konsep dapat digunakan untuk kategorisasi dan klasifikasi. Misalnya dapat diklasifikasikan menurut tinggi badan, kekuatan badan (ciri-ciri fisik), sikap, loyalitas dan sebagainya.
- b). Untuk eksplanasi, prediksi, dan control sosial. Eksplanasi berhubungan dengan peristiwa yang telah terjadi, prediksi berhubungan dengan peristiwa yang akan terjadi, dan

control sosial berhubungan dengan usaha untuk menguasai atau mempengaruhi peristiwa yang akan terjadi tersebut.

c). Untuk mengembangkan hipotesis. Teori dapat dipergunakan sebagai hipotesis dalam penelitian.

Selain memiliki fungsi, teori-teori sosiologi juga memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

- 1). Suatu teori atau beberapa teori merupakan ikhtisar hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang dipelajari sosiologi.
- 2). Teori memberi petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya di bidang sosiologi.
- 3). Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang dipelajari oleh sosiolog.
- 4). Suatu teori akan sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta perkembangan definisi-definisi yang penting untuk penelitian.
- 5). Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan proyek sosial, yaitu usaha dapat mengetahui ke arah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa yang lampau dan pada dewasa ini (Seokanto, 2006: 26)

## **B. Pendidikan dalam Perspektif Teori-Teori Sosiologi**

Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat akan membawa berbagai konsekuensi. Perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat membawa berbagai macam manfaat, seperti munculnya kehidupan yang modern yang membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Namun di sisi lain, perubahan sosial yang terjadi menyebabkan

timbulnya berbagai kekacauan dan disharmoni hubungan antarwarga masyarakat dan berbagai kesenjangan sosial, seperti kesenjangan ekonomi, sosial budaya, bahkan pendidikan juga muncul di tengah-tengah masyarakat.

Timbulnya kekacauan, disharmoni, dan munculnya berbagai kesenjangan sosial pada masyarakat sebagaimana diungkapkan di atas, telah mendorong para sosiolog untuk ikut terlibat untuk menjelaskan kenapa berbagai persoalan sosial masyarakat tersebut muncul. Untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut, secara teoritik para sosiolog menjelaskan dengan berbagai teori sosial. Berkenaan dengan teori sosial, terdapat banyak teori utama yang telah diungkapkan oleh para sosiolog, antara lain yaitu: teori fungsional-struktural, teori konflik, teori intraksionisme simbolik, teori tindakan sosial, teori pertukaran, teori struktur dan agen atau teori “reproduksi social” dan beberapa teori lainnya.

Pendekatan teori-teori sosial yang diajukan oleh para sosiolog ini akan dijadikan sebagai pisau analisis di dalam melihat pendidikan Islam, dari sisi posisi, peran, fungsi serta tujuannya, pada suatu masyarakat.

### **1. Teori Fungsionalisme Struktural**

Teori fungsional struktural adalah salah satu teori yang berangkat dari analogi organik mengenai adanya persamaan tertentu antara organisme biologis dengan masyarakat. Para tokoh sosiologi awal yang merintis pemikiran dasar mengenai fungsionalisme structural, antara lain, ialah Emile Durkheim, Auguste Comte, Herbert Spencer, (Sunarto, 1993: 216), ide-ide mereka kemudian mempengaruhi angkatan ahli sosiologi yang lebih muda, seperti Talcott Parsons, Rebert K. Merton, dan Anthony Gidden.

Menurut Van Den Berghe sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto (1987) menyatakan bahwa fungsional struktural berangkat dari pokok-pokok pikiran, yaitu:

- 1). Analisis terhadap masyarakat harus dilakukan secara holistic, oleh karena ia merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan,
- 2). Hubungan sebab akibat bersifat ganda dan resiprokal,
- 3). Sistem-sistem sosial berada dalam keadaan yang serasi yang dinamis, sehingga penyesuaian terjadi dengan perubahan-perubahan yang seminimal mungkin,
- 4). Integrasi sempurna tidak akan tercapai, sehingga setiap sistem sosial menghadapi tekanan-tekanan maupun penyimpangan-penyimpangan yang akan dapat diinternalisasikan melalui pelembagaan
- 5). Perubahan merupakan proses penyesuaian yang berjalan lamban (dan bukan merupakan suatu proses revolusioner)
- 6). Perubahan merupakan konsekuensi penyesuaian perubahan-perubahan yang terjadi di luar sistem, yang ditimbulkan *diferensiasi*, maupun inovasi-inovasi internal,
- 7). Sistem tersebut terintegrasi melalui nilai-nilai yang dianut bersama-sama.

Menurut Parsons ada dua dimensi dalam analisis sistem yang hidup, yakni adanya saling kaitan bagian-bagian yang merupakan sistem itu dan mencakup pertukaran antara sistem dengan lingkungan, dan mempunyai ciri umum, yakni, prasyarat dan *functional imperative*. Secara deduktif Parsons mengatakan ada empat kebutuhan fungsional, yakni *Latten pattern-maintenance (L)*, *Integrative (I)*, *goal attainment (G)*, *adaptational (A)* atau dapat disingkat LIGA

Teori fungsional struktural menekan kepada keteraturan (*order*) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan

dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan (*equilibrium*). Pendekatan fungsional menyatakan bahwa integritas yang terjadi pada suatu masyarakat didasarkan oleh kata sepakat para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, suatu kesepakatan umum yang memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara anggota masyarakat. Menurut teori fungsional struktural ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lainnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa pendekatan fungsional struktural memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk *equilibrium* (Nasikin, 1995). Masyarakat dalam pandangan pendekatan ini dianalogikan seperti layaknya organism biologis.

Fungsional struktural juga memandang bahwa suatu masyarakat dipandang sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerjasama secara terorganisir, yang bekerja dalam suatu cara yang relatif teratur menurut seperangkat aturan dan nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat tersebut. Oleh karena itu, masyarakat dipandang sebagai sistem yang stabil dengan orientasi ke arah keseimbangan. Ada hasrat untuk saling menjaga keteraturan ini dari setiap komponen masyarakat yang ada. Ada keinginan untuk mempertahankan keteraturan dengan cara sistem kerja yang selaras proposional dan seimbang.

Dalam perspektif ini, para pelopor fungsionalisme struktural menyatakan bahwa setiap kelompok dalam masyarakat akan melaksanakan tugas tertentu dan secara kontinyu, karena ini

merupakan cermin dari apa yang disebut sebagai fungsional tersebut, sebuah perilaku atau tindakan sosial akan bisa dibenarkan karena hal tersebut dalam masyarakat dinilai sebagai fungsional. Suatu pola perilaku bisa muncul, dan sekaligus bisa hilang dan berubah sesuai perkembangan sosial yang terjadi, dan sesuai dengan kebutuhan apa yang diinginkan dalam masyarakat tertentu.

Suatu perubahan sosial bisa terjadi akan mengganggu kestabilan dalam masyarakat tertentu tersebut, namun dalam rentan waktu tertentu, keseimbangan akan muncul kembali. Secara teoritik diasumsikan bahwa jika suatu perubahan sosial yang akan datang membawa hal-hal yang fungsional, maka pada saat yang sama terjadi keseimbangan. Demikian sebaliknya, jika perubahan sosial yang akan datang ternyata mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial yang ada, maka hal tersebut disebut sebagai ganggung fungsional (Soepropto, 2002: 73).

Pendidikan menurut penganut fungsional struktural berfungsi menjaga tertib sosial. Menjaga kesinambungan tertib sosial. Menjamin agar masyarakat dapat memenuhi apa yang paling diinginkan. Jangan sampai masyarakat kehilangan peluang untuk meraih tingkat pendidikan yang baik. Kalau hal ini terjadi, maka nasib akan tidak beruntung. Sulit mendapatkan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang bisa mendatangkan keuntungan besar, hanya akan diperoleh oleh mereka yang memiliki pendidikan yang memadai.

Selain itu, pandangan structural-fungsioanl menganggap bahwa tujuan lembaga-lembaga sosial, termasuk lembaga pendidikan Islam sebagai sarana sosialisasi generasi muda untuk mempelajari pengetahuan agama, tingkah laku, serta nilai-nilai yang dianggap diperlukan warga-masyarakat yang produktif bagi keberlangsungan system sosial (Soyomukti, 2010: 464).

Tegasnya pendidikan Islam harus memainkan peran dan fungsinya mencerdaskan warga masyarakat, karena pendidikan adalah kunci terpenting dalam menentukan keberhasilan seseorang dalam membangun kehidupan. Kalangan fungsional berpandangan bahwa pendidikan, termasuk pendidikan Islam memiliki relevansi dengan pengembangan sistem ekonomi dan demikian juga relevansinya dengan upaya membantu mengintegrasikan masyarakat.

Kajian sosiologi pendidikan Islam dari perspektif fungsional difokuskan kepada pendidikan sebagai realitas sosial (*social facts*), pendidikan dan struktur sosial, pendidikan sebagai pranata sosial, hubungan pendidikan sebagai pranata sosial dengan pranata sosial yang lainnya.

Dalam pandangan Emile Durkeim, masyarakat dan institusi yang ada di dalamnya, seperti pendidikan, agama, ekonomi, politik dan lainnya, merupakan bagian yang saling bergantung. Masing-masing menjalankan fungsinya, dan memberikan sumbangannya bagi terwujudnya masyarakat yang harmoni. Pendidikan adalah bagian yang penting untuk menjaga keberlangsungan masyarakat.

Durkheim menggambarkan betapa generasi muda memerlukan bantuan pendidikan untuk mempersiapkan diri memasuki kehidupan di tengah masyarakat yang memiliki tata nilai tertentu. Sasaran pendidikan adalah mengembangkan kekuatan fisik, intelektual dan moral yang dibutuhkan oleh lingkungan masyarakat politik maupun keseluruhan lingkungan di mana mereka berada. Durkheim menjelaskan lebih lanjut:

Education is the influence exercised by adult generations on those that are not yet ready for social life. Its object is to arouse and to develop in the child a certain number of physical, intellectual and moral states which are demanded of him by both

the political society as a whole and the special milieu for which he is specifically destined (Durkheim, 1998: 35).

Menurut Emile Durkheim masyarakat di bangun bersama dengan cara saling kerjasama antar anggota. Individu tidak bisa mencapai keinginan sendiri. Individu di tengah masyarakat, masing-masing memiliki spesifikasi. Mereka terbagi dalam mode pembagian kerja yang di dalamnya masing-masing memproduksi barang dan jasa tertentu yang dibutuhkan orang lain. Mereka saling melakukan pertukaran antara mereka. Lebih jauh menurut Durkheim, bahwa pendidikan harus ditata perencanaan dalam rangka penyediaan '*human capital*' (modal dasar manusia). Pendidikan dipandang sebagai sebuah investasi, yang dapat dipergunakan dalam rangka pencapaian sebgai tujuan yang diinginkan oleh suatu masyarakat.

## 2. Teori Konflik

Teori konflik adalah salah satu teori sosiologi berangkat dari suatu proposisi teoritik pokok, yaitu bahwa struktur-struktur peran melahirkan pertentangan dan juga kepentingan-kepentingan yang bersifat komplementar. Kondisi-kondisi umum tentang kondisi-kondisi yang mengakibatkan konflik-konflik. Para tokoh sosiologi awal yang merintis pemikiran dasar mengenai teori konflik antara lain, ialah Karl Mark, Max, Weber, Ralf Dahrendorf Lewes Coser. (Sunarto, 1993: 218).

Perspektif teori konflik, merupakan kebalikan dari fungsionalisme struktural. Jika teori fungsionalisme struktural memandang bahwa masyarakat berada dalam keseimbangan dan sekaligus berusaha mencari keseimbangan terus menerus, maka menurut pespektif konflik justru sebaliknya. Perspektif ini mengatakan bahwa masyarakat selalu berada dala ruang konflik yang terjadi secara terus-menerus pula, baik yang terjadi dalam kelompok maupun kelas dalam setiap masyarakat.

Menurut teori konflik versi Dahrendorf bahwa masyarakat terdiri atas organisasi-organisasi yang didasarkan pada kekuasaan (dominan satu pihak atas pihak lain atas dasar paksaan) atau wewenang (dominasi yang diterima dan diakui oleh pihak yang didominasi) yang dinamakannya “*imperatively coordinate association*” (asosiasi yang dikordinasi secara paksa). Karena kepentingan kedua pihak dalam asosiasi-asosiasi tersebut berbeda—pihak penguasa berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, sedangkan pihak yang dikuasai berkepentingan untuk memperoleh kekuasaan—maka dalam asosiasi akan terjadi polarisasi dan konflik antara dua kelompok.

Konflik menurut pandangan Coser dapat dilihat sebagai suatu proses yang dalam kondisi-kondisi tertentu, berfungsi untuk mempertahankan wadah sosial atau bagian-bagiannya. Berdasarkan titik tolak ini, Coser mengembangkan citranya mengenai masyarakat yang memberikan tekanan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1). Dunia sosial dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan,
- 2). Setiap sistem sosial memperlihatkan keadaan tidak harmonis, ketegangan dan konflik kepentingan di antara bagian-bagiannya,
- 3). Proses-proses di dalam dan di antara bagian-bagian sistem berlangsung dalam tradisi yang berbeda-beda untuk mempertahankan, mengubah dan menambah atau mengurangi integritas sistem maupun kemampuan penyelesaian,
- 4). Banyak proses, seperti kekerasan, kekhawatiran, penyimpangan dan konflik yang dipandang mempunyai pengaruh negatif terhadap dasar integritas dari sistem

maupun kemampuannya untuk menyetarakan diri dengan lingkungan.

Berdasarkan asumsi-sumsi tersebut di atas, Coser mengembangkan perangkat proposisi-proposisi yang agak luas mengenai fungsi konflik bagi sistem sosial. Yang penting adalah analisisnya mengenai sebab-sebab berantai yang mengakibatkan konflik dapat mempertahankan atau membentuk kembali sistem integritas dan kemampuan menyetarakan diri pada kondisi-kondisi yang berubah. Di samping itu, Coser juga menyajikan berbagai proposisi-proposisi mengenai aspek-aspek integritas dari konflik yang memungkinkan terjadinya gangguan pada sistem sosial. Proposisi-proposisi tersebut menghasilkan perangkat gejala-gejala pengaruh-mempengaruhi, yakni:

- 1). Ketidak-serasian integritas bagian-bagian itu yang mengakibatkan sistem sosial yang menyebabkan,
- 2). Terjadunya konflik antara bagian-bagian itu yang mengakibatkan
- 3). Terjadinya integritas temporer yang dalam kondisi-kondisi tertentu menyebabkan,
- 4). Meningkatkan keluwesan pada struktur sistem, sehingga,
- 5). Meningkatkan kemampuan sistem untuk mengulangi ketidakserasian melalui konflik yang mengarah kepada sistem yang,
- 6). Memperlihatkan kemampuan yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang berubah (Coser, 1967)

Coser terkenal dengan pandangannya bahwa konflik mempunyai fungsi positif bagi masyarakat (Coser, 1964) menurut definisi kerja Coser, konflik adalah “perjuangan mengenai nilai serta tuntutan atas status, kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai atau

melenyapkan lawan”. Kajian Coser terbatas pada fungsi positif dari konflik, aytiu dampak yang mengakibatkan peningkatan dalam adaptasi hubungan sosial atau kelompok tertentu.

Bekaitan dengan konflik sosial yang terjadi di masyarakat, Craib (1993: 107) mengungkapkan bahwa di dalam setiap masyarakat selalu terdapat konflik antara kepentingan dari mereka yang memiliki kekuatan otoritatif berupa kepentingan untuk memelihara atau bahkan mengukuhkan status-quo daripada pola hubungan-hubungan kekuatan yang ada dengan yang ingin merombak atau mengubah status-quo.

Ada banyak factor yang menyebabkan terjadinya konflik sosial di masyarakat, antara lain: 1) masalah dalam hubungan antarmanusia biasanya dipicu oleh emosi-emosi negatif yang kuat, salah persepsi atau streotipe, salah komunikasi dan tingkah laku negatif yang berulang, 2) masalah kepentingan, 3) masalah struktur, 4) masalah perbedaan nilai (Malik, dkk, 2003).

Selain mendatangkan berbagai kerugian bagi masyarakat yang berkonflik, konflik sosial juga sebagaimana diungkapkan Pierre van den Berghe seperti dikutip George Ritzer (1992:32) mengemukakan ada beberapa fungsi dari konflik sosial suatu masyarakat, antara lain yaitu: (1). Sebagai alat untuk memelihara soidaritas. (2) Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain, (3). Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi, (4). Fungsi komunikasi. Sebelum konflik kelompok tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan. Tapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas. Individu dan kelompok tahu secara pasti di mana mereka berdiri dank arena itu dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak dengan lebih tepat.

Dalam pandangan teori konflik pendidikan Islam merupakan hasil produksi social. Sebagai produksi sosial,

maka pendidikan Islam, tidak akan pernah sepi dari berbagai macam kepentingan. Eksistensi pendidikan Islam dipenuhi oleh berbagai kepentingan para pihak. Pendidikan Islam sebagai proses dan institusi social sebagai proses ideologi penguasa, pengelola, dan para terutama kelas pemilik modal dalam tatanan kapitalisme. Melalui kurikulum yang disusunnya, proses pembelajaran, penilai dan cara pandang tentang ilmu pengetahuan, berbagai kepentingan dan ideologi itu dapat disalurkan. Bagi kaum Kapitalis misalnya, melalui kurikulum yang diajarkan di sekolah bertujuan memaksakan ideologi kapitalis. Henry Giroux (1997: 1980 menyatakan bahwa:

“Kurikulum tersembunyi di sekolah merujuk pada norma-norma, nilai-nilai, dan sikap di bawah sadar yang seringkali ditransmisikan secara halus lewat relasi-relasi social di sekolah dan kelas. Dengan menekankan pada aturan konformitas, positivitas dan ketertundukan, *hidden curriculum* menjadi salah satu media sosialisasi yang kuat yang dapat berguna untuk memproduksi model-model pribadi yang siap menerima hubungan social dan struktur kekuasaan yang sedang bekerja”

Berbeda dari Kaum Kapitalisme yang menjadi lembaga pendidikan sebagai sarana dan wahana mempersiapkan manusia-manusia produktif berdasarkan ideologi kapitalisme, sedangkan para tokoh pemikir pendidikan Islam, memandang bahwa pendidikan Islam bertujuan sebagai sarana efektif dalam membentuk kepribadian seseorang, dilihat dari sisi akhlak maupun keberhasilan seseorang dalam berusaha. Menurut Muhammad Naquib al-Attas (1984), tujuan pendidikan Islam yang paling penting adalah mengetahui tempat Tuhan dalam tatanan wujud ini (Achmadi, 2008: 24). Sedangkan menurut Ahmad Tafsir (1987), pendidikan Islam bertujuan untuk bimbingan manusia agar ia berkembang secara maksimal dengan materi ajaran Islam atau bimbingan terhadap seseorang

agar ia menjadi muslim semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan Islam menurut Ahmad Tafsir adalah untuk membentuk manusia yang berkepribadian Islam.

Ada perbedaan tujuan pendidikan antara kaum kapitalisme dengan para tokoh pendidikan Islam tersebut, ada kemungkinan dapat melahirkan berbagai pertentangan, bahkan konflik—setidak-tidaknya konflik ideologi.

### 3. Teori Intraksionisme Simbolik

Intraksionis simbolik adalah salah satu teori dalam sosiologi yang sangat penting sebagai metode analisis sosial. Para tokoh sosiologi Amerika yang merintis pemikiran dasar mengenai intraksionisme antara lain, ialah William James, Charles Horton Cooley, John Dewey, dan Goerge Herb. Menurut Mead (Turner, 1978: 309), ide-ide mereka kemudian mempengaruhi angkatan ahli sosiologi yang lebih muda, seperti Herbert Blumer, Erving Goffman dan Peter L. Berger.

Interaksionisme simbolik adalah nama yang diberikan kepada salah satu teori tindakan yang paling terkenal. Melalui interaksionisme simboliklah pertanyaan-pertanyaan seperti “definisi situasi”, “realitas dimata pemiliknyaa”, dan “jika orang mendefinisikan situasi itu nyata, maka nyatalah situasi itu dalam konsekuensinya”, menjadi paling relevan. Maka agak berlebihan, nama intraksionisme simbolik itu jelas menunjukkan jenis-jenis aktivitas manusia yang unsur-unsurnya memandang penting untuk memusatkan perhatian dalam rangka memahami kehidupan sosial. Menurut teori intraksionisme simbolik, kehidupan sosia secara harfiah adalah “interaksi manusia melalui penggunaan symbol-symbol. Intraksionisme simbolik pada: 1). Cara manusia menggunakan symbol untuk mengungkapkan apa yang mereka maksud, dan untuk berkomunikasi satu sama lain (suatu minat interpretatif

yang ortodoks). 2). Akibat interpretasi atas symbol-simbol terhadap kelakuan pihak-pihak yang terlibat selama interaksi sosial.

Interaksionisme simbolik menekankan bahwa interaksi adalah proses interpretatif dua arah. Kita tidak hanya harus memahami bahwa tindakan seseorang adalah produk dari bagaimana ia menginterpretasikan perilaku orang lain, tetapi bahwa interpretasi ini akan memberi dampak terhadap pelaku yang perilakunya diinterpretasi dengan cara tertentu pula. Salah satu kontribusi utama interaksionisme simbolik bagi teori tindakan adalah elaborasi dan menjelaskan berbagai akibat interpretasi terhadap orang lain terhadap identitas sosial individu yang menjadi obyek dari interpretasi tersebut.

Untuk dapat memahami teori interaksionisme simbolik tentu kita harus memahami beberapa prinsip dasar teori ini, yang meliputi:

1. Tak seperti bintang, manusia dibekali kemampuan berpikir,
2. Kemampuan berpikir dibentuk oleh intraksi sosial
3. Dalam intraksi sosial manusia mempelajari arti dan symbol yang memungkinkan mereka menggunakan kemampuan berpikir mereka yang khusus itu,
4. Makna dan symbol memungkinkan manusia melanjutkan tindakan khusus dan berintraksi,
5. Manusia mampu mengubah arti dan symbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan penafsiran mereka terhadap situasi,
6. Manusia mampu membuat kebijakan modifikasi dan perubahan, sebagian karena kemampuan mereka berinteraksidengandirimerkasendiri, yang memungkinkan mereka menguji serangkaian peluang tindakan, menilai

- keuntungan dan kerugian relative mereka, dan kemudian memilih satu di antara serangkaian peluang tindakan itu,
7. Pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk kelompok dan masyarakat (Ritzer dan Goodman, 2004:289).

#### 4. Konstruksi citra-diri

Pengaruh interaksionisme yang paling umum adalah pandangan bahwa kita menggunakan interpretasi orang lain sebagai bukti “kita pikir siapa kita”. Berarti, citra diri (*self-image*)—kesadaran identitas kita—adalah produk dari orang lain berpikir tentang kita. Aibatnya, dalam hal ini “saya adalah apa yang saya pikir engkau berpikir tentang saya”. Bagi interaksionisme simbolik ini terutama apa yang dimaksud dengan sosialisasi itu. Jadi bukan proses di mana aturan-aturan kebudayaan sudah ada, bersifat eksternal yang secara umum diinternalisasi oleh manusia, seperti pendapat teori struktural. Citra diri adalah produk dari proses interpretatif—alokasi makna antara satu dengan orang lain—yang bagi teori tindakan adalah akar dari semua interaksi sosial. Kepribadian kita dikonstruksi dengan menggunakan proses interpretasi ini sebagai berikut.

Selama kita hidup, kita ketemu dengan banyak orang, semuanya menanggapi kelakuan kita sesuai dengan simbolisasi yang kita bangun. Mereka menginterpretasikan perilaku kita sesuai dengan bukti yang tersedia bagi mereka. Kemudian mereka bertindak terhadap kita berdasarkan interpretasi tersebut, mengindikasikan melalui wahana simbolik yang tersedia bagi mereka, manusia seperti apa kita menurut pandangan mereka. Citra diri kita sangat dipengaruhi oleh reaksi-reaksi individu yang berkontak dengan kita. Kita tidak dapat mengabaikan orang lain yang memberitahu kita tentang siapa kita, citra “diri” kita sangat dipengaruhi, jika tak dapat

dikatakan diciptakan, oleh citra yang dibangun orang lain tentang kita.

Ambilah contoh hubungan seorang dosen dengan mahasiswanya. Sebagaimana manusia, dosen tak dapat berbuat lain kecuali membuat penilaian terhadap para mahasiswanya dalam kelas., khususnya dalam kemampuan mereka. Sama halnya, menurut interaksionisme simbolik, karena para mahasiswa itu juga manusia, pandangan mereka mengenai diri mereka sendiri dan kemampuan mereka akan dipengaruhi oleh penilain dosen tersebut. Jadi, mahasiswa yang duduk penuh perhatian dibangku terdepan, berkelakuan baik dan sopan, nampaknya akan dianggap sebagai mahasiswa yang “pintar”? dan “rajin”. Sebaliknya, mahasiswi yang duduk di bangku belakang nampaknya kurang perhatian dan malas, akan diinterpretasikan sebagai mahasiswa “kurang baik” atau “bodoh”, bahwa kerap kali yang menjadi persoalan bukanlah apakah interpretasi itu benar, melainkan dampaknya terhadap penerimanya. Dlam hal ini, sekalipun para mahasiswa tersebut sebenarnya memiliki kemampuan yang sama, dosen tetap memutuskan mereka tidak sama, dan akibatnya mereka diperlakukan berbeda. Mahasiswa itu didorong agar terus rajin belajar, sedangkan mahasiswi itu dihukum dan diawasi kelakuannya. Reaksidosen yang berbedaini akan mempengaruhi para mahasiswa dalam memandang diri mereka sendiri. Dipacu oleh dorongan dan dukungan dosen, mahasiswa itu belajar lebih keras dan mencapai potensi dan prestasi tertinggi. Karena kata dosen, ia kurang mampu, sementara mahasiswi semakin malas dan semakin kurang memperhatikan materi kuliah. Penilaian dosen dikonfirmasi, penilaian dosen terhadap mahasiswi menjadi kenyataan. Keadilan dalam interpretasi kurang serius dibandingkan konsekuensi penerapannya, khususnya dalam hal cara penerima didorong untuk memandang dirinya sendiri.

Manfaat dari hasil proses interaksi antara orang yang menginterpretasi dan orang yang diinterpretasi jelas dapat dilihat. “Diri” kita—orang yang kita menjadi—tergantung pada orang-orang tertentu yang kita kebetulan bertemu dalam perjalanan hidup. Orang tua, saudara, kerabat, teman, rekan kerja dan lain-lain dapat membentuk kita menjadi orang yang berbeda. Dalam contoh di atas, seorang dosen seharusnya memperlakukan dan mendorong para mahasiswa dan mahasiswinya itu sama, sehingga konsekuensi yang lebih positif lebih banyak terjadi pada citra-diri mahasiswi tersebut.

### 5. Teori Tindakan Sosial.

Pelopop teori tindakan sosial, Talcott Parsons (1978) dalam bukunya *The Degree of Rationalitas*-nya mengungkapkan bahwa untuk menganalisis atau menjelaskan tipe-tipe rasionalitas tindakan sesuai dengan factor pertimbangan factor-faktor tertentu yang mendasarinya, sehingga mempengaruhi perilaku seseorang dalam suatu tindakannya.

Weber (1978) berpendapat bahwa sosiologi merupakan *a science concerning itself with the interpretative understanding of social action and theory by a causal by explanation of its course and consequences*”. Dengan demikian, Weber berpendapat bahwa semua tindakan manusia diarahkan oleh makna-makna. Jadi untuk memahami dan menjelaskan tindakan, makna-makna dan motif-motif yang ada dibalik tindakan tersebut harus digali dan diapresiasi.

Lebih lanjut, Max Weber menegaskan bahwa suatu tindakan rasional terjadi ketika seseorang mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan melakukan seleksi pada cara-cara (*means*) yang dinilai tepat untuk mewujudkan sesuai dengan stituasi yang ada. Tindakan rasional merupakan

metode untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan cara yang diperhitungkan lebih tepat.

Max Weber (1978) menandakan bahwa tindakan sosial, sebagaimana tindakan-tindakan manusia yang lain dibedakan oleh makna-makna atau motif-motif yang menjadi dasar atau orientasi tindakan tersebut. Ada empat tindakan sosial menurut kadar rasionalitas yang dikandungnya, yakni:

*Pertama*, tindakan rasionalitas instrument (*zweckrationalitat*) adalah suatu tindakan yang meliputi pertimbangan dan pilihan yang sadar berhubung dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipergunakan untuk mencapai. Dalam tindakan ini actor tidak hanya sekedar menilai cara yang baik untuk mencapai tujuannya tapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Tujuan dalam *zwerk rational* tidak absolute. Ia dapat juga menjadi cara dari tujuan lain berikutnya. Bila actor berkelakuan dengan cara yang saling rasional maka mudah memahami tindakan itu (Ritzer 1992: 47).

*Kedua*, tindakan sosial nilai (*zwerk rational action*) adalah suatu tindakan sosial yang berorientasi kepada suatu sistem nilai tertentu. Tindakan sosial semacam ini dilaksanakan tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu asas manfaat dan tujuannya. Dalam tindakan tipe ini actor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu merupakan yang paling tepat atautkah lebih tepat untuk mencapai tujuan yang lain. Ini menunjukkan kepada tujuan itu sendiri. Dalam tindakan ini memang antara tujuan dan cara-cara mencapainya cenderung menjadi sukar untuk dibedakan. Namun tindakan ini rasional, karena pilihan terhadap cara-cara kiranya sudah menentukan tujuan yang diinginkan. Tindakan tipe kedua ini masih rasional meski tidak serasional yang pertama. Karena itu dapat dipertanggung jawabkan untuk diahami. Yang diperhitungkan adalah cara atau proses sosial untuk mencapai tujuan itu.

Contohnya upacara-upacara religio magis, termasuk upacara-upacara keagamaan.

Berkaitan dengan tindakan sosial rasionalitas nilai, Weber (1978) menjelaskan: *“is determined by a conscious belief in the value for its own sake of some ethical, eschetic, or other of behavior independently of the prospected of success”*

*Ketiga*, tindakansosialtradisional (*traditonalaction*). Tindakan ini merupakan tipe tindakan sosial yang bersifat nonrasional. Kalau seseorang individu memperlihatkan perilaku karena kebiasaan, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan, perilaku seperti itu digolongkan sebagai tindakan tradisional. Individu itu akan membenarkan atau menjelaskan tindakan itu kalau diminta dengan hanya mengatakan bahwa dia selalu bertindak dengan cara seperti itu atau perilaku seperti merupakan kebiasaan baginya dilakukan karena kebiasaan yang melekat atau karena warga masyarakat selalu melakukan dengan cara-cara tertentu.

*Keempat*, tindakan afektif (*affectual action*). Tipe tindakan ini ditandai dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Seseorang yang sedang mengalami persaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan atau kegembiraan, dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu, tanpa refleksi berarti sedang memperlihatkan tindakan afektif. Tindakan itu benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideologis atau kreteria rasionalitas lainnya.

Terdapatnya perbedaan-perbedaan dikalangan masyarakat di dalam melihat berbagai bentuk tindakan social yang dilahirkan oleh seseorang atau masyarakat, sedikit tidak akan dapat melahirkan berbagai pandangan dan tujuan yang menjadi motivasi tindakan social terhadap sesuatu—termasuk eksistensi suatu lembaga social, seperti lembaga sosial pendidikan Islam.

Dalam pandangan Max Weber, bahwa suatu tindakan rasional terjadi ketika seseorang mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan melakukan seleksi pada cara-cara (*means*) yang dinilai tepat untuk mewujudkan sesuai dengan situasi yang ada. Tindakan rasional merupakan metode untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan cara yang diperhitungkan lebih tepat. Lebih jauh Max Weber (1978) menandakan bahwa tindakan sosial, sebagaimana tindakan-tindakan manusia yang lain dibedakan oleh makna-makna atau motif-motif yang menjadi dasar atau orientasi tindakan tersebut.

Pandangan teori tindakan social ini, jika dikaitkan dengan proses pendidikan Islam, bahwa tindakan seseorang dalam memilih satu lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan-tujuannya, sangat dibedakan oleh cara ia memaknai atau motif yang menjadi dasar atau orientasi memasuki suatu lembaga pendidikan Islam.

Pada masyarakat yang mendasarkan tindakan social pada tindakan rasionalitas instrument (*zweckrasionalitat*) mendasarkan tindakan social dengan pertimbangan dan pilihan yang sadar berhubungan dengan tujuannya memilih suatu lembaga pendidikan yang dapat mengantarkannya dalam mencapai tujuan yang telah diditetapkannya. Dalam tindakan ini, seseorang atau masyarakat sebagai actor tidak hanya sekedar menilai cara yang baik untuk mencapai tujuannya tapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Tujuan dalam *zwerk rational* tidak absolute. Ia dapat juga menjadi cara dari tujuan lain berikutnya. Bila actor berkelakuan dengan cara yang saling rasional maka mudah memahami tindakan itu (Ritzer 1992: 47).

Sedangkan pada orang atau masyarakat yang mendasarkan tindakan social berdasarkan orientasi nilai (*zwerkkrational*

*action*), maka tindakan sosial dalam mempertimbangkan untuk memasuki suatu lembaga pendidikan Islam sangat ditentukan oleh sistem nilai yang dianutnya. Tindakan sosial dalam memilih suatu lembaga pendidikan Islam semacam ini dilaksanakan tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu asas manfaat dan tujuannya. Dalam tindakan tipe ini seseorang atau masyarakat memilih dan memasukkan anak pada suatu lembaga pendidikan Islam didasarkan karena nilai-nilai yang menjadi tujuan atau anutannya. Dalam tindakan ini memang antara tujuan dan cara-cara mencapainya cenderung menjadi sukar untuk dibedakan. Namun tindakan ini rasional, karena pilihan terhadap cara-cara kiranya sudah menentukan tujuan yang diinginkan.

Bagi seseorang atau masyarakat yang melandaskan tindakan social berdasarkan suatu kebiasaan (*traditional actor*), ia akan memilih dan memasuki lembaga pendidikan Islam tertentu karena kebiasaan orang tua atau masyarakat, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan, perilaku seperti itu digolongkan sebagai tindakan tradisional.

## 6. Teori Pertukaran (*Exchange Theory*).

Hubungan antara dua orang kekasih renggang dan akhirnya terputus tatkala salah seorang dipindahkan ke daerah lain, sehingga untuk berkomunikasi menjadi sangat mahal. Seorang dermawan memberikan berkala sumbangan dalam jumlah besar pada suatu yayasan amal, dan yayasan penerima sumbangan secara berkala pula menyatakan rasa terima kasihnya secara terbuka di muka umum, namun sumbangan dihentikan tatkala darmawan bersangkutan merasa bahwa pengurus yayasan kurang memperlihatkan rasa terima kasih mereka. Seorang mahasiswa senantiasa belajar dengan rajin karena terus menerus dikritik. Pelanggaran lalu lintas berkurang tatkala kebanyakan pelanggar dapat segera ditahan,

diadili dan dijatuhi hukuman denda tinggi atau hukuman kurungan. Kasus ini mencerminkan adanya asas pertukaran dalam hubungan sosial antarmanusia, dan oleh sejumlah ahli sosiologi asas pertukaran dikembangkan menjadi teori untuk menjelaskan ada-tidaknya hubungan sosial.

Turner (1978: 201) menjelaskan mengenai pokok pikiran teori pertukaran sebagai berikut:

- 1) manusia selalu berusaha mencari keuntungan dalam transaksi sosialnya dengan orang lain,
- 2) dalam melakukan transaksi sosial manusia melakukan perhitungan untung-rugi,
- 3) manusia cenderung menyadari berbagai alternatif yang tersedia baginya,
- 4) manusia bersaing antar satu dengan lainnya,
- 5) hubungan pertukaran secara umum antarindividu berlangsung dalam hamper semua konteks sosial, dan
- 6) individupun mempertukarkan berbagai komoditas tak terwujud seperti perasaan dan jasa.

Inti teori pertukaran terletak pada sekumpulan proposisi fundamental. Meski beberapa proposisinya menerangkan setidaknya dua individu yang berinteraksi, namun ia dengan hati menunjukkan bahwa proposisi itu berdasarkan prinsip psikologis. Dalam hal ini Homans menggunakan contoh jenis hubungan pertukaran yang menjadi sasaran perhatian:

“bayangkan dua orang melakukan pekerjaan tulis-menulis di sebuah kantor. Menurut peraturan kantor, masing-masing harus mengerjakan pekerjaan sendiri atau bila memerlukan bantuan ia harus berkonsultasi dengan pengawas. Salah seorang diantaranya, sebut saja Parson, tak begitu terampil bekerja dan hanya akan dapat bekerja lebih baik dan lebih cepat bila ia mendapat batuan dari waktu ke waktu. Meskipun peraturan

kantor memperbolehkan, ia enggan berkonsultasi dengan pengawas karena dengan mengaku ketidak-mampuannya dapat merugikan peluangnya untuk promosi. Malahan ia mencari orang lain, sebut saja Ichal, untuk meminta bantuannya. Ichal lebih bekerja berpegalaman bekerja ketimbang Parson. Ichal dapat mengerjakan pekerjaan dengan dengan lebih baik dan cepat dan melewatkan waktu istirahat dan mempunyai alasan untuk mengira bahwa pengawas takkan memeriksa pelanggaran peraturan yang dibuatnya. Ichal membantu Parson dari imbalannya Parson menyatakan terima kasih dan persetujuannya kepada Ichal. Kedua orang itu telah bertukar bantuan dan persetujuan (Soprpto, 2002: 31-32).

## 7. Teori Konstruksionis.

Teori konstruksionis pada awalnya dikembangkan oleh teoritis Jerman pada akhir abad 19 dan awal abad 20, terutama dari karya Simmel dan Max Weber. Teori konstruksionis menggagas perbedaan filsafat yang berkembang di Jerman. Perspektif teori konstruksionis ini beranggapan bahwa perilaku manusia secara fundamental berbeda dengan perilaku obyek alam. Manusia selalu bertindak sebagai agen dengan mengkonstruksi realitas kehidupan sosial. Cara mereka melakukan tergantung cara mereka memahami atau memberikan makna terhadap dunianya. Oleh karena itu, maka tugas sosiologi adalah memahami cara agen melakukan penafsiran, memberikan makna terhadap realitas. Makna itu adalah makna partisipan yakni agen yang melakukan konstruksi melalui satu proses partisipasi dalam kehidupan di mana ia hidup (Malcolm Waters, 1994:7).

Tugas praktisi pendidikan dengan demikian adalah memahami factor-faktor intrinsic yang ada dalam diri siswa. Oleh karena itu, pendidikan harus dimulai dari *self concept*

siswa. Menciptakan situasi pembelajaran yang menarik dan kondusif, bukan semata-mata tugas guru (Maliki, 2008: 204).

### 1. Teori Struktur dan Agen.

Teori struktur dan agen disebut juga teori “reproduksi sosial”. Teori ini merupakan hasil elaborasi Pierre Baordieu karena banyak yang mengakui bahwa dialah seorang teoritikus social dan filsuf yang banyak memberikan perhatian pada dikotomi antara suatu yang obyektif dan subyektif, antara struktur dan agen.

Bourdieu telah membangun kerangka teoritis yang berkaitan dengan knsep-konsep penting seperti “*habitus*” dan “*capital budaya*”. Konse-konsep tersebut didasarkan pad aide bahwa struktur obyektif menentukan kesempatan bagi individu, melalui mekanisme habitus, yaitu individu-individu mengunternalisasi struktur-struktur tersebut. Habitus juga dibentuk oleh, misalnya, posisi individu di berbagai lapangan (*field*) seperti dalam keluarga atau dimana pun mereka menghadapi pengalaman keseharian. Oleh karenanya, berbeda dengan cara pandang marxis, posisi ia memerankan bagian yang penting. Bersamaan dengan factor-faktor yang lainnya. Lebih juh ia membangun teori hubungan antara kekayaan budaya penyampaian pewarisan budaya, rekaya dan aproptasi kekayaan budaya tersebut.

Dalam kaitannya dengan pendidikan pandangan Bourdieu dan Jean-Claude passeron dalam tuisannya *Les Heritien* (1964) memecahkan kebekuan dengan memfokuskan pada pendekatan sosiologi. Menurut Bourdieu, kesenjangan sosial dalam pendidikan sangat terasa, teutama ketika membandingkan kesempatan untuk masuk perguruan tinggi bagi peserta didik dari kelas atas kemungkinannya 80%,

sedangkan mereka yang berasal dari kelas petani dan buruh hanya 20%.

Bagi Bourdieu sekolah dianggap berperan aktif dalam memproduksi dan mereproduksi kesenjangan sosial. Ada hubungan antara, sekolah yang dipahami sebagai lembaga reproduksi budaya yang berlaku di satu pihak, dan kelas-kelas sosial yang ditandai oleh kemampuan menyerap secara efektif komunikasi pedagogis di pihak lainnya. Ternyata, tradisi yang hidup di kelas atau lebih dekat dengan budaya sekolah. Maka, kecenderungan kemampuan untuk menyerap komunikasi pedagogis di sekolah pada kelompok kelas sosial ini lebih efektif dibandingkan dengan peserta didik kelas bawah.

Dalam upaya memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar (membaca, berbicara, menghitung, dan *problem solving*) peserta didik dari kelas social rendah sudah mengalami banyak hambatan, apalagi pembelajaran untuk mengembangkan kepribadian dan intelektual (pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap). Padahal, pada jenjang ini peserta didik dituntut untuk bisa mengembangkan kemampuan untuk hidup dan bekerja secara berartabat. Jadi jelas, kelas atas diuntungkan oleh system sekolah dan lebih siap bersaing dengan budaya sekolah sesuai dengan habitus mereka (Soyomukti, 2010: 472-4).[]



## BAB XV

# PERAN GURU AGAMA DI ERA GLOBALISASI

### A. Pendahuluan

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia keberbagai perubahan. Seiring dengan itu semua, tantangan yang dihadapi manusiapun menjadi semakin pesat. Dengan kemajuan ini pula tantangan guru—khususnya guru agama menjadi semakin berat. Guru yang idealnya tetap terus belajar, kreatif, inovatif, percaya diri, penuh dedikasi, mengembangkan diri, terus menyesuaikan pengetahuan dan cara mengajar mereka dengan penemuan baru dalam dunia pendidikan, psikologi, sosiologi, dan ilmu pengetahuan, namun dalam kenyataannya, harapan ini kerap kandas, karena guru kurang semangat untuk memajukan diri dan tidak banyak yang terus belajar lagi. Akibatnya pendidikan di Indonesia terbelakang. Yang menarik dengan keadaan seperti itu adalah munculnya tawaran-tawaran model pendidikan alternatif di luar sekolah yang mendapatkan sambutan hangat dari kalangan orang tua seperti *quantum learning*, pembelajaran superkilat, pembelajaran menyenangkan, dan lain-lain.

Kalau pendidikan sekolah di Indoensia benar-benar ingin maju dan bangsa Indonesia mau diperhitungkan di antara negara-negara lainnya, maka bangsa Indonesia mau

tidak mau harus meningkatkan sumber daya manusianya. Langkah strategisnya adalah menyiapkan guru-guru yang sungguh-sungguh menekuni pekerjaannya secara profesional dan penuh dedikasi. Untuk menunjang kebutuhan itu, yang sangat penting adalah penghargaan terhadap guru. Jika guru tidak dihargai, maka kemungkinan besar mereka tidak akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya.

Gejala menurunnya citra guru bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan gejala global. Mungkin saja hal ini disebabkan karena profesi guru tidak dapat bersaing dengan profesi-profesi lainnya. Ketika masyarakat cenderung ke arah materialistik dan konsumerisme, maka profesi guru merupakan kebutuhan dan menjadi komoditas rakyat banyak, semakin lama semakin terpuruk. Guru telah menjadi semacam komoditi yang diperlukan, tetapi tidak dihargai. Berbagai macam mitos yang menyelubungi proses guru dan tanpa disadari profesi guru telah tertindas oleh materialisme dan konsumerisme (Tilaar, 2001).

## **B. Sosok Ideal Guru di Era Globalisasi.**

Tantangan pendidikan di Indonesia sekarang ini teramat besar. Mutu pendidikan terpuruk baik dalam hal pengetahuan maupun dalam pendidikan nilai kemanusiaan. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang begitu canggih, dunia ini terasa menjadi kecil sehingga apapun yang terjadi belahan dunia tertentu dengan cepat diketahui di seluruh dunia. Akibatnya perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, nilai-nilai dari negara lain, baik nilai yang baik maupun jelek, dengan mudah masuk ke Indonesia.

Dengan pasar bebas tanpa jelas hanya produk dan tenaga yang sungguh bermutu dapat menang bersaing dengan luar negeri. Pengaruh globalisasi itu tidak dapat dicegah lagi.

Itulah tantangan bagi pendidikan di Indonesia yang semakin kompleks. Tantangan-tantangan itu menuntut pendidikan kita diperbaharui agar tidak ketinggalan zaman dan dapat bersaing dengan negara lain. apabila pendidikan di Indonesia sungguh ingin direformasi, salah satunya yang perlu dibenahi adalah guru. Tantangan pendidikan yang amat kompleks itu menuntut guru—khususnya guru agama yang mempunyai karakter dan sifat tertentu seperti menjalankan tugasnya sebagai panggilan hidup, berdedikasi tinggi, demokratis, professional, dan bersikap sebagai seorang intelektual.

#### 1. Guru sebagai panggilan hidup.

Di Indonesia, pendidikan membutuhkan guru yang menghayati tugasnya sebagai suatu panggilan. David Hansen dalam tulisannya *The Call to Teach* (1995) menjelaskan dua unsur penting dari panggilan yaitu: *pertama*, pekerjaan itu membantu mengembangkan orang lain, dan *kedua*, pekerjaan itu juga mengembangkan dan memenuhi diri sendiri sebagai pribadi.

Unsur *pertama*, mengungkapkan pekerjaan disebut panggilan hidup bila pekerjaan itu mengembangkan orang lain ke arah kesempurnaan. Ini berarti guru pertama-tama harus mengembangkan anak didik yang dibimbing untuk berkembang menjadi sempurna baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun kehidupan yang lebih menyeluruh. Dalam istilah Driyakara (1980) guru di sini menjalankan fungsinya membantu anak didik berkembang menjadi manusia yang lebih utuh. Hal ini sesuai makna pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia muda. Ini berarti, bagi guru pertama-tama yang dipikirkan, yang diusahakan dalam tugasnya adalah bagaimana agar siswa mereka berkembang dan berhasil. Apapun yang terjadi dan apa pun situasinya, guru pertama-tama bukan berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak didik. Bagi

guru yang menjalankan tugasnya sebagai panggilan, ia rela menyediakan banyak waktu (Suparno, 2004: 126).

Unsur *kedua* adalah memenuhi kepentingan pribadi. Pekerjaan guru akhirnya juga membuahkan hasil bagi perkembangan dan kepenuhan guru sendiri. Ia merasa senang dan bahagia karena dapat berupa materi (upah), meski itu bukan yang utama. Dengan melakukan pekerjaan sebagai guru, seorang guru berkembang, menjadi lebih manusiawi, dan mempunyai harga diri.

Dalam pengertian di atas, tampak bahwa banyak guru di Indonesia belum menghayati tugasnya sebagai panggilan hidup. Masih banyak guru menghayati pekerjaan sebagai lapangan kerja untuk mencari uang, yang sebenarnya jumlah kecil. Belum banyak guru yang sungguh-sungguh perhatian kepada kemajuan dan kebaikan siswa secara penuh. Masih banyak guru yang mengerjakan proyek di mana-mana untuk mencari tambahan uang. Beberapa guru mengajar di berbagai sekolah, sehingga tidak dapat menyiapkan pembelajaran secara sungguh-sungguh dan sudah menjadi capai kerana terlalu banyak bekerja. Akibat dari kekurangan penghayatan ini jelas anak didik terlantar. Banyak guru kurang dedikasi dalam tugasnya. Misalnya tidak menyiapkan bahan secara baik, tidak sungguh-sungguh memerhatikan masing-masing anak didik, lebih senang mendekati anak didik yang pandai sedangkan anak didik yang bermasalah ditinggalkan.

Sebenarnya seorang guru yang terlalu menekankan mencari uang lewat profesi keguruan akan sering mengalami frustrasi karena gaji guru memang kecil dibandingkan gaji pegawai lain yang setingkat. Kalau seorang guru kepingin menjadi kaya dengan menjadi guru, hal itu jelas keliru. Mereka seharusnya bisnis saja dan meninggalkan profesi keguruannya. Kepuasan dan kebahagiaan seorang guru seharusnya terletak

pada kegembiraan batin karena anak didiknya berkembang menjadi manusia yang lebih baik dan ebih utuh.

## 2. Guru yang demokratis dan dialogis.

Kita bangsa Indoensia sedang belajar hidup berdemokrasi. Untuk menunjang kemajuan dalam proses hidup berdemokrasi, amat jelas pendidikan dapat membantu banyak. Melalui pendidikan yang demokratis, anak didik dapat dibantu untuk mengembangkan sikap demokratis yang nantinya berguna bagi hidup mereka di masyarakat. Jika semua generasi muda lewat pendidikan dibantu hidup dan bersikap demokratis maka proses demokrasi di Indonesia akan cepat. Itu berarti, sistem pendidikan kita harus lebih demokratis. Agar pendidikan kita demokratis, yang sangat penting adalah bahwa guru-guru bersikap demokratis dan dialogis terhadap anak didik. Model pembelajaran dan relasi guru kepada siswa yang otoriter sudah bisa diharapkan lagi. Menurut Paulo Freire sudah tidak zamannya lagi pendidikan itu gaya bank, dimana guru menerangkan, murid mendengarkan, guru mendektekan, murid mencatat, guru bertanya, murid menjawab, dan seterusnya. Lebih jauh Paulo Freire menjelaskan bahwa pendidikan gaya bank adalah pendidikan model deposito, guru sebagai deponan yang mendepositokan pengehuan serta berbagai pengalamannya pada siswa, siswa hanya menerima, mencatat dan mem-*file* semua yang disampaikan guru. Pendidikan model bank tersebut menurut Freire merupakan salah satu bentuk penindasan terhadap siswa-siswi, karena menghambat kreativitas dan pengembangan potensi mereka (Elias, 1994:113).

Dalam pendidikan “sistem bank”, guru merupakan subyek yang memiliki pengetahuan yang diisikan kepada siswa. Siswa adalah wadah atau suatu tempat dpositit belaka. Dalam proses belajar itu murid semata-mata merupakan obyek. Sangat jelas

dalam sistem tersebut tidak teradi komunikasi yang sebenarnya antara guru dan siswa. Praktik pendidikan semacam itu mencerminkan penindasan yang terjadi di masyarakat sekaligus memperkuat struktur-struktur yang menindas. Pendidikan menjadi alat dominasi yang dimanfaatkan untuk penjinakan.

Paulo Freire ingin merontokkan pendidikan “sistem bank” tersebut. Sebagai alternative, Freire menciptakan sistem baru yang dinamakan “*problem-problem education*” atau “pendidikan hadapi masalah” yang memungkinkan konsientisasi. Dalam konsientisasi, guru dan siswa bersama-sama menjadi subyek dan disatukan oleh obyek yang sama. Tidak ada lagi yang memikirkan dan yang tinggal menelan, tetapi mereka berpikir bersama. Pengetahuan yang sejati menuntut penemuan dan penemuan kembali melalui penyelidikan terus-menerus atas dunia, dengan dunia dan dengan sesame. Guru dan siswa harus secara serempak menjadi siswa dan guru. Dialog merupakan unsur sangat penting dalam pendidikan.

Dalam “pendidikan hadap masalah” itu guru belajar dari siswa dan siswa belajar dari guru. Guru menjadi rekan siswa yang melibatkan diri dan merangsang daya pemikiran kritis pada siswa. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengembangkan kemampuan untuk mengerti secara kritis dirinya sendiri dan dunia tempat mereka berada. Mereka akan melihat bahwa dunia bukan merupakan realitas yang statis, melainkan suatu proses “menjadi”, makhluk yang belum selesai, yang berada dalam dan dengan kenyataan yang belum selesai. “Pendidikan hadap masalah” senantiasa membuka rahasia realitas yang menantang manusia dan kemudian menunjukkan jawaban terhadap tantangan itu. Jawaban terhadap tantangan membawa manusia kepada dedikasi yang utuh (Danuwnata, 2008: xxii).

Dengan demikian, pendidikan harus diciptakan antara guru dengan siswa dan bukan untuk siswa dalam perjuangan memulihkan kembali kemanusiaan yang telah dirampas. Pendidikan kaum tertindas harus merupakan perjuangan melawan penindasan dalam situasi di mana dunia dan manusia berada dalam interaksi. Oleh karena itu, dalam perjuangan ini diperlukan praksis yang merupakan sebuah proses interaksi antara refleksi dan aksi.

Pengajaran model itu terkadang juga disebut sebagai pendidikan gaya komando, dan menurut Muska Mosston, gejala tersebut muncul dalam decade 60-an sampai 70-an, yang mengembangkan prinsip distribusi sebuah keputusan harus dilakukan secara hierarkis, dari bawah ke atas, dari guru pada siswa (Mosston, 1972: 35). Dalam pengajaran gaya komando semua perencanaan ditentukan oleh guru, disampaikan pada siswa, dan siswa menerima pelajaran, mengubah perilaku sesuai dengan pengajaran baru. Paulo Freire (1990) menyatakan guru dianggap tahu segala-galanya dan siswa hanya pasif menerima saja, sudah bukan zamannya lagi dan akan ditolak oleh siswa. Model pembelajaran dengan pencekokan pengetahuan dan nilai oleh guru dianggap sudah bukan zamannya lagi. Proses pembelajaran sudah harus demokratis di mana guru dan siswa saling belajar, saling membantu saling melengkapi. Guru zaman sekarang sudah bukan satu-satunya sumber informasi dan pengetahuan bagi anak didik. Anak didik dapat belajar melalui internet, orang tua, media komunikasi, perpustakaan dan lain-lainnya.

### 3. Guru yang profesional.

Masih banyak guru yang kurang kompeten dalam bidangnya. Dalam beberapa penelitian dengan guru Sekolah Dasar (SD) masih banyak guru yang mengajarkan matematika dan IPA dengan banyak salah konsep sehingga menyebabkan

siswa mempunyai konsep yang salah. Dalam beberapa pengetahuan dan studi miskonsep IPA di SD, banyak guru yang belum sungguh menguasai bahan pelajaran yang menjadi bidangnya. Yang menyedihkan salah satu konsep dimulai oleh guru SD yang menjadi dasar pengetahuan berikutnya. Apa yang terjadi di sekolah dasar tersebut, sesungguhnya terjadi juga pada pendidikan sekolah tingkat menengah dan bahkan perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta.

Ada banyak alasan mengapa guru belum kompeten, *pertama*, waktu belajar atau kuliah belum sungguh menguasai bahan. Memang mereka hanya asal lulus dan itupun dalam waktu lama. Mereka bukan terbaik karena memang bukan mahasiswa yang terbaik yang menjadi calon guru. *Kedua*, beberapa guru mengajarkan yang bukan bidangnya. Misalnya seorang guru lulusan pendidikan Islam mengajarkan IPA, seorang guru lulusan bahasa Indonesia mengajarkan matematika. Pengalaman ini biasanya terjadi di sekolah pedalaman yang kekurangan guru sebidang. Memang maksudnya baik, dari pada tidak ada guru, guru apapun diminta mengajar berbagai bidang. Dari keadaan ini tampak jelas bahwa diperlukan peningkatan kompetensi guru agar semakin menguasai bidang mereka.

Selain kurang menguasai bidangnya, masih banyak guru yang dalam mengajar banyak menggunakan model yang itu-itu saja. Mereka kurang menguasai berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak didik dan kurang sesuai dengan teori pendidikan yang baru. Banyak guru yang mengajar dengan cara ceramah dan terus mengerjakan soal. Kegiatan utama anak didik mencatat atau mendengarkan saja. Guru mengajar lebih dengan cara yang disenangi sendiri, dan kurang memperhatikan yang disenangi anak didik. Jadi tekanan kepada guru, bukan pada anak didik yang sedang belajar.

Menurut Gardner dalam teori *multiple intelligences*, ia mengungkapkan bahwa siswa mempunyai berbagai intelegensi dan siswa dapat belajar lebih baik apabila bahan yang disajikan sesuai dengan intelegensi yang menonjol pada anak tersebut (Suporno, 2004). Misalnya seorang anak yang menonjol intelegensinya dalam musiknya, ia dapat mudah belajar matematika bila matematika banyak disajikan dengan music atau lagu. Jika bahan matematika selalu disajikan dengan intelegensi matematika logis saja, anak itu akan sulit meangkap. Oleh karena anak didik yang diajar dalam kelas beraneka warna intelengensinya, maka secara umum guru perlu menggunakan metode mengajar yang bervariasi. Akibatnya, guru yang hanya terus menggunakan salah satu cara kurang membantu anak didik belajar. Dari sini tampak bahwa banyak guru kurang belajar teori-teori pendidikan yang baru, mereka banyak ketinggalan zaman.

Yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah guru yang dapat menadi tauladan dalam hal nilai kehidupan. Dalam Kompetensi Standar Guru (Depdiknas, 2001) diungkapkan bahwa guru harus berkepribadian utuh, berbudi luhur, jujur, dewasa, beriman, bermoral, disiplin, tanggung jawab, berwawasan luas, dan lain-lain. secara sangat sederhana guru diharapkan menjadi pribadi yang baik yang dapat diteladani oleh anak didik. Guru yang setiap kali mengajarkan nilai-nilai hidup lewat bahan pelajaran, diharapkan sendiri melakukan nilai-nilai itu. Misalnya, ia mengajarkan kejujuran, diharapkan ia sendiri memang jujur. Apabila yang mengajarkan tentang menghormati orang lain, ia sendiri diharapkan menghormati orang lain termasuk anak didik. Kadang terjadi, guru mengajarkan suatu nilai moral yang baik, tetapi ia sendiri tidak bermoral.

#### 4. Guru yang Intelektual

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dengan berbagai macam persoalannya, telah melahirkan berbagai macam tuntutan baru masyarakat. Pengaruh globalisasi juga menjadikan bermacam-macam pengaruh baik dan buruk masuk ke Indonesia termasuk ke dalam dunia pendidikan. Tantangan, zaman dalam dunia pendidikan juga semakin kompleks. Dalam keadaan seperti ini, guru diharapkan bersikap kritis terhadap segala pengaruh dan perkembangan yang ada, terutama terhadap berbagai nilai yang masuk dunia pendidikan. Guru perlu kreatif dan terbuka terhadap segala perubahan dan kemajuan yang ada untuk memajukan siswa. Guru yang hanya melakukan tugasnya sebagai tukang, menjalankan apa yang pernah diterima di kuliah dulu tanpa mengembangkan di zaman modern ini tidak tepat. Sekarang ini dibutuhkan guru yang terus mau berkembang dan belajar seumur hidup, tidak pernah puas dengan yang dimengerti, mau membawa perubahan, berpikir kritis, rasional, bebas mengembangkan pikiran, reflektif, berani membela kebenaran dan keadilan (Giroux, 1988) inilah yang akan memunculkan inovasi pendidikan di setiap sekolah.

Searah dengan peran guru di atas, secara umum guru itu harus memenuhi dua kategori yaitu memiliki *capabilitas* dan *loyalty*, yakni guru itu harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritis tentang mengajar yang baik, mulai dari perencanaan, implementasi sampai evaluasi, dan memiliki loyalitas keguruan, yakni loyalitas terhadap tugas-tugas keguruan yang tidak semata di dalam kelas, tetapi sebelum dan sesudah kelas.

Mengadopsi teori Peter G. beidler dalam bukunya *Inspiring Teaching* yang di edit oleh John K. Roth, terdapat sepuluh kriteria guru yang baik, yaitu: 1) Seorang guru yang baik harus benar-

benar berkeinginan untuk menjadi guru yang baik, 2) Seorang guru yang baik harus berani mengambil Seorang guru yang baik harus resiko, mereka berani menyusun tujuan yang sangat muluk, lalu mereka berjuang untuk mencapainya; 3) Seorang guru yang baik harus memiliki sikap positif; 4) Seorang guru yang baik selalu tidak pernah punya waktu yang cukup; 5) Seorang guru yang baik berpikir bahwa mengajar adalah sebuah tugas menjadi orang tua siswa, yakni bahwa guru punya tanggung jawab terhadap siswa sama dengan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya sendiri dalam batas-batas kompetensi keguruan, yakni punya otoritas untuk mengarahkan siswanya sesuai basis kemampuannya; 6) Seorang guru yang baik harus selalu mencoba membuat siswanya percaya diri, karena tidak semua siswa memiliki rasa percaya diri yang seimbang dengan prestasinya; 7) Seorang guru yang baik selalu membuat posisi tidak seimbang antara siswa dengan dirinya, yakni dia selalu menciptakan jarak antara kemampuannya dengan kemampuan siswanya; 8) Seorang guru yang baik selalu memotivasi siswanya untuk hidup mandiri, lebih independen; 9) Seorang guru yang baik tidak percaya penuh terhadap evaluasi yang diberikan siswa, karena evaluasi mereka terhadap gurunya bisa tidak obyektif; 10) Seorang guru yang baik senantiasa mendengarkan terhadap pernyataan-pernyataan siswanya, yakni guru harus aspiratif mendengarkan dengan bijak permintaan-permintaan siswanya, kritik iswanya, serta berbagai saran yang mereka sampaikan (Rosyada, 2007: 113-114).

### C. Penutup

Di dalam era reformasi pendidikan di Indonesia, guru adalah salah satu pemegang sahamnya (*stakeholder*). Oleh karena itu, di mana tempat manapun guru memiliki posisi penting dan strategis di dalam membangun bangsa ini di masa depan.

Kalau pendidikan di Indonesia benar-benar ingin maju, dibutuhkan guru yang sungguh menekuni pekerjaannya secara profesional dan penuh dedikasi. Untuk menunjang kebutuhan itu, yang sangat penting adalah penghargaan terhadap guru. Jika guru tidak dihargai, maka kemungkinan besar merek tidak akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Di sini pemerintah perlu turun tangan mengangkat martabat guru. Selain itu, untuk meningkatkan profesionalitas guru, kiranya perlu pembenahan pendidikan calon guru guna mempersiapkan calon guru yang berkarakter dan berperan di masa depan.

Masih banyak persoalan dalam menangani guru yang ideal di negeri ini. masih banyak hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan mutu guru. Dan aneka persoalan itu ikut menait seperti meningkatkan mutu pengetahuan, mutu pembelajaran dan mutu guru dengan anak didik dan rekan-rekan kerja. Dan yang terberat adalah bagaimana menaikkan penghargaan terhadap guru, sehingga mereka punya harga diri dan mau bekerja lebih profesional. Inilah tantangan pendidikan Indonesia di masa datang. Kesungguhan bangsa ini dalam memajukan masyarakat dan pendidikan di Indoensia tercermin pada apakah bangsa ini menghargai guru, bukan hanya dengan lagu *pahlawan tanpa tanda jasa*. □

# DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah, Rohadi, *Rekonstruksi Pesantren Masa Depan* (Jakarta: Listafariska Putra, 2008)
- Achmadi, *Ideology Pendidikan Islam, Paradigma Humanisme Theosetris*, Penerbit Pustaka Pelajar: Jakarta, 2008
- Al-Faruqi, Ismail Raja'i, *Islamisasi Ilmu Penegtahuan*, Kalam PressYogyakarta, 1994.
- Arifin, Syamsul dan Ahmad Barizi, 2001, *Paradigama Pendidikan berbasis Pluralisme dan Demokrasi*, UMM Press: Malang
- AM Saefuddin, *Islamisasi Sains dan Kampus*, Penerbit PPA Consultants: Jakarta, 2010
- \_\_\_\_\_, *Antara Jerman dan Mekkah*, Penerbit PT PPA Consultants: Jakarta 2010
- Asy'arie, Musa, *Islam Keseimbangan Rasionalitas, Moralitas dan Spritualitas*, Yogyakarta: LESFI, 2005
- Azizy, A Qodri, *Melawan Globalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2004ayah, Bandung, 2008.
- Baharudin, *Sosiologi dan Pendidikan*, Genta Press: Yogyakarta, 2008
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyaarta: 2010.
- Craib Ian, *Teori-teori Sosial Modern dari Persons sampai Habermas*, Alih Bahasa Pal S Bout dan t. effendi, Penerbit rajawali press: Jakarta.
- Damar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Prenada Media, 2011)

- Danuwinata, F. dalam kata pengantar bukunya Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, penerbit LP3ES: Jakarta, 2000
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Dediknas BPPPK, 2001. *Kebijakan Umum Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Dasar dan Menengah*. Artikel tidak disebarluaskan.
- Faisal, Ismail, *Islam Transformasi Sosial dan Kontinuitas Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001
- Freire, Paulo, dkk, *Menggugat Pendidikan: Fundamentalis, Konservatif, Liberal, dan Anarkis*, Penerbit: Pustaka Pelajara, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Politik Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2003,
- \_\_\_\_\_, *Pendidikan Kaum Terindas*, alih bahasa Tim Redaksi Asosiasi Pemandu Latihan Utomo Danandjaya, penerbit, LP3ES: Jakarta
- Fudyartanta, Ki, *Membangun Kepribadian dan Watak Bangsa Indonesia Yang Harmonis dan Integral*, Penerbit Pustaka Pelajar: Jakarta, 2010
- Getteng, Abd. Rahman, *Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, Tinjauan Historis dari Tradisional hingga Modern*, Penerbit Grha Guru, Yogyakarta, 2005
- Grioux, H, 1988, *Teachers as intellectuals Toward Critical pedagogy of Learning*, New York, Bergin and Garvey.
- Hamalik, Oemar, *Pengembangan Kurikulum*, penerbit Rosdakarya: Bandung 2007
- Imam Suproyogo, 2008, *Quo Vadis Pendidikan Islam, Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan*, UIN

Press Malang

Ismail Faisal, *Paradigma Kebudayaan Islam*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003

Jalaludin, *Psikologi Agama, memahami perilaku keagamaan dengan mengaplikasikan prinsi-prinsip psikologi*, (Rajawali Press; Jakarta, 2008).

\_\_\_\_\_, *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sejarah dan Pemikirannya*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010)

Jockson, *John Dewey and The Lessons of Art*, (Yale University Press, 2000)

Johnson, DP, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid 1 dan 2 (terj.) (Jakarta: Gramedia, 1986)

Kato, Hisanori, *Agama dan Peradaban, Islaam dan Terciptnya Masyarakat demokratis yang beradab di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 2002

Karhami, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah (Upaya Menyeimbangkan Tiga Kepentingan: masyarakat, Pembelajaran-Keilmuan)* dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* Jakarta: Balitbang-Depdiknas No. 024 Tahun ke 6 Juli 2000.

Karim, Rusli, *Agama dan Masyarakat Industri Modern*, Media Widya Mandala: Yogyakarta, 1992.

Komarudin Hidayat, *Merawat Keragaman Budaya*, dalam Tonni D. Widiastono, *Pendidikan Manusia Indonesia*, Penerbit Kompas: Jakarta, 2004

Legowo, TA, *Politik dan Pendidikan: melayani Masyarakat Mencerdaskan Diri*, dalam *Implementasi Desentralisasi Pendidikan dan Tantangannya*, (ed) Aos Santosa Hadwijaya dkk, Mataram University Press, 2006, Mataram

- Mahfud, Chairul, *Pendidikan Multikultural*, peerbit Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009.
- Maliki, Zainudin, *Sosiologi Pendidikan*, Penerbit Gaah MAAda University, 2008
- Makdisi, George A, *The Rise of Humanism in Classical islam and the Christian West*, Edinburg: Edinburg University Press, 2000.
- Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999
- Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam, Dari Paradigma pengembangan, Manajemen kelembagaan, Kurikulum Sehingga Strategi Pembelajaran*, Penerbit Rajawali Press: Jakarta, 2009
- \_\_\_\_\_, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Rajawali Press: Jakarta, 2005
- \_\_\_\_\_, *Nuansa Baru Pendidikan Islam, Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006
- Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, Penerbit Bima Aksara, Jakarta, 2009
- Muhyi Mubara, *Sosiologi Pendidikan*, Ciputat Press: Jakarta, 2004,
- Naim, Ngainun dan Saugi, Ahmad, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, Aru-Ruzz Media, Yogyakarta, 2008.
- Nata, Abuddin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Jakarta: Grasindo, 2001
- Nasution, 1998, *Sosiologi Pendidikan*, Bina Aksara
- Nizar, Syamsul dan Syaifudin, Muhamad, *Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*, Penerbit: Kalam Mulia, 2010

- O'Neil, William F, *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, Penerbit Pustaka Pelajar: Yogyakarta 2003
- Qomar, Mujamil, *Pesantren dari Transformasi Metodolgi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2007
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Pendidikan Islam, Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, Penerbit Erlangga: Surabaya, 2010
- \_\_\_\_\_, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi*, Penerbit Erlangga, Surabaya, 2007.
- Stenbrink, Karel A, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, LP3ES, Jakarta, 1994
- Soyomukti, Nurani, *Pengantar Sosiologi, dasar Analisis, Teori dan Pendekatan Menuju Analisis masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial, dan Kajian-Kajian Strategis*, Penerbit AM Ar-Ruza Media, Yogyakarta, 2010
- Susan, Novri, *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2009
- Soeprapto, H. R. Riyadi, 2002, *Interaksionisme simbolik: perspektif Sosiologis Modern*, pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Suwito dan Fauzan, *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*, Penerbit Angkasa Bandung: Bandung 2003.
- Ritzer, George, dan Goodman J. Douglas, 2004, *Teori Sosiologi Modern*, Penerbit Kencana: Jakarta.
- Ritzer, George, 1992, *Sosiologi Ilmu Pegetahuan berparadiga Ganda*, alih bahasa, Alimandan, Penerbut Rjawali Press: Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Tarakhir Postmodern*, diterjemahkan oleh Sout Pasaribu dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

- Rosyada, Dede, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Kencana prena Media Group, Jakarta, 2004.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Penerbit Rosdakarya: Bandung 1994.
- Tholhah Hasan, Muhammad, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lantabora Press, 2004
- Tholkhah, Imam dan Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan, Mengurai Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*, Rajawali Press: Jakarta, 2004
- Tilaar, HAR, 2003, *Pendidikan dan Kekuasaan, Manajemen Pendidikan Nasional*, Pustaka Pelajar, 2007
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*, Rosdakarya, Bandung, 1992
- \_\_\_\_\_, *Perubahan Sosial dan Pendidikan*, Penerbit Grafindo: Jakarta, 2008
- \_\_\_\_\_, dan Riant Nugroho, *Kebijakan dan Pendidikan, Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008
- \_\_\_\_\_, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*, Bandung: Rosda Karya, 1999
- \_\_\_\_\_, *Paradigma baru Pendidikan Nasional*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2001
- \_\_\_\_\_, *Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Era Globalisasi, Visi, Misi dan Program Aksi Pendidikan dan pelatihan Manuju 2020*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 1999.

- \_\_\_\_\_, 2001, *Perubahan Sosial dan Pendidikan Suatu Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*, Penerbit Grasindo, Jakarta
- Tonny D. Widiastono, ed, 2004, *Pendidikan Manusia Indonesia*, Penerbit Kompas: Jakarta.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam*, Penerbit Hidakarya Agung: Jakarta, 1989
- Weber, Max, 1958, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, Charles Scribner's Sons, New York.
- \_\_\_\_\_, 1978, *Ecinoic and Society*, University California Press, Berkeley, Angles London.
- Zubaidi, 2008, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta



# BIOGRAFI PENULIS

**Baharudin**, dilahirkan di Gelogor Lombok Barat 20 Oktober 1971, Ia menyelesaikan sarjananya di Jurusan pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Malang 1995. Pada tahun 1999, menyelesaikan Magisternya di UMM Malang, dengan konsentrasi studi Islam. Sementara studi doktornya, ia selesaikan pada program Doktornya di Universitas Hasanudin Makassar dengan program studi ilmu-ilmu sosial dengan konsentrasi sosiologi, pada tahun 2006, dengan judul disertasi *Nahdlatul Wathan dan Perubahan Sosial*.

Adapun jabatan yang telah diembannya, selain sebagai dosen tetap pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan IAIN Mataram, yaitu sebagai Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) IAIN Mataram dari tahun 2008-2010, dan pada tahun 2010-2013 ia dipercaya sebagai wakil direktur program pascasarjana IAIN Mataram.

Dia telah menulis beberapa buku, antara lain berjudul: *Negara dan Sistem Perekonomian dalam Pemikiran Ibn Taimiyah dan Adam Smith* (Genta Press Yogyakarta, 2008), *Nahdlatul Wathan dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), *Sosiologi Klasik, Modern dan Posmodernisme* (Yogyakarta: Genta Press 2008), *Sosiologi dan Pendidikan* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), *Elit Agama dan Politik* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), *Sosiologi Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2010), *Pendidikan Islam dan Isu-isu Sosial* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2011), *Kepemimpin Spiritual TGH. Shafwan Hakim dalam Mengembangkan Pondok Pesantren* (Jakarta, HG, 2015). Beberapa buku yang segera diterbitkannya, antara lain: *Isu-Isu Pendidikan Islam Kontemporer (proses terbit)*, *Ilmu Pendidikan Islam*

*(proses terbit), Sosiologi Agama (proses finishing), Politik Tuan Guru dalam Mengembangkan Pondok Pesantren (proses finishing), Kepemimpinan Spiritual dalam Pengembangan Pondok Pesantren di Lombok ((proses terbit)*

## BIOGRAFI EDITOR

**NurLatifah**, dilahirkan di Malang, 5 Juli 1973, menyelesaikan studinya pada Fakultas Tarbiyah UIN Malang, pada tahun 1998. Sejak mahasiswa selain aktif di HMI dan aktif diorganisasi ekstra kurikuler KSR UIN Malang, juga menjadi editor beberapa buku, antara lain: *Sosiologi Klasik, Modern, dan Posmodernisme (2008)*, *Sosiologi dan Pendidikan (2008)*, *Sosiologi Suatu Pengantar (2008)*. Menulis beberapa artikel antara lain, *Sains dalam Perspektif Islam, Filsafat Alam, Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Islam*. Pada tahun 2013 ia menyelesaikan studinya pada program pascasarjana IAIN Mataram mengambil program studi pendidikan Islam. Menulis buku dengan judul: *Kepemimpinan Spiritual TGH. Shafwan Hakim dalam Pengembangan Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat (2015)*